



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19_ dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik;
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Penetapan RKPD ini bertujuan untuk :

- a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.
- b. sebagai bahan pembahasan KUA serta PPAS Tahun 2021 bersama DPRD

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. BAB VII : Penutup.



(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

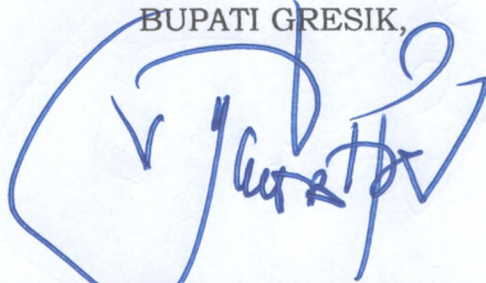
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Juli 2020

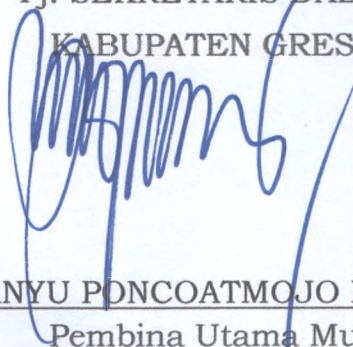
BUPATI GRESIK,



Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,



 Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek perencanaan pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu, perencanaan pembangunan mengoptimalkan potensi sumber daya untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 1 (satu) tahun. RKPD 2021 adalah tahun terakhir dan transisi dari RPJMD Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik secara normatif memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan regulasi lainnya.

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 meliputi:

- 1) persiapan penyusunan RKPD;
- 2) penyusunan rancangan awal RKPD;
- 3) penyusunan rancangan RKPD;
- 4) pelaksanaan Musrenbang RKPD;

- 5) perumusan rancangan akhir RKPD dan
- 6) penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 telah memetakan nomenklatur eksisting dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan Renstra RKPD Kabupaten Gresik terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan kebijakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 juga memperhatikan penanganan pandemi Covid-19 di daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 huruf d Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Secara garis besar penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik diarahkan dalam penanganan darurat kesehatan, pemulihan ekonomi sosial, dan penegakan tatanan normal baru. Sementara itu kebijakan Penganggaran telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Sehingga Muatan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA-PD) yang bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) dengan beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19_ dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.....Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentangtentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; dan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

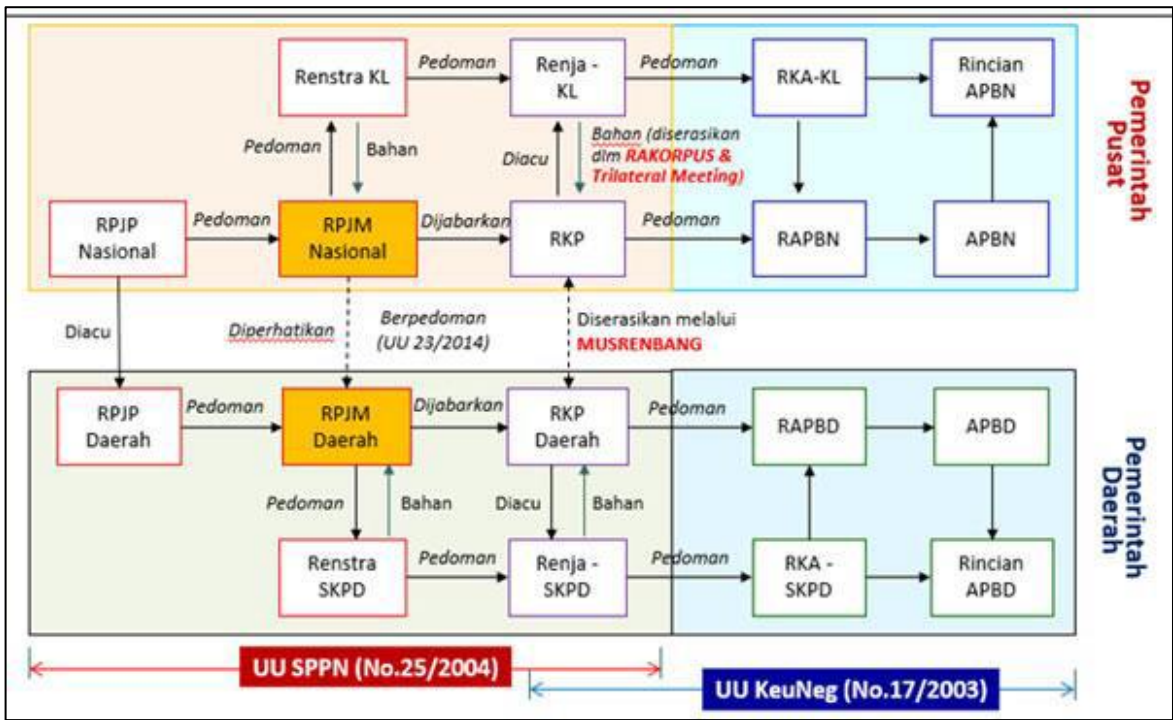
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumenPerencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD

tahun 2021, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Gresik tahun 2021 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2021 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- 3) Menjadi landasan untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 4) Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2021

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

- 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara umum wilayah Kabupaten Gresik terbagi menjadi dua yaitu Gresik Daratan dan Pulau Bawean. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa yang memanjang serta 71 km yang berada di Pulau Bawean. Batas Wilayah Kabupaten Gresik meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Kecamatan di Kabupaten Gresik meliputi Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Bungah, Cerme, Driyorejo, Duduksampeyan, Dukun, Gresik, Kebomas, Kedamean, Manyar, Menganti, Panceng, Sangkapura, Sidayu, Tambak, Ujungpangkah, dan Wringinanom. Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sangkapura seluas 118,72 km² atau 9,97 persen dari luas total Kabupaten Gresik. Sedangkan Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Gresik seluas 5,54 km² atau 0,47 persen dari luas total Kabupaten Gresik.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten
Gresik Tahun 2019

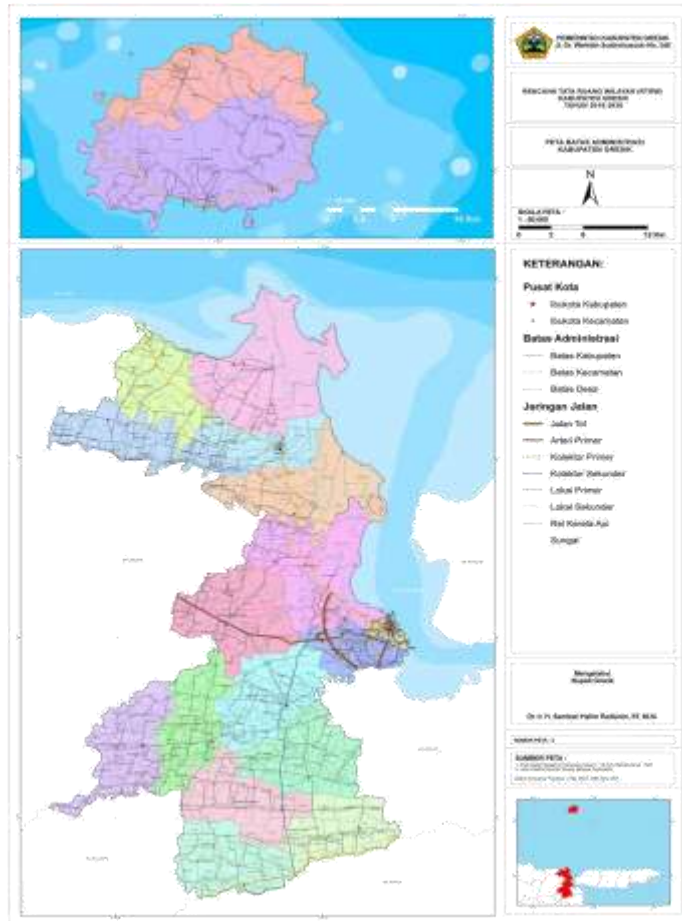
Kecamatan <i>Subdistrict</i>		Luas (km²) <i>¹Total Area (square.km)</i>	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau²
			<i>Percentage to Regency</i>	<i>Number of Islands</i>
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Wringinanom	62,62	5,26	-
2	Driyorejo	51,30	4,31	-
3	Kedamean	65,96	5,54	-
4	Menganti	68,71	5,77	-
5	C e r m e	71,73	6,02	-
6	Benjeng	61,26	5,14	-
7	Balongpanggang	63,88	5,36	-
8	Duduksampeyan	74,29	6,24	-
9	Kebomas	30,06	2,52	-
10	Gresik	5,54	0,47	-
11	Manyar	95,42	8,01	-
12	Bungah	79,49	6,67	1
13	Sidayu	47,13	3,96	-
14	Dukun	59,03	4,96	-
15	Panceng	62,59	5,25	-
16	Ujungpangkah	94,82	7,96	1
17	Sangkapura	118,72	9,97	5
18	Tambak	78,70	6,65	4
Gresik		1191,25	100	11

Sumber: Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dalam Buku “Gresik dalam Angka Tahun 2020”

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

a) Posisi Astronomis dan Geografi

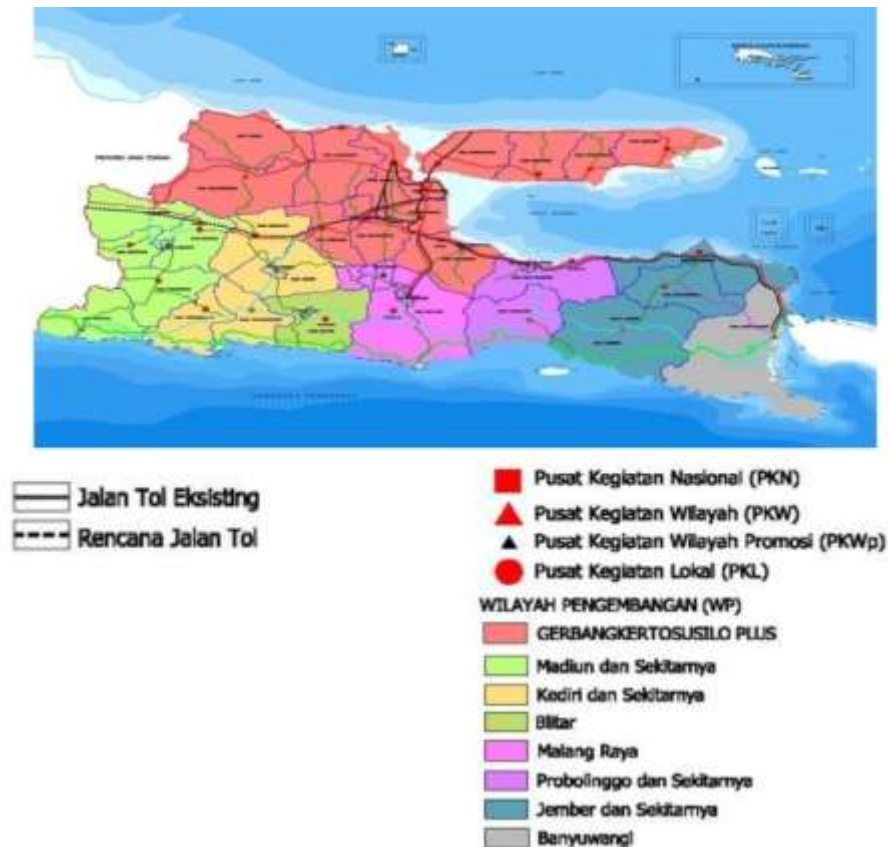
Secara astronomi, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112°sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Adapun Peta Administrasi Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan). Kabupaten Gresik berbatasan dengan selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Gresik terhdap Provinsi Jawa Timur

b) Kondisi/Kawasan

Ditinjau dari Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kawasan Lindung

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 bahwa Rencana Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik adalah Suaka Marsasatwa Pulau Bawean serta Cagar Alam Pulau Bawean.

2. Kawasan Budidaya

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN, Rencana Kawasan Budidaya termasuk kedalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan yang meliputi pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Sedangkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 merupakan arahan penggunaan lahan permukiman, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Arahan rencana Kawasan industri untuk Kabupaten Gresik:

- a. Rencana pengembangan kawasan peruntukkan industri Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga
- b. Kawasan Industri Agro
- c. Kawasan Industri Berat
- d. Kawasan Industri Petrokimia

Ditinjau dari Sistem perkotaan, menurut PP no. 13 tahun 2017 Kabupaten Gresik merupakan merupakan Pusat Kegiatan Nasional yang tergabung dalam kawasan perkotaan Gerbangkerto susila. Sedangkan menurut Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039. Kawasan perkotaan diklasifikasikan sebagai PKN yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertokusila. Struktur Pusat Permukiman Perkotaan Gresik yang meliputi wilayah Perkotaan Gresik, Perkotaan Kebomas, Perkotaan Manyar, Perkotaan Menganti, dan Perkotaan Driyorejo.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

2.1.1.3.1 Kemiringan Lereng

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi yaitu pada kemiringan 0-2%, 3-15%, dan 16-40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0-2% dengan luas sebesar ± 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit yaitu dengan luas ± 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %.

Tabel 2.2
Luas Kemiringan Lereng (Ha) Kabupaten Gresik

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00

Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.672,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.259,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.656,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

2.1.1.3.2 Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas ± 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas ± 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 %.
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas ± 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Tabel 2.3
Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Pada Kabupaten Gresik

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

2.1.1.4 Kondisi Geologi

2.1.1.4.1 Struktur dan Karakteristik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun.

2.1.1.1.1 Potensi Kandungan

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- a. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
- b. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas

yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

c. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

d. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

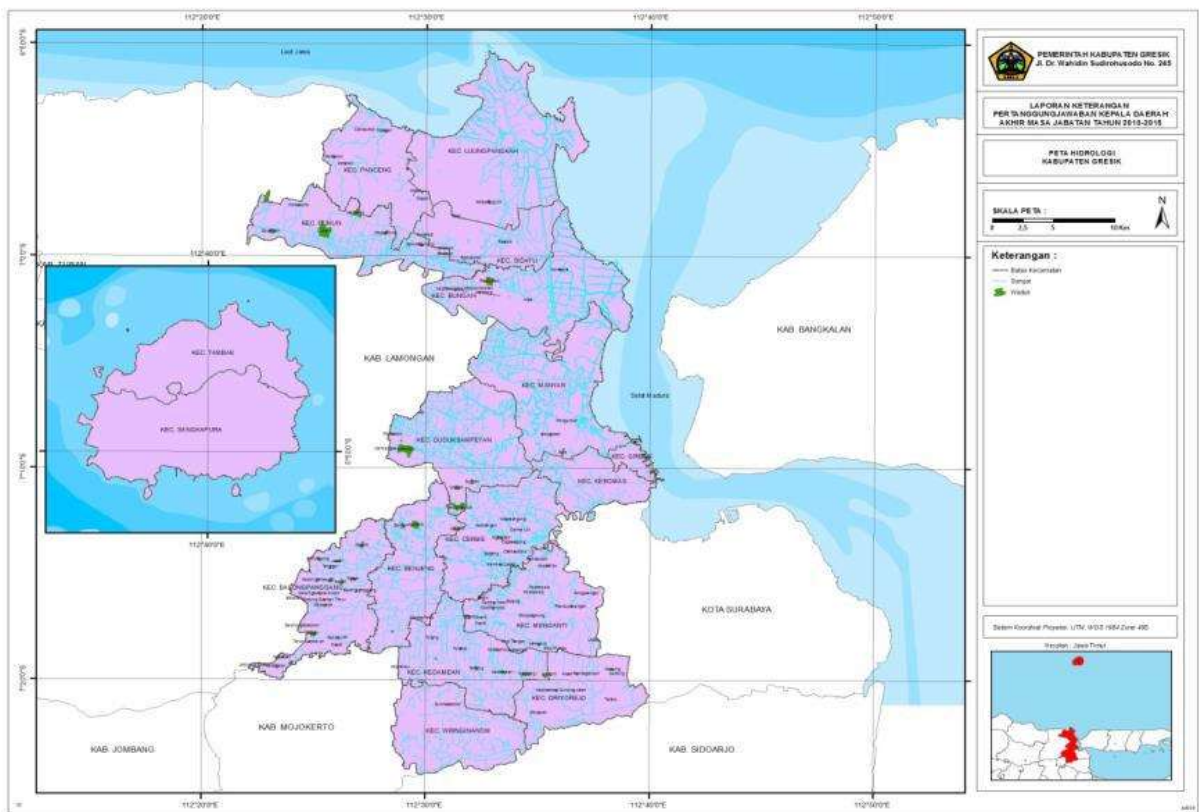
Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga

pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Gambar 2. 3
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

2.1.1.5.2 Kondisi Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim

peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

2.1.1.5.3 Curah Hujan

Menurut RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030, kondisi curah hujan rata-rata di Kabupaten Gresik sebesar 2.245 mm/tahun. Menurut Tabel 2. Pada Tahun 2018 rata-rata curah hujan berlangsung dari mulai Oktober 2017- Hingga Juni 2018 dan pada bulan Oktober-Desember 2018, tertinggi terjadi pada Bulan November sebesar 317,10 mm.

Tabel 2.4
Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan
di Kabupaten Gresik, 2014-2018

Bulan/ Month	Rata-Rata Curah Hujan/ Yearly Rainfall Averages				
	(Mm)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari/ January	373,70	270,00	224,00	220,00	296,10
Februari/ February	243,40	324,00	308,00	290,00	273,90
Maret/ March	319,60	259,00	266,00	298,00	250,60
April/ April	316,10	225,00	224,00	223,00	177,30
Mei/ May	202,00	77,00	266,00	199,00	41,30
Juni/ June	224,40	-	238,00	169,00	133,30
Juli/ July	171,50	-	224,00	178,00	-
Agustus/ August	4,00	-	140,00	-	-
September/ September	-	-	266,00	-	-
Oktober/ October	-	-	322,00	261,00	142,00
November/ November	-	63,00	224,00	370,00	317,10
Desember/ December	-	125,00	224,00	178,00	311,30

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2018

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

2.1.1.6.1 Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya memiliki luas 115.349,6679 Ha atau sekitar 96,83 % dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Permukiman menjadi kawasan teluas sebesar 41.108,3957 Ha termasuk didalamnya terdiri dari Kawasan Perkotaan sebesar 15.331,4053 Ha dan Kawasan Pedesaan sebesar 25.776,9904. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Hutan Produksi sebesar 996,2112 Ha.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten
Gresik

B	KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA	115.349,6679
1	Kawasan Hutan Produksi	996,2112
	- Hutan Produksi Tetap	996,2112
2	Kawasan Pertanian	39.269,8866
	- Kawasan Tanaman Pangan	28.979,7212
	- Kawasan Hortikultura	10.290,1653
3	Kawasan Perikanan	21.094,1022
	- Kawasan Perikanan Budidaya	21.094,1022
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	379,9807
	- Kawasan Pertambangan Mineral	296,0844
	- Kawasan Pertambangan Mineral bukan Logam	296,0844
	- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	83,8963
5	Kawasan Peruntukan Industri	10.841,9718
	- Kawasan Industri	10.841,9718
6	Kawasan Pariwisata	1.659,1198
7	Kawasan Permukiman	41.108,3957
	- Permukiman Perkotaan	15.331,4053
	- Permukiman Perdesaan	25.776,9904
	Sungai	1.325,2596
	Waduk	292,9998
	Danau	202,0738
	Embung	5,5569
	Jalan Bebas Hambatan	324,1042
	Rel Kereta Api	10,8102

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gresik 2019-2039

2.1.1.6.2 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 7.959,9593 Ha atau sekitar 6,68 % dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Konservasi menjadi kawasan teluas termasuk didalamnya terdapat hutan lindung mutlak yaitu Cagar Alam seluas 653,2901 Ha, dan Suaka Margasatwa seluas 3.902,2616 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Ruang Terbuka Hijau sebesar 69,6161 Ha.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Kawasan Lindungdi Kabupaten Gresik

NO	POLA RUANG	LUAS (HA)
A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	7.959,9593
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	254,8126
	- Resapan Air	254,8126
2	Kawasan Perlindungan Setempat	1.356,6286
	- Sempadan Pantai	1,7214
	- Sempadan Sungai	1.308,9938
	- Kawasan Sekitar Danau/Waduk	45,9134
3	Kawasan Konservasi	4.555,5517
	- Cagar Alam	653,2901
	- Suaka Margasatwa	3.902,2616
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	1.723,3501
5	Ruang Terbuka hijau	69,6162

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gresik 2019-2039

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gresik diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Berdasarkan RTRW, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9.426,12 hektar;
2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar;
3. Kawasan Terumbu Karang 5.387,00 hektar;
4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar;
5. Kawasan Resapan Air 1.252,58 hektar;
6. Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar;

b. Kawasan Budidaya

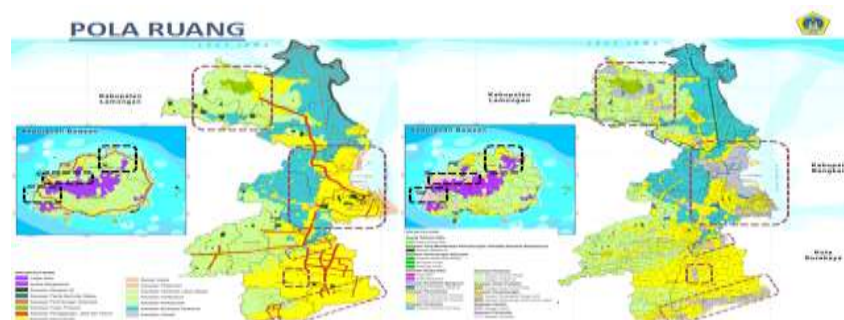
1. Kawasan Permukiman 26.06,55 hektar;
2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23.372,70 hektar;
3. Kawasan Perikanan Budidaya 21.678,36 hektar;
4. Kawasan Hortikultura 16.885,48 hektar;
5. Kawasan Industri 12.448,03 hektar;
6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6.644,01 hektar;
7. Kawasan Perkebunan 2.573,67 hektar;
8. Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar;
9. Kawasan Pertambangan 817,25 hektar;
10. Kawasan Pariwisata 82,85 hektar;
11. Kawasan Bandar Udara 68,44 hektar;
12. Kawasan Pelabuhan 1.257,69 hektar.

Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya.

Kemudian untuk kawasan pesisir dengan panjang pantai 140,69 km dengan potensi sumberdaya baik perikanan, pelabuhan, industri, dan ekosistem mangrove berada di kecamatan Ujungpangkah dan Manyar. Namun, kawasan pesisir memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dari kesan kumuh di kawasan permukiman nelayan, banjir rob, abrasi, hingga adanya reklamasi yang memicu terjadinya degradasi lingkungan di kawasan pesisir.

Potensi perikanan budidaya berada di kawasan Gresik Utara, seperti di Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, Bungah, dan Dukun. Dalam hal ini alih fungsi lahan dimungkinkan terjadi juga seperti pada Potensi Pertanian. Pada Kecamatan Duduksampeyan juga terdapat potensi pengembangan pelabuhan internasional namun dapat berimplikasi terjadinya alih lahan perikanan budidaya menjadi kawasan industri disertai permukiman dan infrastrukturnya.

Untuk Potensi Pariwisata didominasi oleh situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius serta objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pulau Bawean merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi pariwisata, dimana terdapat 5 Pulau di Kecamatan Sangkapura dan 4 Pulau di Kecamatan Tambak yang bisa menjadi pilihan destinasi wisata. Namun yang menghambat potensi ini untuk berkembang adalah erdapat kawasan lindung yang membatasi kegiatan budidaya termasuk kegiatan eksplorasi dalam upaya pengembangan pariwisata. Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambarberikut:



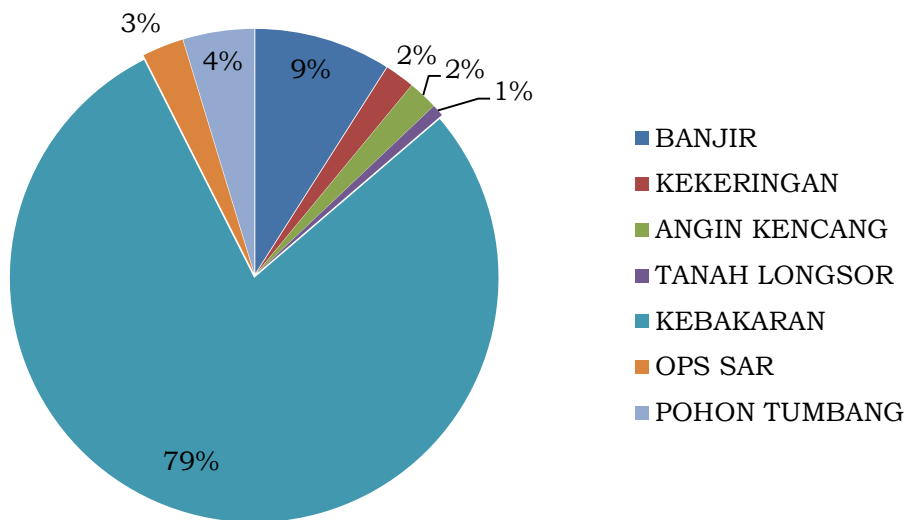
Sumber data : Revisi RTRW Kab. Gresik Tahun 2019- 2039

Gambar 2.4

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik

2.1.1.6.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia DIBI terdapat 7 (tujuh) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang, Tanah Longsor, Kebakaran, Ops Sar, Pohon Tumbang Dalam rentang waktu tahun 2019 telah terjadi 255 kali bencana di Kabupaten Gresik.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2020

Gambar 2.5
Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2019

Bencana Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik dari tahun 2019, dengan persentase kejadian yaitu 79%, dan Banjir dengan 23%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah. Penentuan tingkat ancaman atau bahaya juga disesuaikan dengan jenis potensi bahaya di Kabupaten Gresik sijnabarkan sebagaimana berikut:

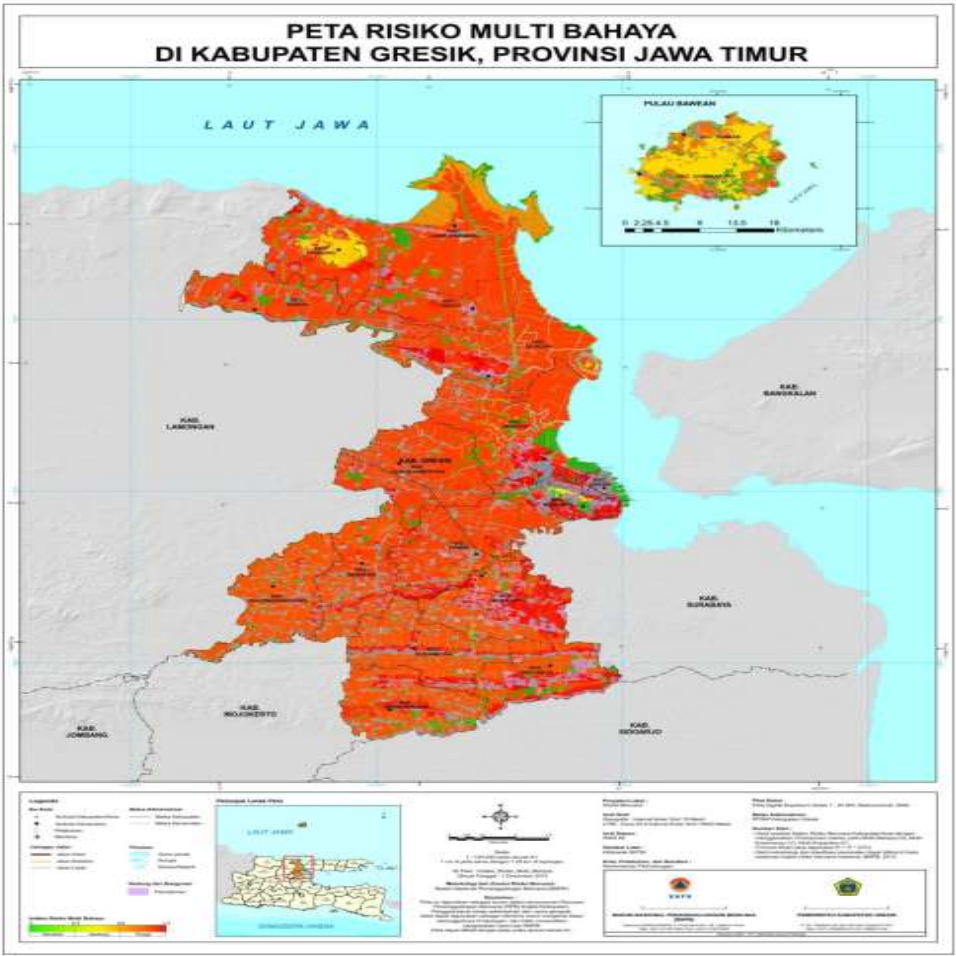
Tabel 2.7
Jenis Potensi Bahaya di Kabupaten Gresik

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1.	Banjir	82.809	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrem	97.852	Tinggi
3.	Epidemi Wabah Penyakit	7.274	Rendah
4.	Gelombang ekstrim dan Abrasi	3.314	Tinggi
5.	Gempa Bumi	106.527	Rendah
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	19.160	Tinggi
7.	Kekeringan	106.527	Tinggi
8.	Tanah Longsor	551	Sedang
9.	Kegagalan Teknologi	6.690	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2020

Ancaman bencana atau bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas bahaya maksimum per bencana untuk seluruh potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik. Secara umum didapat tingkat bahaya yang rendah adalah

bencana epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi, serta tingkat bahaya sedang adalah tanah longsor. Sedangkan bencana lainnya adalah tinggi.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2019

Gambar 2.6
Peta Resiko Multi Bahaya di Kabupaten Gresik

Ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan meningkat di Kabupaten Gresik adalah bencana banjir, Kegagalan teknologi, cuaca esktrim, gelombang ekstrim dan Abrasi. Sedangkan ancaman bencana prioritas tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan tetap adalah Tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko sedang dengan kecenderungan meningkat adalah bencana kekeringan.

2.1.1.7 Jumlah Dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2019 sebanyak 1.298.184 jiwa yang terdiri dari 652.982 laki-laki dan

645.202 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 1.089 jiwa/Km². Hal ini berarti tiap 1 km² ditempati sebanyak 1089 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2019 sebesar 1:1. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Tahun 2018 s/d Tahun 2019

8	Kecamatan	2018			2019		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	34.529	33.951	68.480	33.759	33.368	67.127
2	BALONGPANGGANG	29.572	29.801	59.373	28.889	29.126	58.015
3	PANCENG	26.837	26.547	53.384	26.361	26.238	52.599
4	BENJENG	33.981	33.840	67.821	33.402	33.144	66.546
5	DUDUKSAMPEYAN	25.428	25.442	50.870	25.234	25.263	50.497
6	WRINGINANOM	37.310	36.827	74.137	36.957	36.340	73.297
7	UJUNGPANGKAH	26.253	25.897	52.150	26.050	25.840	51.890
8	KEDAMEAN	32.338	31.892	64.230	32.193	31.694	63.887
9	SIDAYU	22.295	21.974	44.269	21.935	21.598	43.533
10	MANYAR	59.013	57.281	116.294	58.151	56.742	114.893
11	CERME	40.332	40.054	80.386	40.265	39.767	80.032
12	BUNGAH	34.698	34.206	68.904	34.441	33.901	68.342
13	MENGANTI	63.981	62.585	126.566	62.894	61.574	124.468
14	KEBOMAS	55.626	54.776	110.402	55.052	54.340	109.392
15	DRIYOREJO	53.883	52.874	106.757	51.809	50.837	102.646
16	GRESIK	41.605	41.977	83.582	41.005	41.443	82.448
17	SANGKAPURA	35.077	34.543	69.620	28.279	27.774	56.053
18	TAMBAK	19.825	19.321	39.146	16.306	16.213	32.519
	JUMLAH	672.583	663.788	1.336.371	652.982	645.202	1.298.184

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2020

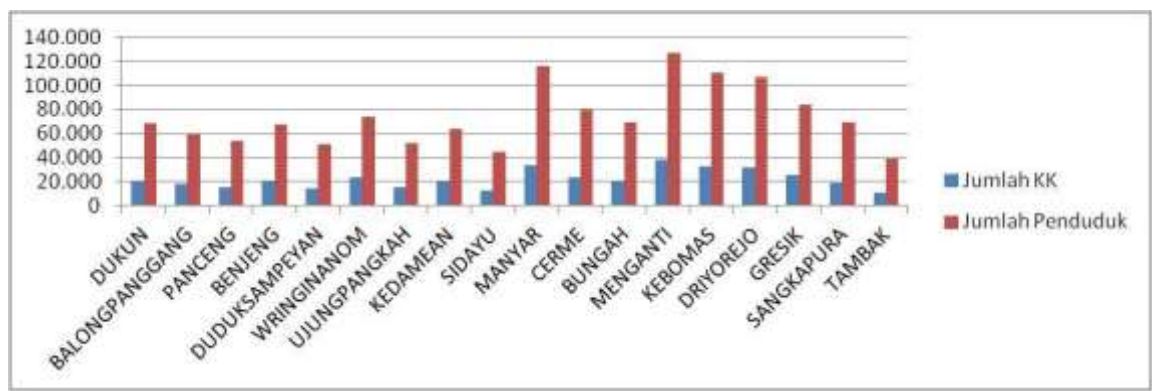
Jumlah penduduk Gresik tahun 2019 mengalami Penurunan Jumlah Penduduk 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 sebanyak 389.072 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 394.657 keluarga maka terjadi Penurunan jumlah keluarga sebanyak 5.585 Keluarga atau 1.44%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9
Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK		
			2017	2018	2019
1	DUKUN	26	19.653	20.244	20.186
2	BALONGPANGGANG	25	18.054	18.492	18.358
3	PANCENG	14	14.906	15.432	15.520
4	BENJENG	23	20.078	20.620	20.456
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14.454	14.784	14.840
6	WRINGINANOM	16	23.299	23.896	23.715
7	UJUNGPAKKAH	13	14.798	15.258	15.392
8	KEDAMEAN	15	19.751	20.233	20.231
9	SIDAYU	21	12.030	12.387	12.393
10	MANYAR	23	32.195	33.283	33.202
11	CERME	25	22.364	23.099	23.283
12	BUNGAH	22	19.234	19.790	19.878
13	MENGANTI	22	36.878	38.039	37.789
14	KEBOMAS	21	31.127	32.265	32.342
15	DRIYOREJO	16	31.316	32.153	31.312
16	GRESIK	21	24.750	25.217	25.185
17	SANGKAPURA	17	18.525	19.029	15.873
18	TAMBAK	13	10.051	10.436	9.117
JUMLAH			383.463	394.657	389.072

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.7
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2019, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 37.789 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 124.468 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan

10.436 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 32.519 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 35–39 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,39% kemudian kelompok umur 15-19 tahun mencapai 8,08% dan selanjutnya kelompok umur 45-49 tahun mencapai 7,67%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut

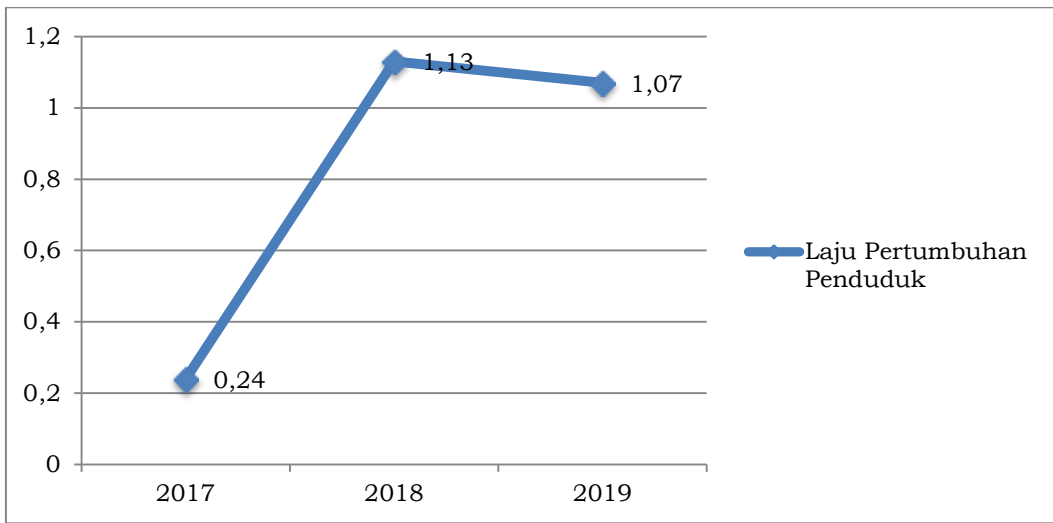
Tabel 2.10
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2019

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR																JUMLAH
		0 - 4 Th	5 - 9 Th	10 - 14 Th	15 - 19 Th	20 - 24 Th	25 - 29 Th	30 - 34 Th	35 - 39 Th	40 - 44 Th	45 - 49 Th	50 - 54 Th	55 - 59 Th	60 - 64 Th	65 - 69 Th	70 - 74 Th	75 Th	
1	DUKUN	4.160	4.998	4.736	5.114	4.994	4.776	5.001	5.714	5.577	4.968	4.368	3.679	3.109	2.284	1.389	2.260	67.127
2	BALONGPANGGANG	3.162	3.855	3.844	4.139	4.048	4.107	3.847	4.320	4.561	4.664	4.417	3.869	3.144	2.428	1.488	2.122	58.015
3	PANCENG	3.259	4.030	3.879	3.980	3.920	3.633	3.731	4.532	4.710	3.933	3.608	3.114	2.512	1.585	909	1.264	52.599
4	BENJENG	3.886	4.780	5.007	5.052	4.707	4.754	4.567	5.654	5.298	5.137	4.570	3.842	3.268	2.365	1.412	2.247	66.546
5	DUDUKSAMPEYAN	3.361	3.747	3.834	3.936	3.692	3.561	3.552	4.166	4.245	3.781	3.569	2.985	2.491	1.605	772	1.200	50.497
6	WRINGINANOM	4.798	5.595	5.668	5.716	5.363	5.386	5.214	6.351	5.623	5.800	5.159	3.993	2.925	2.078	1.398	2.230	73.297
7	UJUNGPAKKAH	3.456	3.974	3.974	4.085	3.987	3.750	3.755	4.490	4.563	3.844	3.414	2.770	2.338	1.486	811	1.193	51.890
8	KEDAMEAN	3.765	4.626	4.595	4.596	4.583	4.298	4.561	5.263	5.014	5.163	4.629	3.778	2.977	2.303	1.536	2.200	63.887
9	SIDAYU	2.895	3.528	3.364	3.397	3.363	3.150	3.189	3.778	3.674	3.333	2.816	2.250	1.855	1.284	664	993	43.533
10	MANYAR	8.686	9.746	9.451	9.838	9.333	8.804	8.436	9.499	8.996	8.377	7.676	6.361	4.428	2.555	1.061	1.646	114.893
11	CERME	5.234	6.206	6.298	6.221	5.751	5.661	5.541	6.901	6.822	6.210	5.363	4.433	3.565	2.542	1.325	1.959	80.032
12	BUNGAH	4.777	5.595	5.232	5.364	5.036	5.017	5.157	5.814	5.335	4.907	4.562	3.788	3.142	1.951	1.033	1.632	68.342
13	MENGANTI	7.546	9.599	10.147	10.467	9.350	8.842	8.265	10.313	10.109	10.552	8.958	6.366	5.055	3.630	2.138	3.131	124.468
14	KEBOMAS	8.124	8.996	9.015	8.885	8.437	8.390	8.198	9.396	8.672	8.035	7.483	6.303	4.480	2.502	1.124	1.352	109.392
15	DRIYOREJO	6.329	7.721	8.305	8.857	8.188	7.427	6.826	8.289	8.538	8.895	7.724	5.394	3.925	2.521	1.528	2.179	102.646
16	GRESIK	5.829	6.987	6.935	6.816	6.287	5.958	5.853	7.184	6.543	5.882	5.306	4.253	3.510	2.448	1.234	1.423	82.448
17	SANGKAPURA	3.252	4.376	4.684	5.411	4.811	3.967	4.362	4.571	4.837	3.900	2.935	2.345	1.981	1.606	1.236	1.779	56.053
18	TAMBAK	1.884	2.551	2.826	3.050	2.762	2.164	2.437	2.676	2.884	2.175	1.589	1.426	1.249	995	789	1.062	32.519
JUMLAH		84.403	100.910	101.794	104.924	98.612	93.645	92.492	108.911	106.001	99.556	88.146	70.949	55.954	38.168	21.847	31.872	1.298.184

Sumber Data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.1.1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk

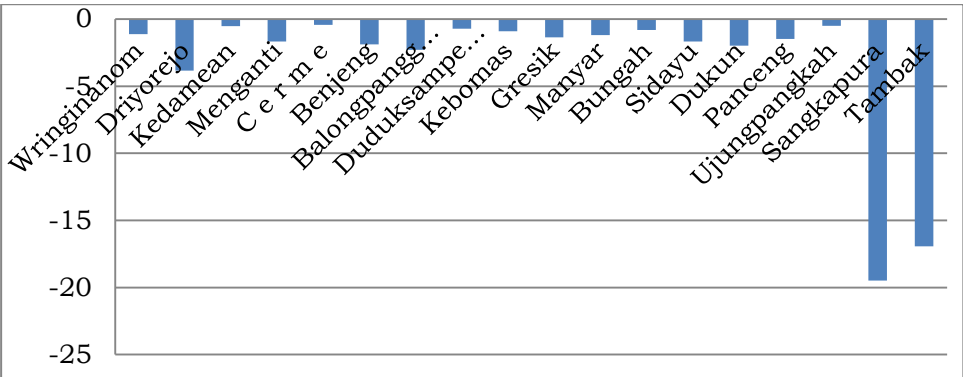
Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Jika dilihat dalam kurun waktu terakhir (Gambar 2.) diperoleh rata-rata sebesar 0,81 % atau penduduk dengan laju pertumbuhan rendah. Pada Tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 %, kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,13% pada tahun 2018 terutama akibat jumlah kelahiran yang meningkat dari tahun sebelumnya (19.810 jiwa di tahun 2017 menjadi 20.695 jiwa di tahun 2018). Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,07%.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut kecamatan yang tertinggi berada pada Kecamatan Cerme sebesar - 0.44%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah berada di Pulau Bawean pada kecamatan Sangkapura hal ini bisa disebabkan adanya migrasi penduduk yang keluar daerah mengikuti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di daratan Kabupaten Gresik .

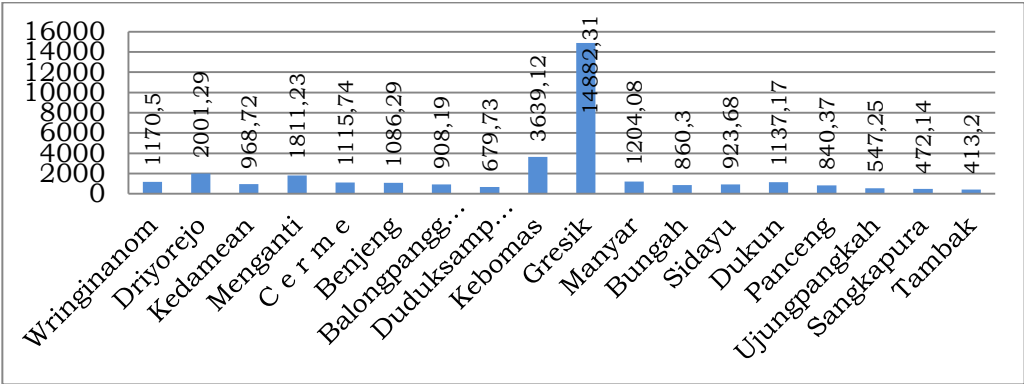


Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2019

2.1.1.9 Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2019, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik 14882,31 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak.



Sumber: Hasil Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik/Population and Civil Regristation Services of Gresik Regency

Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2019 (jiwa/km²)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Nilai Peduli HAM

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia didasarkan pada terpenuhinya:

1. Hak Atas Kesehatan

2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak Atas Pekerjaan
6. Hak Atas Perumahan yang layak
7. Hak Atas lingkungan yang berkelanjutan

Dari Hasil penilaian terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019 dijelaskan bahwa Gresik memperoleh Apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi suatu negara atau daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1). Pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Pengeluaran

JENIS PENGELUARAN	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) / Menurut Pengeluaran								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,71	5,38	5,95	5,81	3,39	4,64	4,63	4,91	4,72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,78	4,81	7,67	10,49	0,15	3,72	2,46	4,21	5,98
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,27	7,41	7,63	3,03	2,84	-7,59	3,54	4,84	4,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,66	9,79	6,27	4,59	11,58	5,52	7,34	7,88	4,90
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PDRB / GRDP	6,48	6,92	6,05	7,04	6,61	5,49	5,83	5,97	5,41

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2. Dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik adri Tahun 2011 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

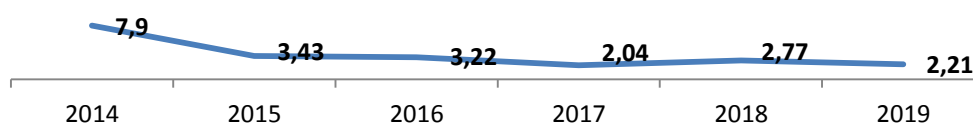
Gresik meningkat sebanyak 0,14 dari yang semula Pada Tahun 2017 sebesar 5,83 menjadi 5,97. Sedangkan untuk Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0,56 menjadi 5,41.

2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi pada suatu negara menggambarkan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat membahayakan perekonomian di negara tersebut. Sedangkan inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena dapat menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan barang atau jasa yang akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- 1) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*);
- 2) Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*);
- 3) Eskalasi nilai proyek (*project escalation*);
- 4) Penentuan target inflasi (*inflation targeting*);
- 5) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (*budget indexation*);
- 6) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Sebagai proxy perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*);
- 8) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 2.11
Laju Inflasi Kabupaten Gresik

Grafik yang ditunjukkan oleh Gambar 2. Menggambarkan bahwa laju inflasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, yakni pada Tahun 2014 hingga 2015 relatif melandai. Pada Tahun 2014 Laju inflasi pada Kabupaten Gresik berada pada angka 7,9, lalu mengalami penurunan hingga Tahun 2019 mencapai angka 2,21. Hal ini menunjukkan bahwa laju inflasi di kabupaten Gresik relatif terkendali.

2.1.2.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar secara komprehensif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan adanya arah kebijakan ini, karakteristik penduduk miskin menjadi hal penting untuk dapat membantu memfokuskan arah kebijakan tersebut. Salah satu komponen yang dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah penanggulangan kemiskinan secara komprehensif melalui optimalisasi penyelenggaraan program *pro poor* pada dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan. Sebanyak 148.610 jiwa atau 11,35 persen penduduk Gresik tergolong miskin pada Maret 2019, turun 0,54 poin dari tahun sebelumnya. Artinya, terdapat 1 penduduk miskin di antara 10 penduduk Gresik. Sekitar 18,68 persen rumah tangga miskin di Gresik dipimpin oleh perempuan. Perempuan dalam kelompok ini rata-rata berumur 52 tahun dan harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari 5 orang.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 2. 12
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kab. Gresik Tahun 2003-2019

Selama periode Tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 7 Persen poin persen, yaitu dari 19,14 persen pada tahun 2009 menjadi 11,35 persen pada Tahun 2019. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 225.774 jiwa pada Tahun 2009 menjadi 148.610 jiwa pada Tahun 2019.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 terus mengalami peningkatan, pada tabel 2. menerangkan bahwa besarnya konsumsi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 maksimal sebesar Rp. 466.154. Selama periode 2018-2019 , Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 27.450 (5,8%), yaitu dari Rp. 438.704 perkapita pada Tahun 2018 menjadi Rp. 466.154 pada Tahun 2019. Garis

Kemiskinan Kabupaten Gresik pada dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Gresik dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

No	Wilayah	Garis Kemiskinan Perkapita (perkapita/bulan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab.Gresik	372.661	393.447	414.261	438.704	466.154
2	Provinsi Jawa Timur	305.171	321.761	342.092	373.574	397.687

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1.10 yakni, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2009-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,42 dibandingkan dengan Tahun 2018. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2018 sebesar 1,79 menjadi 2,21 Pada Tahun 2019. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,16 dari yang semula Pada Tahun 2018 sebesar 0,45 menjadi 0,61 di Tahun 2019.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2019

Gambar 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2003-2019

2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks

pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sbb :

- 1. Angka Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
- 2. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
- 3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
- 4. Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Nasional	90,96	90,99	91,07
2	Jawa Timur	90,76	90,77	90,91
3	Gresik	89,57	89,72	89,72

Sumber : BPS Nasional dan Jawa Timur Tahun 2019

Menurut tabel 2. Dapat diketahui bahwa Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki peningkatan sebesar 0,03 di Tahun 2018, dari yang sebelumnya sebesar 90,96 di Tahun 2017 menjadi 90,99 di tahun 2018. Sama dengan Tahun 2018, Indeks Pembangunan Gender Nasional pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 0,08 menjadi 91,07. Selama 2 Tahun terakhir, trend Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan di Tahun 2018 dan Tahun 2019 masing-masing sebesar 0,01 dan 0,14. Indeks Pembangunan Gender untuk Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan sebesar 0,15 pada Tahun 2018 menjadi 89,72 dari sebelumnya di Tahun 2017 sebesar 89,57. Sedangkan untuk Tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Gresik masih berada pada angka 89,72. Informasi yang di dapat dari tabel diatas adalah Tingkat ketimpangan gender pada Indonesia lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur. Tingkat ketimpangan gender pada Provinsi Jawa Timur juga lebih rendah dibanding Kabupaten Gresik.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun

kualitas hidup manusia. Hal ini menggambarkan bagaimana hasil pembangunan dapat digunakan sebagai akses untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia ada 3, yakni a) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) yang digambarkan oleh Angka Harapan Hidup Saaat Lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama panjang dengan usia bayi, b) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yakni rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. dan c) Standar Hidup Layak (*decent standard of living*) dapat digambarkan melalui pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Nasional	70,81	71,39	71,92
2	Jawa Timur	70,27	70,77	71,50
3	Gresik	74,84	75,28	76,10

Sumber: BPS Nasional dan Jawa Timur Tahun 2019

Dari tabel 2. Dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,58 menjadi 71,39 dari sebelumnya di Tahun 2017 sebesar 70,81. Pada Tahun 2019 IPM di tingkat Nasional tidak mengalami peningkatan sebanyak di Tahun 2018, yakni sebesar 0,53 menjadi 71,92. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 0,5 di Tahun 2018 dan 0,73 di Tahun 2019.

Pada Kabupaten Gresik sendiri, IPM juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni sebesar 0,44 Pada Tahun 2018 dan sebesar 0,82 Pada Tahun 2019. Indeks Pembangunan

Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.1.2.1.7 Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Tabel 2.15
Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,42	2,44
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,35	1,40
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,41	1,53
4	Penataaan Tatalaksana	5,00	2,62	2,79
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,74	10,82
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,42	3,73
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,00	6,80
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,61	3,69
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	31,57	33,20
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kerja	14,00	10,04	11,21
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,75	4,68
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,21	6,25
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,73	8,35
Total Komponen Hasil (B)		40,00	31,73	33,49
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	63,30	66,69

Sumber: Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/393/RB.06/2019

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel 2. . Berdasarkan hasil evaluasi

diatas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan sebanyak 3,39 dari yang sebelumnya sebesar 63,30 Pada Tahun 2018 menjadi 66,69 Pada Tahun 2019. Penilaian tersebut didapat dari penjumlahan Komponen Pengungkit yang terdiri dari:

- 1. Manajemen Perubahan
- 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4. Penataan Tatalaksana
- 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
- 6. Penguatan Akuntabilitas
- 7. Penguatan Pengawasan
- 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dan Komponen Hasil yang terdiri dari:

- 1. Nilai Akuntabilitas Kerja
- 2. Survei Internal Integritas Organisasi
- 3. Survei Eksternal Persepsi korupsi
- 4. Opini BPK
- 5. Survei Eksternal Pelayanan Publik

Dari kedua komponen tersebut yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Opini BPK yakni 3,00 dari 3,00. Sedangkan yang mendapat nilai terendah adalah Penataan dan Penguatan Organisasi.

2.1.2.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ini dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan pengembangan yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi lingkungan di daerah tersebut.

Tabel 2.16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kabupaten Gresik
Tahun 2019

No	Indikator	Tahun 2018	Nilai Indeks	Bobot	Tahun 2019
1	Indeks Pencemaran udara		86,16	0,3	25,848
2	Indeks Pencemaran Air		63,33	0,3	18,999
3	Indeks Tutupan Lahan		72,85	0,4	29,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64,62			73,99

Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

Dalam tabel 2. Dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mengalami peningkatan

sebesar 9,37 dari yang semula sebesar 64,62 pada Tahun 2018 menjadi 73,99 di Tahun 2019. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH ada 3, yakni:

1. Indeks Pencemaran Udara, laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama periode tertentu dengan parameter a) TSS, b) DO, c) COD, d) BOD, e) Fosfat, f) Total Coliform dan g) E.Coli/Fecal Coli
2. Indeks Pencemaran Air, laporan kualitas air kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas air dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menggunakan atau mengonsumsi air tersebut selama periode tertentu dengan parameter SO₂ dan NO₂
3. Indeks Tutupan Lahan, Laporan dengan parameter a) Indeks Tutupan Hutan (ITH), b) Indeks Performance Hutan (IPH), c) Indeks Kondisi Tututan Tanah (IKT) d) Indeks Kondisi Badan Air (IKBA) dan e) Indeks Kondisi Habitat (IKH)

Dari ketiga indikator diatas, indikator yang paling tinggi adalah Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan untuk indikator yang paling rendah adalah Indeks Pencemaran Air.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Batas maksimum untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 Tahun dan batas minimum sebesar 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

Kondisi Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2019 mencapai 9,29 Tahun, berarti penduduk mengenyam pendidikan selama 9

Tahun (setara dengan kelas 3 SLTP). Program Wajar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selanjutnya kalau dilanjutkan menjadi wajar 12 tahun atau lulus tingkat SLTA. Selama 5 Tahun terakhir, MYS naik sebesar 0,36 Tahun, setiap tahun rata-rata naik 0,07 Tahun. Hal itu menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk. Untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi, baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mendorong penduduk bersekolah setinggi-tingginya.

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2015-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 naik sebesar 0,01 Tahun, yaitu dari 13,71 Tahun di Tahun 2018 menjadi 13,72 Tahun di Tahun 2019. Artinya bahwa setiap anak usia 7 tahun di Kabupaten Gresik mempunyai harapan lamanya mengenyam pendidikan sekitar 13,72 Tahun atau hampir sampai perguruan tinggi tahun kedua.

Tabel 2.17

EYS dan MYS Kabupaten Gresik Tahun 2010 -2019

Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
2010	11,89	7,93
2011	12,23	8,26

Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
2012	12,63	8,41
2013	12,85	8,41
2014	13,17	8,42
2015	13,19	8,93
2016	13,69	8,94
2017	13,70	8,95
2018	13,71	8,96
2019	13,72	9,29

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

c. **Angka Melek Huruf**

Tabel 2.18

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Gresik, 2017-2019 (%)

Kelompok Umur Age Group	2017	2018	2019
15 - 19	100,00	100,00	100,00
20 - 29	100,00	99,88	100,00
30 - 39	100,00	99,82	99,82
40 - 49	99,03	99,22	99,65
50-59	96,32	97,43	97,93
60-69	78,93	79,68	85,66
70+	63,61	61,16	53,84

Sumber : gresikkab.bps.go.id

Salah satu indikator tingkat pendidikan adalah angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu. Pada tahun 2019 jumlah penduduk melek huruf di Gresik, menurut hasil penelitian BPS, pada kelompok umur 15-19 dan 20-29 mencapai 100%. Pada tahun yang sama, di kelompok usia 30-39 dan 40-49, AMH juga diatas 99%. Fakta ini menarik untuk dikaji tentang faktor apa saja yang menjadikan tingginya AMH di Kabupaten Gresik pada 2019.

d. **Angka Kelulusan (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS)**

Tabel 2.19

Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2017 s.d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar			
1	Angka Kelulusan SD dan Sederajat	100%	96,99%	98,72%
	<i>Jumlah siswa SD dan Sederajat</i>			20.320
	<i>Jumlah siswa SD dan Sederajat yang lulus</i>			20.060

No	Uraian	2017	2018	2019
2	Angka Kelulusan SMP dan Sederajat	100%	95,38%	97,51%
	<i>Jumlah siswa SMP dan Sederajat</i>			19.394
	<i>Jumlah siswa SMP dan Sederajat yang lulus</i>			18.912
3	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02%	0,02%	0,02%
	<i>Jumlah siswa SD dan Sederajat Putus Sekolah</i>			23
4	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,09%	0,08%	0,08%
	<i>Jumlah siswa SMP dan Sederajat Putus Sekolah</i>			45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Angka kelulusan menunjukkan jumlah siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang tertentu. Angka Kelulusan mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan pendidikan serta kemajuan tingkat penyelesaian pendidikan. Berdasarkan table diatas, Angka Kelulusan SD sederajat pada Tahun 2018 mencapaikan 96,99 %, kemudian mengalami kenaikan menjadi 98,72% pada tahun 2019. Hal yang sama terjadi pada Angka kelulusan SMP Sederajat dimana pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dari 95% menjadi 97,51% pada Tahun 2019.

Angka Putus Sekolah menunjukkan proporsi anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Menurut table diatas, Angka Putus Sekolah SD Sederajat dari tahun 2017 ke 2019 tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk SMP Sederajat dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,01% menjadi 0,08%, dan tidak ada perubahan pada tahun 2019.

e. Angka keberlanjutan Sekolah

Tabel 2.20
Perkembangan Angka keberlanjutan Sekolah Kabupaten Gresik
Tahun 2017 s.d 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	93,93%	95%	95%	100,1%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Angka Keberlanjutan Sekolah merupakan Persentase Jumlah lulusan siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persentase lulusan SD dan Sederajat di Kabupaten Gresik yang melanjutkan ke Jenjang berikutnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Dari tahun 2017 sebesar 93,93

persen kemudian terus mengalami peningkatan hingga menjadi 100% pada Tahun 2019.

2.1.2.2.2 Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur atau disebut *Age Specific Death Rate (ASDR)*. Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun sistem registrasi penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Gresik belum memungkinkan, sehingga untuk menghitung AHH digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpack Lite*. Kegunaan AHH adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan seperti kampanye kecukupan gizi terutama pada bayi, termasuk pemberian imunisasi dan posyandu.

Selama Tahun 2015-2019 perkembangan AHH Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2015 AHH penduduk Kabupaten Gresik 72,30 Tahun dan sampai dengan Tahun 2019 naik sebesar 0,31 Tahun, sehingga Angka Harapan Hidup penduduk menjadi 72,61 Tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Madiun mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 terdapat 17,7% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan gizi

kurang sebesar 13,8%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Gresik tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,46% dan terus turun sebesar 0,03% pada tahun 2019, begitu pula dari jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Gresik pada tahun 2019.

Tabel 2.21
AHH, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Gresik Tahun 2010 -2019

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik
2015	72,30	137	1,20%
2016	72,33	126	0,98%
2017	72,36	115	0,61%
2018	72,46	130	0,15%
2019	72,61	110	0,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik baik pada urusan wajib (wajib dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang. Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

Urusan wajib dasar yaitu dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pilihan meliputi bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan penunjang meliputi bidang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perencanaan, keuangan, inspektorat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2019 mencapai 94,92% menurun dibandingkan Pada tahun 2018 mencapai 98,98%. Dari jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun sebanyak 122.483 jiwa, tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 116.268 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2019 mencapai 84,76% menurun dibandingkan tahun 2018 mencapai 85,17%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 54.987 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 46.611 siswa.



Sumber : apkpm.data.kemdikbud.go.id

Gambar 2.13 Angka Parisipasi Murni Pendidikan Kab. Gresik 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan

dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten dijenjang SMP dan SMA. APK SMP pada tahun 2019 mencapai 62.73% sedangkan untuk SMA sebesar 75,93%. Adapun APK Paud dan SD cenderung mengalami penurunan. APK Paud Kabupaten Gresik Tahun 2019 mencapai 68.52% mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0.24 basis poin sedangkan APK SD mencapai 62.73% pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar 1.75 basis poin dari tahun sebelumnya.

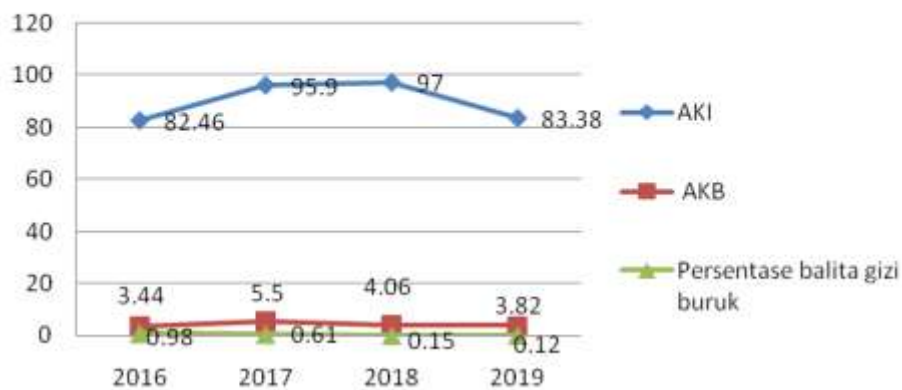


Gambar 2.14Angka Parisipasi Kasar Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2011 s.d 2019

2.1.3.1.2 Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2019 mencapai 82%, Hal ini dibuktikan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 83/100.000 Kelahiran Hidup. Jumlah absolute kematian Ibu pada tahun 2019 sebanyak 17 kematian ibu dari 20.388 jumlah kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 20 kematian ibu dari 20.695 jumlah kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB)pada tahun 2019 mencapai 96%, Realisasi kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 3,82/1.000 Kelahiran Hidup. Realisasi tersebut lebih rendah dari tahun 2018 yaitu 4,06/1.000 Kelahiran Hidup. Adapun realisasi yang lebih rendah tersebut menunjukkan bahwa kematian bayi mengalami penurunan dari tahun lalu, dari 84 kematian bayi menurun menjadi 78 kematian bayi.Adapun Trend AKI dan AKB Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana grafik berikut:



Gambar 2.15

Trend Realisasi AKI, AKB dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2016-2019

Persentase Desa Siaga aktif purnama mandiri pada tahun 2019 sebesar 108% yang berarti dalam skala nilai peringkat kinerja yaitu Sangat Tinggi. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 153 Desa, lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 147 Desa. Capaian berhasil dan realisasi dapat melampaui target yang telah ditentukan. Kerja keras ini merupakan bentuk kerjasama secara baik dari kader, petugas dan masyarakat desa dalam mendukung desa siaga aktif. Peningkatan Desa Purnama Mandiri di Kabupaten Gresik harus tetap dipertahankan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi tersebut yaitu melalui Pengaktifan desa yang belum aktif dan penguatan petugas kesehatan, kader, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan pedoman dalam strata desa siaga aktif, dengan menekankan pada : Forum Desa, kegiatan SMD dan dukungan lintas sektor melalui dana desa siaga aktif.

Persentase Desa/ Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 12,07%, sedangkan target yang ditetapkan ditahun 2018 ini sebesar 10%, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 121. Pada tahun 2019 dari 356 Desa di Kabupaten Gresik, terdapat 43 Desa/ Kelurahan STBM, tahun ini mengalami peningkatan 14 Desa yang ber STBM dari tahun lalu yang hanya 29 Desa. Keberhasilan ini didapatkan karena adanya dukungan SK Bupati No. 910/205/HK/407.12/2015 tentang Tim Percepatan Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Mandiri di Kabupaten Gresik serta dukungan lintas sectoral dan lintas program terkait.

Persentase KLB (Kejadian Luar Biasa) skala kabupaten yang ditanggulangi <24 jam. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 116%, Realisasi yang dihasilkan di tahun 2019 melebihi dari target yang telah direncanakan. Kejadian KLB di Kabupaten Gresik mengalami penurunan. Tahun 2018 terdapat 42 KLB, sedangkan tahun 2019 terdapat 36 KLB.

Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif. Persentase capaian yang sebesar 127%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil realisasi pada tahun 2019 sebesar 89%. Dari 356 desa yang ada di Kabupaten Gresik, 318 Desa diantaranya merupakan desa/ kelurahan yang sudah memiliki posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) aktif. Naik sebanyak 51 Desa dari tahun 2018, keberhasilan yang dicapai diawali dengan adanya komitmen yang kuat dari penanggung jawab program PTM yang ada di puskesmas dan didukung oleh Dinas Kesehatan khususnya bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit). Komitmen tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan SMD (Survey Mawas Diri) di desa wilayah puskesmas, yang selanjutnya dibawa ke MMD (Musyawarah Mufakat Desa). Pada forum MMD tersebut semua berperan aktif dalam membangun kerjasama untuk mendirikan suatu wadah *skrining* mandiri masyarakat yang disebut Posbindu PTM. Hasil dari MMD mendapatkan kesepakatan untuk pembentukan SK Kader Posbindu PTM sehingga ada tanggung jawab dan komitmen dari semua pihak untuk bersinergi dalam eksistensi Posbindu PTM di Desa/Kelurahan. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan yang meningkat juga turut andil dalam pembentukan Posbindu PTM. Didukung kebijakan stimulan dari Bidang P2P Dinas Kesehatan, untuk memfasilitasi pengadaan sarana prasarana, Posbindu PTM berupa Posbindu Kit bagi desa yang memiliki Posbindu PTM.

Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB diperoleh capaian sebesar 106%. Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap yaitu sebanyak 2.171 orang. Sedangkan untuk Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan sebesar 2.293 orang sehingga bisa diperoleh realisasi pada tahun 2019 sebesar 94,72%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus harus dipertahankan dengan cara menjalin jejaring antar layanan TB,

Melakukan validasi data setiap 3 bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemegang program TB.

Case Fatality Rate (CFR) DBD yang meninggal tahun 2019 sebanyak 2 orang dari jumlah semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sebanyak 441 orang. Penderita DBD naik dari tahun 2018 yang sebanyak 205 orang, Pencapaian ini dikatakan Sedang karena semakin naiknya jumlah baik dari penderita yang meninggal diakibatkan oleh DBD maupun jumlah kasus DBD.

Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi mendapatkan capaian sebesar 48% pada tahun 2019, Capaian tersebut berasal dari perbandingan antara realisasi yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 30,4% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 63%. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2019 berasal dari jumlah FKTP yang terakreditasi sebanyak 34 dari 112 FKTP yang ada di Kabupaten Gresik. Realisasi dan capaian diatas yang menghasilkan kinerja Sedang, terkendala pada FKTP Klinik yang terakreditasi masih belum ada. Hal ini dikarenakan akreditasi yang awalnya menjadi salah satu syarat untuk FKTP dapat melakukan *credencialing* dengan BPJS di Tahun 2019 mundur menjadi tahun 2021, sehingga klinik yang termasuk dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama masih ada yang belum melakukan akreditasi di tahun 2019.

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Capaian pada indikator ini sebesar 100% pada 2019, Capaian tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2018. Capaian target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100% dalam artian seluruh Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Gresik harus terakreditasi. Dalam kenyataannya, 19 Rumah Sakit yang di kabupaten Gresik telah terakreditasi. Pada 2018, salah satu Rumah Sakit yang belum terakreditasi yaitu RSUD Umar Mas'ud Bawean. Rumah Sakit ini belum terkareditasi di tahun 2018 karena Rumah Sakit baru mulai beroperasi pada bulan Oktober 2017. Sesuai Permenkes Nomor 12 tahun 2012 Pasal 3 ayat (7), setiap rumah sakit baru yang telah memperoleh izin operasional dan beroperasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi. Oleh karena itu, pada tahun 2019 RSUD Umar Mas'ud telah terakreditasi karena pada tahun

2019 telah mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit.

Persentase FKTP dengan nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) minimal 80%. Indikator ini dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diperoleh masyarakat selama ini. Target tahun 2019 sebesar 75%, realisasi yang dihasilkan pada indikator ini juga 90,6%, yakni ada 29 puskesmas yang nilai survey kepuasan masyarakatnya melebihi 80%.

Baiknya kualitas pelayanan kesehatan didukung dengan tenaga kesehatan yang berkompeten serta mempertimbangkan rasio tenaga kesehatan/100.000 Penduduk. Pencapaian kinerja, kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan (Indikator Rasio Tenaga Kesehatan) Tahun 2019 meliputi indikator Rasio tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Anak, Dokter Umum, Bidan, Perawat, apoteker tiap 100.000 Penduduk) untuk menunjukkan kuantitas SDM Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan) dan indikator Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin serta tenaga kefarmasian yang memiliki izin

Rasio Dokter spesialis obgyn/ kandungan sebesar 131% berdasarkan realisasi sebesar 2,62 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 2-3 dokter spesialis Obgyn yang menangani. Capaian **Rasio dokter anak** sebesar 120% berdasarkan realisasi sebesar 2,39 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 2 dokter spesialis Anak yang menangani. Capaian **Rasio dokter umum** sebesar 104% berdasarkan realisasi sebesar 74,03 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 74 dokter umum yang menangani. **Rasio Bidan** sebesar 94% berdasarkan realisasi sebesar 83,35 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 83 Bidan yang menangani. Capaian **Rasio perawat** sebesar 139% berdasarkan realisasi sebesar 164,3 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 164 perawat yang menangani. Terakhir yakni Capaian **Rasio apoteker** sebesar 116% berdasarkan realisasi sebesar 26,6 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 26 apoteker yang menangani. **Persentase tenaga kesehatan** yang memiliki izin memperoleh pencapaian sebesar 100%, yang berarti skala nilai kinerja Sangat

Tinggi. Semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik diwajibkan untuk melakukan registrasi dan surat izin tenaga kesehatan, sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 100%. Sedangkan untuk **Persentase sarana kefarmasian** yang berizin juga mempunyai capaian sebesar 100% sehingga skala penilaian kinerjanya juga Sangat Tinggi. **Sarana kefarmasian** yang berizin mempunyai realisasi tahun 2019 sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang telah ditentukan juga sebesar 100%. Keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara organisasi profesi apoteker dan tenaga pengelola kefarmasian yang merekomendasikan izin tempat praktik apoteker. Selain itu apoteker juga tidak boleh beroperasi sebelum ada SIAK (Surat Izin Apoteker).

Tabel 2.22
Perkembangan SPM Ketenagakerjaan

No.	Jenis SPM	Target 2020	Target 2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 dan 7)	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100%

2.1.3.1.3 pekerjaan umum dan penataan ruang

Tabel 2.23
Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	81,81%	73,62%	72,41%	70,41%
2	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	61,57%	58,36%	62,67%
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	95%	100%	95%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2019

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 370,85 km dalam kondisi mantap atau 72,41%. **Persentase Akses Air Bersih/Minum** dijelaskan bahwa dari 394.657 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM 230.305 RT atau 58.36%. **Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW** dengan RTRW pada tahun 2019 tercatat Jumlah pemanfaatan ruang sesuai dgn rencana tata ruang 295 dari jumlah pemanfaatan ruang 295 atau 100%.

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sepanjang 512,17 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 280,35 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 218,73 km; kondisi sedang 152,11 km; kondisi sedang/rusak sepanjang 102,2 km; dan rusak berat sepanjang 39,12 km. Dengan demikian jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 326.29 km sedangkan sisanya adalah tidak mantap.

Tabel 2.24
Rekapitulasi Kondisi Jalan

No	Jenis Permukaan	Panjang (km)
1	ASPAL	280,35
2	BETON	45,36
3	PAVING	180,21
4	TANAH	0,45
5	TELFORD/KERIKIL	5,8
	JUMLAH	512,17

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang

Berdasarkan hasil proyeksi Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Gresik Tahun 2015 hingga Tahun 2035, beberapa ruas jalan utama akan mempunyai level of service (LOS) kritis antara lain Jl. Dr. Wahidin sebesar 1,08 (F), Jl. Jaksa Agung sebesar 0,86 (E), Jl. Raya Maduran sebesar 0,85 (E), dan Jl Raya Manyar sebesar 0,86 (E). Sebagian besar ruas jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat menuju kawasan industri-pergudangan di Kabupaten Gresik. Belum adanya Jembatan Timbang pada wilayah Gresik Selatan, dengan adanya rencana peningkatan kelas jalan Legundi - Bunder menjadi kelas strategis nasional, maka akan terjadi peningkatan volume lalu lintas khususnya oleh kendaraan angkutan barang yang berdampak pada kondisi fisik jalan kedepannya.

Pembangunan Jalan tol Surabaya – Gresik – Lamongan sesuai yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030 mengalami perubahan trase, yang awalnya melintas di Perkotaan Lamongan berubah menjadi melintas di Kawasan Pesisir Utara Gresik. Sebagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Gresik menjadi salah satu Kabupaten prioritas percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibangunnya jalan bebas hambatan (jalan tol) Krian Legundi Bunder Manyar (KLBM) yang progress pembangunan fisiknya mencapai 82,49%. Pembangunan jalan bebas hambatan KLBM menjadi salah satu solusi infrastruktur guna peningkatan investasi terutama pada sektor industri, hal ini juga ditunjang dengan rencana pengembangan jaringan rel kereta api barang di Kawasan Pantai Timur Kabupaten Gresik sebagai rencana besar keterpaduan antar moda.

Panjang Jaringan Irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 147.356m dari panjang tersebut sebesar 51.554,19m atau sebesar 34,23% berada dalam kondisi baik. Jumlah ini meningkat daripada tahun 2018 yang panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 43.744,69m atau sebesar 29,69%. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik ini meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya. Peningkatan irigasi kondis baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk

meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur.

Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, potensi pemanfaatan Sungai Bengawan Solo sebagai sumber air baku menjadi kurang optimal, sedangkan kebutuhan air baku di Kabupaten Gresik masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Berdasarkan profil PDAM, sumber baku yang digunakan oleh PDAM berasal dari:

1. Kali Surabaya;
2. IPA Krikilan;
3. IPA Legundi;
4. IPA Perumnas;
5. Sumur Dalam Suci;
6. Sumur Dalam Randuagung;
7. Sumur GKB III;
8. Air Curah Segoromadu;
9. Air Curah Gadung;
10. Air Curah PT. Dewata;
11. Air Curah PT. Drupadi;
12. Bendung Gerak Sembayat (BGS);
13. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan; dan
14. SPAM Mojokerto-Lamongan-Gresik (Mojolagres).

Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih dibandingkan daerah hulu sungai. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik merupakan terdapatnya alih fungsi waduk/embung/bozem menjadi kegiatan non irigasi. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah karena fungsi waduk/embung/bozem yang seharusnya menjadi hak sumber air secara umum, namun karena dibudidayakan menjadikan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air disekitarnya.

Persentase panjang saluran drainase dan saluran pembuang dalam kondisi mantap diuraikan sebagai berikut: Air yang

dibutuhkan oleh tanaman biasanya akan dialirkan melalui saluran pembawa. Sedangkan kelebihan air yang ada pada suatu petak akan dibuang melewati saluran pembuang. Saluran pembawa dan pembuang ini merupakan saluran irigasi yang paling utama. Dalam saluran pembuang dengan masing-masing wilayah untuk wilayah selatan sekitar 322.551,42m; wilayah utara sekitar 250.240,14m dan wilayah bawean sekitar 90.000,00m dengan total keseluruhan saluran pembuang kota Gresik sekitar 662.791,56m.

Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM diuraikan sebagai berikut: Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebanyak 366.554 rumah tangga, dari jumlah ini jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 230.305 rumah tangga atau sebesar 58,36%. Kondisi ini menurun sebesar 3,2% dari tahun sebelumnya yaitu 61,57%. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Hal ini mengindikasikan belum tercapainya target capaian 100% air bersih.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: Terjadi deviasi/ simpangan antara rencana tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Gresik dengan kondisi eksisting saat ini. Beberapa deviasi yang terjadi antara lain:

1. Struktur hierarkhi kota yang meliputi perkotaan sedang dan perkotaan kecil kurang sesuai. IKK Cerme dan IKK Bungah jumlah penduduknya dibawah 100.000 Jiwa seharusnya masuk pada IKK Perkotaan Kecil, namun dalam RTRW termasuk dalam IKK Perkotaan Sedang;
2. Terjadinya deviasi rencana kawasan pertanian antara RTRW dengan LP2B. Dalam RTRW total luas kawasan pertanian adalah 35.959,56 Ha sedangkan dalam LP2B luas kawasan pertanian adalah 24.716 Ha dan luas cadangan sebesar 3.005 Ha;
3. Belum terlaksananya pemindahan terminal kelas B yaitu Terminal Bunder dari Kecamatan kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan; dan

4. Direncanakan 208 titik zona tower bersama namun pada kondisi eksisting sudah terdapat 320 titik zona tower bersama. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030 mengalami beberapa arahan pengembangan, antara lain:
 - a. Peningkatan konektivitas antarwilayah dengan pengembangan infrastruktur serta sarana transportasi yang layak dan memadai;
 - b. Pengembangan kawasan perkotaan dari kawasan industri menjadi kegiatan perdagangan dan jasa pada Kec. Gresik dan Kebomas;
 - c. Optimalisasi kawasan pesisir dalam mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan;
 - d. Mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengacu Perda Kab. Gresik No. Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. Pengembangan kawasan perikanan, baik tangkap dan budidaya yang diarahkan pada Kec. Sidayu, Ujungpangkah, Bungah, Manyar, Duduksampeyan, dan Cerme;
 - f. Penetapan sebagian wilayah di Pulau Bawean sebagai kawasan lindung (kawasan resapan air dan kawasan konservasi) dan kawasan strategis kabupaten (sebagai kawasan pariwisata);
 - g. Pengembangan kawasan industri diarahkan ke Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar. Sedangkan peruntukan industri diarahkan pada Kec. Panceng, Sidayu, Bungah, Duduksampeyan, Cerme, Wringinanom, Driyorejo, dan Menganti;
 - h. Kawasan pertambangan mineral bukan logam diarahkan pada Kec. Panceng; dan
 - i. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial di Kecamatan Ujung Pangkah.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.25
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	19.93 ha dari target 10 ha	88,6 ha (62,42 ha) dari target 15 ha	102,79 ha (14,19 ha)
2	Persentase Rumah Layak Huni	86,95%	89.34%	90,55%

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2020

Penurunan **Luas kawasan kumuh** pada Tahun 2019 seluas 14,19 Ha atau sebesar 100%. Selama tahun 2017-2019 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 102,79 Ha atau >100%. Sedangkan **Persentase Rumah Layak Huni** sebesar 90,55% dari Jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 257.451 Unit dibandingkan dengan Jumlah Rumah di Kabupaten Gresik sebanyak 284.316 Unit.

2.1.3.1.5 ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Tabel 2.26
Indikator Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	-	49%	78,43%	10-20%
2	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam hal Pelanggaran Perda yang terjadi pada Tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat 881 Pelanggaran dan yang tertangani sebesar 691 pelanggaran atau naik 29,43% dari Tahun 2018.

Persentase penyelesaian pelanggaranPerda pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresikmenargetkan kinerja sebesar 100%, kemudian pada pelaksanaannya mampumencapai realisasi kinerja sebesar 99%, hal ini terjadi karena Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan

pelanggaran Perdas sebanyak 1120 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 1129 laporan.

Pada tahun 2019 dilakukan **pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintahan** sebanyak 97 Kegiatan. Terjadi gangguan tibusan trans seperti unjuk rasa dan kegiatan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat, setiap gangguan maupun kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sepenuhnya dan tercipta kondisi yang tertib dan kondusif.

Sejak tahun 2017 Perlindungan Masyarakat (Linmas) bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah Linmas di tiap Kecamatan Kabupaten Gresik. Pada tahun 2019 ditargetkan kinerja 1 Rasio Linmas 1 per RT, Kabupaten Gresik memiliki 6,259 RT. Namun, belum semua Linmas ditingkat RT aktif, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan Linmas yang aktif. Kriteria aktif disini adalah Linmas yang memiliki jadwal piket dan memiliki laporan dalam kegiatannya. Selama tahun 2019 telah terdata sebanyak 7.630 Linmas yang aktif.

Persentase Penanganan Bencana pada tahun 2019 mencapai 100% melalui penanganan 255 Kejadian Bencana. Sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, sebagai panduan untuk mengembangkan desa tangguh bencana berbasis masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana, dengan terbentuknya desa tangguh masyarakat di daerahnya, dalam arti masyarakat akan tangguh tangguh terhadap bencana sehingga korban bencana yang berupa material maupun jiwa dapat diminimalisir. Pada hakekatnya, desa tangguh sangat diperlukan di daerah rawan bencana sebagai upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Gresik. Dari target 76 Desa Tangguh Bencana, capaian sampai dengan Tahun 2018 adalah 57 (75 %) desa tangguh bencana. Pada Tahun 2019 ditargetkan 64 Desa Tangguh Bencana (85 %) dengan realisasi 64 (100 %). Kenaikan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah Daerah yang menghendaki desa tangguh bencana di Kab. Gresik lebih cepat tercapai targetnya.

2.1.3.1.6 Sosial

Tabel 2.27
Indikator Urusan Sosial

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,98%	6,22%	7,4%	5,1-5,6%

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2019

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas pada Tahun 2019 mencapai 7,4% melalui penanganan PMKS sebanyak 10.018orang dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Penanganan PMKS meningkat dibandingkan Tahun 2018 sebesar 6,22% melalui penanganan PMKS sebanyak 8.410orang,

Rehabilitasi terhadap jumlah PMKS tahun 2019 sebesar 0,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,31%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan capaian kinerja 105% dengan predikat sangat tinggi. Capaian tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan karena terdapat 440 PMKS dalam satu tahun yang direhabilitasi berasal dari hasil razia yang dilakukan rutin oleh Petugas Dinas Sosial serta laporan dari masyarakat. PMKS tersebut meliputi Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, ODGJ dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap (T4), Lansia Terlantar dan Penjaga warung remang-remang. Sedangkan persentase pelatihan terhadap jumlah PMKS sebesar 1,78% dari target 1,28%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2018, capaian tersebut mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dikarenakan, selain direhabilitasi, PMKS juga mendapatkan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak kembali menjadi PMKS lagi. Tidak hanya PMKS hasil razia saja yang mendapatkan pelatihan, namun anak yang bermasalah juga mendapatkan pelatihan seperti pengiriman ke UPT PSPA (Pelayanan Sosial Petirahan Anak) Batu untuk melatih kemandirian anak tersebut. Ada pula pengiriman Anak Putus Sekolah ke UPT PSBR (Pelayanan Sosial untuk Remaja Bermasalah dan Putus Sekolah)

Bojonegoro. Pelatihan di UPT PSBR Bojonegoro bertujuan untuk melatih kemandirian anak dan melatih keterampilan anak sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Keterampilan tersebut seperti menjahit, membordir, mesin dan otomotif. Tercapainya target tersebut dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait yang menangani masalah sosial serta diperlukannya peran masyarakat yang aktif untuk melaporkan PMKS yang ada didaerahnya. Namun, jumlah PMKS masih banyak disebabkan oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih membutuhkan penanganan yang lebih baik.

Persentase Perlindungan Dan Jaminan Terhadap Fakir Miskin sebesar 17,1 % dari target 6 % yang telah ditentukan pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan target tersebut ditetapkan capaian kinerja 284,94 % dengan predikat sangat tinggi. Capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan.

2.1.3.2 UrusanWajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2020 terdiri dari 7 Program dan 26 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 9,573,187,705.00. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2019 dengan sasaran “Menurunnya Tingkat Pengangguran” serta Target indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.28
Indikator Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Sasaran	Realisasi		Target 2020
		2018	2019	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,82	5,54	5,05-4,75

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2019 mencapai 5.54% dengan jumlah penganggur sebanyak 36.390 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 657.273 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 turun 0.28% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,82%.

Tabel 2.29
Perkembangan SPM Ketenagakerjaan

No	Indikator	Target 2020	Target 2021
1	Besaran tenaga kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	75%
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	60%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	60%
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	70%
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%	50%
6	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta	50%	50%
7	Besaran Pemeriksaan perusahaan	45%	45%
8	Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	50%	50%

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tabel 2.30
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	90,44%	100%	100%	100%
2	Nilai Kabupaten Layak Anak	640	754,2	828	850-925

Sumber: Dinas KBPPPA Kab.Gresik Tahun 2019

Penyelesaian **penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak** selama tahun 2019terdapat135 korban kekerasan perempuan

Tabel 2.31
Perkembangan SPM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Target 2020	Target 2021
1	cakupan perempuan dananak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%

No	Indikator	Target 2020	Target 2021
2	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%
3	cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	75%
4	cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	75%
5	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	80%
6	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	50%
7	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	50%
8	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%

2.1.3.2.3 Pangan;

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan utama dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian, upaya-upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama di daerah menjadi sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Penyelenggaraan urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2020 dilakukan oleh Bidang Pangan yang terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 452.815.000,-. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2019 dengan sasaran “Mencapai Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Pelaku

Pertanian” serta Target indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.32
Indikator Urusan Pangan

No	Indikator Sasaran	Realisasi		Target 2020
		2018	2019	
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	180.41 kg/kpt/thn	187.55 kg/kpt/thn	194 kg/kpt/thn

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Rasio keterserdiaan pangan utama pada tahun 2018 mencapai 180.41 kg/kpt/thn dan mengalami peningkatan sebesar 7.14% Pada tahun 2019. Jumlah produksi tanaman panganKabupaten Gresik dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2016 s/d 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	Target 2020
Padi	422,343	433,410	428,755.50	433,213.3	433,503
Jagung	111,684	136,599	158,136.60	130,120.3	130,207
Kedelai	1,195	927	279.9	81.8	81.8
Kacang Tanah	2,161	2,151	1,582	1,311	1,311
Kacang Hijau	4,329	3,432	1,854.50	9,378	9,384
Ubi Kayu	11,287	3,547	8,775	224	224
Ubi Jalar	2,035	7,152	178.5	519	519
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	556,875.47	594,410.00	599,561.94	574,847.40	575,233

Sumber Data: LKPJ Kabupaten Gresik Tahun 2019

Jumlah produksi tanaman pangan per ton dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan, dan terjadi penurunan produksi pada tahun 2019 sebesar 574,847.40. Menurunnya jumlah produksi tanaman pangan, yang diiringi dengan meningkatnya rasio ketersediaan pangan utama menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang rendah. Rata-rata ketersediaan pangan yang diambil dari komponen jumlah produksi tanaman pangan per ton dari tahun 2016 sampai dengan 2019 per tahun sebesar 581.423,70 Ton. Sehingga, Rasio ketersediaan pangan utama dari total produksi tanaman pangan dengan jumlah

penduduk sebanyak 1.298.184 jiwa mencapai 187,55 Kg/Kpt/Thn pada Tahun 2019.

2.1.3.2.4 **Pertanahan**

Tabel 2.34
Indikator Urusan Pertanahan

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat (bidang)	-	34	99
2	Persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan (dibanding luas rencana tanah yang dibebaskan)	-	2	4

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2019

Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat pada tahun 2019 mencapai rasio sebesar 44% dari target 225 bidang di tahun tersebut. Hal ini disebabkan kebutuhan personil yang kurang memadai di Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik. Untuk rasio capaian persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan sebesar 67% pada tahun 2019 dari target 6 lokasi karena belum selesainya pembebasan lahan untuk irigasi di Sukodono dan pelepasan hak atas lahan di kelurahan Pekelingan akibat pemilik meninggal dunia.

2.1.3.2.5 **Lingkungan Hidup**

Tabel 2.35
Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	2017	2018	2019	TARGET 2020
1	Indeks Kualitas Air Sungai	53,64	60,90	63,33	68-72,5
2	Indeks Kualitas Udara	70	57,35	86,16	90-93,5
3	Indeks Tutupan Lahan	-	9,75%	9,75%	18,19%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2019

Capaian terhadap Uji **Kualitas Air Sungai** dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform pada Tahun 2019 mencapai 63,33 meningkat 2,43 basis point dibandingkan Tahun 2018 senilai 60,90 sedangkan Uji **Kualitas Udara** dengan rerata SO₂ dan NO₂ mencapai 86,16 atau naik 28,81 dari tahun 2018 senilai 57,35. Adapun Indeks **Tutupan Lahan** mencapai 9,57% dengan luas tutupan lahan hutan meliputi Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5.828,62 hektar, Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3.831,60 hektar, Kawasan Cagar Alam 725,00 hektar, Kawasan Hutan Produksi 1.017,00 hektar.

Luas Area Bersih Sampah. Pada Tahun 2019, terlihat Luas area bersih sampah sebesar 56,59% atau lebih tinggi pada tahun 2018 sebesar 53,55%. Realisasi antara volume sampah terkelola dan luas area bersih sampah yang tidak jauh berbeda menunjukkan bahwa sampah yang terdapat di area terlayani telah dikelola seluruhnya.. Dari Tahun 2018 ada kenaikan luas area bersih sampah sebesar + 36 km2.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.36

Indikator Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	72,50	79,80	80,79	82-86

Sumber : DispendukcapilKabupaten Gresik Tahun 2019

Nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh layanan administrasi kependudukan pada Tahun 2019 mencapai 80,79 meningkat 1,24 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar 79,80, yang berarti nilai survey kepuasan masyarakat di tingkat Kabupaten mendapat interpretasi sangat baik.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun 2020 melalui 8 program dan 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 9,665,333,500.00 Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2019 dengan sasaran “Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan untuk Mencapai Kemandirian Desa” serta Target indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.37
Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Sasaran	Realisasi		Target
		2018	2019	2020
1	Indeks Desa Membangun	0.635	0.707 2	0.700

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi Desa. Pada skala nasional, rerata IDM mencapai 0,566 pada 73.709 Desa. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, Indeks Desa Membangun Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 mencapai 0.7072 meningkat 0.0752 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0.632. Sehingga, Rerata IDM Kabupaten Gresik masuk dalam klasifikasi Desa Maju (>0,707 dan < 0,815).

Tabel 2.38
Perkembangan SPM Desa

No	Indikator	Target 2020	Target 2021
1	Tersedianya data dan informasi administrasi kependudukan	75%	75%
2	Tersedianya data dan informasi pertanahan yang akurat	75%	75%
3	Pemahaman masyarakat terhadap proses suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan	75%	75%
4	Tingkat penyelesaian pemberian surat keterangan	75%	75%
5	Penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjasi kewenangan Kabupaten/Kota Kepada Desa	75%	75%
6	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan	75%	75%

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.39
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0,24	1,13	1,07	0,6-1,4
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,79	63,35	65,33	63,5-6,4

Sumber: Dinas KBPPPA Kab.Gresik Tahun 2019& BPS (Gresikdalam angka 2020)

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebesar 1,07%dengan pertambahan penduduk sebanyak 13.112 Jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 1.299.769 meningkat pada Tahun 2019 mencapai 1.312.881 Jiwa. Sedangkan **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**Kabupaten Gresik Tahun 2019 mencapai 65,33 meningkat 1,98 basis point dibandingkan Tahun 2018 sebesar 63,35.Sementara prosentase prevalensi peserta KB aktif diKabupaten Gresik mengalami penurunan dari tahun 2018, yang semulatingkat capaian 79,23% menjadi 73,86% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi peserta KB Aktif di KabupatenGresik tidak melampaui target.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Tabel 2.40
Indikator Urusan Perhubungan

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0.11%	0,13%	0,12%	0,12%

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Kecelakaan Angkutan Umum Pada Tahun 2019 mencapai 0.12%, dihitung dari jumlah kecelakaan yang melibatkan Angkutan umum sebanyak 32 kejadian dibandingkan jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 25.951 unit. Indikator tersebut didukung dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.41
Indikator Urusan Perhubungan

No	Indikator	Tahun 2019
1	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi	100%
2	Persentase Angkutan Umum sesuai SPM	70,02%

No	Indikator	Tahun 2019
3	Persentase Angkutan Penyeberangan diatas Air yang Laik Layar	37,29%
4	Penurunan Titik Rawan Kecelakaan	71,43%

Sumber : Dinas Perhubungan

Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai merupakan salah satu Sasaran Dinas Perhubungan yang diemban/ dilaksanakan oleh Bidang Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Adapun Ketersediaan Jumlah dari Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42

Ketersediaan Jumlah dari Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO	Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Yang Tersedia Tahun 2019	Jumlah Yang Berfungsi Optimal Tahun 2019	Presentase Pemenuhan (Capaian)
1	Halte Angkutan	4 Unit	4 Unit	100%
2	Pos Pantau	4 Unit	4 Unit	100%
3	Terminal Angkutan Umum	-	-	-
4	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
5	Tambangan Penyeberangan di atas Air	-	-	-
6	Teminal Parkir Elektronik	1 Lokasi	1 Lokasi	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Gresik

Dalam rangka mencapai Target Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang memadai, Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Data Prasarana dan Fasilitas Angkutan Jalan yang sudah rusak/ tidak Optimal dan mengalami penurunan fungsi yang telah di direhabilitasi/ dipelihara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.43

Prasarana dan Fasilitas Angkutan Jalan

NO	PRASARANA DAN FASILITAS ANGKUTAN JALAN	JUMLAH YANG RUSAK TAHUN 2019	JUMLAH DIPELIHARA TAHUN 2019	PRESENTASE PEMENUHAN

NO	PRASARANA DAN FASILITAS ANGKUTAN JALAN	JUMLAH YANG RUSAK TAHUN 2019	JUMLAH DIPELIHARA TAHUN 2019	PRESENTASE PEMENUHAN
1	Halte Angkutan Umum	4 Unit	4 Unit	100%
2	Pos Pantau	1 Unit	1 Unit	100%
3	Terminal Angkutan	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
4	Rambu Lalu Lintas	122 Unit	122 Unit	100%
5	Rambu RPPJ	15 Unit	15 Unit	100%
6	Traffic Light	10 Unit	10 Unit	100%
7	Flashing Amber	15 Unit	15 Unit	100%
8	Marka Jalan	691m	691m	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Gresik

Capaian kinerja Persentase Angkutan Umum sesuai SPM Tahun 2019 sebesar 100%. Dari target awal Tahun 2019 sebesar 61,47% dan Realisasi Tahun 2019 sebesar 61,47%. Data Angkutan Umum di Kabupaten Gresik yang telah memenuhi/sesuai dengan SPM layanan Angkutan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44

Layanan Angkutan Umum

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Jumlah angkutan Umum	1441	1441
2	Jumlah angkutan Umum sesuai SPM	578	1009
	Presentase	50,66%	61,47%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Gresik

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar, pada tahun 2019 tercapai 100%. Dari Target 31,28% atau 22 unit, terealisasi 31,28% atau 22 unit, jumlah Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45

Angkutan Penyeberangan diatas Air

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Jumlah Angkutan Penyeberangan diatas air	59	59
2	Jumlah Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar	20	22
	Presentase	30,51%	31,28%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Gresik

Penurunan Titik Rawan Kecelakaan merupakan salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dan difokuskan pada Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian

Operasional. Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Raya Manyar Kec. Manyar;
2. Ruas Jalan Raya Bungah Kec. Bungah;
3. Ruas Jalan Raya Panceng Kec. Panceng;
4. Ruas Jalan Raya Bringkang Kec. Menganti;
5. Ruas Jalan Raya Menganti Kec. Menganti;
6. Ruas Jalan Raya Benjeng Kec. Benjeng;
7. Ruas Jalan Raya Kedamean Kec. Kedamean;
8. Ruas Jalan Raya Wringinanom Kec. Wringinanom;
9. Ruas Jalan Raya Driyorejo Kec. Driyorejo; dan
10. Ruas Jalan Raya Duduksampeyan Kec. Duduksampeyan.

2.1.3.2.10 Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.46
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	2018	Target 2019	Target 2020
1	Indeks e-Government	2.68	3.00-3.10	3.05-3.15

Sumber : Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2019

Penilaian Indeks E-Government mencakup 5 (lima) aspek meliputi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Pada Tahun 2018, nilai indeks e-Gov Kabupaten Gresik mencapai 2,68 dengan interpretasi baik menunjukkan bahwa pengembangan dimensi menunjukkan dampak positif pada pemanfaatan *egovernment*. Namun, diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi *egovernment* pada masa yang akan datang.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melalui 5 program dan 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 4,798,213,000.00. Capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2019 dengan sasaran "Menguatkan Daya Saing, Peningkatan Kinerja, dan Menstimulasi Pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi Yang Inovatif"serta Target indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil,

dan menengah pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.47 Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
No	Indikator Sasaran	Realisasi		Target
		2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,14% (230 Usaha Mikro)	0.15% (250 Usaha Mikro)	0.16% (270 usaha mikro)
2	Pertumbuhan Koperasi Sehat	9,37% (350 Koperas i Sehat)	8.82% (415 Koperasi Sehat)	8.55% (330 Koperas i Sehat)

Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2020

Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2019 mencapai 0.15% mencapai 250 usaha mikro dibandingkan tahun 2018 sebanyak 230 usaha. Sedangkan **Pertumbuhan Koperasi Sehat** di Kabupaten Gresik mencapai 8.82% dengan pertumbuhan Koperasi Sehat sebanyak 415 pada Tahun 2019 dibandingkan dengan 350 Koperasi Sehat pada Tahun 2018dari total 3.165 koperasi secara keseluruhan.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 8 program yang terdiri dari 36 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.022.280.825,00. Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2019 dengan sasaran "Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah" serta Target indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.48 Indikator Sasaran Urusan Penanaman Modal				
No	Indikator Sasaran	Realisasi		Target
		2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	48.34 T	52.93 T	43.45T (85,29%)

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2019 dengan total investasi mencapai 52,93 triliun yang terdiri dari 3.199.731,00 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 98.364,90 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Rincian realisasi investasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.49
Indikator Sasaran Urusan Penanaman Modal

Uraian	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	3,982,980.6	4,449,254.70	3,452,308.20	3,199,731.00
Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	348,001.0	436,663.70	165,375.80	98,364.90
Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	13,952,621.8	9,662,187.80	8,547,595.70	-
Rencana Investasi PMA (US\$ Ribu)	212,764.9	434,873.90	546,605.60	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020

Pertumbuhan realisasi investasi secara kumulatif sampai dengan periode 2019 mencapai 52,93 triliun meningkat 48% dibandingkan kumulatif realisasi investasi pada periode tahun dasar sebesar 23,45 triliun (2011-2015). Perlambatan minat investasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari sektor penanaman modal dalam negeri yang menunjukkan tren penurunan minat investasi. Hal ini berbanding terbalik dengan minat investasi dari sektor penanaman modal asing yang menunjukkan tren positif. Capaian ini membuktikan bahwa kepercayaan investor asing masih berpihak terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik.

Realisasi investasi Kabupaten Gresik tidak hanya dihitung dari realisasi izin prinsip penanaman modal yang dikenal dengan izin usaha. Realisasi investasi memiliki beberapa komponen yang terdiri dari nilai investasi perdagangan, investasi usaha kecil dan investasi masyarakat. Berikut merupakan tabel investasi perdagangan berdasarkan penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tabel 2.50
Investasi Perdagangan Berdasarkan SIUP

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
SIUP Mikro	342	447	331	814
SIUP Kecil	968	1372	1325	1890
SIUP Menengah	290	350	343	557
SIUP Besar	12	55	52	93

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Nilai Investasi	19,766,408	4,879,959.5	24,594,315,01	5,427,277,16

Sumber Data: Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di seluruh skala usaha baik di sektor usaha mikro, kecil, menengah maupun besar cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan ijin terbesar berdasarkan skala usaha terjadi pada skala usaha mikro dengan persentase sebesar 59,34% pada tahun 2018, sedangkan jumlah perizinan perdagangan terbanyak dalam kurun waktu empat tahun terdapat pada perijinan skala usaha kecil yaitu sebanyak 1.890 izin pada tahun 2018.

Adapun peningkatan SIUP terbanyak terjadi antara tahun 2017 dengan tahun 2018 yang mencapai 3.354 izin, meningkat sebesar 38,85 % atau sebanyak 1.303 izin jika dibandingkan dengan jumlah perijinan Tahun 2017 sebanyak 2.051 izin.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemudayang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, danprestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melaluiDinas Kepemudaan danOlah Raga memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuanmeningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.51
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	47%	94,79%	96,37%	98%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik Tahun 2019

Selama tahun 2019, jumlah Pemuda yang dibina mencapai 1.460 orang dengan jumlah **Pemuda Pelopor dan berprestasi** mencapai 1.407 atau 96,37%. Pada Tahun 2018 pembinaan pemuda pelopor dan berprestasi meningkat secara signifikan mencapai 94,79% dengan jumlah pemuda yang dibina sebanyak 576 orang dan berarti ada peningkatan baik pada persentase capaian maupun jumlah pemuda yang dibina.

2.1.3.2.14 Statistik

Tabel 2.52
Indikator Urusan Statistik

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Pertumbuhan kunjungan website	338.557	445.530	548.821	568.029

Sumber : Diskominfo Kab. Gresik Tahun 2019

Selama tahun 2019, jumlah kunjungan website mencapai 548.821 *viewers* dengan target 365.541 *viewers* sehingga capaian sebesar 150%. Pada Tahun 2019 jumlah kunjungan website meningkat secara signifikan mencapai 23,18% dibanding dengan jumlah kunjungan di tahun 2018.

2.1.3.2.15 Persandian

Tabel 2.53
Indikator Urusan Persandian

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki jaringan telekomunikasi yang berkualitas	96,96%	96,96%	92,81%	96,96%

Sumber : Diskominfo Kab. Gresik Tahun 2019

Selama tahun 2019, jumlah persentase desa / kelurahan yang memiliki jaringan telekomunikasi yang berkualitas mencapai 92,81% untuk desa dan 100% untuk kelurahan dengan target pada tahun yang sama sebesar 96,96% untuk desa dan 100% untuk kelurahan. Hal ini berdasarkan, pada tahun 2019, jumlah desa yang memiliki jaringan telekomunikasi yang berkualitas sebesar 297 dibanding targetnya sebesar 310 desa yang memiliki jaringan telekomunikasi.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Tabel 2.54
Indikator Urusan Kebudayaan

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gresik Tahun 2019

Pada tahun 2019 dari 24 **cagar budaya** yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011

tentang Cagar Budaya, hanya ditargetkan 5 Cagar Budaya untuk dilestarikan dengan baik, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%. Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Disparbud kab. Gresik antara lain : mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kab. Lain serta menetapkan Warisan budaya non bendawi tersebut.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Gresik makadidukung oleh 2(dua) indikator program yaitu (1) Prosentase Peningkatan Pemustaka (2)Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan.

Tabel 2.55
Indikator Urusan Perpustakaan

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase peningkatan pemustaka	9,74%	58,08%	64,06 %	64%
2	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik (97,96)	Sangat Baik (100)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Gresik Tahun 2019

Selama tahun 2019, jumlah persentase peningkatan pemustaka mencapai 64,06% dengan targetpada tahun yang sama sebesar 13,24%. Hal ini berdasarkan, pada tahun 2019, jumlah pemustaka sebesar 120.964 dibanding targetnya sebesar 25.000 pemustaka.

2.1.3.2.18 Kearsipan.

Tabel 2.56
Indikator Urusan Kearsipan

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola pengarsipan sesuai ketentuan	3,87%	7,75%	11,62%	13,94%
2	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	Baik	Baik	Baik (75,02)	Baik (84)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Gresik Tahun 2019

Selama tahun 2019, jumlah persentase pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola pengarsipan sesuai ketentuan mencapai 11,62% mencapaitargetpada tahun yang sama sebesar 11,62% (100%). Hal ini berdasarkan, pada tahun 2019, jumlah pencipta arsip yang melaksanakan tata kelola pengarsipan sesuai ketentuan sebesar 48 dibanding targetnya sebesar 413 pencipta arsip.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Gresik. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui 8 Program dan 47 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 6,811,307,990.00. Adapun indikator urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari nilai tukar nelayan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.57
Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Realisasi			Target
		2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Nelayan	121,77	126,9	125,84	112,50

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengikuti NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2020, NTN mengalami penurunan sebesar 3.34 dibanding tahun 2018 yaitu 125,84.

Udang windu, udang *vanname* dan ikan bandeng merupakan komoditas unggulan budidaya ikan di Kabupaten Gresik. Sejak Tahun 2012, Kabupaten Gresik telah dinobatkan sebagai kawasan minapolitan udang dan bandeng. Komoditas ikan tersebut banyak dibudidayakan oleh masyarakat Gresik karena harganya yang cukup stabil di pasaran.

Seiring berjalannya waktu, muncul kasus-kasus kematian ikan/udang yang diakibatkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu yang berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan ikan/udang. Ikan/udang dapat mengalami stress yang dapat mempengaruhi proses berkembang biak. Dampak terburuknya yaitu penurunan kuantitas dan kualitas akibat kematian ikan secara dini. Namun demikian, berbagai upaya preventif telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, diantaranya dengan dilaksanakannya kegiatan pemantauan obat ikan/udang yang setiap tahun diadakan. Kegiatan ini mensosialisasikan kepada masyarakat pembudidaya ikan akan pentingnya uji benih sebelum ditebar. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin keberhasilan dalam usaha pembudidayaan ikan. Disamping itu, para pembudidaya juga diajarkan bagaimana cara menangani ikan dengan baik dan tepat bila berbagai macam penyakit menyerang. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pembudidaya ikan dalam melakukan penanganan kesehatan ikan, serta secara intensif memonitor kesehatan ikan dan udang di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, termasuk pengawasan terhadap pemakaian obat ikan/udang.

Tabel 2.58
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Produksi Perikanan Budidaya	128.571,56	129.214,42	131.195,47
	1.1. Tambak (ton)	53.843,84	54.113,06	62.824,65
	1.2. Kolam (ton)	74.727,72	75.101,36	68.370,82

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

Berdasarkan Tabel diatas produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2019 meningkat sebesar menjadi 131.195,47 ton. Secara terperinci untuk budidaya tambak meningkat menjadi 62.824,65 ton tahun sebelumnya adalah sebesar 54.113,06 ton.Namun, untuk budidaya kolam, mengalami penurunan dimana ditahun sebelumnya adalah sebesar 75.101,36 ton dan di tahun 2019 hanya mencapai 68.370,82 ton.

Lahan budidaya ikan di Kabupaten Gresik secara umum sudah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan pabrik, pergudangan serta pemukiman. Oleh karena itu, langkah strategis

perlu disusun dan direncanakan supaya target tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2016–2021 dapat tercapai dengan baik. Beberapa upaya yang terus dilakukan adalah dengan memberikan introduksi/pengenalan serta pelatihan kepada masyarakat tentang penggunaan sistem pembudidayaan ikan yang baik dan benar, baik yang dilakukan secara intensif maupun semi intensif. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat pembudidaya dalam rangka memfasilitasi program Sertifikasi Hak Atas Tanah pembudidaya ikan yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil dari program tersebut diharapkan dapat membantu pembudidaya ikan mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Di sebagian wilayah Kabupaten Gresik, khususnya wilayah selatan sudah banyak dari pembudidaya ikan yang memelihara ikan lele dalam wadah kolam terpal. Metode ini memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah. Lahan yang awalnya tidak produktif diolah sedemikian rupa menjadi lebih produktif. Banyak masyarakat yang awalnya hanya berprofesi sebagai petani memiliki profesi tambahan sebagai pembudidaya ikan. Hal-hal tersebut diatas yang menjadi salah satu pendorongmeningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya baik di tambak maupun kolam. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) gedung penyuluhan yang diberi nama "Posluhan" Pos Penyuluhan Perikanan. Gedung yang terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu tersebut telah dilengkapi sarana dan prasarana penyuluhan, seperti kolam percontohan, ruang pertemuan dan fasilitas yang lain. Gedung tersebut digunakan sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran tentang teknik budidaya ikan/udang yang baik dan benar serta sarana untuk mencari solusi dari segala permasalahan terkait usaha pembudidayaan ikan/udang.

Tahun 2019 telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi diversifikasi masalah yang dialami setiap tahun oleh pembudidaya ikan. Mulai dari teknik budidaya ikan yang baik dan benar, perbaikan sarana dan prasarana, pemberian bantuan, sampai dengan kemudahan dalam mengakses permodalan. Hal tersebut menjadi pendorong minat para pembudidaya dalam menjalankan dan mengembangkan usaha perikanan budidaya sehingga tren budidaya perikanan baik tambak maupun kolam

mengalami peningkatan. Kepercayaan masyarakat pembudidaya kepada pemerintah juga turut meningkat.

Tabel 2.59
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Perikanan Tangkap	18.608,46	19.228,56	19.500,16	23.458,45	33.403,09
	1.1. Laut (ton)	18.122,28	18.786,01	19.000,51	22.636,98	22.423,47
	1.2. Perairan Umum (ton)	486,18	442,55	499,65	821,47	10.979,62

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

Produksi perikanan tangkap pada Tahun 2018 adalah sebesar 33.403,09 ton. Secara total, nilai ini jauh meningkat dibanding Tahun 2018 yang hanya sebesar 23.458,45 ton. Namun, secara terperinci terdapat sedikit penurunan produksi perikanan tangkap laut, tahun 2018 sebesar 22.636,98 ton menjadi 22.423,47 ton di tahun 2019. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik melalui kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap serta menjamin kelangsungan usaha nelayan dengan kegiatan penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan. Pengenalan alat-alat tangkap ramah lingkungan juga selalu disosialisasikan kepada masyarakat nelayan dalam berbagai kesempatan dengan harapan ketersediaan ikan dapat terus terjaga sehingga nelayan tidak perlu jauh-jauh melaut untuk menangkap ikan.

Produksi perikanan tangkap di perairan umum dapat ditingkatkan, salah satunya melalui program *restocking*. Namun perlu diketahui, bahwa program ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum, yang terpenting bagaimana upaya berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan, misal dengan tidak membuang limbah berbahaya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Upaya tersebut harus selalu dilakukan, didukung dengan selalu memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat akan manfaat menjaga kelestarian lingkungan perairan, sehingga ikan yang hidup di sungai dapat tinggal dan berkembang biak dengan baik.

Pelestarian ekosistem kawasan pesisir di wilayah Kabupaten Gresik menunjukkan kabar yang positif. Hal ini ditandai dengan

perkembangan luas ekosistem kawasan pesisir Kabupaten Gresik yang direhabilitasi pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.60
Perkembangan Luas Ekosistem Kawasan Pesisir
Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019	Target 2020
1	Luas Ekosistem Kawasan Pesisir yang Direhabilitasi (Ha)	127.6	312.2	324,15	336,46

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 2020

Peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 324,15 ha. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2017 dan 2018. Ini terjadi karena banyak pihak yang ikut andil dalam pelestarian ekosistem kawasan pesisir di wilayah Kabupaten Gresik. Sosialisasi telah banyak dilakukan dan akan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Gresik melalui program dan kegiatan di Dinas Perikanan maupun dari instansi lain yang terkait. Karena dengan menjaga kelestarian ekosistem pesisir maka habitat yang hidup didalamnya akan turut lestari. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 yang berkontribusi pada usaha pelestarian wilayah pesisir Kabupaten Gresik diantaranya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan; bimbingan teknis kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas); serta pengembangan kawasan pesisir tangguh.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pada Tahun 2019, Kunjungan Wisatawan mengalami peningkatan sebanyak 4,617,398 orang yang terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 46,915 orang dan wisatawan lokal 4,570,483 orang. Pertumbuhan kunjungan wisata pada Tahun 2019 mencapai 29,39% jika dibandingkan kunjungan wisata pada Tahun Dasar 2017 sebanyak 3,107,278 orang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.61
Indikator Urusan Pariwisata

No	Indikator	Realisasi			Target
		2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	3,107,278	6,0-7,0%	6,5-7,5%	7,0-8,0%

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2020

Keberhasilan pencapaian target kinerja untuk wisatawan mancanegara ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kabupaten Gresik mempunyai objek wisata unggulan yang tidak kalah menarik dengan obyek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten/Kota lain seperti wisata alam, buatan dan objek wisata budaya seperti yang ada di Pulau Bawean. Sehingga menjadi destinasi menarik bagi wisatawan mancanegara.
2. Banyak warga Kabupaten Gresik terutama yang berlokasi di Pulau Bawean menjadi TKI di Negara lain, sehingga informasi tentang obyek wisata yang ada di Gresik lebih cepat menyebar.
3. Tahun 2017, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik sudah mempunyai website sendiri dan social media lain nya serta aplikasi yang memudahkan orang untuk mengakses obyek-obyek wisata di Kabupaten Gresik.
4. Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Gresik juga bertambah, sehingga jumlah kunjungan wisatawannya pun meningkat.

a) Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. **Nilai Tukar Petani**Kabupaten Gresik pada tahun 2019mencapai 108.53 meningkat 1,91 basis point dibandingkan Tahun 2018sebesar 106.62.

Tabel 2.62
Indikator Urusan Pertanian

No	Indikator	Realisasi			Target
		2017	2018	2019	2020
1	Nilai Tukar Petani	104.10	106.62	108.53	109,42

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2020

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, terjadi tren peningkatan jumlah produksi komoditas unggulan pertanian dimana pada tahun 2016 jumlah produksi komoditas unggulan pertanian sebesar 662.205,47 ton menjadi 665.049,90 ton pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 688.343,20 ton pada tahun 2018, sehingga realisasi persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian pada tahun 2018 sebesar 3,50%. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2.63
Produksi Pertanian

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Padi	403.906	422.343	433.410	428.755,50	433.213,3
Jagung	127.218	111.684	136.599	158.136,60	130.120,3
Kedelai	1.326	1.195	927	279,9	81,8
Kacang Tanah	2.925	2.161	2.151	1.582,00	1.311,0
Kacang Hijau	3.026	4.329	3.432	1.854,50	9.378,0
Ubi kayu	10.426	11.287	3.547	8.775,00	224,0
Ubi jalar	938	2.035	7.152	178,5	519,0
Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	549.765	556.875,47	594.410,00	599.561,94	574.847,4

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gresik

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tembakau, tebu, kelapa, cengkeh, kenanga, jambu mete, siwalan, kapuk randu dan aren. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan, terjadi tren peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan, dimana produksi komoditas unggulan perkebunan pada tahun 2016 sebesar 161.134,74 ton

menjadi 162.643,82 ton pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 162.896,15 ton pada tahun 2018, sehingga realisasi persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan pada tahun 2018 sebesar 0,15%. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari: (a) produksi daging sapi potong, domba, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik ; (b) produksi telur ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, itik, entok ; (c) produksi susu sapi perah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, terjadi tren peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, dimana produksi komoditas unggulan peternakan pada tahun 2016 sebesar 11.046.799 kg menjadi 12.625.651 kg pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 17.031.323 kg pada tahun 2018, sehingga realisasi persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan pada tahun 2018 sebesar 34,89 %. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

b) Perdagangan

Capaian indikator kinerja urusan perdagangan pada tahun 2019 dengan sasaran "Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan" serta target indikator sasaran pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.64 Indikator Urusan Perdagangan

No	Indikator	Realisasi (%)			Target (%) 2020
		2017	2018	2019	
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US\$) dalam perentase	15.94	13.9	28.36	40.96

Sumber : Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2020

Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi terus mengalami pertumbuhan dari tahun dasar 2016 sebesar US\$1.317.863.550,00, hingga mencapai US\$1.691.565.305.62 pada tahun 2019 dengan persentase pertumbuhan sebesar 28,36%.

c) Perindustrian

Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2019 dengan sasaran "Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan" sertatarget indikator sasaran pada tahun 2020, dapat diuraikan sebagaimana berikut sebagaimana berikut:

Tabel 2.65
Indikator Urusan Perdagangan

No	Indikator	Realisasi (%)			Target (%)
		2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah	0,77 % (7.141 IMKM)	0,84% (7.207 IMKM)	0.94% (7.275 IMKM)	0.95% (7.336 IMKM)

Sumber : Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2020

Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah terus mengalami kenaikan dari 2017 sampai dengan tahun 2019. Pertumbuhan IMKM pada 2018 sebesar 0,84% dengan jumlah IMKM 7.207, meningkat 66 IMKM dibandingkan Tahun 2017 sejumlah 7.141 IMKM. Pada tahun 2019 peningkatan mencapai 0,94% dengan jumlah 68 IMKM, lebih tinggi 0,1% dibanding peningkatan IMKM tahun 2018.

2.1.3.4 Urusan Penunjang

2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2019 Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 22 program terdiri 102 kegiatan, Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah pada Tahun 2019 denganSasaran “Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah” sebagaimana berikut:

Tabel 2.66
Capaian Sasaran Sekretariat Daerah

No	Indikator Sasaran	Baseline 2018	2019	Target 2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90.16 Baik	81.75	84-88
2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	AA	A	A

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019

Nilai Komposit terhadap Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik adalah 96.75 dengan interpretasi sangat baik meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 90.16 dengan interpretasi baik.

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Pada Tahun 2019 Urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 43 kegiatan. Pengukuran kinerja pada urusan Sekretariat DPRD terintegrasi dengan Urusan Sekretariat Daerah pada sasaran “Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah”.

2.1.3.4.3 Perencanaan

Pada Tahun 2019 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2019 dengan Sasaran “Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah” sebagaimana berikut:

Tabel 2.67
Capaian Sasaran Perencanaan Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target 2020
1	Nilai Pangripta	B	B	A

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai pangripta diperoleh dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah. Nilai pangripta secara substansial merupakan penilaian terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berarti bahwa perencanaan yang dilaksanakan dapat aplikatif sesuai dengan kaidah peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Aspek kualitas dokumen RKPD ini juga dinilai keterkaitan antara dokumen perencanaan lain seperti RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta dokumen lain yang relevan. Selain itu, konsistensi antar bab dalam dokumen serta kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan dalam dokumen juga perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas dokumen RKPD. Berdasarkan penilaian terhadap kualitas, keselarasan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan maka nilai Pangripta Kabupaten Gresik memiliki predikat B dengan interpretasi baik.

2.1.3.4.4 Keuangan

Pada Tahun 2019 Urusan Keuangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh BPPKAD. Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada Tahun 2019 dengansasaran "Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah" sebagaimana berikut:

Tabel 2.68				
Capaian Sasaran Keuangan Tahun 2018 dan 2019				
No	Indikator Sasaran	Baseline 2018	2019	Target 2020
1	Rasio Kemandirian Fiskal	67.14%	67,22%	61%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2019

Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2019 mencapai 67.22% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67.14%. Kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2019.

2.1.3.4.5 Inspektorat

Pada Tahun 2019 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui8 program terdiri 30 kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2019 Sasaran "Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah" dengan indikator:

Tabel 2.69				
Capaian Sasaran Inspektorat Tahun 2018 dan 2019				
No	Indikator Sasaran	Baseline 2018	2019	Target 2020
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2019

Pada Tahun 2019 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 42 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK Tahun 2019 sebanyak 684temuan. Daritemuan tersebut, terdapat 306 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 45aduan dan seluruhnya dapat ditindaklanjuti. Opini BPK Tahun 2018 dan 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.1.3.4.6 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2019 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 55 kegiatan,Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2019 dengan Sasaran "Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat pemerintahan daerah" dengan indikator sebagai berikut

Tabel 2.70
Capaian SasaranKepegawaian Serta Pendidikan dan PelatihanTahun 2018 dan 2019

No	Indikator Sasaran	Baseline 2018	2019	Target 2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	90.57%	66%	81%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 66% dari skor maksimum (100). Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa hal meliputi Hasil Rekapitulasi Absensi Elektronik terhadap 48 Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik per Desember. Dari 110 unit kerja diperoleh data Indeks Kedisiplinan Pegawai sebagai berikut :

- a. Indeks Kedisiplinan Baik (80 – 100) : 109
- b. Indeks Kedisiplinan Cukup (60 – 79) : 1
- c. Indeks Kedisiplinan Kurang (di bawah 60) : 0

Dari total 7.728 Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tercatat 20,74% yang sudah melaporkan secara

mandiri atau 1.603 Pegawai sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 6.125 Pegawai.

2.1.3.4.7 Kecamatan

Pada Tahun 2019 Urusan Kecamatan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 69 kegiatan. Pengukuran kinerja pada urusan kecamatan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kearsipan, Perpustakaan, dan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2019 terintegrasi pada sasaran "Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik"

2.1.3.4.8 Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun 2019 Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program dan terdiri 25 kegiatan. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terintegrasi dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Pada Tahun 2019, Aspek Daya Saing Daerah didukung dengan Pertumbuhan Inovasi Daerah dan telah melahirkan 27 inovasi yang diakui oleh kementerian PAN RB dimana salah satunya memperoleh Prestasi tingkat Internasional yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama Tahun 2019 adalah ICT Asean Awards Telmin 2019.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Gresik kembali mendaftarkan 27 inovasi dalam *Innovative Government Award* sebagai berikut :

1. RUMAHKU SIP (Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan)
2. SI KEPO MANJA (Siap Menjaga Kesehatan Reproduksi Masa Remaja)
3. KLIK (Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Publik)
4. Pepes (Penempatan Pekerja disabilitas)
5. Gerebek Pasar Legi (cari penderita hipertensi bersama tukang parkir dan tukang karcis Pasar Legi)
6. Go-PLOONG (Go Pengelolaan Air Limbah Domestik Online Gresik)
7. Kampung ASI-NekDulsi
8. SIKATE – Sistem Layanan Kesehatan Korban KDRT dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
9. SEKOPER – Sekolah Perempuan
10. GEN JIMAT “Gerakan Energic No Sigma Jiwa Mandiri Sehat”: Solusi Cerdas Meningkatkan Kesehatan dan Produktivitas Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Desa Dahanrejo Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kebomas
11. GADIS TOP (Gangren luka Diabetes Segera Temukan dan Obati Penderitanya)
12. Layanan GADIS TOP
13. PADAMU MAS AJI
14. La Tanza
15. K-POP
16. JOSS POL
17. dr. KePO
18. Bang Rubuha Mentis
19. Simora Sensitif
20. GELIAT (GERakan Literasi masyarakat) di Perpustakaan Desa
21. LAGI SIP (LAYanan diGitalisasi arSIP)
22. PUSMINTALI (Perpustakaan Mini Kota Wali)
23. WIS PUAS (WISata PUstaka Anak Sekolah)
24. BOT-Telegram
25. Gresik Gambid (Grand Advanced Management in Big Data)
26. BATASPETIR BPK (Obati Tuntas Penderita TB MDR berbasis pendekatan keluarga)

27. Gita Ceria “Layanan PDAM Gresik dalam Genggaman”

Pada Tahun 2019, Kabupaten Gresik Kembali Berinovasi melalui Puskesmas yaitu Melalui “Grebek Pasar Legi” dan memperoleh top 99 Pada Sinovik Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dimana Inovasi tersebut bertujuan untuk mendeteksi dini penderita hipertensi secara luas, bekerja sama dengan tukang parkir dan tukang karcis pasar Legi.

2.1.4.1 FOKUS FASILITAS WILAYAH INFRASTRUKTUR

Daya ungkit pembangunan Gresik dalam tataran nasional dirumuskan sebagai bagian dari agenda pembangunan Jawa Bali (RPJMN 2014-2019). Cluster ini merupakan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makananminuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja. Kondisi tersebut sesuai dengan pengembangan Kabupaten Gresik dilevel Regional Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka peningkatan investasi melalui pengembangan industri manufaktur dan sektor lainnya dibutuhkan fasilitas untuk memenuhi proses produksi seperti pemenuhan kebutuhan bahan baku air ataupun listrik. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan bahan baku air industri di Gresik direncanakan memanfaatkan Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas penyimpanan hingga 7 juta m³ untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan air untuk industri dan rumah tangga mencapai 1.000 m³/s. Adapun kebutuhan listrik dipenuhi melalui keberadaan Pembangkit Listrik Jawa Bali yang berada di Gresik dengan kapasitas 2.218 MW serta produksi setiap tahun untuk membangkitkan energi listrik rata-rata 12.814 GWh yang disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi Jawa. dan Bali. Selain kemantapan pasokan air dan listrik, potensi minyak dan gas bumi di Gresik juga melimpah dengan produksi minyak dan kondensate mencapai 18-19% total produksi Jawa Timur atau sekitar 3,94 juta barel per tahun.

Konektivitas daerah melalui jalur pelabuhan ditunjang oleh 2 (dua) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan pelabuhan di Kawasan JIPE serta 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk

kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik memiliki peranan penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik, adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
4. Terminal Khusus PT. PLN PJB II Gresik
5. Terminal Khusus PT. Pertamina
6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
7. Terminal Khusus PT. Smelting
8. Terminal Khusus PT. Maspion

Tabel 2.71
Indikator Urusan Pekejaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	81,81%	73,62%	72,41%	70,41%
2	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	61,57%	58,36%	62,67%
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	95%	100%	95%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2019

Berkat keunggulan konektivitas daerah dan kemantapan infrastruktur, maka Gresik layak mengambil peran strategis sebagai poros investasi yang menghubungkan Indonesia Timur dan Barat. Selain konektivitas daerah strategis, infrastruktur ditunjang dengan Kemantapan Infrastruktur Jalan. Dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 377,06 km dalam kondisi mantap atau 73,62%. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sepanjang 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 277,71 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 106,02 km; kondisi sedang 98,87 km; kondisi sedang/rusak sepanjang 9,18 km; kondisi rusak ringan sepanjang 38,08 km; dan rusak berat sepanjang 25,56

km. Oleh karena itu, jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 326,29 km sedangkan sisanya adalah tidak mantap. Selain itu, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW pada tahun 2018 tercatat sesuai dengan rencana tata ruang yaitu 271 dari jumlah pemanfaatan ruang 285 atau 95%.

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat terus meningkat selama periode tahun 2016 - 2019. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan besarnya Pengeluaran Per Kapita setahun sebesar Rp12.845.000,00 pada tahun 2018 hingga menjadi Rp13.295.000,00 di tahun 2019, sebagaimana gambar berikut:

Tabel 2.72
Pengeluaran Per Kapita (Ribuan rupiah/orang/tahun)
di Kabupaten Gresik, 2016 - 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Gresik	11 961.00	12 375.00	12 845.00	13 295.00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020 (IPM)

Proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatannya karena data-data pendapatan masyarakat memiliki kecenderungan bias dan sulit diperoleh akibat sulitnya mendapat pengakuan dari responden.

2.1.4.2.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2018 Provinsi Jawa Timur pengeluaran per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 1.322.912,- terdiri dari pengeluaran konsumsi komoditi makanan sebesar Rp 673.892,- dan pengeluaran konsumsi komoditi non pangan sebesar Rp 649.020,-. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka porsi pengeluaran akan

bergeser dari pengeluaran untuk pangan ke pengeluaran bukan pangan. Penurunan persentase pengeluaran untuk makanan mencerminkan membaiknya kehidupan ekonomi penduduk.

Tabel 2.73
Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan
di Kabupaten Gresik Menurut Jenis Pengeluaran
(Rupiah), 2018

No	Jenis Pengeluaran	Nilai
1	Perumahan & fasilitas rumah tangga	313.763
2	Aneka barang & jasa	168.034
3	Pakaian, alas kaki & tutup kepala	34.933
4	Barang tahan lama	69.616
5	Pajak & asuransi	40.133
6	Keperluan pesta & upacara	22.542
Rata-rata pengeluaran non pangan		649.020

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 (GDA Kab. Gresik Tahun2019)

2.1.4.2.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Dalam sisi Pertanian diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Petani Kabupaten Gresik pada tahun 2019 mencapai 108,53 meningkat 1,91 basis point dibandingkan Tahun 2018 sebesar 106,62.

Tabel 2.74
Capaian Sasaran Urusan Pertanian

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	Target 2020
1	Nilai Tukar Petani	104,10	106,62	108,53	109,42

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya saing daerah Kabupaten Gresik ditinjau dari pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik yang meningkat secara signifikan pada Tahun 2018 dengan total investasi mencapai 6 triliun yang terdiri dari 3.481.933,30 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 165.375,80(US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Pertumbuhan realisasi investasi secara kumulatif sampai dengan periode 2018 mencapai 48,34 triliun

meningkat 51,49 % dibandingkan komulatif realisasi investasi pada periode tahun dasar sebesar 23,45 triliun (2011-2015).

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2019 dengan total investasi mencapai 52,93 triliun yang terdiri dari 3.199.731,00 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 98.364,90 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Rincian realisasi investasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 2.75
Uraian Realisasi Investasi Tahun 2017 s/d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	4.449.254,70	3.452.308,20	3.199.731,00
2	Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	436.663,70	165.375,80	98.364,90
3	Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	9.662.187,80	8.547.595,70	-
4	Rencana Investasi PMA (US\$ Ribu)	434.873,90	546.605,60	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan realisasi investasi secara komulatif sampai dengan periode 2019 mencapai 52,93 triliun meningkat 48% dibandingkan komulatif realisasi investasi pada periode tahun dasar sebesar 23,45 triliun (2011-2015).

2.1.4.4 Angka Kriminalitas

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam hal Pelanggaran Perda, yang terjadi pada Tahun 2019, terdapat 295 Pelanggaran atau turun 32% dari Tahun 2018 (354 Pelanggaran) atau turun sebesar 59 Pelanggaran.

Tabel 2.76
Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	Target 2020
1	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	-	Pelanggaran) 49% (354	Pelanggaran) 17% (295	10-20%

Sumber Data: Dinas Satpol PP dan BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2020

2.1.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.5.1 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik pada 2020 adalah 42.22 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio tersebut turun sebesar 1,07 persen dari tahun 2019 sebesar 43,29%.

Tabel 2.77
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2010-2020

Tahun	Rasio
2010	44,86
2011	44,48
2012	44,07
2013	43,68
2014	43,32
2015	43,03
2016	42,76
2017	42,53
2018	42,38
2019	43,29
2020	42,22

Sumber: Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2020 Triwulan I, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Buku 2 RKPD Kabupaten Gresik Tahun2021.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Gresik, maka permasalahan pokok pembangunan diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah prioritas berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Rumusan Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 2.78

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Permasalahan	Prioritas	Tahun
1	Pertumbuhan ekonomi melambat meskipun masih diatas performa nasional dan Jawa Timur	Tujuan Pembangunan, IKU, Prioritas Nasional	2020
2	Kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 mencapai 11,89% atau mengalami penurunan 0,91% dibandingkan Tahun 2017 sebesar 12,80%. Laju penurunan melambat sedangkan posisi relatif masih di atas rerata nasional dan Jawa Timur.	Tujuan Pembangunan, IKU, Prioritas Nasional	2020
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2018 mencapai 94,58% menurun dibandingkan Pada tahun 2017 mencapai 98,76%.	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2018 mencapai 66,94% menurun dibandingkan tahun 2017 mencapai 82,43%.	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020

No	Permasalahan	Prioritas	Tahun
5	Kemantapan Infrastruktur Jalan dijelaskan bahwa dari 512,16 km jalan kabupaten, sepanjang 377,06 km dalam kondisi mantap atau 73,62%. Masih di bawah target.	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
6	Persentase Akses Air Bersih/Minum dijelaskan bahwa dari 366.554 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM 225.705 RT atau 61,57%. Diwah target prioritas nasional 100 0 100	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
7	penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas pada Tahun 2018 mencapai 6.22% melalui penanganan PMKS sebanyak 8.410 orang dari total keseluruhan PMKS dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Pelayanan belum signifikan.	Sasaran Pembangunan	2020
8	Rasio ketersediaan pangan utama mencapai 291,43 Kg/Kpt/Thn di bawah target 194 kg/kpt/thn	Sasaran Pembangunan	2020
9	Kualitas Udara dengan rerata S02 dan NO2 mencapai 57,53 atau turun 22,47 dari tahun 2017 senilai 70	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
10	Indeks Desa Membangun Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 mencapai 0,635 meningkat 0,004 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,631. Rerata IDM Kabupaten Gresik mendapat klasifikasi Desa berkembang. Belum mencapai Kemandirian Desa.	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
11	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebesar 1,7% dengan penambahan penduduk sebanyak 22.745 Jiwa di atas target pengendalian.	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
12	Implementasi Smart City belum optimal meskipun nilai indeks e-Gov Kabupaten Gresik mencapai 2,68 dengan interpretasi baik	Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional	2020
13	Net Date Rate (NDR) Urusan Kesehatan 52% dari target 41%	Indikator Sasaran Renstra	2021
14	Persentase Usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup 30% dari Target 40%	Indikator Sasaran Renstra	2021
15	Persentase Penurunan Data Ganda dan Anomali 10,18% dari target 14% atau hanya tercapai 73%	Indikator Sasaran Renstra	2021

No	Permasalahan	Prioritas	Tahun
16	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif 0,46% (612 Koperasi) dari target 0,89% (1.016 Koperasi) atau tercapai 52%	Indikator Sasaran Renstra	2021
17	Persentase APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan 62% Belum Optimal	Indikator Sasaran Renstra	2021
18	Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan 55% dari total target 75%	Indikator Sasaran Renstra	2021
19	Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi 39,89%	Indikator Program	2021
20	Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Pustu 61% dari target 82,40%	Indikator Program	2021
21	Persentase perolehan pasien baru (customer acquisition) 47,18%	Indikator Program	2021
22	Sales Growth Rate (SGR) RSUD selaku BLUD 9,07%	Indikator Program	2021
23	Persentase Pencapaian mutu untuk prioritas Rumah Sakit 50%	Indikator Program	2021
24	Persentase Penempatan Pencari Kerja 44,7%	Indikator Program	2021
25	Persentase lokasi konservasi 20% dari target 30%	Indikator Program	2021
26	Persentase Lokasi dengan tingkat polusi sesuai ambang batas 20% dari target 30%	Indikator Program	2021
27	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB 71,38% Karena Keterlambatan klaim BPJS dengan rumus $\frac{\text{Total pendapatan thn ini} - \text{Total pendapatan thn sebelumnya}}{\text{total pendapatan thn sebelumnya}}$	Indikator Program	2021
28	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan 55,00%	Indikator Program	2021
29	Persentase Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan 2%	Indikator Program	2021
30	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013 19,97%	Indikator Program	2021
31	Persentase penyuluh bersertifikat 19,44% Karena Penurunan Jumlah Penyuluh	Indikator Program	2021
32	Prosentase Pejabat Struktural yang sudah memiliki sertifikat Diklatim sesuai dengan jenjangnya 57,84% dari target 95%	Indikator Program	2021
33	Prosentase kebutuhan formasi sesuai dengan ABK 54,00% Karena Adanya Pemeriksaan berjenjang sehingga pasien akan melukan pemeriksaan melalui faskes pertama terlebih dahulu	Indikator Program	2021

No	Permasalahan	Prioritas	Tahun
34	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 17% atau 3 dari 18 Kecamatan	Indikator Program	2021
35	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD) 76,63% atau turun dari tahun 2018 89,30%	Indikator Renstra	2021
36	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan 88,27% atau turun dari tahun 2018 sebesar 88,59%	Indikator Renstra	2021
37	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 43% atau turun dari tahun 2018 sebesar 47%	Indikator Renstra	2021
38	Rasio Dokter Umum 74,03% atau turun dari tahun 2018 sebesar 74,03%	Indikator Renstra	2021
39	Rasio bidan per 100.000 penduduk 83,35% atau turun 91,83%	Indikator Renstra	2021
40	Turn Over Internal (TOI) : 1-3 Hari (Sesuai Depkes R.I Th.2005) 1,53 atau turun dari tahun 2018 sebesar 2,3	Indikator Renstra	2021
41	Bed Turn Over (BTO) : 40-50 Kali (Sesuai Depkes R.I Th.2005) 55,59% turun dari 2018 sebesar 58,3	Indikator Renstra	2021
42	Persentase Panjang jalan Kabupaten Dalam kondisi Mantap 72,41% atau turun dari 73,62%	Indikator Renstra	2021
43	Persentase Rumah tangga akses air bersih Non PDAM 58,36% atau turun dari tahun 2018 61,57%	Indikator Renstra	2021
44	Tingkat partisipasi angkatan kerja 63,79% atau turun dari tahun 2018 67,29%	Indikator Renstra	2021
45	Prevalensi Peserta KB aktif 74% atau turun dari tahun 2018 sebesar 79,23%	Indikator Renstra	2021
46	Persentase Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian 0,61% atau turun dari tahun 2018 sebesar 3,50%	Indikator Renstra	2021
47	Persentase peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 1,79% atau turun dari tahun 2018 sebesar 2,42%	Indikator Renstra	2021
48	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan 89,9% atau turun dari tahun 2018 sebesar 93%	Indikator Renstra	2021
49	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi 94,79% atau turun dari tahun 2018 sebesar 96,37%	Sasaran RPJMD	2021
50	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 81,75% atau turun dari tahun 2018	Sasaran RPJMD	2021

No	Permasalahan	Prioritas	Tahun
	sebesar 90,16%		
51	Indeks Profesionalitas ASN 66% atau turun dari tahun 2018 sebesar 90,57%	Sasaran RPJMD	2021
52	Persentase Akses Air Bersih/Minum 58,36% atau turun dari tahun 2018 61,57%	Sasaran RPJMD	2021

Pandemi Covid-19 secara epidemiologi, sejak kasus pertama di Wuhan pada akhir Desember 2019, COVID-19 telah menjalar ke lebih dari 190 Negara dan teritori di berbagai penjuru Dunia. Hingga 20, Juni 2020, pagebluk ini telah menjangkiti lebih dari 8 Juta orang dengan angka kesembuhan mencapai 4,2 juta (49%) sedangkan kematian global sebanyak 460 ribu jiwa (5,3%). United States of America menjadi negara dengan total infeksi tertinggi mencapai 2.220.961 Jiwa diikuti Brazil dengan 1.083.912 Jiwa. Russia berada di urutan ke-3 dan menjadi negara Eropa dengan konfirmasi positif terbanyak sebesar 583.879 Jiwa diikuti United Kingdom, urutan ke-5, sebanyak 305.803 Jiwa dan Spanyol, urutan ke-7, sebanyak 246.272 serta Itali, urutan ke-9, sebesar 238.499.

India berada di urutan ke-4 dan menjadi negara Asia dengan positif COVID-19 terbanyak mencapai 452.282 jiwa. China, pusat pandemi pertama, menduduki peringkat ke-21 dengan konfirmasi COVID-19 sebanyak 84.572. Sementara Indonesia memiliki kasus positif COVID-19 sejumlah 45.891 atau tertinggi di kawasan Asia Tenggara termasuk mencakup Australia, New Zealand, dan Papua New Guinea. Jumlah kasus di Indonesia lebih tinggi dari Korea Selatan (12.438 Jiwa) dan Jepang (17.780) sebagai salah satu kluster penyebaran pertama setelah Cina. Negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah konfirmasi COVID-19 mendekati Indonesia adalah Singapura sejumlah 42.095 jiwa dan Philipines sebesar 30.052 sedangkan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia hanya sebanyak 8.572 jiwa. Konfirmasi positif tertinggi terjadi pada akhir usia produktif pada umur 50-59 sebagaimana terlihat dalam sebaran kasus di China sebesar 22,8% dan Italia 19,1% dari total keseluruhan kasus. Sementara di Korea Selatan mencatat usia 20-29 tahun sebagai carrier COVID-19 terbesar dengan 27,8%. Case fatality rate atau tingkat kematian tertinggi berada pada usia diatas 79 Tahun sebagaimana ditunjukkan di Cina 14,8%, Korea Selatan 10,85, dan Italia, 23,65.

Penyusunan kebijakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 juga memperhatikan penanganan pandemi Covid-19 di daerah sebagaimana

diamanahkan dalam Pasal 2 huruf d Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Secara garis besar penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik diarahkan dalam penanganan darurat kesehatan, pemulihan ekonomi sosial, dan penegakan tatanan normal baru.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2.79

Permasalahan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar		
a	Pendidikan	• Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kantor Kementerian Agama, mengingat perbedaan wewenang penangan antara sekolah dengan madrasah. Sehingga pengendalian MI/Mts tidak bisa optimal; • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini; • Banyak bermunculan lembaga PAUD yang tidak terakreditasi diimbangi dengan ketersediaan SDM maupun dukungan Dana yg cukup; • Sebagian guru yang sudah S1 tidak memiliki sertifikasi dokumen administrasi ijin belajar sehingga belum di akui; • Ada beberapa lembaga yang masa akreditasinya sudah habis karena Kuota akreditasi ditentukan oleh pusat; • Kurangnya Guru Yang Memenuhi Kompetensi Tenaga Pendidik; • Bantuan Sosial untuk Bantuan Kuliah bagi anak kurang mampu diluar tugas dan pokok Dinas Pendidikan (TUPOKSI TK/SD/SMP), sebaiknya dialihkan ke Dinsos atau Kesra; • Masih minimnya anggaran PAUD dan Pendidikan Non Formal; • Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk Rehabilitasi sekolah terus menurun dari Rp. 50 Milyard tahun 2017 pada tahun 2020 tinggal 25 Milyard, padahal banyak sekolah Negeri yang sudah tua dan rapuh yang perlu segera ditangani, sedang dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal tersebut; • Kurangnya guru untuk Sekolah SD/SMP Negeri terutama SDN (guru Kelas, Mapel, agama) karna sudah banyak yang pensiun tapi belum ada pengangkatan PNS, Sedang untuk mengangkat honorer tidak diperkenankan; • Banyak Kepala Sekolah yang merangkap; • Di SD Negeri tidak ada tenaga khusus Bendahara/pengelola BOS, operator Dapodik, maupun PDSERU sehingga para guru harus mengambil alih tugas tersebut diluar tanggung jawab utamanya karena TU hanya 1 orang bahkan ada yang tidak memiliki, selain itu juga harus mengelola perpustakaan; • Tekendalanya koordinasi pada lembaga pendidikan yang ada dilapangan karena dihapusnya UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan;
b	kesehatan	• Angka Kematian Ibu Masih Tinggi; • Banyak pelayanan Kesehatanfasilitas kesehatan tingkat pertama belum terakreditasi; • Angka Kematian bayi masih tinggi; • Penerapan STBM belum maksimal; • Penyakit menular masih tinggi • Cakupan penyakit tidak menular masih kurang
c	pekerjaan umum dan penataan ruang	• Terdapatnya alih fungsi waduk/embung/bozem menjadi kegiatan non irigasi; • Pertambahan debit limpasan akibat perubahan tataguna lahan di daerah tangkapan saluran yang bersangkutan;

No	Urusan	Permasalahan
		• Dimensi saluran dan atau dimensi gorong-gorong yang ada sudah tidak lagi memadai dibanding dengan besarnya debit air yang harus dialirkan. Hambatan aliran pada saluran: akibat sampah, pendangkalan saluran (sedimentasi), pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, dan adanya jaringan pipa, kabel, dan benda lain yang melintang saluran; • Saluran mengalami penyempitan yang disebabkan saluran melewati sebagian lahan milik warga dan tidak bisa dinormalisasi; • Sistem drainase yang belum tertata dengan baik: hierarki jaringan drainase tersier, sekunder, primer sehingga saluran alami yang belum tertata secara sistematis, juga ditemukan saluran drainase yang tidak menerus (terputus). Ada saluran yang outletnya tidak bermuara ke laut atau ke saluran yang lebih tinggi tingkatannya namun menghilang di persawahan, tambak dan tegalan; • Kurang memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan saluran drainase; • Kapasitas jaringan distribusi air yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, karena terbatasnya sumber air baku. Pengawasan kualitas air minum belum dilakukan dengan tertib; • SPAM Jaringan Perpipaan perawatan dan pemeliharaan yang tidak dilakukan secara berkala. Sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak dapat terlayani 24 jam. Terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh sistem pengaliran yang ada, sehingga terdapat pelanggan yang tidak dilayani; • SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) perawatan dan pemeliharaan yang tidak dilakukan secara berkala. Beberapa sumber yang digunakan belum teruji kualitasnya. Belum dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak; • Koridor jalan-jalan utama yang ada di pusat kota belum diterbitkan aturan kaitannya berhubungan terhadap RTBL; • Permasalahan bioekoregion di wilayah hilir DAS Bengawan Solo Hilir sebagai akibat degradasi lingkungan; • Permasalahan di Hulu DAS Bengawan Solo yang rentan akan erosi menyebabkan transport sedimen di hulu ke hilir semakin tinggi; • Banyaknya bangunan baru yang tidak mematuhi aturan sempadan bangunan. Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya; • Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB; • Perubahan Bangunan Cagar Budaya; • Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di Kawasan Kota Gresik Lama.
d	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	• Perlu adanya pemutakhiran data penerima bantuan RTLH beserta data administratif pendukung dalam proses verifikasi penerima bantuan RTLH • Harga tanah yang terus meningkat sehingga kebutuhan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

No	Urusan	Permasalahan
		(MBR) semakin sulit. • Belum adanya pemutakhiran basis data dasar perumahan formal. • Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat akan tugas dan fungsi bidang PSU • Belum maksimalnya keterpaduan koordinasi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang PSU. • Belum adanya review dan pemutakhiran data pada seluruh aspek kawasan permukiman seperti jalan lingkungan, saluran, sanitasi ipal, TPS, air bersih, dan proteksi kebakaran terutama pada kawasan permukiman di pedesaan. • Kurang sinerginya anggaran daerah dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. • Adanya ketidakserasian antara peraturan yang satu dengan yang lain pada pendanaan oleh APBN. • Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat; • Kondisi geografis dan budaya di wilayah permukiman yang berbeda yang mengakibatkan lingkungan kumuh; • Program penanganan kumuh masih belum terintegrasi dengan perencanaan program OPD lain • Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;
e	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	• Kurang aktifnya peran Linmas dalam RT, meskipun pada tahun 2019 sudah ditargetkan kinerja 1 Rasio Linmas 1 per RT, Kabupaten Gresik memiliki 6,259 RT dalam 18 Kecamatan;
f	sosial	• Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban Napza; • Diperlukan dukungan dan kepedulian keluarga bagi eks korban pasung, sehingga membantu pemerintah dlm penanganannya; • Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS; • Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Gresik seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah; • Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; • Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam; • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan

No	Urusan	Permasalahan
		sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat; • Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang; • Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani;
UrusanWajib Non Pelayanan Dasar		
a	Tenaga Kerja	• Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak sebanding dengan penambahan jumlah angkatan kerja • Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal • Kurangnya daya saing angkatan kerja di Kabupaten Gresik karena tingkat kompetensi dan skill yang masih rendah • Masih adanya perusahaan yang belum melaporkan keberadaan TKA di wilayah Kabupaten Gresik ke Dinas Tenaga Kerja • Masih adanya Pekerja Migran Indonesia non prosedural di Kabupaten Gresik • Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan di BLK Disnaker Kabupaten Gresik • Kurangnya SDM di bidang ketenagakerjaan (Instruktur BLK, Mediator dan Pengantar Kerja) • Kurangnya tingkat produktivitas SDM baik di perusahaan maupun UMKM di Kabupaten Gresik • Banyaknya Lowongan kerja di perusahaan yang belum terserap karena kurangnya kompetensi pencari kerja atau ketidaksesuaian dengan kompetensi pencari kerja • Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja • Keterbatasan perusahaan untuk memberikan kesempatan magang kepada peserta pelatihan • Masih adanya Kurikulum Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang tidak update • Masih adanya instruktur di LPKS yang belum tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi • Masih adanya perusahaan yang tidak patuh terhadap norma ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja • Masih adanya perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK yang ditetapkan dan pembayaran THR dicicil/kurang dari ketentuan • Tingginya angka PHK/ pekerja yang dirumahkan selama masa pandemi covid-19 • Meningkatnya intensitas perselisihan karena saluran komunikasi hubungan industrial terputus selama pandemi covid-19 • Perusahaan cenderung mengurangi/mengubah nilai-nilai dan syarat-syarat kerja yang sudah biasa diberikan kepada pekerja selama pandemi covid-19 • Kegiatan pelatihan terpaksa ditunda/dibatalkan pelaksanaannya karena adanya pemberlakuan social/physical distancing selama masa pandemi covid-19 • Pengiriman Pekerja Migran Indonesia sementara dihentikan selama masa pandemi covid-19

No	Urusan	Permasalahan
		• Pekerja Migran Indonesia banyak yang pulang ke Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik dan tidak bisa kembali berangkat lagi selama masa pandemi covid-19
b	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	• Batalnya sebagian kegiatan pembelajaran sekolah perempuan; • Data anak belum diolah dan dimanfaatkan secara terpadu; • Belum adanya NSPK dan keorganisasian yang jelas untuk pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak serta dasar hukum untuk shelter dan SDM nya sebagai sub unit penunjang vital utk layanan P2TP2A; • d. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang gender dan hak anak;
c	Pangan;	• Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi (Skor PPH baru mencapai 86 pada tahun 2019) dan selama ini pencapaiannya berjalan lamban dan fluktuatif • Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (umbi-umbi lokal) • Masih adanya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan Belum adanya cadangan pangan pemerintah (CPP) Kabupaten Gresik dan masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat (BTP) yang dilarang • Belum adanya cadangan pangan pemerintah (CPP) Kabupaten Gresik dan masih rendahnya sistem cadangan pangan di masyarakat • Rantai tata niaga pangan yang masih cukup panjang sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima petani • Penyusutan lahan pertanian yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan
d	Pertanahan	• Proses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak • Penggunaan kembali tanah-tanah terlantar • Kegiatan fasilitasi sertifikat asset tanah pemerintah daerah, dalam rangka pengukuran harus mengikuti jadwal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) • Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami proses tahapan sertifikasi ke BPN .
e	Lingkungan Hidup	• Keterbatasan sarana/prasarana yang mendukung program/kegiatan dalam pelayanan persampahan kabupaten dan pemrosesan akhir. • Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya reduksi dan pengelolaan sampah dari sumber belum optimal. • Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. • Kurang optimalnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. • masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan belum terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup karena keterbatasan SDM.

No	Urusan	Permasalahan
		• program kemitraan/kerjasama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan hidup belum terlaksana dengan optimal. • pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai upaya peningkatan estetika dan kualitas lingkungan hidup belum terlaksana dengan optimal. • kurangnya kegiatan pembinaan, sosialisasi/workshop dan sejenisnya baik untuk internal SKPD maupun masyarakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dalam berperan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurang optimalnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian kualitas udara, mitigasi dan adaptasi iklim yang beragam. • banyaknya kepentingan dan karakteristik para stakeholder dalam urusan lingkungan hidup.
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Kepemilikan E-KTP di Kabupaten Gresik Belum 100% ; • Belum selesainya perbaikan Data Ganda dan Anomali; • Kurang aktifnya desa dalam melaporkan kematian ke dispendukcapil sehingga penerbitan akta kematian kurang optimal • Belum selesainya arsip akta kelahiran yg dialihmedia • Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan • Kurangnya sarana dan prasarana cetak dan rekap e-KTP untuk ditempatkan di Kecamatan
g	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Kurangnya pemahaman Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD di tingkat kecamatan sehingga pembinaan pemerintah desa kurang maksimal. • Seluruh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum mengikuti pelatihan awal pelaksanaan tugas-tugasnya. • Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas untuk kepala desa dan perangkat desa dalam pelaksanaan bidang tugasnya. • Kurangnya tenaga pelaksanaan (PNS) dalam pembinaan keuangan desa melalui SISKEUDES yang menguasai Teknologi Informasi. • Kurangnya tenaga pelaksanaan (PNS) yang memenuhi kualifikasi untuk penyelesaian permasalahan pemerintah desa. • Tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam pelaksanaan pembangunan di desa. • Kepala Desa belum mengoptimalkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa. • Kurangnya upaya peningkatan SDM bagi lembaga kemasyarakatan desa oleh pemerintah desa. • Kurangnya pemahaman teknis di bidang pembangunan desa sehingga pembinaan di bidang pembangunan (RAB dan Gambar) di TK. • Pembinaan, monitoring dan evaluasi Dana Desa kurang maksimal. • Pembinaan, pendataan aset desa, aplikasi SIPADES kurang berjalan sesuai dengan aturan yang ada. • Kurangnya pengelola data pendapatan dan kekayaan desa

No	Urusan	Permasalahan
		hususnya inventaris aset desa melalui aplikasi SIPADES. • Kurangnya tenaga pengelola data dana desa khususnya melalui aplikasi OMSPAM. • Kurangnya SDM tiap desa terkait IT dalam entri data, salah satunya menentukan perkembangan desa tiap tahun dengan kategori: Cepat Berkembang; Berkembang; dan Kurang Berkembang. • Kurangnya sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa menuju Desa Mandiri. • Kurangnya kapasitas SDM (Kaur Perencana Program Desa) dalam pembuatan RKPDes sehingga tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran.
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Berhubungan dengan batalnya pendataan keluarga di tahun 2020, maka dibutuhkan pendataan keluarga di tahun 2021; • Belum ada strategi khusus dalam upaya peningkatan keluarga yang menyasar pada remaja dan pasangan pra nikah secara luas dan terintegrasi. Hal ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab tingginya angka perceraian; • Kabupaten Gresik memiliki kader sub PKBD di setiap RW, namun belum ada pelatihan yang memadai utk memperkuat kapasitasnya; • Data keluarga belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal; • Laju Pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari nasional; • Beban PLKB belum sesuai SPM;
i	Perhubungan	• Pengelolaan perkeretapiian belum mejadi alternatif dalam sistem logistik barang dan orang; • Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan sistem logistik nasional.
j	Komunikasi Dan Informatika	• Banyaknya panggilan darurat dari masyarakat yang menyalahgunakan NTPD 112 • Kurangnya kesadaran Perangkat daerah terhadap data yang dapat dipublikasikan • Kegiatan Rakor rencana perubahan perda telekomunikasi bersama pada kegiatan fasilitasi sarana komunikasi daerah tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi covid-19
k	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	• Kurangnya biaya operasional • Masih minimnya para usaha mikro untuk mempromosikan produk-produk unggulannya • UMKM yang masih rendah memiliki hak paten merk dagang serta belum optimalnya kualitas produk UMKM • Keterbatasan modal bagi para usaha mikro • Masih kurang validnya data UMKM
l	Penanaman Modal	• Ketersediaan lahan peruntukan industri yang semakin terbatas sedangkan peluang investasi masih sangat besar. • Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang proses perijinan. • Perubahan regulasi yang sangat cepat sehingga dalam penerapannya masih belum maksimal. • Masih banyak wilayah yang belum memiliki RDRT sehingga integrasi dengan sistem perijinan belum komprehensif. • Penerapan regulasi sektoral yang tidak sinkron dengan pelayanan perijinan yang terintegrasi secara elektronik. • Kecenderungan nilai rupiah yang tidak stabil. • Perekonomian global yang belum menentu.

No	Urusan	Permasalahan
		• Merebaknya pandemic Covid-19. • Kurangnya event promosi investasi. • Masih dijumpai permasalahan perolehan lahan. • NSPK kementerian teknis yang ada masih belum bisa menjadi. pedoman dalam penerapan prosedur yang mudah diikuti. • Sistem OSS belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perijinan. • Database pada sistem OSS belum terklarifikasi dengan jelas. • Pemetaan peluang investasi masih belum optimal. • Minimnya anggaran pelayanan. • Kompetensi SDM penanaman modal yang perlu ditingkatkan. • Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan data paparan perkembangan penanaman modal yang masih perlu ditingkatkan. • Masih dijumpai pelanggaran regulasi penanaman modal.
m	Kepemudaan dan Olah Raga	• Peranan induk Organisasi kepemudaan atau forum lembaga kepemudaan belum mendukung penyelenggaraan pembangunan • Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku; • Belum terdapatnya basis data keolahragaan dan kepemudaan yang komprehensif; • Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik; • Masih banyaknya lembaga kepemudaan yang perlu diinventarisir dan dilakukan pembinaan; • Masih rendahnya dukungan terhadap pembibitan atlit muda yang potensial dan kurangnya pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas;
n	Statistik	• Keterlambatan Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam pengiriman data statistik • Terjadi pembatalan MOU dengan BPS karena pada tahun ini BPS fokus dengan sensus penduduk 2020 sehingga anggaran untuk MOU dialihkan ke penanganan Covid-19
o	Persandian	• Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal • Belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
p	Kebudayaan	• Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional; • Tidak adanya anggaran untuk penetapan CB maupun WBTB; • Anggaran untuk pendukung pelestarian warisan budaya (WBTB) dihapus; • Fasilitasi di ODTW belum memadai; • Belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan wisata Desa;
q	Perpustakaan	• Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan

No	Urusan	Permasalahan
		informasi secara konservatif melalui perpustakaan; • Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca; • Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
r	Kearsipan.	• Kecenderungan kesalahan klasifikasi dalam pengelolaan arsip baik bersifat statis maupun dinamis; • Rendahnya kompetensi arsiparis yang tidak sesuai dengan tatakerja kearsipan terkini; • Kurang memadainya fasilitas penunjang kearsipan; • kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip;
Urusan Pilihan		
a	Kelautan dan Perikanan	• Kematian ikan/udang pada usaha perikanan budidaya ,akibat penyakit virus. • Harga ikan / udang menurun/ rendah akibat pandemi covid-19. • Mahal nya Harga Pakan ikan/udang (pabrik). • Rendahnya kualitas benih/bibit ikan / benur udang. • Irigasi Saluran Tambak yang tidak lancar.
b	Pariwisata	• Masih kurangnya jumlah tenaga kerja Pariwisata yang bersertifikat Kompetensi • Masih kurangnya penyelenggaraan peningkatan kualitas tata kelola Destinasi • Volume Monitoring dan evaluasi destinasi wisata perlu ditingkatkan • Fasilitasi di ODTW belum memadai • Belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan wisata Desa
c	Pertanian	• Masih rendahnya kemampuan petani untuk memberikan nilai tambah pada hasil pertaniannya. • Adanya tuntutan peningkatan produksi pertanian, sementara semakin terbatasnya luas lahan pertanian serta adanya pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI). • Terbatasnya keahlian spesifik aparatur / petugas. • Kekhawatiran petani terhadap kerugian yang disebabkan oleh faktor alam dalam menjalankan usaha taninya masih relatif tinggi. • Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas yang sudah modern dan berbasis teknologi informasi. • Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi pertanian.
d	Kehutanan	Kewenangan Provinsi
e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Belum adanya kajian dan fasilitasi Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota
f	Perdagangan	• Perijinan dan pendaftaran perusahaan (belum adanya peraturan Bupati yang mengatur tentang jarak berdirinya toko modern dan pusat perbelanjaan; kurangnya pembinaan terhadap pasar tradisional) • Fasilitasi distribusi perdagangan (masih kurang fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan; pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan

No	Urusan	Permasalahan
		serta pembinaan) • Stabilitas harga kurang optima (kurang optimal dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting) • Pengembangan ekspor (perubahan sistem elektronik (SKA) (E-SKA), permasalahan timbul diantaranya masih adanya tenaga bagian eksportir yang kurang bisa mengaplikasikan sistem ini, meskipun sudah pernah diadakan pelatihan
g	Perindustrian	• Masih menggunakan teknologi yang sederhana • Sarana dan prasarana pendukungnya terbatas • Masih sulitnya mendapatkan bahan baku terutama untuk pengerajin rotan • Rendahnya pengetahuan pelaku usaha IKM berkaitan dengan pasar produksi • Penggunaan teknologi untuk proses produksi masih tertinggal/ sederhana • Kesulitan pelaku IKM untuk mendapatkan bantuan modal dan perbankan terutama adanya agunan bank dan persyaratan yang rumit • Masih tingginya biaya listrik dan bahan bakar minyak untuk industri kecil dan menengah • Masih adanya para pelaku usaha IKM dan UKM yang kurang peduli terhadap limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar • Masih banyaknya para usaha IKM yang belum memenuhi standart yang telah ditentukan
h	Transmigrasi	• Kurangnya minat masyarakat di Kabupaten Gresik untuk mengikuti program transmigrasi
Urusan Penunjang		
a	Sekretariat Daerah	• Bagian Umum • Masih adanya perubahan terkait kebijakan pengadaan yang sudah ditetapkan • Masih adanya perubahan target pemeliharaan rumah tangga dibandingkan realisasi • Bagian Humas dan Keprotokolan • Sarana dan Prasarana Peralatan masih belum memadai dan menunjang di Bagian Humas (Sub Bagian Keprotokolan) • Kurangnya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Protokol (Sub Bagian Keprotokolan) • Kurangnya penganggaran untuk kegiatan Kehumasan sehingga belum maksimalnya kegiatan yang dilakukan (Sub Bagian Kehumasan) • Bagian Keuangan (Tidak ada permasalahan) • Bagian Pembangunan • Masih adanya keterlambatan dari sebagian OPD terhadap capaian kinerja kegiatan OPD • Bagian Organisasi dan Tata Laksana • Kurangnya penyelarasan OPD terhadap RPJMD • Bagian Kesejahteraan Rakyat • Belum dapat memperkirakan kegiatan apa saja yang masih dijalankan oleh Bagian Kesra (Misal: MTQ, Lomba istighosah) sebagai akibat dari adanya bencana Covid 19 • Bagian Perekonomian dan SDA • Belum tersedianya data makro ekonomi per bulan sehingga belum dapat mengukur pertumbuhan ekonomi (mengikuti

No	Urusan	Permasalahan
		klaster Surabaya) • Bagian Hukum • Masih kurangnya SDM sesuai kebutuhan Analis Beban Kerja • Bagian Pengadaan dan Jasa • Kurangnya SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa sesuai Analis Beban Kerja • Masih belum adanya TPP khusus sebagaimana permintaan KPK dalam program Stranas Pencegahan Korupsi • Perencanaan pengadaan belum masuk pada saat penentuan target kinerja • Belum adanya perlindungan hukum terkait permasalahan pengadaan bagi personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
b	Sekretariat DPRD	• Pelaksanaan kegiatan yang sering tidak sesuai dengan jadwal yang disusun oleh sekretariat karena DPRD memiliki jadwal Banmus yang seringkali memiliki jadwal yang sama • Karena tahun ini adalah tahun politik, sehingga ada masa transisi anggota dprd yang berakibat berkurangnya waktu untuk melaksanakan kegiatan secara optimal • Banyaknya silpa dari perjalanan dinas akibat dari perencanaan yang belum optimal
c	Perencanaan	• Adanya perubahan regulai, yakni Permendagri 90 Tahun 2019 sehingga dalam penyusunan RKPD 2021 harus melaksanakan pemetaan program dan kegiatan yang ada sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di Peremdagri 90 Tahun 2019 • Belum terintegrasinya e-Planning dengan SIPD milik Bangda sehingga sinkronisasi kegiatan perencanaan sektoral belum selaras • Pengurangan anggaran dan Phisycal Distancing karena pandemi covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah untuk prioritas musrenbang kecamatan, pokir dan topdown sehingga menghambat penyusunan dokumen perencanaan.
d	Keuangan	• Dinamisasi aturan perundangan seringkali membuat perencanaan daerah tidak bisa berjalan efektif sehingga mungkin dokumen perencanaan tidak selaras dengan dokumen anggaran. • Kemampuan kinerja pemerintah pusat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19, hal ini berpengaruh pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana pemerintah daerah wajib menyampaikan perhitungan sisa kemampuan keuangan daerah pada pusat termasuk laporan terkait penyusunan dana Covid-19. Apabila tidak tertib dalam penyampaian laporan transfer dari pusat ke daerah tidak diberikan/ditunda. • Pendapatan daerah yang berasal dari PAD maupun lain lain PAD mengalami penurunan secara signifikan akibat pandemi Covid-19 praktis sumber pendapatan hanya daritransfer pusat, untuk menjaga liquiditas keuangan rasionalisasi program dan kegiatan serta penjadwalan yang ketat terkait arus yang keluar dari RKPD

No	Urusan	Permasalahan
		• Diperlukan kebijakan terkait pembebasan denda untuk wajib pajak, adanya relaksasi pembayaran melalui mekanisme angsuran
e	Inspektorat	• Terkait urusan diklat khusus (perlu adanya peningkatan kualitas SDM, perlu pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan, pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pengawas daerah serta penilaian angka kredit) • Terkait urusan sapu bersih pungutan liar (perlu adanya pengawasan yang lebih komprehensif serta survey penilaian integritas)
f	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	• Penempatan ASN yang belum sesuai dengan standar kompetensi • Penempatan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi belum dilaksanakan 100% • Pengurangan anggaran dan Physical Distancing karena pandemi covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan • Belum adanya standar pengukuran terhadap hasil dan pelaksanaan diklat
g	Kecamatan	• Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokol ; • Belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik ; • Pengumpulan data agregasi di Desa / Kelurahan belum maksimal tersinkronisasi dengan data yang ada pada OPD Kabupaten Gresik pelaksana urusan wajib dan pilihan.
h	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	• Aktivitas Ormas/LSM belum dilaporkan maksimal ; • Unjuk rasa masyarakat (demo) yang cenderung meningkat ; • Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

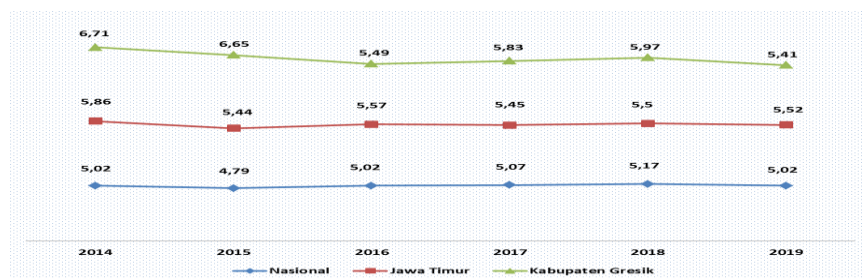
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Gresik dibandingkan dengan regional Provinsi Jawa Timur maupun Nasional ditinjau dari berbagai indikator makro yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja pembangunan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indikator makro ekonomi daerah yang menjadi perhatian utama inter alia pertumbuhan ekonomi, kinerja perdagangan, kinerja investasi dan kinerja BUMD serta indikator lainnya.

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Gresik, Jawa Timur dan Nasional menunjukkan tren yang cenderung melambat mengikuti fluktuasi perekonomian global, ketidakpastian kondisi sosial ekonomi akibat konflik regional dan penurunan nilai mata uang rupiah serta faktor lainnya. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Sumber : BPS (2020). Data Diolah

Gambar 0.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Selama periode 2014 s/d 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik termutakhir pada tahun 2019 mencapai 5,41% diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 mencapai 5,52% dan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2019 mencapai 5,02%.

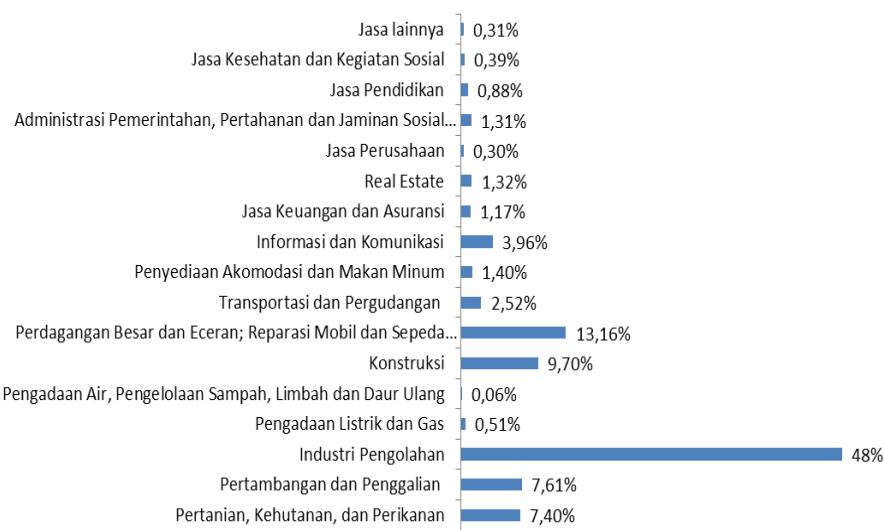
Ditinjau dari sisi produksi, secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Gresik mencapai Rp118.6 Milyar dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp96.2 Milyar. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dialami oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran RKPd Kab. Gresik Tahun 2021

reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruksi. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yakni sebesar 47,77 persen. Dengan banyaknya industri di sektor manufaktur tersebut akan terjadi kecenderungan untuk percepatan berdirinya industri baru yang merupakan mata rantai industri yang saling menunjang. Sektor tersebut selain dapat menyerap tenaga kerja juga menjadi pendorong utama untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain.

Sementara itu, untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) sebesar 13,01 persen, tentunya sektor tersebut didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan volume ekspor barang. Sejak tahun 2014, peran sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan digeser oleh sektor konstruksi yang mana pada Tahun 2018 kontribusinya sebesar 9,67 persen. PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik tahun 2019 adalah 5,41 persen. Pertumbuhan PDRB tertinggi sebesar 11,87 persen adalah pada sektor Transportasi dan Pergudangan.

a. Pertumbuhan Sisi Produksi (Sektoral)

Ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2019 tumbuh 5,41%. Dari sisi produksi (sektoral) semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadipada Industri Pengolahan 48%, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,16%; dan Konstruksi sebesar 9,70%. Secara grafis hal ini ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.2

Daya Saing PDRB menurut Sektor Tahun 2019

Secara lengkap perkembangan PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2019 secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 0.1
PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2013-2019

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6 304 242,11	7 252 042,46	8 274 300,48	9 038 899,00	9 809 404,93	10 022 405,13	10 285 301,64
B	Pertambangan dan Penggalian	10 245 762,79	11 463 102,34	8 771 931,60	7 571 492,16	9 019 961,16	10 698 176,07	10 584 411,96
C	Industri Pengolahan	39 960 124,34	45 217 878,76	49 572 708,31	52 573 170,50	56 872 420,84	62 394 127,71	66 743 468,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	363 811,14	412 948,01	464 121,55	510 546,98	600 505,60	665 968,18	709 647,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52 878,83	56 577,78	62 525,46	69 039,07	76 394,00	81 342,77	85 448,52
F	Konstruksi	6 623 078,59	7 746 726,26	8 876 471,45	10 212 251,38	11 524 132,17	12 634 528,33	13 484 198,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 564 482,23	10 617 743,21	12 183 312,77	13 873 126,59	15 205 350,65	16 850 608,01	18 304 903,80
H	Transportasi dan Pergudangan	1 794 461,81	2 062 787,47	2 319 528,09	2 544 864,68	2 807 675,61	3 095 589,47	3 509 234,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	892 743,70	1 053 473,61	1 227 220,87	1 427 925,70	1 592 506,06	1 771 785,74	1 947 234,94
J	Informasi dan Komunikasi	3 019 245,00	3 221 708,46	3 654 736,93	4 116 188,19	4 565 998,96	4 974 254,96	5 507 902,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	888 457,38	997 535,45	1 139 195,56	1 285 909,81	1 385 460,67	1 537 624,48	1 621 611,95
L	Real Estate	968 157,82	1 037 164,51	1 191 245,74	1 328 191,62	1 442 856,31	1 663 815,76	1 832 870,12
M,N	Jasa Perusahaan	221 696,00	245 394,83	272 918,77	302 834,02	334 861,83	380 854,89	415 295,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 063 516,29	1 078 834,35	1 215 931,91	1 365 981,77	1 467 555,69	1 638 045,87	1 817 319,07
P	Jasa Pendidikan	679 522,49	751 311,55	837 051,10	922 895,99	1 012 182,90	1 111 585,53	1 219 467,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	292 050,94	332 793,24	373 451,46	407 580,94	452 332,65	497 536,65	548 117,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	218 772,84	249 683,35	287 135,25	325 686,35	349 630,73	390 551,30	427 354,76
Produk Domestik Regional Bruto		83 153 004,31	93 797 705,63	100 723 787,28	107 876 584,74	118 519 230,76	130 408 800,85	139 043 789,66
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		73 686 950,23	83 262 242,91	93 048 584,82	101 518 746,58	110 784 505,89	121 132 980,73	129 983 050,68

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Tabel 0.2

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha(Juta Rupiah),
2013-2019

Kategori 1	Uraian 2	2013 3	2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018* 8	2019* 9
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 986 429,50	5 244 731,72	5 563 337,90	5 910 982,64	6 174 857,73	6 030 047,77	6 053 854,96
B	Pertambangan dan Penggalian	7 797 528,89	8 531 409,27	9 038 143,94	9 232 393,95	9 605 738,10	9 895 835,08	9 844 446,66
C	Industri Pengolahan	37 267 132,49	39 359 843,13	41 018 650,99	43 195 652,59	45 980 598,95	48 470 369,27	41 016 850,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	417 222,28	448 249,85	445 800,75	467 482,47	491 839,66	519 069,83	544 260,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46 400,24	47 060,05	49 394,23	51 789,85	55 376,45	58 207,02	61 843,22
F	Konstruksi	5 842 464,55	6 315 840,31	6 939 213,75	7 617 067,96	8 337 117,06	9 072 388,67	9 893 280,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 377 567,68	8 935 823,02	9 757 223,81	10 546 822,68	11 244 528,97	12 006 731,74	12 814 583,53
H	Transportasi dan Pergudangan	1 528 906,37	1 619 184,73	1 741 756,21	1 834 887,33	1 939 973,91	2 089 499,04	2 337 478,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	765 685,76	835 346,00	908 408,57	995 088,06	1 084 376,61	1 183 367,97	1 281 886,85
J	Informasi dan Komunikasi	2 938 569,22	3 131 927,07	3 345 974,13	3 638 412,26	3 958 476,15	4 304 842,82	4 722 777,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	771 520,59	811 255,13	870 799,52	935 510,86	969 378,45	1 039 844,12	1 084 152,29
L	Real Estate	891 850,11	948 999,87	1 006 176,28	1 095 625,35	1 153 428,30	1 263 119,33	1 362 855,23
M,N	Jasa Perusahaan	183 423,44	199 106,15	213 826,05	229 307,06	245 055,22	267 967,89	285 254,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	883 884,78	885 648,70	942 573,95	999 330,48	1 039 845,36	1 094 021,30	1 136 239,58
P	Jasa Pendidikan	576 431,64	616 608,93	665 223,43	713 052,99	761 880,73	822 069,31	891 618,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	267 740,36	282 844,95	305 289,54	324 461,72	345 838,53	375 926,49	405 459,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	204 475,99	214 879,73	227 458,74	239 241,10	252 239,29	272 443,66	294 937,26
Produk Domestik Regional Bruto		71 314 178,92	76 336 047,97	81 380 443,91	85 850 107,77	90 855 603,11	96 275 980,98	101 485 298,37
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		64 118 858,03	68 419 227,94	72 992 170,42	77 308 084,02	81 949 911,29	87 065 751,03	92 325 963,93

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

a. Pertumbuhan Pengeluaran Per-Kapita

Kesejahteraan dapat dikatakan makin baik apabila kalori dan protein yang dikonsumsi penduduk semakin meningkat sampai akhirnya melewati standar kecukupan konsumsi kalori/protein perkapita sehari. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) Maret 2019 pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp1.263.95,- terdiri dari pengeluaran konsumsi komoditas makanan sebesar Rp607.933,- dan pengeluaran konsumsi komoditi non makanan sebesar Rp656.018,-.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Penurunan persentase pengeluaran untuk makanan mencerminkan membaiknya kehidupan ekonomi penduduk. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.3
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan 2019

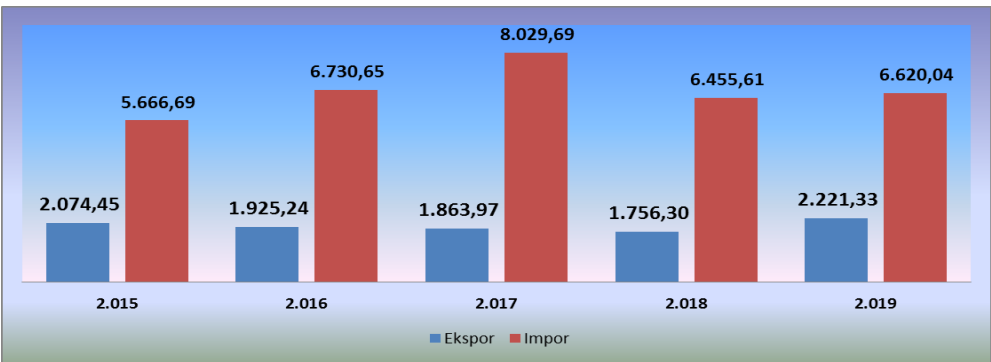
Kelompok Komoditas	2018	2019
1	2	3
Makanan dan Minuman		
Padi-padian	61.869,88	58.450,72
Umbi-umbian	3.284,69	3.450,72
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	45.469,79	45.987,56
Daging	27.934,31	29.705,54
Telur dan Susu	36.401,17	30.402,89
Sayur-sayuran	32.054,86	30.114,22
Kacang-kacangan	14.734,70	14.351,61
Buah-buahan	30.996,37	26.163,93
Minyak dan Kelapa	11.951,84	12.163,93
Bahan Minuman	13.767,19	13.557,76
Bumbu- bumbu	11.824,51	11.175,37
Konsumsi lainnya	10.095,00	8.331,41
Makanan dan minuman jadi	297.472,38	256.713,95
Rokok	76.035,49	66.537,37
Jumlah Makanan dan Minuman	673.892,18	607.106,98
Bukan Makanan		
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	313.762,59	321.881,07
Aneka Komoditas dan Jasa	168.034,13	169.791,12
Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	34.932,65	42.733,81
Komoditas Tahan Lama	69.616,09	55.995,55
Pajak, Pungutan dan Asuransi	40.132,68	38.867,62
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	22.541,62	26.748,65
Jumlah Bukan Makanan	649.019,76	656.017,82
Jumlah	1.322.911,94	1.263.124,80

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita konsumsi makanan tertinggi pada Tahun 2019 ada pada komoditas makanan dan minuman jadi sebesar 256.713,95. Kemudian disusul dengan konsumsi Rokok 66.537,37 dan Padi-padian 58.450,72. Konsumsi makanan terendah ada pada umbi-umbian 3.450,72. Sedangkan Rata-rata Pengeluaran per Kapita menurut Bukan Makanan tertinggi ada pada Perumahan dan fasilitas rumah tangga 321.881,07 dan Aneka komoditas dan jasa sebesar 169.791,12.

3.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Arus perdagangan Ekspor dan impor di Kabupaten Gresik dapat diamati dari besaran atau volume dan nilai ekspor-impor Kabupaten Gresik. Totalitas volume ekspor pada Tahun 2019 naik dari tahun 2018. Volume ekspor tahun 2019 sebesar 2.221,3 juta ton dengan nilai sebesar 1,02 Milyar US\$. Sedangkan volumen dan nilai impor Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 sebesar 6.620 Juta ton dengan nilai 7,44 Milyar US\$. Nilai impor tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Gambar 0.3 Volume Ekspor dan Impor di Pelabuhan Gresik, 2015- 2019(Juta Ton)

3.1.1.3 Kinerja Investasi

Naik turunnya iklim investasi suatu daerah dalam posisi relatif dengan daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Secara umum, pengembangan iklim investasi perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi.

Sesuai dengan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Timur, Realisasi investasi di Jawa Timur tahun 2019 mencapai Rp58,45 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 14,2 persen dibanding tahun 2018. Bahkan, lebih tinggi dari kenaikan investasi nasional sebesar 12,24 persen. Realisasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Rp45,45 triliun. Sedangkan untuk lokasi usaha, investasi Jatim tahun 2019 paling banyak tersebar di Kota Surabaya Rp10,89 triliun, Kabupaten Pasuruan Rp9,87 triliun, Kabupaten Probolinggo Rp8,32 triliun, Kabupaten Malang Rp4,74 triliun, dan Kabupaten Gresik Rp4,67 triliun.

Penanaman modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya pada era otonomi daerah. Persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah dan menciptakan daya saing. Dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing, pemerintah daerah secara berkelanjutan, selalu berusaha mengembangkan penanaman modal di daerahnya. Berdasarkan hasil penelitian strategis terdapat 3 (tiga) potensi Kabupaten Gresik dalam kegiatan investasi, diantaranya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi infrastruktur.

Bentuk ketetapan hukum pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan investasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030. Strategi pembangunan dan pemetaan kawasan investasi di kabupaten Gresik difokuskan pada beberapa kawasan yaitu Gresik Utara, Gresik Selatan, Gresik Kota dan Pulau Bawean. Selain ketetapan hukum, peningkatan investasi di Kabupaten Gresik didukung dengan kemudahan pelayanan (*index of easy doing business*), konektivitas daerah dan kemantapan infrastruktur serta kondusifitas daerah.

Jumlah perizinan yang diterbitkan mencapai 5.274 izin lebih rendah dibanding tahun 2017 lalu sebanyak 8.178 izin namun nilai investasi yang direalisasikan lebih besar. Untuk meningkatkan kinerja perizinan, DPMPSTSP telah menetapkan aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan aturan itu, setiap pelaku usaha yang akan mengurus segala perizinan bisa melakukan pendaftaran secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS), selanjutnya mereka akan langsung mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2019 dengan total investasi mencapai 52,93 triliun yang terdiri dari 3.199.731,00 (juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 98.364,90 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Rincian realisasi investasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 0.4
Uraian Realisasi Investasi Tahun 2017 s/d 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	4.449.254,70	3.452.308,20	3.199.731,00
2	Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	436.663,70	165.375,80	98.364,90
3	Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	9.662.187,80	8.547.595,70	-
4	Rencana Investasi PMA (US\$ Ribu)	434.873,90	546.605,60	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan realisasi investasi secara komulatif sampai dengan periode 2019 mencapai 52,93 trilliun meningkat 48% dibandingkan komulatif realisasi investasi pada periode tahun dasar sebesar 23,45 trilliun (2011-2015).

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

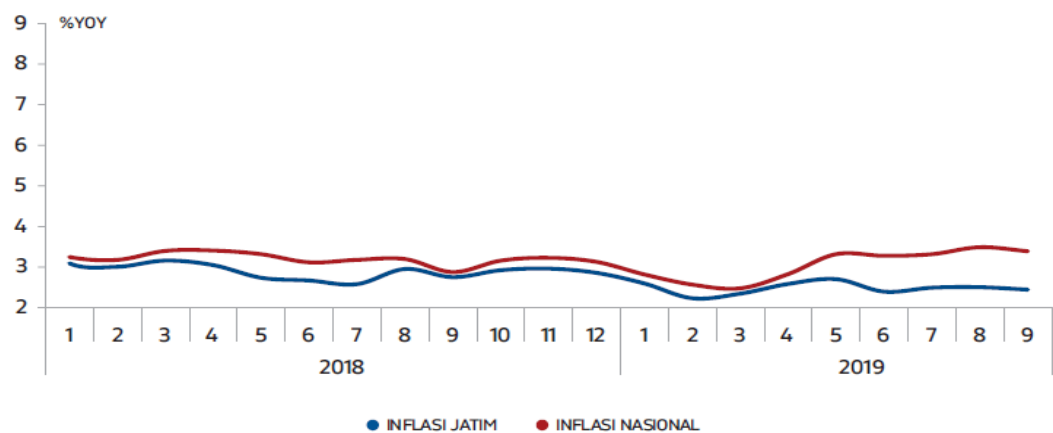
Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Selain itu pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis.

Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- 1) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*);
- 2) Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*);
- 3) Eskalasi nilai proyek (*project escalation*);
- 4) Penentuan target inflasi (*inflation targeting*);

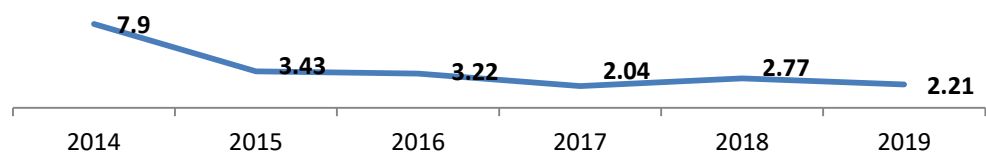
- 5) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (*budget indexation*);
- 6) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Sebagai proxy perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*);
- 8) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.



Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur (November 2019)

Gambar 0.4
Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 dan Tahun 2019

Pada triwulan III 2019, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,32%, melambat dibandingkan triwulan II 2019 yang tumbuh 5,69%. Penurunan disumbangkan oleh deselerasi konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, serta penurunan ekspor luar negeri yang disertai penurunan impor luar negeri. Sementara itu, penurunan kinerja sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta konstruksi menjadi penyebab penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari sisi penawaran. Inflasi Jawa Timur pada triwulan III 2019 mencapai 2,45% , lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,39%.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.5
Laju Inflasi Kabupaten Gresik

Posisi relatif laju inflasi Kabupaten Gresik dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur relatif terkendali. Laju Inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 terkendali pada angka 2.21 lebih rencah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.77.

3.1.1.5 Kinerja Perbankan

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Gresik, Jumlah Aktiva rupiah dan valuta asing di Kabupaten Gresik tertinggi terjadi di bulan Juli yaitu sebesar Rp38.667.732 (Juta Rupiah) sebagaimana berikut:

Tabel 0.5
Jumlah Aktiva Rupiah dan Valuta Asing di Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

Bulan	Aktiva Rupiah dan Valuta Asing
Januari	-
Februari	36.434.181
Maret	37.659.504
April	36.045.884
Mei	37.541.674
Juni	38.172.099
Juli	38.667.732
Agustus	38.032.872
September	37.648.351
Oktober	33.587.137
November	-
Desember	-

Catatan : (Data tidak tersedia)

Sumber : BPS Kab. Gresik

Sedangkan pinjaman rupiah yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR tertinggi di Bulan Juli yaitu sebanyak 65,75 triliun rupiah. Untuk pinjaman valuta asing yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR terbanyak di bulan Februari yaitu sebesar 10,61 triliun rupiah. Posisi pinjaman rupiah yang diberikan Bank Umum BPR Menurut jenis penggunaan di Kabupaten Gresik (Juta Rupiah) tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 0.6
Posisi Pinjaman Rupiah Yang Diberikan Bank Umum BPR Menurut Jenis Penggunaan Di Kabupaten Gresik (Juta Rupiah) Tahun 2019

Bulan	Jenis Penggunaan		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
Januari	-	-	-
Februari	37.179.256	10.269.218	6.961.320
Maret	40.966.249	10.317.227	7.043.895
April	40.921.199	10.492.813	7.100.369
Mei	41.753.881	10.400.777	7.174.405
Juni	42.241.959	10.442.043	7.148.702
Juli	46.470.832	12.074.327	7.206.477
Agustus	44.437.622	12.031.433	7.254.595
September	43.627.887	13.196.164	7.331.380
Oktober	39.915.744	13.158.000	7.426.346
November	41.490.505	13.075.965	7.486.901
Desember	43.541.762	12.823.391	7.574.726

Sumber: BPS Gresik Tahun 2020

3.1.1.6 Kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki 5 (lima) BUMD yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, PT BPR Jatim, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT Bank Jatim yang bergerak pada Sektor Perbankan serta PT Gresik Migas. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik yang direncanakan pada APBD 2020 adalah 1,08%.

Tabel 0.7

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

No	PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	APBD 2018	APBD 2019	APBD 2020
1	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik	1.130.000.000,00	587.474.927,00	600.000.000,00
2	PT GRESIK MIGAS	78.909.244,00	155.156.543,00	1.000.000.000,00
3	PT BANK JATIM	9.711.400.797,00	10.043.922.683,70	11.000.000.000,00
4	PT BPR JATIM	7.635.000,00	8.646.000,00	7.000.000,00
Total Bagian Laba Penyertaan Modal Pada BUMD		10.927.945.041,00	10.795.200.153,70	12.607.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		921.926.953.257,00	923.973.075.519,70	1.163.672.913.876,00
Kontribusi %		1,19%	1,17%	1,08%

Sumber: APBD Kabupaten Gresik

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kontribusi terbesar atas Penyertaan Modal pada BUMD ada pada PT.Bank Jatim sebesar Rp11.000.000.000,- disusul dengan PT Gresik Migas Sebesar Rp1.000.000.000,00,Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Rp600.000,00 dan PT BPR Jatim Rp7.000.000,-

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2021

Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan Wabah SARS-CoV-2 sebagai darurat kesehatan masyarakat untuk mendorong kepedulian Internasional pada 30 Januari 2020 diikuti dengan penetapan pandemi global Covid-19 pada 11 Maret 2020. Setiap negara di dunia didesak oleh WHO untuk mengadopsi social distancing atau jarak sosial dan karantina yang ketat sebagai langkah-langkah utama untuk menghindari penyebaran virus dan untuk melindungi kesehatan masyarakat . Pandemi yang telah melanda lebih dari ratusan negara menghadirkan kelindan efek multidimensi yang menuntut setiap negara, pemerintahan, teritori, dan terutama ras manusia untuk bersatu memerangi pandemi ini.

Berbagai respon kebijakan original maupun replikasi telah diterapkan oleh berbagai negara di Dunia sebagai respon global untuk mengatasi krisis Covid-19. Respon para ilmuwan telah diinisasi dengan tujuan untuk memahami viral

genetika, imunopatogenesis, dan strategi terapeutik. Publik dan penyandang dana swasta di seluruh dunia telah meluncurkan sejumlah inisiatif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung proyek multidisiplin menangani deteksi, pengobatan dan pencegahan infeksi SARS-CoV2.

Pemerintah dunia mendorong kolaborasi antara ilmuwan internasional, industri, komunitas layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan pemerintah untuk merespons COVID-19 yang terintegrasi dengan baik. Efek dramatis dari wabah COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa pandemi serupa tidak dapat dikelola hanya di tingkat nasional. Untuk alasan ini, aliansi, konsorsium, dan jaringan telah muncul di setiap benua untuk menghubungkan para ahli di berbagai bidang penelitian sains mendasar, uji klinis, sosial, ilmu perilaku, teknik, dan bioinformatika.

Zona euro mengalami pertumbuhan ekonomi yang buruk bahkan sebelum goncangan pandemi dengan ekspansi hanya 0,1% selama tiga bulan terakhir di penghujung tahun 2019. Produktivitas ekonomi ke-19 negara-negara zona euro menurun 3,8% selama kuartal pertama pada tahun 2020 dalam bayangan penyebaran coronavirus di seluruh Eropa. Analisis ekonomi saat ini menyatakan dengan pasti bahwa seluruh zona euro akan mengalami resesi terbesar sejak didirikan pada akhir 1990-an. Jerman, Perancis dan Italia, tiga ekonomi terbesar di serikat moneter telah memasuki resesi ekonomi. Eurostat merekam Kemerosotan Di Jerman, Prancis, dan Itali dalam skala Produk Nasional Bruto (PDB) jauh lebih dalam dibandingkan dengan pasar diharapkan. Meskipun negara hanya mempublikasikan data untuk kuartal pertama 2020, analisis memperkirakan resesi yang lebih besar untuk kuartal kedua dan ketiga tahun ini.^{1,2,3}

Dari masing-masing negara zona euro yang menerbitkan data yang relevan, Perancis melaporkan bahwa setelah resesi 0,1% untuk kuartal terakhir 2019, ekonominya menyusut 5,8% selama 3 bulan pertama 2020,. Kemerosotan ini menjadi resesi terbesar sejak Prancis mulai merekam data pada akhir 1940-an. Italia juga telah mengalami resesi untuk paruh pertama tahun ini, dengan ekonomi menyusut menjadi 4,7% setelah jatuh 0,3% pada akhir tahun 2019. Spanyol, salah satu negara dengan perekonomian terdampak parah pandemi

¹ European Council, Coronavirus Global Response. [Online], Available at: <https://ec.europa.eu>

² European Council, Eurostat, GDP Down by 3.8% in the Euro Area and by 3.5% in the EU, [Online] Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294-708/2-30042020-BP-EN.pdf/526405c5-289c-30f5-068a-d907b7d663e6>

³ M. McKee, D. Stuckler, If the world fails to protect the economy, COVID-19 will damage health not just now but also in the future, Nat. Med. (2020), <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0863-y>.

mengalami penurunan 5,2% pada kuartal pertama tahun sementara PDB di Belgia dan Austria masing-masing turun 3,9% dan 2,5%.^{4,5}

Ekonomi terkuat di zona Euro, Jerman, menyusut sebesar 2,2% pada kuartal pertama 2020. Pandemi Covid-19 mendorong ke dalam jurang resesi diikuti jumlah pengangguran yang disesuaikan secara musiman melonjak 373.000–2.64 juta pada bulan April. Tingkat pengangguran naik menjadi 5,8% dari level terendah 5% bulan sebelumnya. Pemerintah juga melaporkan jumlah pekerja 'setengah menganggur' menjadi 10,1 juta selama bulan April. Langkah-langkah kerja paruh waktu ini membantu mempertahankan angka ketenagakerjaan secara keseluruhan di Jerman⁶.

Menurut Reuters, para ahli dari Bank Dunia, World Resources Institute (WRI) dan organisasi lain memperingatkan bahwa pandemi coronavirus akan meninggalkan sekitar 100 juta 'miskin baru' yang tinggal di kota-kota di seluruh dunia karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan.^{7,8}

Dalam skenario ini, kebenaran menyedihkan lain yang harus dihadapi bahwa pandemi coronavirus akan memperlebar jurang pemisah antara kaya dan miskin. Sebagaimana setiap epidemi, kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat memperburuk tingkat penularan dan kematian. Faktor utama yang menghukum orang miskin menjadi sakit adalah kurangnya akses ke perawatan kesehatan, ditambah kondisi kehidupan yang buru.

Dalam konteks pandemi saat ini, faktor penentu utama infeksi risiko adalah kemungkinan bekerja dari jarak jauh atau Work From Home. Sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar angkatan kerja.

Untuk orang yang bekerja di luar rumah, pilihannya adalah antara kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, atau terus berjalan bekerja di tengah pandemi. Dan karena posisi keuangan mereka lebih genting, satu-satunya pilihan adalah untuk terus bekerja, bepergian meskipun kebanyakan kasus terkait dengan transportasi umum bahkan risiko infeksi untuk diri mereka

⁴ European Council, Coronavirus Global Response. [Online], Available at: <https://ec.europa.eu> (Accessed 1 May 2020) (2020)

⁵ European Council, Eurostat, GDP Down by 3.8% in the Euro Area and by 3.5% in the EU, [Online] <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294-708/23004-2020-BP-EN.pdf/526405c5-289c-30f5-068a-d907b7d663e6>

⁶ Financial Times, Germany Braced for Jobless Surge As Companies Rush for State Funds, [Online] <https://www.ft.com/content/5486b247-c73e-4887-a2b2-528b23e301a6>

⁷ Moloney, Cities Face 100 Million "new Poor" in Post-pandemic World: Experts, [Online] <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cities-trfn/cities-face-100-million-new-poor-in-post-pandemic-world-experts-idUSKBN22B3GG>

⁸ M.K. Anser, Z. Yousaf, M.A. Khan, A.A. Nassani, S.M. Alotaibi, M.M. Qazi Abro, X.V. Vo, K. Zaman, Does communicable diseases (including COVID-19) may increase global poverty risk? A cloud on the horizon, Environ. Res. 187 (2020) 109668, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109668>.

sendiri dan keluarga mereka semakin meningkat. Konsekuensi utama dari fenomena ini adalah disproporsi ras dalam persentase penyakit dan kematian. Di Amerika Serikat, Ras Afrika-Amerika yang terpapar SARS-CoV2 memiliki angka kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang kulit putih Amerika. Fakta tidak ada hubungannya dengan kecenderungan biologis atau genetik terhadap infeksi coronavirus tetapi lebih karena "kecenderungan sosial"⁹

Di Uni Eropa, telah diputuskan untuk memberikan bantuan keuangan sebesar 5% dari PDB-nya kepada negara-negara anggota-nya.¹⁰ Negara-negara yang terkena dampak terburuk dapat menggunakan dana tersebut untuk meringankan beban keuangan dari melalui langkah-langkah respon langsung termasuk bantuan kepada pendu-duk, bantuan medis dan peralatan, dukungan untuk kelompok rentan dan langkah-langkah untuk menanggulangi penyebaran penyakit, memperkuat kesiapan dan komunikasi. Di antara berbagai langkah fiskal diadopsi untuk mengatasi kejatuhan ekonomi, beberapa pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembayaran tertentu termasuk pajak, pinjaman atau tagihan listrik guna meningkatkan posisi likuiditas individu dan perusahaan yang menghadapi Kesulitan selama masa pandemi.

Di Italia, negara Uni Eropa yang paling parah terkena virus corona, memiliki ekonomi telah rusak sedemikian parah sehingga terjadi kekurangan makanan dan uang di beberapa daerah. Banyak dari "miskin baru" hanya bergantung terhadap donasi dan beberapa kasus penjarahan di supermarket telah dilaporkan. Situasi kritis ini mendorong orang Italia untuk memberikan sentuhan baru pada kebiasaan lama yang dikenal sebagai "suspended coffe". Dalam tradisi Neapolitan yang berusia berabad-abad ini, pelanggan bar membayar di muka untuk kopi untuk seseorang yang tidak mampu membelinya. Konsep yang sama sedang diterapkan "Belanja bahan makanan yang ditangguhkan" dimana pelanggan membeli makanan yang selanjutnya diletakkan di rak panjang untuk dapat diambil siapapun yang membutuhkan. "Mereka yang bisa, memasukkan sesuatu, mereka yang tidak bisa, membantu dirimu sendiri" ini adalah slogan yang ditulis pada keranjang solidaritas yang muncul di supermarket, toko kelontong lokal dan bahkan di jalanan di seluruh Italia.¹¹ Di luar aksi solidaritas ini, pemerintah juga menganggarkan € 400

⁹ C.W. Yancy, COVID-19 and african americans, JAMA 323 (19) (2020) 1891–1892, <https://doi.org/10.1001/jama.2020.6548>.

¹⁰ European Union, EU Solidarity Fund for COVID-19. [Online], https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19

¹¹ Sannino C., Repubblica, 1 April 2020 [Online] https://rep.repubblica.it/pwa/rubrica/omissis/2020/04/01/news/chi_puo_metta_chi_non_puo_prenda-252773346/

milliar untuk voucher makanan bagi mereka yang tidak mampu membeli bahan makanan.¹²

Amerika Serikat, negara dengan kekayaan dan pemikiran kesehatan terbesar di dunia, gagal mengindahkan peringatan dari Cina dan Italia. Negara ini menolak untuk mengakui “keadaan darurat inter-nasional” sebagaimana diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 31 Januari 2020 dan tidak memiliki sebuah rencana kesiapan pandemi untuk memobilisasi sistem kesehatan Amerika menanggapi pandemi virus yang nyatanya datang sedini mungkin pada Februari. Kegagalan kepemimpinan nasional, diperparah oleh politik divisi dan negara yang terfragmentasi oleh berbagai respon negara bagian menyebabkan Amerika Serikat menjadi episentrum pandemi Covid-19 di dunia pada 20 Juni dengan 2 juta kasus dan terus bertambah serta kematian lebih dari 120.000 orang.

Pandemi virus corona telah memicu resesi paling tajam di Amerika Serikat sejak the Great Depression pada tahun 1929. Pada dua setengah bulan pertama tahun 2020, ekonomi Amerika Serikat terus tumbuh dengan kecepatan tetap tetapi tiba-tiba berhenti pada pertengahan Maret ketika bisnis, industri perjalanan restoran dan toko ritel ditutup tiba-tiba dan puluhan juta orang Amerika diperintahkan untuk tinggal di rumah dalam upaya untuk memperlambat penyebaran SAR-CoV2. Lebih dari 35 juta orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan telah mengajukan klaim pengangguran dalam beberapa minggu terakhir. Penyebaran coronavirus telah mengancam tatanan sosial dan ekonomi komunitas Amerika. Sebuah peristiwa tunggal melemparkan lebih dari 35.000.000 orang menjadi pengangguran dan selangkah lebih dekat ke kemiskinan. Perluasan penerima manfaat pengangguran dengan paket stimulus satu kali datang dari House dan Senat tetapi hanya menjadi solusi sementara untuk ketidaksetaraan struktural yang jauh lebih besar yang terkekspos selama pandemi.

Pandemi Covid-19 menyoroti kelemahan dalam sistem dan mengungkapkan dua kondisi ekonomi yang telah dibiarkan tak terkendali, kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi. Jaring pengaman sosial inklusif yang mencakup pendapatan dasar dan cakupan kesehatan mungkin merupakan satu-satunya solusi untuk memastikan bahwa warganya memiliki fondasi yang kuat untuk kesiapsiagaan menghadapi pandemi berikutnya.

¹² A. Giuffrida, L. Tondo, The Guardian, (2020) [Online] <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/singapore-stops-italy-fear-social-unrest-mount-coronavirus-lockdown>

Resiko kedalaman efek negatif pandemi ini dapat melampaui krisis keuangan global 2008-09. Ada persamaan antara krisis COVID-19 dan krisis keuangan global 2007-2008. Seperti pada 2020, banyak orang-orang sebelumnya berasumsi bahwa dampaknya sebagian besar akan akan dilokalisasi (dalam hal ini berdasarkan dengan asumsi bahwa krisis subprime mortgage akan menjadi masalah yang relatif kecil di AS, tetapi pada akhirnya mempengaruhi sistem keuangan global) (Elliot, 2020). Gangguan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 tidak hanya merusak tetapi juga memiliki implikasi luas karena menciptakan guncangan permintaan dan penawaran di hampir setiap bidang usaha (El-Erian, 2020)¹³. Resesi global 2020 tidak hanya mungkin tetapi juga sangat mungkin terjadi sebagaimana diramalkan oleh IMF dengan berbagai penyebab diantaranya, Pertama, mesin pertumbuhan ekonomi dunia, Cina, Amerika, Uni Eropa sangat terpengaruh. Goldman Sachs memperkirakan kontraksi -9 persen dalam pertumbuhan PDB Tiongkok pada Kuartal pertama tahun 2020 dan penurunan pertumbuhan PDB AS sebesar -6 persen pada kuartal kedua tahun 2020. Penurunan ini jauh lebih buruk daripada pertumbuhan -2,2 persen yang pernah dicatat pada kuartal keempat tahun 2008 (Bloomberg 2020; Goldman Sachs 2020).

Kedua, melalui efek penularan, kemerosotoan negara ekonomi besar akan memengaruhi seluruh dunia. Bukti ini dapat dilihat pada penurunan tajam harga komoditas sejak pertengahan Februari 2020, dengan harga minyak jatuh ke level terendah selama 18 tahun. (The Economist 2020a; CNN 2020). Ketiga, sebagian besar negara di seluruh dunia akan terkena dampak pandemi. Ini menyiratkan biaya langsung terkait dengan morbiditas, perawatan kesehatan, dan ketidakpastian. Ini juga menyiratkan biaya tidak langsung terkait dengan pengendalian dan langkah-langkah mitigasi, seperti pengurangan tenaga kerja, kapasitas produksi, dan produktifitas.

Jika pandemi tidak dikelola dengan baik maka dapat menghasilkan serangkaian krisis lain, termasuk krisis keuangan (jika kebangkrutan merajalela dan bank menjadi tidak likuid atau bangkrut), sektoral runtuh (misalnya dalam maskapai penerbangan, pariwisata, dan layanan perhotelan), dan krisis ekonomi makro (jika biaya mitigasi berubah menjadi berlebihan mengingat keterbatasan fiskal suatu negara ruang dan tingkat pendapatan) dengan konsekuensi mengerikan bagi kesejahteraan dan kemiskinan pengentasan.^{14,15}

¹³ Bénassy-Quéré, Agnès, Ramon Marimon, Jean Pisani-Ferry, Lucrezia Reichlin, Dirk Schoenmaker, Beatrice Weder di Mauro (2020), 'COVID-19: Europe needs a catastrophe relief plan', 11 March 2020. <https://voxeu.org/article/covid-19-europe-needs-catastrophe-relief-plan>

¹⁴ Furman, J. 2020. "Protecting People Now, Helping the Economy Rebound Later." In *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*, edited by R. Baldwin and B. Weder di Mauro, 191–96. Center for Economic Policy and Research. Washington, DC: CEPR Press.

Di negara berkembang, kerentanan terhadap pandemi lebih tinggi dan kemampuan untuk menghadapinya melalui kebijakan lebih rendah daripada yang dikembangkan negara maju. Selain efek langsungnya pada resiko kesehatan, untuk negara berkembang yang terpapar COVID-19 membawa permintaan eksternal yang tajam yang menuntun resesif massif. Misalnya, di negara-negara di Asia Timur dimana perdagangan dan pariwisata adalah bagian besar dari ekonomi (Bank Dunia 2020a), negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor komoditas pendapatan pemerintah (Bank Dunia 2018; The Economist 2020a), dan atau bergantung pada pengiriman uang dari negara maju (Hausmann 2020). Beberapa negara, seperti Meksiko, telah menolak keras biaya ekonomi akibat pengendalian sementara negara tetangga Guatemala telah menutup perbatasan dan transportasi (The Wall Street Journal 2020).

Pada negara dengan tingkat pendapatan rendah sebagaimana di Afrika, krisis coronavirus mempengaruhi semua segmen populasi Afrika terutama kelompok sosial dalam situasi yang paling rentan termasuk orang yang hidup dalam kemiskinan, orang tua, orang dengan kecacatan, pemuda, dan masyarakat adat. Tunawisma di negara-negara Afrika tidak dapat menemukan tempat berlindung yang aman dan sangat terpapar bahaya coronavirus. Orang-orang tanpa akses ke air yang mengalir, pengungsi, migran, atau orang-orang terlantar juga akan menderita baik dari pandemi coronavirus maupun dampak ekonomi yang dihasilkan. Jika krisis sosial yang disebabkan oleh coronavirus tidak tepat ditangani melalui kebijakan sosial, pandemi COVID-19 juga dapat meningkatkan ketimpangan, pengucilan, diskriminasi dan pengangguran global di negara-negara Afrika dalam jangka menengah dan panjang.

Tabel

Indikator Kesehatan Masyarakat, Pasar Tenaga Kerja, Ruang Fiskal, dan Tata Kelola Berdasarkan Kelompok Pendapatan Negara¹⁶.

Kategori	Indikator	Tingkat Pendapatan			
		Rendah	Menengah Ke Bawah	Menengah Ke Atas	Tinggi
Kesehatan Masyarakat	Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit tiap 1.000 orang, 2014-18	0,69	1,32	2,18	4,2
	Jumlah Dokter, Suster, dan Bidan tiap 1.000 orang, 2014-18	1,69	2,57	5,63	11,78

¹⁵ Odendahl, C., and J. Springford. 2020. “Bold Policies Needed to Counter the Coronavirus Recession.” In Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, edited by R. Baldwin and B. Weder di Mauro, 145–50. Center for Economic Policy and Research. Washington, DC: CEPR Press.

¹⁶ ILO (2018, 2020); Kose, Ohnsorge, and Sugawara (2018); Loayza and Meza-Cuadra (2018); Health Nutrition and Population Statistics, World Bank (2020b); World Development Indicators, World Bank (2020c); Worldwide Governance Indicators, World Bank (2019).

Kategori	Indikator	Tingkat Pendapatan			
		Rendah	Menengah Ke Bawah	Menengah Ke Atas	Tinggi
	Infeksi pernapasan akut diperlakukan sebagai bagian dari anak di bawah 5 tahun dengan batuk dan napas cepat (%), 2009-18	44,5	54	69,4	86,33
	Risiko pengeluaran bencana untuk perawatan bedah (%), 2013-17	64,3	35,02	15,82	9,81
	Harapan hidup saat lahir (tahun), 2017	62	69	74	81
Pasar Tenaga Kerja	Perkiraan tenaga kerja informal sebagai bagian dari lapangan kerja (%), 2016	92,7	83	55,35	14,43
	Wiraswasta sebagai bagian dari pekerjaan (%), 2019	82,49	64,03	40,6	12,28
Ruang Fiskal	Utang bruto pemerintah umum (% dari PDB), 2018	46,82	53,21	50,55	56,92
	Utang pemerintah umum yang dipegang oleh bukan penduduk sebagai bagian dari utang (%), 2018	57,14	55,88	38,57	46,41
	Kredit domestik ke sektor swasta (% dari PDB), 2018	14,09	27,69	48,42	110,8
	Peringkat utang jangka panjang mata uang asing (Indeks: rendah dari 1 ke tinggi 21), 2018	7,17	7,2	9,36	16,67
	Pendapatan pajak (% dari PDB), 2016	15,4	15,08	15,12	19,03
	Efektivitas Pemerintah, 2018	-1,12	-0,57	-0,09	1,1
Tata kelola	Kualitas Peraturan, 2018	-0,94	-0,54	-0,14	1,06
	Aturan Hukum, 2018	-1,01	-0,64	-0,26	1,05
	Pengawasan Pada Korupsi, 2018	-1,02	-0,62	-0,32	-0,94

Sistem perawatan kesehatan di negara berkembang memiliki kapasitas yang rendah. Banyak orang tidak memiliki akses ke perawatan layanan kesehatan esensial dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan sehingga masyarakat hidup dengan risiko pengeluaran kesehatan yang sangat besar (Wagstaff dan Neelsen 2019). Secara khusus, kapasitas untuk pengobatan pasien COVID-19 yaitu, layanan rumah sakit khusus dengan ventilator untuk

mengatasinya kasus kritis sangat tidak memadai di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah. Misalnya, Malawi hanya memiliki 25 tempat tidur perawatan umum populasi 17 juta sedangkan Zimbabwe tidak memiliki satu pun (The Guardian 2020). Meskipun negara-negara berkembang memiliki populasi yang lebih muda dan iklim lebih hangat (kondisi yang mungkin terkait dengan berkurangnya risiko COVID-19), mereka juga memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi, HIV / AIDS, dan penyakit lain yang membuat mereka lebih rentan (The Economist 2020c; The Washington Post 2020).

Sektor pekerjaan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sebesar 50 persen hingga 90 persen didominasi tenaga kerja informal. Pekerja di sektor ini tidak memiliki manfaat seperti asuransi pengangguran, asuransi kesehatan, maupun cuti berbayar. Pekerja sektor informal sangat terpapar tidak hanya pada dampak kesehatan tetapi juga terdampak dari berbagai kebijakan mitigasi dalam penanggulangan penyebaran penyakit. Sebagian besar pekerja informal, terutama pekerja wiraswasta, tergantung pada pekerjaan sehari-hari untuk membayar kebutuhan dasar rumah tangga. Jika mereka tidak dapat bekerja untuk waktu yang lama maka seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan mereka sepenuhnya beresiko secara ekonomi. Kondisi ini menyebabkan lockdown tidak mungkin berlaku di banyak negara berkembang karena masyarakat cenderung untuk lebih bekerja meskipun ilegal daripada kelaparan. Selain itu, tenaga kerja informal yang luas menyiratkan bahwa bantuan dan pemulihan kebijakan yang ditujukan untuk tenaga kerja formal seperti meningkatnya pengangguran, asuransi, mengurangi gaji dan pajak penghasilan, dan memperpanjang pembayaran akibat cuti sakit memiliki efek yang sangat terbatas di negara berkembang.

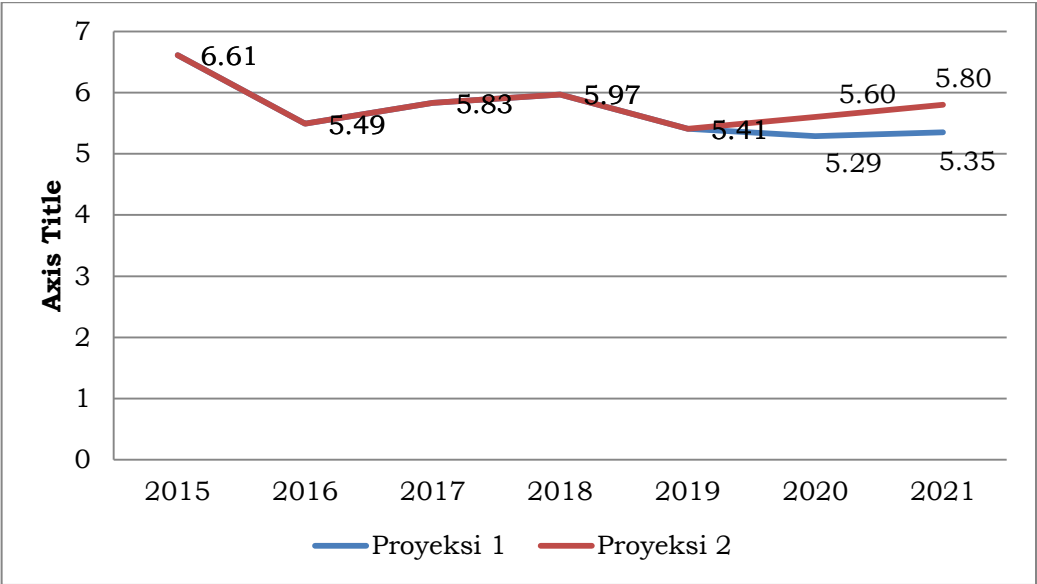
Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup yaitu kemampuan untuk menggunakan dana publik dan sumber daya untuk menghadapi guncangan negatif yang besar (Kose, Ohnsorge, dan Sugawara 2018). Meski negara berkembang tidak memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih besar daripada yang dikembangkan., utang mereka lebih tunduk pada risiko nilai tukar dan jatuh tempo, peringkat kreditnya lebih rendah dan pasar keuangan mereka lebih dangkal. Selain itu, pajak negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki kontribusi yang kecil dengan administrasi pajak yang kurang efisien sehingga dukungan kebijakan fiskal dalam penanganan pandemi lebih sulit untuk diterapkan di negara berkembang daripada negara maju.

Kualitas tata kelola pemerintahan menentukan efektivitas kapasitas negara untuk mengelola guncangan pandemi dan memberikan bantuan kepada warga negara (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi 2011; Chuah, Loayza, dan Myers 2020). Kebanyakan negara-negara berkembang menderita korupsi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kompetensi birokrasi yang rendah, dan sistem regulasi yang berbelit. Menghadapi tantangan COVID-19, pemerintah negara berkembang berpotensi mengalami kesulitan untuk melakukan langkah-langkah kompleks untuk mengatasi krisis dan lebih mengandalkan kebijakan bantuan darurat serta pemulihan langsung.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan beberapa indikator makro ekonomi dan sosial sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Grafik proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dapat diuraikan sebagaimana berikut:



Gambar 0.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2021

Berdasarkan Gambar 3.2, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 5,60 pada tahun 2020 dan 5,80 pada tahun 2021 memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun berdasarkan tren linier 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik juga di proyeksikan meningkat mencapai 5,29 pada tahun 2020 dan 5,35 pada tahun 2021.

3.1.2.2 PDRB KABUPATEN GRESIK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Rerata laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,27%) diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,16%), Informasi dan Komunikasi (9,10%). Sedangkan rerata laju pertumbuhan terendah adalah Pertambangan dan penggalian (3,36%). Sektor manufaktur dengan kontribusi PDRB terbesar memiliki rerata laju pertumbuhan 6,1% sedangkan sektor pertanian memiliki rerata laju pertumbuhan 5,28%. Proyeksi laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sektor Transportasi dan Konstruksi (10,10%), Perdagangan (10,01%) dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan (8,77%). Adapun sektor manufaktur diproyeksikan tumbuh sebesar 4,88% pada tahun 2020 dan 4,68% pada tahun 2021. Sedangkan sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 2,58% pada tahun 2020 dan 2,22% pada tahun 2021.

Rerata laju pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (5,87%) sedangkan rerata laju pertumbuhan terendah adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (2,84%). Proyeksi pada tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh tertinggi sebesar 4,9% dan 4,57% diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,57% dan 3,82%. Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 3,31% dan 3,38% serta Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1% dan (0,01)%.

Tabel 0.8
LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

No	KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,86	2,78	3,19	3,75	2,6	3,57	3,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,07	4,15	3,08	3,51	2,34	1,00	-0,01
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,55	5,75	8,17	6,21	3,69	4,90	4,57
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,74	6,49	2,39	3,21	2,72	3,31	3,38
5	Perubahan Inventori	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Net Ekspor	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jumlah		15,22	19,17	16,83	16,68	11,35	12,78	11,76

Sumber: BPS Kabupaten Gresik

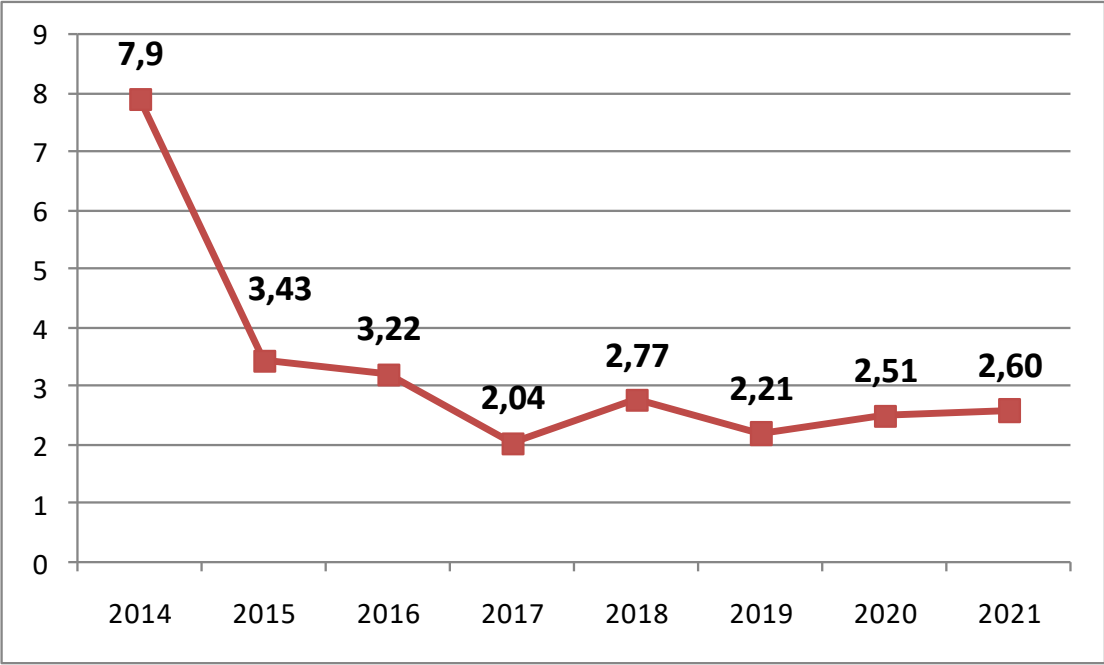
Tabel 0.9
Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2021	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,6	5,2	5,42	5,18	6,07	6,25	0,39	2,23	2,58
B. Pertambangan dan Penggalan	5,14	4,1	-6,6	9,41	5,94	2,17	-0,52	0,49	0,84
C. Industri Pengolahan	5,59	6,64	7,58	6,98	5,62	4,21	5,41	4,68	4,88
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,5	12,6	7,03	7,44	-0,6	4,86	4,85	-0,79	0,36
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,89	2,52	7,72	1,42	4,96	4,85	6,25	4,98	5,00
F. Konstruksi	7,74	7,79	8,24	8,1	9,87	9,77	9,05	10,25	10,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,1	10,4	9,47	6,66	9,19	8,09	6,73	5,37	5,88
H. Transportasi dan Pergudangan	6,79	6,58	6,64	5,9	6,33	5,7	11,9	10,62	10,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,11	8,24	7,45	9,1	8,75	9,54	8,33	8,79	8,77
J. Informasi dan Komunikasi	9,57	10,7	12,2	6,58	6,83	8,74	9,71	7,98	8,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,75	10,2	12,3	5,15	7,34	7,43	4,26	3,08	3,80
L. Real Estat	6,62	6,65	6,62	6,41	6,02	8,89	7,9	8,48	8,26
M,N. Jasa Perusahaan	4,61	4,37	6,14	8,55	7,39	7,24	6,45	8,34	8,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,31	3,66	1,84	0,2	6,43	6,02	3,86	3,93	3,97
P. Jasa Pendidikan	6,43	7,06	6,78	6,97	7,88	7,19	8,46	8,78	8,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,5	9,72	10,6	5,64	7,94	6,28	7,86	3,68	4,49
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,48	4,05	5,54	5,09	5,85	5,18	8,26	8,13	7,76

Sumber : BPS Kabupaten Gresik

3.1.2.3 **Inflasi**

Indeks Harga Konsumen (IHK) secara luas telah diterima sebagai suatu indikator umum dari inflasi untuk mengidentifikasi sumber-sumber inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut Inflasi (Kenaikan Harga) dan Deflasi (Penurunan Harga). Inflasi dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nilai inflasi Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir stabil pada kisaran 2%-3%. Proyeksi inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 2,51 % sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,60%. Laju inflasi pada tahun 2020 dan tahun 2021 membutuhkan kebijakan khusus oleh pemerintah dalam rangka pemulihan dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19. Tren line laju inflasi dan proyeksi inflasi diestimasikan sebagaimana berikut:



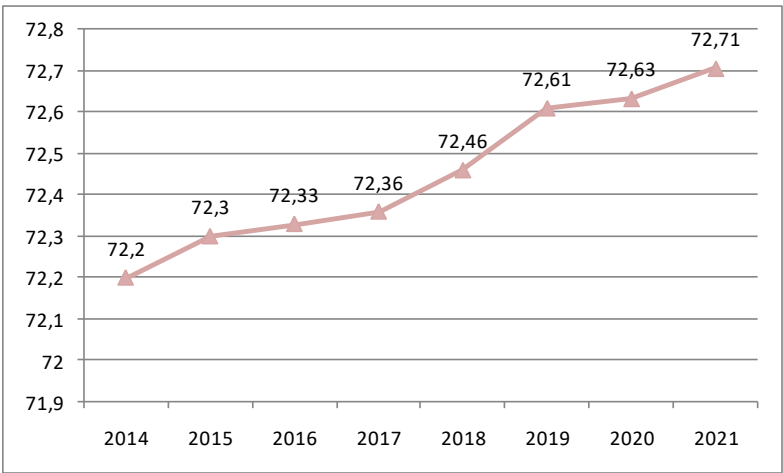
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 0.7
Proyeksi Laju Inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Tahun 2021

3.1.2.4 **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standar of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik selalu meningkat secara

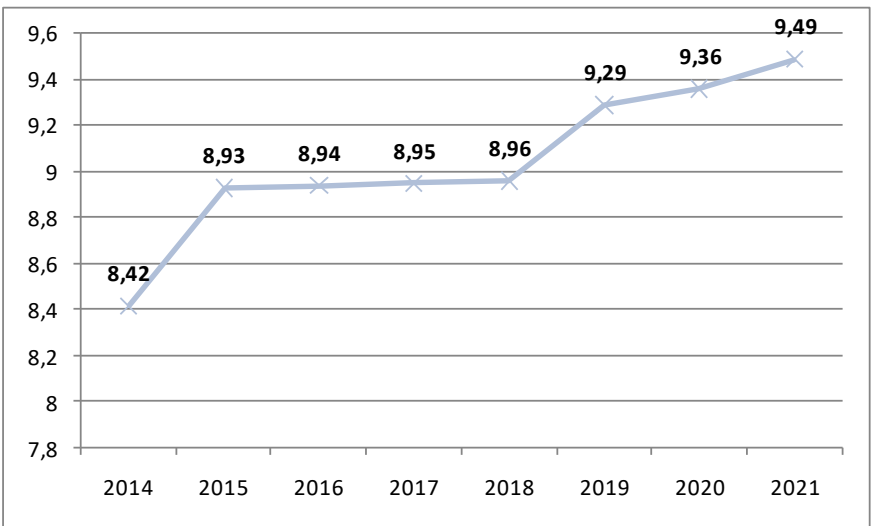
konsisten dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 72,2 tahun pada tahun 2014 dan sebesar 72,61 tahun pada tahun 2019. Proyeksi Angka Harapan Hidup pada tahun 2020 diestimasikan sebesar 72,63 tahun sedangkan pada tahun 2021 diproyeksikan kembali meningkat mencapai 72,71 tahun. Proyeksi Angka Harapan Hidup diestimasikan sebagaimana berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 0.8
Proyeksi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Gresik 2020 – 2021

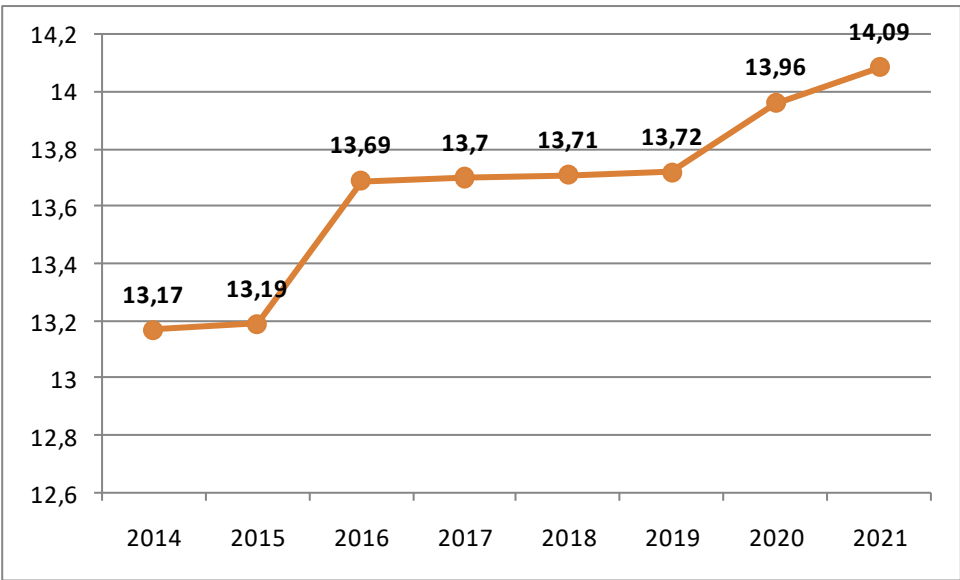
Berdasarkan angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Gresik tahun 2014 sampai dengan 2019, rata-rata angka harapan hidup adalah 72.38 tahun. Selain angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dapat diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan tahun rata-rata lama sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata tahun penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sebagaimana tabel berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 0.9
Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Tahun 2021

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 mencapai rata-rata lama sekolah tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 9,29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan bangku sekolah semakin tinggi. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah diproyeksikan semakin meningkat mencapai 9,36 tahun dan 9,49 tahun. Selain rata-rata lama sekolah, dimensi pengetahuan diukur dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13.72 tahun pada tahun 2019 yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.



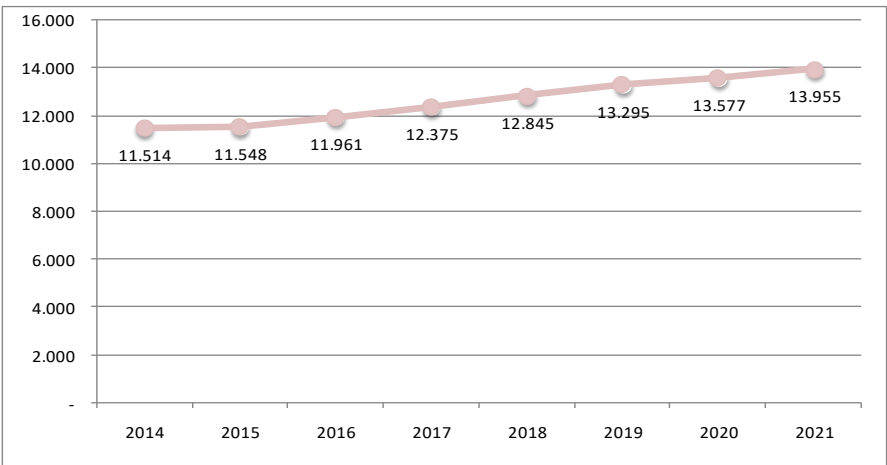
Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 0.10
Proyeksi Harapan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Tahun 2021

Harapan rata-rata lama sekolah Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir namun mengalami perlambatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dimana rata-rata lama sekolah bergerak pada kisaran 13,69 sampai dengan 13,72 tahun. Pada tahun 2020 selaras dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah Kabupaten diproyeksikan kembali meningkat pada angka 13,96 tahun dan 14,09 tahun.

Dimensi standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Kabupaten Gresik semakin meningkat secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai pengeluaran per kapita (ribu rupiah) mencapai 11.514 pada tahun 2014 meningkat secara signifikan mencapai 13.295 pada tahun 2019. Proyeksi pengeluaran per kapita Kabupaten Gresik pada tahun 2020 dan 2021 diestimasikan kembali meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian

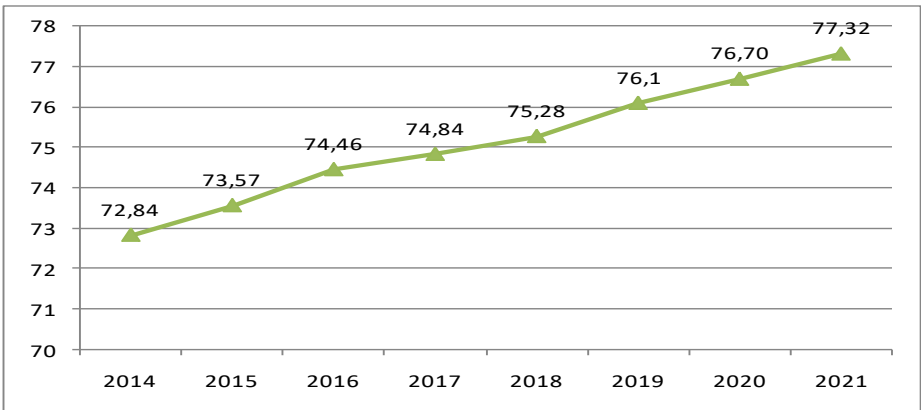
masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 mencapai 13.577 dan 13.955.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.11
Proyeksi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Gresik 2020-2021

Peningkatan pada setiap dimensi Indeks Pembangunan Manusia memberikan efek selaras terhadap pertumbuhan IPM di Kabupaten Gresik yang secara konsisten terus bertumbuh hingga mencapai 76.1 pada tahun 2019 dari 72,84 pada tahun 2014. IPM Kabupaten Gresik diproyeksikan kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai 76,70 dan 77,32 pada tahun 2021.



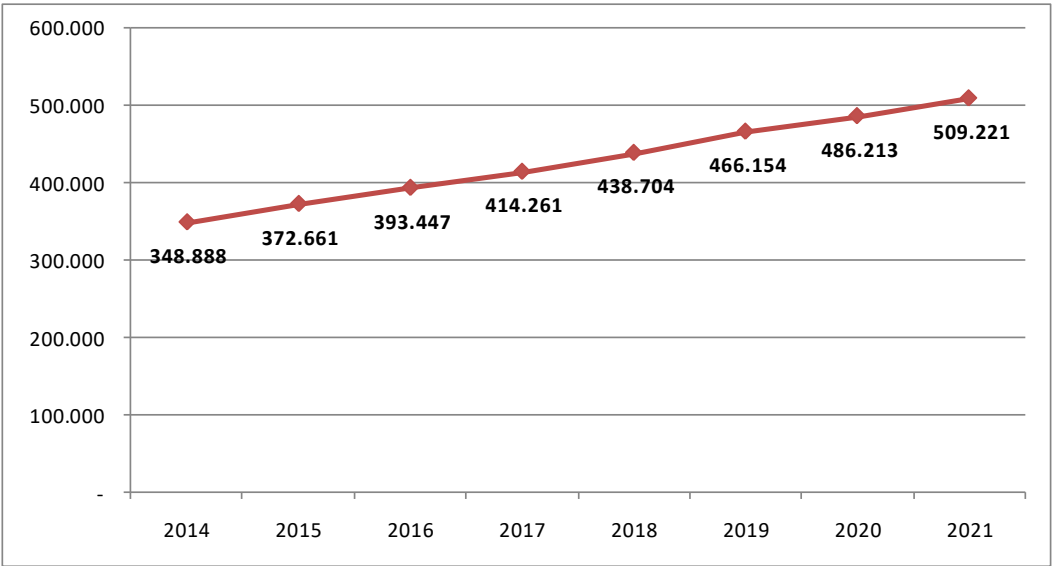
Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.12
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2021

3.1.2.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi multidimensional pada keterbatasan akses terhadap pemenuhan hak pada dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, sipil, politik, ketimpangan gender, kesenjangan geografis, maupun beban kependudukan. Kemiskinan di Indonesia saat ini masih diukur pada dimensi

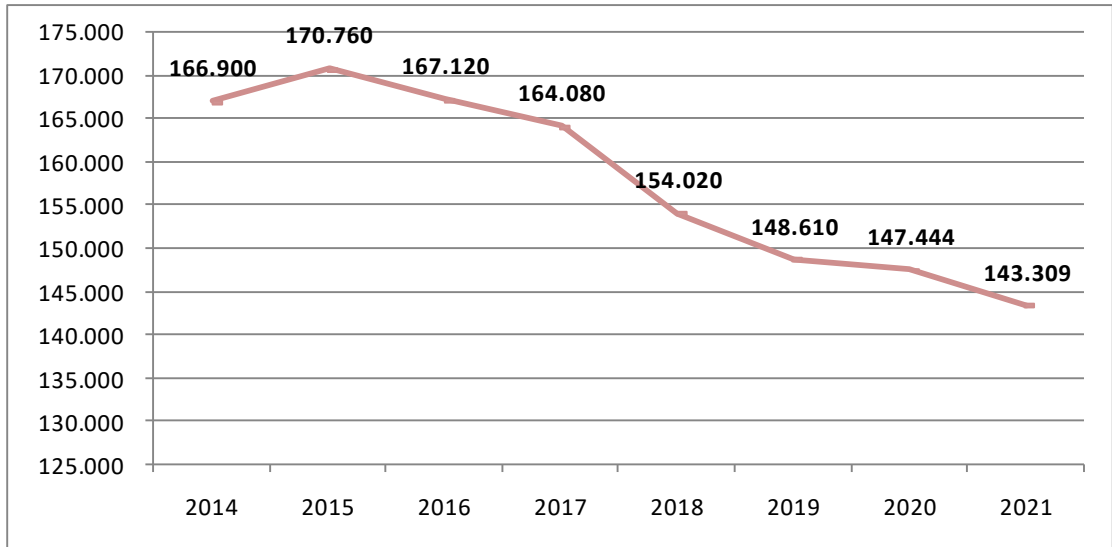
ekonomi dengan garis kemiskinan yang mengacu pada harga kebutuhan makanan dan non makanan. Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir relatif mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) mencapai Rp466.154 per Kapita per Bulan dan diproyeksikan kembali meningkat pada Tahun 2020 mencapai Rp486.213 per Kapita per Bulan dan pada tahun 2021 mencapai Rp509.221 per Kapita per Bulan. Kenaikan besaran garis kemiskinan menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk miskin juga semakin meningkat.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.13
Proyeksi Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik 2020-2021

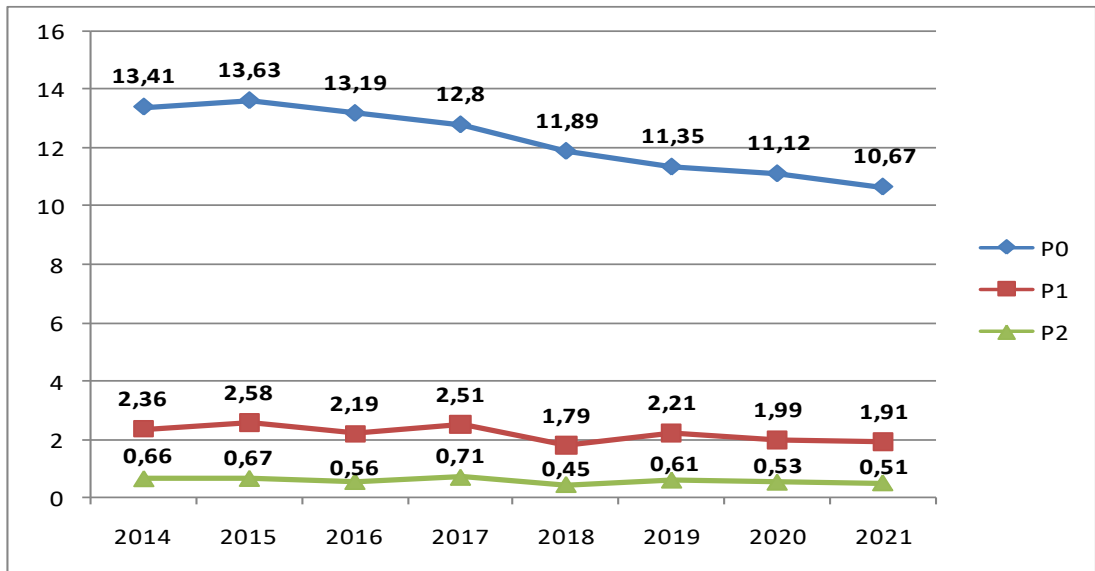
Peningkatan garis kemiskinan tidak selaras dengan jumlah penduduk miskin selama tahun 2014 sampai dengan 2019 yang mengalami penurunan namun melambat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin mencapai 166.900 jiwa turun sebesar 23.591 jiwa selama lima tahun terakhir mencapai 143.309 jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk miskin kabupaten Gresik diproyeksikan semakin berkurang pada Tahun 2020 dan 2021 seiring dengan peningkatan perekonomian daerah, pengendalian laju inflasi, dan peningkatan pembangunan manusia yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi jumlah penduduk miskin Kabupaten Gresik semakin berkurang hingga mencapai 143.309 pada tahun 2021.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.14
Proyeksi Jumlah Penduduk Kemiskinan Kabupaten Gresik 2020-2021

Penurunan jumlah penduduk miskin selaras dengan penurunan Persentase penduduk miskin (PO) hingga menyentuh level 11,35% pada tahun 2019 atau turus sebesar 2,06 basis poin dari Tahun 2014 sebesar 13,41. Penurunan persentase penduduk miskin secara konsisten pada 5 (lima) tahun terakhir namun cenderung melambat. Persentase penduduk miskin (PO) diproyeksikan menurun mencapai 10,67% secara linear dan ditarget di bawah 10% pada kinerja RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Penurunan kemiskinan tidak selaras dengan kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif yang mengisyaratkan bahwa Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) dan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P2) masih belum sepenuhnya terentaskan. Kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 2.21 dari sebelumnya 1.79 pada tahun 2018 dan diproyeksikan mengalami penurunan mencapai 1,99 pada tahun 2020 dan kembali menurun 1,91 pada tahun 2021. Sementara itu, keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan, yakni dari 0.45 pada tahun 2018 menjadi 0.61 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021, keparahan kemiskinan diproyeksikan mengalami penurunan 0,53 dan 0,51.



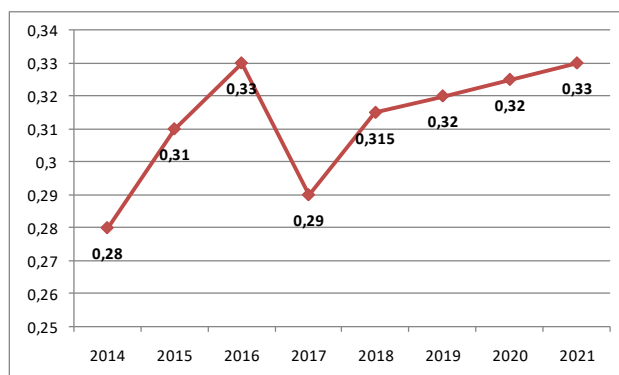
Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.15
Proyeksi Persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Kabupaten Gresik 2020-2021

3.1.2.6 Rasio Gini

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan adalah menggunakan indeks gini. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). BPS menggunakan pendekatan pengeluaran dengan asumsi pengeluaran yang besar akan menghasilkan pendapatan yang besar.

Rasio Gini Kabupaten Gresik cenderung mengalami fluktuatif namun pada kisaran ketimpangan yang rendah. Proyeksi Gini ratio pada Tahun 2020 mencapai 0,32 sedangkan tahun 2021 diestimasikan mencapai 0,33. Berikut merupakan rasio gini di Kabupaten Gresik:

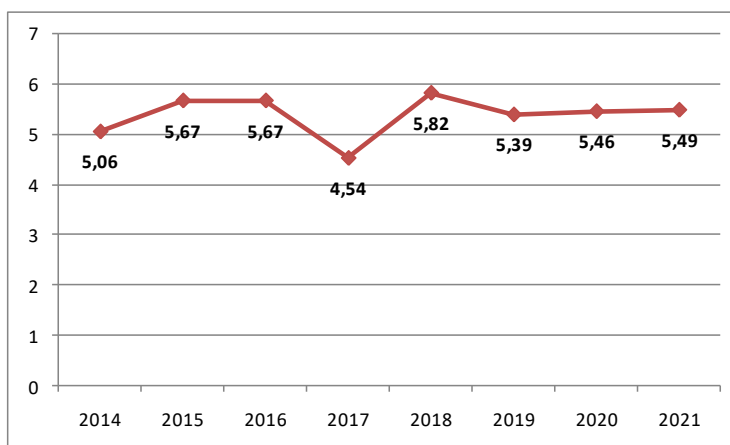


Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.16
Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Gresik 2020 – 2021

3.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi pada kisaran 4,5-5,8% dengan persentase terendah pada tahun 2017 mencapai 4,54% dan tertinggi 5,82% pada Tahun 2018. Tingkat pengangguran diproyeksikan masih berada pada kisaran 5% sebesar 5,46% pada tahun 2020 dan 5,49% pada tahun 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik

Gambar 0.17
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik
2020 – 2021

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

3.1.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian 2020 dan 2021

Pencapaian kinerja utama pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada tantangan multidimensional yang terjadi baik pada konstelasi lokal, regional, maupun global. Tantangan perekonomian pada tahun 2020 ini adalah kondisi pandemi covid Global yang memangkas proyeksi pendapatan nasional dan daerah hingga mencapai 40% diikuti dampak sosial ekonomi masyarakat secara parsial. Kondisi pandemi juga berdampak langsung terhadap pertukaran nilai mata uang rupiah yang cenderung menurun terhadap mata uang asing namun dapat dikendalikan selaras dengan nilai inflasi yang masih dalam batas wajar. Kondisi pandemi juga berpengaruh terhadap peredaran barang dan jasa yang terhambat bukan hanya pada konektivitas namun proses produksi yang sebagian terhenti disebabkan oleh prioritas kesehatan sumber daya manusia dan penerapan protokol kesehatan selama pandemi.

Keadaan pandemi memaksa pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan intervensi secara ekonomi melalui kebijakan moneter yang dirumuskan oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal dengan berbagai instrumen mulai dari relaksasi hingga penghapusan pajak dan retribusi. Pada

dimensi pembangunan, penanganan pandemi menghambat sebagian besar pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di Daerah pada tahun 2020.

Penerapan protokol kesehatan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan serentak oleh pemerintah Daerah sejak permulaan kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 diarahkan pada tatanan hidup baru atau *new normal*. Pada tatanan baru ini perekonomian diharapkan kembali pulih dengan berbagai peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Pemulihan ekonomi nasional dan regional dari keadaan yang menurun signifikan untuk kembali stabil atau *big restart* telah ditunjukkan dalam pergerakan indeks harga saham gabungan yang kembali mengalami peningkatan *net buy* sejak penjualan besar-besaran selama masa pandemi di awal Maret sampai dengan Mei., perbaikan mata uang rupiah, dan peningkatan produksi dalam negeri.

Pemulihan ekonomi menjadi tantangan sekaligus prioritas kebijakan perekonomian nasional tahun 2021. Kabupaten Gresik menyambut pemulihan ekonomi dengan fundamental perekonomian makro yang kuat sebagaimana dijelaskan bahwa kondisi perekonomian Gresik selalu diatas regional Provinsi Jawa Timur dan nasional, pembangunan manusia yang meningkat secara berkelanjutan, penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi dan tingkat pengangguran, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah secara massif.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pada Alokasi anggaran Tahun 2021, selain memperhatikan target akhir pencapaian indikator yang sudah ditentukan pada Dokumen Perencanaan Menengah, Penganggaran juga diarahkan dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui pemulihan dampak

sosial ekonomi sebagaimana amanah PMDN No. 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021.

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019, APBD 2020 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Gresik tahun disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 0.10
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah 2021

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	2.875.920.087.365	3.110.031.675.007,09	3.414.635.118.176	3.537.534.599.080
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	956.832.098.114	980.751.230.877,09	1.163.672.913.876	1.223.906.780.876
4.1.01	PAJAK DAERAH	575.932.431.125,46	642.192.435.921,22	760.994.000.000	815.657.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	73.435.779.742,00	80.949.444.661,00	112.482.403.876	118.449.099.080
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.696.168.301,68	10.795.200.154,10	12,607,000,000	14,007,000,000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	296.767.718.945,72	246.814.150.140,77	277,589,510,000	279.181.100.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.425.168.417.026	1.458.947.957.330,00	2.180.271.804.300	2.239.550.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	493.919.572.225	670.332.486.800,00	70.690.400.000	70.690.400.000

3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 1.223.906.780.876 yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 815.657.000.000; Retribusi Daerah Rp 118.449.099.080; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 14,007,000,000.00; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 279.181.100.000. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

3.2.2.1.1 Hasil Pajak Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut pajak diatur pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak ada 10 (sepuluh) jenis, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah di APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 diperkirakan akan mencapai Rp815.657.000.000.

Tabel 0.11
Komponen Pendapatan Asli Daerah
Hasil Pajak Daerah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	956.832.098.114,86	980.751.230.877,09	1.163.672.913.876	1.223.906.780.876
4.1.01	PAJAK DAERAH	575.932.431.125,46	586.700.000.000	760.994.000.000	815.657.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.967.399.293,50	5.250.000.000	8.800.000.000	13.384.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.059.634.307,70	21.500.000.000	31.500.000.000	34.163.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.346.037.133,10	3.500.000.000	9.234.000.000	16.156.854.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.381.700.015,88	3.250.000.000	3.900.000.000	3.700.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	204.461.631.978,17	213.700.000.000	252.560.000.000	256.359.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.845.834.706,00	5.500.000.000	6.000.000.000	7.270.000.000

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.302.985.558,10	1.000.000.000	1.000.000.000	951.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.602.028.940,00	5.000.000.000	5.000.000.000	4.229.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	116.017.657.136,00	116.000.000.000	131.000.000.000	136.295.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	220.872.381.496,00	212.000.000.000	312.000.000.000	343.153.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

3.2.2.1.2 Retribusi Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut retribusi daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Jasa Usaha dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah di APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 diperkirakan akan mencapai Rp118.449.099.080,00

Tabel 0.12
Komponen Pendapatan Daerah : Retribusi Daerah Kabupaten Gresik

Kode Rek	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.1.02	Retribusi Daerah	73.435.779.742,00	80.949.444.661,00	112.482.403.876	118.449.099.080
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.101.177.491,00	20.563.019.462,00	24.631.053.876	22.535.658.080
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.808.896.962,00	6.180.858.370,00	6.100.000.000	10.901.441.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	52.525.705.289,00	54.205.566.829,00	81.751.350.000	85.012.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

3.2.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah (BUMN). Bagian laba atas penyertaan modal meningkat sesuai dengan performa perusahaan tersebut dan jumlah penyertaan modal yang dimiliki

Pemerintah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp 14,007,000,000.00.

Tabel 0.13
Komponen Pendapatan Daerah : Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Kabupaten Gresik

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.696.168.301,68	10.795.200.154,10	12,607,000,000	14,007,000,000
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Bumd	10.696.168.301,68	10.795.200.154,10	12,607,000,000	14,007,000,000

3.2.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi FKTP dan Tindak Lanjut Penghapusan Aset Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan akan mencapai Rp 279,181,100,000.00.

Tabel 0.14
Komponen Pendapatan Daerah : Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Gresik

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	296.767.718.945,72	246.814.150.140,77	277,589,510,000	279.181.100.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

3.2.2.2 Pendapatan Transfer

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah Pendapatan Transfer yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Pada Tahun 2021 pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 2,239,550,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 Ayat 2 terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa. Pada Tahun 2021 pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp. 1.872.163.000,000.00.

Tabel 0.15
Komponen Pendapatan Transfer : Transfer Pemerintah Pusat

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.425.168.417.026,00	1.458.947.957.330,00	2.180.271.804.300	2.239.550.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.425.168.417.026,00	1.458.947.957.330,00	1.833.996.004.300	1.872.163.000.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.425.168.417.026,00	1.458.947.957.330,00	1.498.276.091.300	1.872.163.000.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	184.996.926.377,00	190.806.944.996,00	157.763.759.300	195.950.867.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	909.888.092.000,00	958.325.036.000,00	982.169.880.000	982.169.000.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus (DAK)	330.283.398.649,00	309.815.976.334,00	358,342,452,000.00	358,328,000,000.00

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

3.2.2.2.2 Transfer Antar-Daerah

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 Ayat 3 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pada Tahun 2021 pendapatan Transfer Antar-Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 367,391,105,000.00

Tabel 0.16
Komponen Pendapatan Daerah : Transfer Antar Daerah

Kode Rek	Uraian Pendapatan	APBD 2020	Proyeksi 2021
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	346.275.800.000	367.387.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	331.000.000.000	352.112.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	331.000.000.000	352.112.000.000
4.2.02.01.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000.000	105.622.000.000
4.2.02.01.01.002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	75.000.000.000	78.146.000.000
4.2.02.01.01.003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	95.000.000.000	99.114.000.000

Kode Rek	Uraian Pendapatan	APBD 2020	Proyeksi 2021
4.2.02.01.01.004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.000.000.000	1.019.000.000
4.2.02.01.01.005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	60.000.000.000	68.211.763.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	15.275.800.000	15.275.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.275.800.000	15.275.000.000
4.2.02.02.02.001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	15.275.800.000	15.275.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

3.2.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Bagi Hasil Propinsi yang berasal dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Rokok, Perkiraan penerimaan dari Lain-Lain. Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 akan mencapaiRp 70,690,400,000.00.

Tabel 0.17
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :
Pendapatan Hibah

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun Berjalan 2020	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	493.919.572.225,00	670.332.486.800,00	70.690.400.000	70.690.400.000

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

Adapun Analisa Dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerahsebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 0.18

Analisa Dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah Berdasarkan Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019

NO Rek	URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	3.537.534.599.080
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.227.294.199.080
4.1.01	Pajak Daerah	815.657.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	13.384.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	13.384.000.000
4.1.01.06.01.001	Pajak Hotel	10.875.000.000
4.1.01.06.02.001	Pajak Motel	2.053.000.000
4.1.01.06.03.001	Pajak Losmen	456.000.000

NO Rek	URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI 2021
4.1.01.07	Pajak Restoran	34.163.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	20.390.000.000
4.1.01.07.01.001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	20.390.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.893.000.000
4.1.01.07.02.001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.893.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	8.000.000
4.1.01.07.05.001	Pajak Warung dan Sejenisnya	8.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.872.000.000
4.1.01.07.07.001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.872.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	16.153.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	9.780.000.000
4.1.01.08.01.001	Pajak Tontonan Film	9.780.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	82.000.000
4.1.01.08.02.001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	82.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	262.000.000
4.1.01.08.07.001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	262.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.554.000.000
4.1.01.08.08.001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.374.000.000
4.1.01.08.08.001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	180.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.187.000.000
4.1.01.08.09.001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	367.000.000
4.1.01.08.09.001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	820.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	288.000.000
4.1.01.08.10.001	Pajak Pertandingan Olahraga	288.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.700.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.116.000.000
4.1.01.09.01.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.116.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.584.000.000
4.1.01.09.02.001	Pajak Reklame Kain	1.584.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	256.359.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.846.000.000
4.1.01.10.01.001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.846.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	235.513.000.000
4.1.01.10.02.001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	235.513.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	7.270.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	7.270.000.000
4.1.01.11.01.001	Pajak Parkir	7.270.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	951.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	951.000.000
4.1.01.12.01.001	Pajak Air Tanah	951.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.229.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	4.229.000.000
4.1.01.14.04.001	Pajak Batu Kapur	4.229.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	136.295.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	136.295.000.000
4.1.01.15.01.001	PBBP2	136.295.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	343.153.000.000

NO Rek	URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI 2021
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	343.153.000.000
4.1.01.16.01.001	BPHTB-Pemindahan Hak	343.153.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	118.449.099.080
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	22.535.658.080
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.763.000.000
4.1.02.01.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.763.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.050.000.000
4.1.02.01.02.001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.050.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.000.000.000
4.1.02.01.04.001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.000.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.122.658.080
4.1.02.01.05.003	Retribusi Kios	1.122.658.080
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000
4.1.02.01.06.001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.100.000.000
4.1.02.01.11.001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1.100.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.901.441.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.901.441.000
4.1.02.02.01.001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000.000
4.1.02.02.01.001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000
4.1.02.02.01.003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.096.620.000
4.1.02.02.01.004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	200.000.000
4.1.02.02.02.002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.304.000.000
4.1.02.02.03.001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	18.000.000
4.1.02.02.04.003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	100.000.000
4.1.02.02.05.001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	700.000.000
4.1.02.02.09.001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.777.000.000
4.1.02.02.09.001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.115.821.000
4.1.02.02.10.001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	270.000.000
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	85.012.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	82.500.000.000
4.1.02.03.01.001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	82.500.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.000.000
4.1.02.03.03.001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.500.000.000
4.1.02.03.06.001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	2.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.007.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.007.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.007.000.000
4.1.03.01.01.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...	13.007.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.000.000.000
4.1.03.02.01.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...	1.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	279.181.100.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.000.000

NO Rek	URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI 2021
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	110.000.000
4.1.04.03.02.001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	110.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	5.156.100.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada BLUD	156.100.000
4.1.04.05.04.001	Jasa Giro pada BLUD ...	156.100.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	25.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000
4.1.04.07.01.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	539.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	9.000.000
4.1.04.13.01.009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.000.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	530.000.000
4.1.04.13.02.001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000
4.1.04.13.02.007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	226.575.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	226.575.000.000
4.1.04.16.01.001	Pendapatan BLUD	51.575.000.000
4.1.04.16.01.001	Pendapatan BLUD	175.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	21.801.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.801.000.000
4.1.04.18.01.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.801.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.550.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.163.000.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.872.163.000.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	195.947.000.000
4.2.01.01.01.001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	35.001.000.000
4.2.01.01.01.003	DBH PPh Pasal 21	66.982.000.000
4.2.01.01.01.004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.769.000.000
4.2.01.01.01.005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	50.428.000.000
4.2.01.01.01.006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.785.000.000
4.2.01.01.01.007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	178.000.000
4.2.01.01.01.009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	305.000.000
4.2.01.01.01.012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	474.000.000
4.2.01.01.01.013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	25.000.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	982.169.000.000
4.2.01.01.02.002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan	982.169.000.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.716.000.000
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.970.000.000
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	349.000.000
4.2.01.01.03.002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.723.000.000
4.2.01.01.03.006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	2.500.000.000
4.2.01.01.03.009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.633.000.000
4.2.01.01.03.010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Reguler	3.466.000.000
4.2.01.01.03.011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler	34.491.000.000

NO Rek	URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI 2021
4.2.01.01.03.012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.518.000.000
4.2.01.01.03.013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	22.993.000.000
4.2.01.01.03.014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	4.559.000.000
4.2.01.01.03.015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	1.438.000.000
4.2.01.01.03.015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	620.000.000
4.2.01.01.03.015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	263.000.000
4.2.01.01.03.016	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler	2.386.000.000
4.2.01.01.03.017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler	501.000.000
4.2.01.01.03.022	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan Stunting	1.133.000.000
4.2.01.01.03.023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit	10.737.000.000
4.2.01.01.03.025	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.200.000.000
4.2.01.01.03.027	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	477.000.000
4.2.01.01.03.028	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan	10.767.000.000
4.2.01.01.03.030	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.617.000.000
4.2.01.01.03.031	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	375.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	224.612.000.000
4.2.01.01.04.002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	5.658.000.000
4.2.01.01.04.003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.249.000.000
4.2.01.01.04.004	DAK Non Fisik-BOP PAUD	33.075.000.000
4.2.01.01.04.005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.113.000.000
4.2.01.01.04.006	DAK Non Fisik-TPG PNSD	148.382.000.000
4.2.01.01.04.009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000
4.2.01.01.04.011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.677.000.000
4.2.01.01.04.013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.230.000.000
4.2.01.01.04.015	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.506.000.000
4.2.01.01.04.016	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.235.000.000
4.2.01.01.04.017	DAK Non Fisik-PK2UKM	417.000.000
4.2.01.01.04.018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.542.000.000
4.2.01.01.04.019	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	928.000.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	47.828.000.000
4.2.01.02.01	DID	47.828.000.000
4.2.01.02.01.001	DID	47.828.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	287.891.000.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	287.891.000.000
4.2.01.05.01.001	Dana Desa	287.891.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	367.387.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	352.112.000.000
4.2.02.01.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	105.622.000.000
4.2.02.01.01.002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	78.146.000.000
4.2.02.01.01.003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	99.114.000.000
4.2.02.01.01.004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.019.000.000
4.2.02.01.01.005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	68.211.000.000
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi ...	15.275.000.000
4.2.02.02.01.001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi ...	15.275.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.690.400.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	70.690.400.000

NO Rek	URAIAN PENDAPATAN	PROYEKSI 2021
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	70.690.400.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	70.690.400.000
4.3.03.01.01.001	Pendapatan Hibah Dana BOS	70.690.400.000

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah harus mampu menjamin ketersediaan dana yang cukup sampai akhir tahun agar semua program dan kegiatan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gresik untuk Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen data penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan nonkonvensional;
3. Melakukan evaluasi dan revisi secara peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan;
4. Menetapkan target penerimaan dengan memperhatikan potensi penerimaan;
5. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya;
6. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD Penghasil;
8. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
9. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi asset, maka Belanja Daerah antara

lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (added value) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Belanja Daerah pada Tahun 2020 ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan publik. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Gresik secara umum diarahkan untuk :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Pemantapan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan belanja;
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang prioritas yang langsung menyentuh kepentingan publik;
4. Mengakomodasi usulan *bottom up* dan aspirasi masyarakat;
5. Mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai dan mengefektifkan belanja pegawai;
6. Mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial kepada organisasi, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengalokasikan Dana Desa, pembangunan infrastruktur desa dan tunjangan aparat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Untuk kegiatan fisik konstruksi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran akan dilaksanakan secara multiyears sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021, mengacu dan memperhatikan: (1)Sasaran, (2) arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;(3)Hasilevaluasi kinerja RKPD Tahun 2020;(4) Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;(5)Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021; dan (6)Rancangan RKPD Jawa Timur Tahun 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2021 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka RKPD Tahun 2021 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 serta pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut;

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri*” ditetapkan tujuan yaitu;

Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan

Keluhuran Budaya Gresik

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral,

pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (2)Kepemudaan dan olahraga, dan (3) Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat** meliputi;

Sasaran ke-1

*Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat*

Sasaran ke-2

*Mewujudkan ketangguhan Daerah
dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran*

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

*Menggugah kreatifitas pemuda dalam
kemandirian dan pembangunan*

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan local

Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan Indikator Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Misi Pertama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.1
Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Tahun 2021
Misi Ke- 1 RPJMD Ke-5

Misi ke-1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;			
Tujuan 1 Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan Keluhuran Budaya Gresik			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	10-20%
2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%
3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	100%
4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan local	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “*Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik*” ditetapkan tujuan yaitu;

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Kedua didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan(1)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2)Komunikasi dan Informatika, (3)Statistik, (4)Persandian, (5)Kearsipan, (6)Kecamatan, (7)Perencanaan, (8)Inspektorat, (9)Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, (10) Sekretariat Daerah, (11)Sekretariat DPRD, dan (12)Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut;

Sasaran pada urusan**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan,dan Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

*Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang
menjamin keterbukaan informasi*

Sasaran pada urusan **Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-3

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran pada urusan **Kepegawian serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan Indikator Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Misi Kedua sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.2
 Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Tahun 2021
 Misi Ke- 2 RPJMD Ke-5

Misi ke-2 Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;			
Tujuan Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target TAHUN 2021
1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86-90
2	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Government	3.10-3.20
3	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	A
4	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	A
6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	82

Dalam rangka implementasi **Misi Ketiga** “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan ke-3

Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Peningkatan pertumbuhan secara menyeluruh dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian inklusif dengan dukungan infrastuktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara

komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan. Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan Meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanaman Modal, (2) Pertanahan, (3) Pariwisata, (4) Kelautan dan Perikanan, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (7)Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Tenaga Kerja, (10) Transmigrasi, (11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, (12) Perdagangan, (13) Sosial, (14)Perindustrian, (15) Energi dan Sumber Daya Mineral, (16) Kehutanan, (17)Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, (18)Pangan, (19)Pertanian, (20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-1 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan**Penanaman Modal**dan **Pertanahan**meliputi;

Sasaran ke-1

*Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan
frekuensi usaha di Daerah*

Sasaran pada urusan**Pariwisata**meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatkan keberdayaan ekonomi nelayan

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-5

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-6

Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-2 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup** dan **Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-7

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-3 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-8

Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-9

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-10

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-11

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi;

Sasaran ke-12

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-13

Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-14

Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan Indikator Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Misi Ketiga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.3
Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Tahun 2021
Misi Ke- 3 RPJMD Ke-5

Misi ke-3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;			
Tujuan 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	104,69% (Rp.48T)
2	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7,5-8,5%
3	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	112,75
4	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	62 %
5	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	87,21 % Jalan
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	100%
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%
6	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,10%
Tujuan 2 Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.			
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	68-72.5
		Indeks Kualitas Udara	90--93.5
		Indeks Tutupan Lahan	18,19%
8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.90-4.60%
Tujuan 3 Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.			

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
9	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Usaha Mikro	0.17 (290 usaha mikro)
		Pertumbuhan Koperasi Sehat	10.20% (335)
10	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	53.41% (2.021.750,42)
		Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	1.01% (7411)
11	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	5,3-5,8%
12	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	19% (40 ha)
		Persentase Rumah Layak Huni	86,19%
13	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,725
14	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn
		Nilai Tukar Petani	109,62

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan ke-2

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar,

penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Pendidikan, (2) Perpustakaan (3) Kesehatan, (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan dan Perpustakaan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-3

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

didukung optimalisasi program Keluarga Berencana

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran ke-5

Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak

Berdasarkan sasaran tersebut maka ditetapkan Indikator Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Misi Ke empat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.4

Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Tahun 2021 Misi Ke- 4 RPJMD Ke-5

Misi ke-4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan,dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.			
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan			
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	99.20%
		APM SMP sederajat	87.23%
		Angka Harapan lama sekolah	9,7
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan			
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	73
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1.4
4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.75-64.25
5	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	925-1000

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Sebagaimana yang telah ditetapkan persiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tema Pembangunan Nasional Pemerintah di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial”**, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI–KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
 - b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
 - d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah
3. SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - c. Terpenuhinya layanan dasar.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.
 - b. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien.
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim.
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu:
 - a. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif.
 - b. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal.
 - c. Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil.

- d. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah **Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulih industri, pariwisata, investasi, kesehatan, dan infrastruktur di Jawa Timur**. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)
4. Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

4.2.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2020. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gresik Tahun 2021 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 0.5
 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik

Agenda Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2021	RKPD Provinsi Jawa Timur 2021	RKPD Kab. Gresik 2021
Tema		
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulih industri, pariwisata, investasi, kesehatan, dan infrastruktur di Jawa Timur	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial menuju Gresik Kota Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan
Prioritas Pembangunan		
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;	1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata;	1. Pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi hub Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah dan ekologi berkelanjutan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;	2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;	
3. SDM berkualitas untuk mengurangi kesenjangan;	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI)	2. Pelayanan publik berlandaskan human centered design yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;	4. Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;	3. Pembangunan keluhuran budaya berlandaskan pengarustamaan Gresik yang agamis;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;	5. Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;	1. Pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi hub Indonesia Barat dan Indonesia
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;	1. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui	

Agenda Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2021	RKPD Provinsi Jawa Timur 2021	RKPD Kab. Gresik 2021
	Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;	Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah dan ekologi berkelanjutan;
7. Stabilitas polhukhankam dan trnasformasi pelayanan publik.	2. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.	2. Pelayanan publik berlandaskan human centered design yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi;

Tabel 0.6

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021		
		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	10-20%
2	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim.	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%
3	a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila. b. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	100%
4	Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan local	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%
5	Terpenuhinya layanan dasar.	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86-90
6	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang	Indeks e-Government	3,10-3,20

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021		
		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
		menjamin keterbukaan informasi		
7	a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal b. Terpenuhi hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil.	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	A
8	Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
9	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	AA
10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	82
11	a. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian b. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	104,69% (Rp. 48 T)
12	a. Meningkatkan produktivitas dan daya saing b. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	7,5-8,5%
13	a. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	112,75

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021		
		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
	b. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah			
14	a. Meningkatnya produktivitas dan daya saing b. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	62%
15	a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar. b. Meningkatnya konektivitas wilayah. c. Meningkatnya pemerataan antar wilayah d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	87,21% Jalan
			Persentase Akses Air Bersih/Minum	100%
			Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%
16	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,10%
17	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	68-72,5
			Indeks Kualitas Udara	90-93,5
			Indeks Tutupan Lahan	18,19%
18	Terwujudnya pengentasan kemiskinan.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90-4,60%
19	a. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian b. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,17 (290 usaha mikro)

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021		
		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
	dasar, daya saing serta kemandirian daerah	pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Koperasi Sehat	10,20% (335)
20	a. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	53,41% (2.021.750,42)
			Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	1.01% (7411)
21	a. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. b. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	5,3-5,8%
22	a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan. b. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	19% (40 ha)
			Persentase Rumah Layak Huni	86,19%
23	a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan. b. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,725
24	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021		
		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
	b. Terwujudnya pengentasan kemiskinan. c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah		Nilai Tukar Petani	109,62
25	a. Terpenuhiya layanan dasar. b. Terwujudnya pengentasan kemiskinan. c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	99,20%
			APM SMP sederajat;	87,23%
			Angka Harapan lama sekolah	9,7
26	a. Terpenuhiya layanan dasar b. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	73
27	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	0,6-1,4
28	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.75-64.25
29	a. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda. b. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%
			Nilai Kabupaten Layak Anak	925-1000

4.2.4 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016- 2021 Tahun ke-5, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresiksebagaimana berikut:

- 1. Pelayanan publik berlandaskan human *centered design* yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi;
- 2. Pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi hub Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah dan ekologi berkelanjutan;
- 3. Pembangunan keluhuran budaya berlandaskan pengarustamaan keluhuran Gresik yang agamis.

4.2.5 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dirumuskan berlandaskan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021 yaitu **Gresik, Inclusive, Resilient and Sustainable City (Gresik, Kota Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan)**. Dengan demikian dirumuskan prioritas program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel 0.7
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
Pelayanan publik berlandaskan human centered design yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi;	1.	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Jumlah PD yang memanfaatkan data adminstrasi kependudukan	9 OPD
			Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialih mediakan	82,92%
	2.	Program Pengembangan E-Government	Persentase PD yang dapat mengakses WAN dan Fiber Optik	100%
			Kecepatan Akses internet untuk	400 Mbps

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
			perkantoran Pemerintahan	
			Persentase sistem informasi yang aktif	98.80%
			Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	85.52%
			Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	100%
	3.	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%
	4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum PD sesuai Petunjuk Teknis	100%
			Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	95%
	5.	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%
	6	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100%
	7	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%
	8	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	8%
			Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja	11.11%

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
			berbasis Entrepreneurship	
	9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	71.01%
	10	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	11%
	11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	98%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	108,25 %
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	93.5
	12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	99,25%
			Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	57%
			Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	53%
	13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	66%
			Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	54%
			Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	57%
	14	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	95%
			Cakupan peyanan KN lengkap	98%

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
			Persentase balita gizi kurang	7%
			Cakupan pelayanan kesehatan remaja	73%
			Cakupan pelayanan kesehatan lansia	60%
	15	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	76%
	16	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	94%
			Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	90%
			Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	40%
			Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	174
			Insiden / Angka kesakitan DBD	56
			Persentase kasus pemasangan yang ditangani	0,10%
	17	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi	100%
			Persentase Pustu sesuai standar	74%
			Persentase Ponkesdes sesuai standar	66%
			Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100%
			Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100%
			Persentase penyehat tradisional	80%

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
			terdaftar	
	18	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100%
			Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	74%
			Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	92%
			Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	56%
	19	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes	
			Puskesmas :	100%
			Pustu :	100%
			Ponkesdes :	100%
	20	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	90%
	21	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	6,35%
	22	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	1,01%
	23	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	100%

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
			dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	
	24	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	48.04%
	25	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki AD ART	100%
			Persentase Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang mengalami peningkatan pendapatan	90%
			Prosentase Pasar desa dalam kondisi baik	61
			Prosentase pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan atau warga masyarakat	25
	Pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi hub Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah dan ekologi berkelanjutan	26	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	1. Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Presentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik				97,88%
27		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan ekonomi	100%
28		Program Pengembangan Destinasi	Persentase Destinasi Wisata yang	100%

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
		Pariwisata	dikembangkan	
	29	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	26.19%
	30	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	86.84%
			Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	96.49%
	31	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1
	32	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0.18%
	33	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5.18%
	34	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75%
	35	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0.54%
	36	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	50%
	37	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	89%
			Persentase Keamanan Pangan Segar	80%
			Pola Pangan	90

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
			Harapan	
	38	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	144.76 0,65 Ton
			Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	35%
	39	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	21,021
			Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	125%
	40	Program Penyediaan Layanan Sanitasi Aman Skala Perkotaan	Persentase rumah tangga yang terlayani/terhubung ke sistem sanitasi aman	9,5%
	41	Program pengendalian banjir	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	92%
	42	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	72,49%
	43	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	20,65 % (38,92 ha)
	44	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	75%
	45	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Persentase Pemenuhan Rumah Tangga pengakses Air Bersih/minum non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	100%
	46	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya layak huni	86,19%
	47	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	100%
Pembangunan	48	Program	Persentase	35-45

Prioritas 2021	No	Program	Indikator Program	2021
keluhuran budaya berlandaskan pengarustamaan Gresik yang agamis;		Pembinaan dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Fasilitasi terhadap Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang Olahraga Berprestasi
	49	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif;	26 Organisasi
	50	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kepemudaan;	730 Wirausahaan Muda
	51	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka	0.08 - 0.16
	52	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	≥30%
	53	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	141 Penyelenggaraan Festival Budaya

 Prioritas Program dalam Pemulihan Sosial ekonomi Dampak Pandemi Covid-19

4.2.6 Prioritas Output Kunci (Kegiatan)

Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dirumuskan mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021, 3 (tiga) prioritas tematik, prioritas program pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan

dokumen Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik Smart City, Rencana Aksi Peduli HAM, dsb. Prioritas output kunci dimaknai sebagai keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas Output Kunci (Kegiatan) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 0.8
Prioritas Output Kunci Kabupaten Gresik Tahun 2021

NO	PRIORITAS OUTPUT KUNCI	URUSAN
1.	Penanganan Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19	Kesehatan, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
2.	Pemulihan Ekonomi terdampak Pandemi Covid-19	Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Pariwisata
3.	Pelaksanaan Social Safety Net atau Jaring Pengaman Sosial	Sosial, Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
4.	Penegakan Tata Kelola Protokol <i>New Normal</i>	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Kecamatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Peningkatan kesejahteraan dan life long education 24.110 Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
6.	Peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat miskin penyandang disabilitas meliputi a. 648 Tuna Netra, b. 560 Tuna Rungu, c. 261 Tuna Wicara, d. 49 Tuna Netra, Rungu, dan Wicara, e. 184 Tuna Rungu dan Wicara, f. 1.475 Tuna Daksa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesehatan, Pendidikan, Sosial
7.	Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Kepulauan Bawean sesuai Standar Pelayanan Minimal	Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepegawaian
8.	Peningkatan kualitas hidup lansia miskin sebanyak 31.161 Perempuan dan 22.829 laki-laki	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
9.	Inkubasi inovasi pelayanan publik	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah
10.	Integrasi Perencanaan Lintas Sektoral	Perencanaan

NO	PRIORITAS OUTPUT KUNCI	URUSAN
11.	Implemetasi Walidata melalui Monitoring, Evaluasi, Verifikasi, Sinkronisasi dan Pendampingan Penyusunan database OPD	Komunikasi dan Informatika
12.	Pengembangan Dashboard Sistem Informasi Pendukung NOC	Komunikasi dan Informatika, Perencanaan, dan seluruh OPD
13.	Peningkatan Kapasitas Clustering Server menjadi Cloud Computing Pemerintah Daerah	Komunikasi dan Informatika
14.	Pembangunan Jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15.	Legalisasi RDTR	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16.	Pembebasan Lahan untuk Penanggulangan Banjir	Pertanahan
17.	Ketersediaan Air Bersih/ Minum Non Perpipaan	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.	Keberlanjutan pemberdayaan Bank Sampah dan pengurangan timbulan sampah di tingkat sumber sebesar 30%	Lingkungan Hidup
19.	Pengembangan TPS3R di seluruh Kecamatan	Lingkungan Hidup
20.	Pengembangan Desa berwawasan lingkungan	Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesehatan, Perencanaan & Litbang
21.	Pengembangan Destinasi Wisata Tematik	Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perencanaan
22.	Peningkatan ketaatan usaha terhadap IPPLH untuk pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan	Lingkungan Hidup
23.	Kerjasama promosi pariwisata daerah dengan platform media digital	Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
24.	Penataan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25.	Pelaksanaan Mitigasi Bencana Secara Partisipatif	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Kecamatan
26.	Peningkatan kemudahan investasi dan optimalisasi Mall Pelayanan Publik	Penanaman Modal, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup
27.	Pengembangan usaha ekonomi produktif model Chamber untuk masyarakat miskin	Koperasi, Industri dan Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

NO	PRIORITAS OUTPUT KUNCI	URUSAN
		Sosial
28.	Pendampingan publikasi karya tulis ilmiah dan/atau non ilmiah bagi peserta didik	Pendidikan, Perpustakaan
29.	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Perlindungan anak
30.	Pengembangan Perpustakaan sebagai Pusat Pemberdayaan, Kebudayaan, dan Edukasi	Pendidikan, Perpustakaan, Perlindungan anak
31.	Peningkatan Kualitas tatakelola kearsipan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah.	Kearsipan
32.	Pembinaan Pemuda dalam Pengembangan <i>Sociopreneurship</i>	Pemuda dan Olahraga
33.	Penyelenggaraan Festival Tahunan Tematik	Kebudayaan

4.2.7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas Pembangunan Tahun 2021 selain memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2021 serta masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD memuat:

1. Penjabaran hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diinventarisir DPRD untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
2. Penjabaran wewenang politik DPRD untuk menyalurkan aspirasi konstituennya berkenaan dengan perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gresik secara berurutan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0.9

Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2021 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	POKOK POKOK PIKIRAN DPRD	KESELARASAN PRIORITAS
1.	Meningkatkan anggaran kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai untuk untuk mengurangi minimal 50% lokasi rawan banjir.	Prioritas Tematik 1
2.	Pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah baru.	Prioritas Tematik 1
3.	Penuntasan pembangunan jalan – jalan ex JPD melalui kegiatan betonisasi dilengkapi instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU).	Prioritas Tematik 1
4.	Pelaksanaan program Kartu Gresik Pintar dan beasiswa mahasiswa untuk putra daerah yang miskin harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang penyusunan dan sosialisasinya melibatkan Komisi terkait di DPRD Gresik.	Prioritas Tematik 2
5.	SOP kedua program tersebut mengatur kriteria penerima, dan upaya menyederhanakan tahapan prosedur; pengusulan, verifikasi calon penerima Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Desa/ Kelurahan, sekaligus mempermudah penyaluran anggaran KGP dan bantuan beasiswa	Prioritas Tematik 2
6.	Meningkatkan kuota penerima beasiswa mahasiswa miskin dengan ketentuan “1 DESA 1 BEASISWA SARJANA” setiap tahunnya.	Prioritas Tematik 2
7.	OPD Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan menetapkan penerima melalui keputusan Bupati sebelum dilakukan verifikasi data lapangan penerima.	Prioritas Tematik 2
8.	Perbaikan regulasi daerah agar KGS bisa dengan mudah melayani warga miskin sebagai peserta JKN/ BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran bersumber dari APBD Gresik.	Prioritas Tematik 2
9.	Peningkatan alokasi anggaran KGS dengan syarat telah adanya validasi jumlah total warga miskin Gresik. Berapa Total Warga Miskin telah mendapatkan bantuan iuran JKN/ BPJS Kesehatan dari KIS pemerintah pusat? berapa yang sudah mendapatkan manfaat bantuan iuran JKN/ BPJS Kesehatan dari KGS?	Prioritas Tematik 2

NO	POKOK POKOK PIKIRAN DPRD	KESELARASAN PRIORITAS
10.	Tahun 2021, harus menjadi tahun realisasi UHC, artinya tidak ada satupun penduduk Gresik, khususnya warga miskin yang tidak terjangkau Jaminan Kesehatan.	Prioritas Tematik 2
11.	Pengadaan sarana, prasarana dan SDM Balai Latihan Kerja Gresik (BLK) agar mampu menghasilkan lulusan pelatihan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.	Prioritas Tematik 2
12.	Tahun 2021, UPT BLK Dinas tenaga Kerja Kabupaten Gresik harus melaksanakan Fungsinya secara mandiri dengan dukungan anggaran, kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan, tutor yang handal, sehingga berhenti mengirim peserta pelatihan ke BLK daerah lain.	Prioritas Tematik 2
13.	Dinas Tenaga Kerja harus mampu memfasilitasi BLK Gresik agar mampu menjalin komunikasi, MoU, maupun perjanjian resmi, dengan perusahaan-perusahaan di Gresik sehingga tercipta profil lulusan yang LINK and MATCH, mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia industri di Gresik.	Prioritas Tematik 1
14.	Potensi pendanaan dari CSR harus mampu diperhitungkan dan ditetapkan peruntukannya bagi kegiatan pengentasan kemiskinan dan sektor produktif lainnya oleh BAPPEDA untuk selanjutnya menjadi referensi Sdr. Bupati menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar teknis pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Prioritas Tematik 2
15.	Ketimbang cenderung direalisasikan dalam bentuk pembangunan Tugu dan monumen yang tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penggunaan dana CSR hendaknya lebih terarah dan produktif pada kegiatan perbaikan sanitasi kawasan kumuh, pelatihan tenaga kerja, maupun penyediaan co-working space bagi remaja dan pemuda.	Prioritas Tematik 1
16.	Terkait butir ke-2, di era industri 4.0 saat ini, co-working space telah menjadi kebutuhan generasi muda (milenial) Gresik untuk bisa didorong menjadi inisiator wirausaha berbasis digital atau startup. Sektor industri digital telah menjadi lapangan kerja baru yang sangat potensial untuk difasilitasi	Prioritas Tematik 2

NO	POKOK POKOK PIKIRAN DPRD	KESELARASAN PRIORITAS
	Pemda Gresik dalam kerangka mencapai target Smart City.	

4.2.8 kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 telah memperhatikan Pasal 2 Ayat (2d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 sebagaimana berikut:

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
1.	Penerapan Phbs Pencegahan Covid-19	Penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas / berkegiatan.
	Peningkatan Penanganan Kesehatan	Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui: a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun tetangga, rukun warga sampai dengan tingkat Kabupaten; b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; c. peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat; d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19; f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19; g. peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19; h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19; i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya	a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau Lembaga pendidikan lainnya; b. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan; c. menggunakan masker bagi pendidik dan peserta didik; d. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan; e. mencuci tangan air bersih mengalir dengan sabun dan/atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas; f. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (physical distancing); g. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta didik tiap kelas dan dilakukan pembelajaran secara bergelombang; h. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar; i. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya secara berkala; j. melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk siswa atau mahasiswa yang berasal dari luar Daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga; k. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis; dan l. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Keagamaan	Pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		persen) dari kapasitas rumah ibadah; b. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah; c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah; d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah; e. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (physical distancing); f. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar; g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan h. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Tempat Kerja	Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja; b. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja dan sistem kerja; c. mewajibkan pekerja menggunakan masker; d. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan; e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja; f. menyediakan hand sanitizer; g. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri; i. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19; j. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (physical distancing); k. menghindari aktivitas

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang; l. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara pro aktif; m. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja; dan n. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid- 19.
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Tempat/Fasilitas Umum	Pengurus dan/atau penanggungjawab tempat umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/fasilitas umum; b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; d. mengatur waktu kunjungan; e. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (physical distancing); f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Sosial dan Budaya	Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dan kapasitas tempat acara; c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker; d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh; e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit Covid 19; f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; g. menyediakan hand sanitizer; h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (physical distancing); dan i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19
	Penyesuaian	Pengurus dan/atau penanggungjawab

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
	Kegiatan/Aktivitas di Pasar	pasar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: - membentuk gugus tugas Covid-19; - penjual menggunakan masker dan/atau face shield; - antrian pembayaran harus diatur (Physical distancing); - menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; - mewajibkan pengunjung menggunakan masker; - Pintu masuk dan keluar pasar harus dipisah; - tenaga bongkar muat harus dilakukan tenaga setempat; - Pedagang dari luar kota dilarang berjualan di dalam atau di luar pasar dengan menunjukkan KTP; - Pedagang yang tidak ber-KTP Gresik harus menutup dagangannya. - mempunyai ruang kesehatan, beserta peralatan, tenaga kesehatan dan mobil siaga (ambulance) bagi pasar besar; - diawasi Satpol PP, TNI-POLRI, Perangkat Daerah terkait
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Restoran atau Rumah Makan dan Warung Kopi/Cafe	Penanggungjawab/pengelola restoran atau rumah makan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: - melaksanakan Penegakan Protokol Kesehatan; - mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; - dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat (dinerin) dilakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan sebesar 50 %(lima puluh persen); - menjaga jarak (physical distancing) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan atau satu kursi satu orang; - menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan; - menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian; - memastikan kecukupan proses

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar; h. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; i. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan; j. melarang karyawan bekerja bagi yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan k. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Perhotelan	Pengurus dan/atau penanggungjawab Hotel wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyediakan peralatan untuk pelindung diri berupa masker, pembersih tangan (hand sanitizer), face shield dan thermal gun, tempat cuci tangan dengan air mengalir; b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja; c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri; d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service); e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan physical distancing; f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celsius ke atas) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel; h. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		i. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja; dan j. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius ke atas) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Mall dan pertokoan	Pengurus dan/atau penanggungjawab toko dan mall wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. melaksanakan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pekerja; b. menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer), thermal gun, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; c. mengharuskan pengunjung dan pekerjamenggunakan masker; d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuhpengunjung yang memasuki toko dan mall sertamelarang pengunjung yang sakit atau menunjukkangejala suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) batuk, pilek, diare dan sesaknafas untuk masuk toko dan mall; e. memastikan pekerja yang bekerja di toko dan malltidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhutubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajatcelcius) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untukmasuk kerja; f. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang1 (satu) meter; g. melakukan pembatasan pengunjung denganmemperhatikan kapasitas gedung dan/atauPenyewa Stand di Mall; h. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk mallguna memudahkan penerapan dan pengawasanprotokol kesehatan; i. mengutamakan pemesanan barang secara jarakjauh/daring dengan fasilitas layanan antar; j. melakukan penyemprotan disinfektan

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		secara berkalapada lantai, dinding, perangkat bangunan toko dan mall; k. Penyewa Stand di Mall yang menyediakanmakanan/minuman diutamakan secara take awaydan/atau tetap melaksanakan physical distancing;dan l. dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat(diner in) sebagaimana dimaksud pada huruf kdilakukan pembatasan pengunjung denganmemperhatikan kapasitas ruangan sebesar 50 %(lima puluh persen).
	Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Pedoman Kegiatan Di Konstruksi	Pengurus dan/atau penanggungjawab penyedia jasa kontruksi wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek; b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek; c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidupsehari-hari seluruh pekerja selama berada dikawasan proyek; d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yangdilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarungtangan dan pakaian kerja sesuai pedomankeselamatan dan kesehatan kerja; f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/ataupembersih tangan (hand sanitizer) termasukmenyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses pada tempat kerja; g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihaklainnya, yang sedang sakit atau menunjukkan gejalasuhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma limaderajat celcius) batuk, pilek, diare dan sesak nafasuntuk berada di dalam lokasi kerja; h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksudpada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasapekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusatlayanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas Covid19 Kabupaten; i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye danpromosi teknik pencegahan Covid-19 dalam

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau safety morning talk; dan j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
	Pengendalian Moda Transportasi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil	Pengendalian kapasitas angkut bagi kendaraan pribadi dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut sebagai berikut: - kapasitas angkut mobil paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; dan - Sepeda motor pribadi paling banyak untuk 2 (dua) orang dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor: - selalu menggunakan masker; - mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan; - menyediakan hand sanitizer dalam kendaraan; - membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan - tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
	Pengendalian Moda Transportasi kendaraan umum masal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan	Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi: - kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; - kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, bus antar jemput karyawan, angkutan perairan, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan - kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 terhadap setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum : - selalu menggunakan masker; - mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan; - menyediakan hand sanitizer;

No	Kebijakan	Uraian Kebijakan
		d. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; e. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing) baik pada saat antrian maupun didalam modal transportasi; dan f. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
	Pengendalian Moda Transportasi angkutan sungai, dan penyeberangan	Angkutan sungai, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang
	Pengendalian Moda Transportasi pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street	a. Selama Masa Transisi dilakukan pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street) melalui pembatasan satuan ruang parkir. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Kebijakan dalam penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud telah dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1 BELANJA PEGAWAI

Kerangka Pendanaan Untuk Belanja Pegawai Tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel V.1
Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran Tahun 2021
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.089.808.321.628

5.1.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN DESA/HIBAH KEPADA LEMBAGA MASYARAKAT/BANSOS

Kerangka Pendanaan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa/Hibah Kepada Lembaga Masyarakat/Bansos Tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel V.2
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah
Desa Dan Partai Politik
Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran Tahun 2021
5.1.2.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN DESA/HIBAH KEPADA LEMBAGA MASYARAKAT/BANSOS	448.482.184.770
5.1.3.	ALOKASI DANA DESA	129.593.282.170
5.1.4.	DANA DESA	287.891.804.000
5.1.4.	BELANJA HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK	2.809.640.000

5.1.3 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Kerangka Pendanaan Untuk Belanja Hibah Tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel V.3
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Tahun 2021

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran Tahun 2021
5.1.2.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	93.151.027.088

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Prioritas Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD inidilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik UrusanWajib, Urusan Pilihan maupun Urusan Penunjang. Prioritas Program dan Kegiatan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon AnggaranSementara Tahun 2021. Secara rinci Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel penyajian rencana program dibagi kedalam beberapata bel dibawah ini.

Tabel V.4
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021

NO	NAMA	BELANJA LANGSUNG
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	277.034.053.145
2	DINAS KESEHATAN	338.900.224.908
3	RSUD IBNU SINA	194.085.354.767
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	636.466.440.865

NO	NAMA	BELANJA LANGSUNG
1	2	3
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	42.779.488.010
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.187.471.200
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.771.603.600
8	DINAS SOSIAL	7.390.445.400
9	DINAS TENAGA KERJA	5.237.056.450
10	DINAS PERTANAHAN	179.768.247.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.018.039.250
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.662.248.250
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.883.713.000
14	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.925.530.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	38.172.355.400
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.297.536.500
17	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDAG	8.835.692.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU	10.779.526.185
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.033.427.200
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.527.367.675
21	DINAS PERIKANAN	6.517.627.900
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14.552.524.010
23	DINAS PERTANIAN	18.602.326.620
24	SEKRETARIAT DAERAH	102.861.954.645
25	SEKRETARIAT DEWAN	70.854.968.000
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.316.573.861
27	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23.699.293.640
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19.714.805.950
29	INSPEKTORAT	9.569.348.000
30	KECAMATAN GRESIK	11.936.988.000
31	KECAMATAN KEBOMAS	7.741.912.500
32	KECAMATAN MANYAR	1.100.000.000
33	KECAMATAN CERME	1.100.000.000
34	KECAMATAN BENJENG	1.100.000.000
35	KECAMATAN BALONGPANGGANG	1.100.000.000
36	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	1.100.000.000
37	KECAMATAN DRIYOREJO	1.100.000.000
38	KECAMATAN WRINGINANOM	1.100.000.000
39	KECAMATAN KEDAMEAN	1.100.000.000
40	KECAMATAN MENGANTI	1.100.000.000
41	KECAMATAN SIDAYU	1.100.000.000
42	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	1.100.000.000

NO	NAMA	BELANJA LANGSUNG
1	2	3
43	KECAMATAN PANCENG	1.100.000.000
44	KECAMATAN BUNGAH	1.100.000.000
45	KECAMATAN DUKUN	1.100.000.000
46	KECAMATAN SANGKAPURA	1.200.000.000
47	KECAMATAN TAMBAK	1.200.000.000
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.117.930.000
Jumlah		2.176.042.073.931

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program, Kegiatan, Dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana Nomenklatur Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel V.5. Adapun Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021 yang telah dipetakan dengan Nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

TABEL V.5

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
NOMENKLATUR PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN
2016 TENTANG RPJMD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021**

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
1	DINAS PENDIDIKAN											277.034.053.145
1	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	BARANG CETAKAN, PENGGANDAAN, PENJILIDAN	20	JENIS	273.656.400,0
2	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	JUMLAH SURAT KABAR DAN BAHAN BACAAN	6	JENIS	27.428.000
3	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH JENIS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	3	JENIS	250.316.000
4	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 6	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI	1. RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	5.036	ORANG	544.750.000
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JASA ADMINISTRASI KANTOR	12	BULAN	2.991.200.000
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	TERPENUHINYA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN	100	%	
6	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERSEDIAANYA JASA OPERASIONAL KANTOR	12	BULAN	1.442.040.000
7	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JASA KEBERSIHAN	100	%	299.199.300
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.01.1.01 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	BELANJA BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN	100	%	
9	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01 .01.02.00 3	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100	%	351.797.282
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01 .01.02.00 3	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR E-PURCHASING	100	%	
10	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01 .01.02.00 3	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	100	%	84.030.000
11	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01 .01.02.00 3	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	BELANJA BAHAN PUBLIKASI	100	%	253.408.593
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01 .01.02.00 3	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	BELANJA HADIAH, SOUVENI, TALI ASHI	100	%	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA	100	%	1.01.1.01 .01.02.00	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR	PRASARANA APARATUR			3	KANTOR/RUMAH TANGGA				
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	BELANJA MODAL PENGADAAN ALKAT STUDIO DAN KOMIUNIKASI	100	%	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT	100	%	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	BELANJA MOPDAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER	100	%	
12	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PENGADAAN/PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA PENGADAAN MEBELEUR	100	%	284.500.000
13	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN YANG DIPELIHARA	11	KENDARAAN	600.000.000
14	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUN	2	UNIT	1.129.200.000
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DRIYOREJO	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SIDAYU	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BENJENG	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAK	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SANGKAPURA	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	GEDUNG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEBOMAS	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	2	UNIT	
15	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	PEMELIHARAAN MESIN KANTOR	7	JENIS	319.750.000
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	PEMELIHARAAN AUDIO	7	JENIS	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	MESIN FOTO COPY	7	JENIS	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	PEMELIHARAAN RUNNING TEST	7	JENIS	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	PEMELIHARAAN KOMPUTER	7	JENIS	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.01.1.01.01.02.003	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT LISTRIK	7	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA	PERSENTASE FASILITASI	100	%	1.01.1.01	PEMELIHARAAN	PEMELIHARAAN MEBELER	7	UNIT	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DAN PRASARANA APARATUR	TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR			.01.02.00 3	RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR				
16	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA GEDUNG KANTOR	100	%	1.01.1.01 .01.02.05	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH TANGGA	PEMELIHARAAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN	2	UNIT	393.782.500
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA GEDUNG KANTOR	100	%	1.01.1.01 .01.02.05	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH TANGGA	PEMELIHARAAN TAMAN	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA GEDUNG KANTOR	100	%	1.01.1.01 .01.02.05	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH TANGGA	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	2	UNIT	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATKAN SARANA GEDUNG KANTOR	100	%	1.01.1.01 .01.02.05	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR/RUMAH TANGGA	JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	2	UNIT	
17	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.01 8	FASILITASI ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH DOKUMEN	4	DOKUMEN	100.000.000
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.01 5	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	JUMLAH DOKUMEN BANTUAN SOSIAL	1	DOKUMEN	79.597.400.000
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.01 6	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	JUMLAH LEMBAGA SWASTA PENERIMA HIBAH	928	LEMBAGA	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.01 7	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	JUMLAH ORANG PENERIMA BANSOS	84	ORANG	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.01 8	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	TERSEDIANYA HIBAH PENDIDIKAN DAERAH BOSDA	100	%	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.01 9	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	TERSEDIANYA HIBAH OPERASIONAL PAUD DAK	100	%	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.02 0	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	TERLAKSANANYA PENDIDIKAN KESETARAAN	100	%	
	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.02 1	FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (HIBAH, SOSIAL,KEUANGAN,DLL)	JUMLAH ORANG PENERIMA BANTUAN KULIAH	50	ORANG	
18	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN	7	DOKUMEN	90.000.000
19	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.01.1.01 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN	2	DOKUMEN	72.658.000
20	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.07 .	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	1.01.1.01 .01.07.01 9	PENGELOLAAN SKB	TERCUKUPINYA BIAYA OPERASIONAL UPT	12	BULAN	150.000.000
21	SEKRETARIAT	1.01.1.01.01.07 .	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	1.01.1.01 .01.07.02	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER	TERCUKUPINYA BIAYA OPERASIONAL UPT	12	BULAN	170.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			SKPD				0.					
22	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.01 0	SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	669.936.450
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.01 0	SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.01 0	SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
23	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.03 3	WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	450.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 3	WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.03 3	WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
24	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.03 7	PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	150.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 7	PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.03 7	PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
25	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.01 1	PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	100.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.01 1	PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.01 1	PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
26	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 2	PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN SEKOLAH	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	150.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 2	PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN SEKOLAH	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 2	PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN SEKOLAH	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
27	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.01 2	SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN GUGUS	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	350.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.01 2	SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN GUGUS	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.01 2	SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN GUGUS	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KEBERLANJUTAN	95,5	%	1.01.1.01	PEMBINAAN	JUMAH SEKOLAH YANG	549	SEKOLAH	714.414.400

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP			.01.16.02 8	PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	MENERAPKAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	JUMAH SEKOLAH YANG MENERAPKAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	549	SEKOLAH	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	JUMAH SEKOLAH YANG MENERAPKAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN	549	SEKOLAH	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	JUMLAH DOKUMEN	2	DOKUMEN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	JUMLAH DOKUMEN	2	DOKUMEN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	JUMLAH DOKUMEN	2	DOKUMEN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	TENAGA ADMINISTRASI SD DAN SMP	47	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	TENAGA ADMINISTRASI SD DAN SMP	47	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	TENAGA ADMINISTRASI SD DAN SMP	47	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	PUSTAKAWAN SD DAN SMP	114	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	PUSTAKAWAN SD DAN SMP	114	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	PUSTAKAWAN SD DAN SMP	114	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT IPA	50	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT IPA	50	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT IPA	50	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT TIK	41	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT TIK	41	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT TIK	41	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT BAHASA	4	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT BAHASA	4	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	LABORAT BAHASA	4	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
28	Pendidikan Dasar	1.01.1.01.01.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.00 4	OPERASI SAYANG SISWA	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	1.350.000.000
	Pendidikan Dasar	1.01.1.01.01.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.00 9	PEKAN OLAHRAGA SD/MI	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	Pendidikan Dasar	1.01.1.01.01.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.01 9	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA BAGI PELAJAR	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
29	Pendidikan Dasar	1.01.1.01.01.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 6	PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	961.960.270
30	Pendidikan Dasar	1.01.1.01.01.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 0	LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	Pendidikan Dasar	1.01.1.01.01.16	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.03 0	LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
33	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.01 5	PENERIMAAN PESERTA DIDIDK BARU (PPDB)	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	610.936.600
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.01 5	PENERIMAAN PESERTA DIDIDK BARU (PPDB)	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.01 5	PENERIMAAN PESERTA DIDIDK BARU (PPDB)	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.01 8	PELAKSANAAN UNAS SMP/MTS	JUMLAH SISWA YANG MENGIKUTI UJIAN NASIONAL	7.150	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.01 8	PELAKSANAAN UNAS SMP/MTS	JUMLAH SISWA YANG MENGIKUTI UJIAN NASIONAL	7.150	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.01 8	PELAKSANAAN UNAS SMP/MTS	JUMLAH SISWA YANG MENGIKUTI UJIAN NASIONAL	7.150	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.03 2	PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN	JUMLAH TIM PENGEMBANG MUTU PEMBELAJARAN YANG DIBINA	220	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 2	PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN	JUMLAH TIM PENGEMBANG MUTU PEMBELAJARAN YANG DIBINA	220	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.03 2	PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN	JUMLAH TIM PENGEMBANG MUTU PEMBELAJARAN YANG DIBINA	220	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.03 4	WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA ONLINE	JUMLAH PESERTA WORKSHOP	110	PESERTA	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 4	WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA ONLINE	JUMLAH PESERTA WORKSHOP	110	PESERTA	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.03 4	WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA ONLINE	JUMLAH PESERTA WORKSHOP	110	PESERTA	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.03 5	PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMPN/S	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	225	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 5	PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMPN/S	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	225	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.03 5	PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMPN/S	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	225	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.46 7	PENGLOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	TERLAKSANANYA SECARA MAKSIMAL PENGLOLAAN PENDIDIKA INKLUSI	400	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.46 7	PENGLOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	TERLAKSANANYA SECARA MAKSIMAL PENGLOLAAN PENDIDIKA INKLUSI	400	ORANG	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.46 7	PENGLOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	TERLAKSANANYA SECARA MAKSIMAL PENGLOLAAN PENDIDIKA INKLUSI	400	ORANG	
34	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.02 8	PEMBINAAN PENGENDALIAN PENGAWASAN BOS APBD	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	98	%	387.729.500
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.03 1	PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIATA	ANGKA KELULUSAN SD	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.46 9	PENGLOLAAN RUMAH BELAJAR	ANGKA KELULUSAN SMP	100	%	
34	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.38	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	654.345.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.38	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.38	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
35	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.39	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	522.060.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.39	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.39	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
36	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.40	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	589.620.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.40	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.40	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
37	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.41	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	587.970.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.41	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.41	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								GRESIK				
38	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.42	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	592.020.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.42	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.42	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
39	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.43	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	591.600.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.43	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.43	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
40	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.44	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	582.855.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.44	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.44	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
41	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.45	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	451.845.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.45	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.45	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
42	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.46	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BUNGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	456.720.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.46	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BUNGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.46	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BUNGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
43	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.47	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	408.510.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.47	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.47	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
44	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.48	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	146.505.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.48	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.48	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
45	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.49	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	198.255.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.49	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.49	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
46	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.50	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	101.040.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.50	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.50	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
47	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.51	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUKUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	292.380.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.51	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUKUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.51	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUKUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
48	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.52	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 UJUNGPAKKAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	247.440.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.52	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 UJUNGPAKKAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				.01.16.52	OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 UJUNGPAKKAH	OPERASIONAL SEKOLAH			
49	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.53	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 PANCENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	170.370.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.53	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 PANCENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.53	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 PANCENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
50	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.54	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 CERME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	665.400.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.54	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 CERME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.54	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 CERME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
51	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.55	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 CERME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	455.865.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.55	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 CERME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.55	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 CERME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
52	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.56	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	487.260.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.56	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.56	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
53	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.57	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BENJENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	594.540.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.57	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BENJENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.57	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BENJENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
54	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.58	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	382.560.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN	KE SMP				(BOS) SMP NEGERI 2 BENJENG				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.58	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BENJENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.58	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BENJENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
55	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.59	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	523.080.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.59	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.59	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
56	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.60	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	260.985.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.60	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.60	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
57	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.61	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	247.440.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.61	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.61	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
58	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.62	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MENGANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	649.980.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.62	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MENGANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.62	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MENGANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
59	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.63	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MENGANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	582.855.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.63	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								MENGANTI				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.63	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MENGANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
60	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.64	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	589.290.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.64	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.64	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
61	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.65	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DRIYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	719.250.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.65	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DRIYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.65	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DRIYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
62	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.66	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	588.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.66	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.66	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
63	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.67	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	417.120.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.67	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.67	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
64	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.68	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SANGKAPURA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	355.350.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.68	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SANGKAPURA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.68	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SANGKAPURA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
65	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.69	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 TAMBAK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	181.605.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.69	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 TAMBAK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.69	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 TAMBAK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
66	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.71	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.425.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.71	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.71	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
67	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1.01.1.01 .01.16.06 5	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 33 DRIYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	102.600.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1.01.1.01 .01.16.06 5	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 33 DRIYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1.01.1.01 .01.16.06 5	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 33 DRIYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
68	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 73	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDILAN GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	124.185.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 73	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDILAN GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 73	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDILAN GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
69	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 74	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGTURI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	65.520.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 74	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGTURI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 74	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGTURI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
70	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 75	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUMPUR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	69.525.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 75	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUMPUR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 75	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUMPUR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
71	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT	95,5	%	1 01 1 01 01 16 76	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	206.460.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN	KE SMP				NEGERI PETROKIMIA GRESIK				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 76	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 76	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
72	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 77	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	207.285.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 77	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 77	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
73	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 78	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	211.500.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 78	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 78	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
74	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 79	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	200.160.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 79	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 79	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
75	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 80	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 5	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	65.820.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 80	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 5	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 80	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 5	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
76	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 81	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 6	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	68.190.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 81	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 6	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 81	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 6	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
77	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 82	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 7	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	83.100.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 82	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 7	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 82	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 7	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
78	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 83	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORUKUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	128.100.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 83	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORUKUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 83	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORUKUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
79	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 84	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKORAME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	195.330.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 84	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKORAME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 84	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKORAME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
80	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 85	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	107.640.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 85	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 85	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
81	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 86	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	140.910.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 86	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 86	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
82	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 87	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPOJOK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	118.395.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 87	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPOJOK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 87	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPOJOK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
83	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 88	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAHANREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	139.200.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 88	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAHANREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 88	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAHANREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
84	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 89	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GENDING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	133.020.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 89	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GENDING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 89	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GENDING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
85	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KEBERLANJUTAN	95,5	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP			01 16 90	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GULOMANTUNG	OPERASIONAL SEKOLAH			109.485.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 90	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GULOMANTUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 90	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GULOMANTUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
86	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 91	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	190.365.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 91	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 91	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
87	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 92	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGKERING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.670.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 92	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGKERING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 92	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGKERING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
88	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 93	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAWISANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	114.960.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 93	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAWISANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 93	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAWISANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
89	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 94	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	98.145.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 94	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 94	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
90	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 95	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDANYANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	280.455.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 95	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDANYANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 95	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDANYANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
91	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 96	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMBANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	71.085.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 96	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMBANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 96	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMBANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
92	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT	95,5	%	1 01 1 01 01 16 97	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	61.875.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN	KE SMP				NEGERI KLANGONAN				
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 97	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLANGONAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 97	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLANGONAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
93	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 98	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRAMBANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	39.675.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 98	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRAMBANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 98	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRAMBANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
94	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 99	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	82.215.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 99	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 99	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
95	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 100	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	157.560.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 100	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 100	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
96	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 101	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	127.635.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 101	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 101	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
97	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 102	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	104.940.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 102	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 102	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
98	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 103	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEGOROMADU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	71.940.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 103	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEGOROMADU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 103	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEGOROMADU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
99	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 104	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SIDOMORO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	200.340.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 104	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SIDOMORO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 104	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SIDOMORO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
100	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 105	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	49.650.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 105	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 105	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
101	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 106	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	69.870.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 106	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 106	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
102	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 107	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SINGOSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	194.175.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 107	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SINGOSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 107	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SINGOSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
103	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 108	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETOYOGUCI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 108	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETOYOGUCI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 108	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETOYOGUCI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
104	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 109	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GUMENO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 109	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GUMENO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 109	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GUMENO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
105	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 110	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	33.195.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 110	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 110	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
106	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 111	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LERAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.655.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 111	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LERAN	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 111	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LERAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
107	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 112	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	79.890.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 112	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 112	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
108	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 113	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	130.065.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 113	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 113	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
109	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 114	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROBAKUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 114	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROBAKUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 114	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROBAKUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
110	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 115	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PONGANGAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	319.590.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 115	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PONGANGAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 115	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PONGANGAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
111	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 116	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ROOMO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	71.565.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 116	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ROOMO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 116	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ROOMO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
112	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 117	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	51.495.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 117	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 117	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
113	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 118	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	65.820.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 118	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 118	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
114	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 119	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUCI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	134.100.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 119	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUCI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 119	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUCI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
115	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 120	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	206.505.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 120	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 120	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
116	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 121	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 121	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 121	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
117	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 122	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBALO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	42.900.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 122	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBALO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 122	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBALO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
118	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 123	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI YOSOWILANGUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.940.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 123	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI YOSOWILANGUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 123	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI YOSOWILANGUN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
119	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 124	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	104.715.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 124	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 124	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
120	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 125	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAGAKAGGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	81.105.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 125	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAGAKAGGUNG	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 125	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAGAKAGGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
121	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 126	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	219.150.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 126	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 126	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
122	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 127	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	67.665.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 127	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 127	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
123	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 128	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME LOR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	240.090.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 128	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME LOR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 128	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME LOR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
124	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 129	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DADAPKUNING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	39.315.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 129	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DADAPKUNING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 129	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DADAPKUNING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
125	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 130	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOORO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 130	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOORO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 130	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOORO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
126	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 131	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUNGUS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	86.685.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 131	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUNGUS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 131	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUNGUS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
127	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 132	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGKULUT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.215.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				132	NEGERI GEDANGKULUT				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 132	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGKULUT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
128	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 133	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GURANGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	65.475.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 133	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GURANGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 133	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GURANGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
129	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 134	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI IKER IKER GEGER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	49.485.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 134	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI IKER IKER GEGER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 134	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI IKER IKER GEGER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
130	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 135	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	51.735.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 135	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 135	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
131	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 136	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAMBINGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 136	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAMBINGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 136	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAMBINGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
132	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 137	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KANDANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 137	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KANDANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 137	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KANDANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
133	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 138	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROWUDI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 138	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROWUDI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 138	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROWUDI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
134	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 139	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGABETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	87.645.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 139	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGABETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 139	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGABETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
135	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 140	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEMBUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	80.925.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 140	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEMBUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 140	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEMBUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
136	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 141	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	75.960.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 141	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 141	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
137	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 142	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	64.680.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 142	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 142	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
138	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 143	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMAMPIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 143	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMAMPIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 143	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMAMPIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
139	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 144	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	40.440.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 144	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 144	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
140	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 145	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	77.940.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 145	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 145	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
141	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 146	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKBERAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 146	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKBERAS	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 146	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKBERAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
142	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 147	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDANI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	41.940.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 147	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDANI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 147	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDANI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
143	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 148	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETITING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	168.390.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 148	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETITING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 148	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETITING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
144	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 149	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI AMBENG AMBENG WATANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	32.790.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 149	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI AMBENG AMBENG WATANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 149	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI AMBENG AMBENG WATANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
145	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 150	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUDUKSAMPEYAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	38.130.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 150	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUDUKSAMPEYAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 150	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUDUKSAMPEYAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
146	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 151	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	32.010.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 151	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 151	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
147	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 152	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREDEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	55.335.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 152	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREDEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 152	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREDEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
148	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 153	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDANAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.420.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 153	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDANAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 153	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDANAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
149	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 154	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANJUNAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.190.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 154	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANJUNAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 154	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANJUNAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
150	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 155	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETISBENEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	33.105.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 155	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETISBENEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 155	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETISBENEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
151	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 156	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMIRPLAPAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.695.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 156	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMIRPLAPAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 156	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMIRPLAPAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
152	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 157	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SETROHADI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 157	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SETROHADI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 157	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SETROHADI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
153	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 158	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	54.720.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 158	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 158	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
154	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 159	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	84.630.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 159	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 159	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
155	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KEBERLANJUTAN	95,5	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP			01 16 160	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO I	OPERASIONAL SEKOLAH			59.340.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 160	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 160	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
156	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 161	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.780.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 161	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 161	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
157	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 162	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TEBALOA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.945.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 162	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TEBALOA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 162	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TEBALOA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
158	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 163	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 163	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 163	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
159	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 164	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TUMAPEL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 164	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TUMAPEL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 164	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TUMAPEL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
160	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 165	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALONGMOJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.815.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 165	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALONGMOJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 165	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALONGMOJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
161	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 166	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BALONGTUNJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.845.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 166	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BALONGTUNJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 166	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BALONGTUNJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
162	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 167	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANTER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 167	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANTER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 167	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANTER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
163	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 168	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BENGKELOLOR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 168	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BENGKELOLOR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 168	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BENGKELOLOR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
164	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 169	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.715.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 169	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 169	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
165	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 170	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BULUREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	75.450.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 170	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BULUREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 170	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BULUREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
166	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 171	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI D E R M O	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	34.620.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 171	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI D E R M O	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 171	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI D E R M O	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
167	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 172	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DELIKSUMBER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	77.190.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 172	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DELIKSUMBER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 172	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DELIKSUMBER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
168	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 173	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GLURANPLOSO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	71.775.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 173	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GLURANPLOSO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 173	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GLURANPLOSO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
169	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KEBERLANJUTAN	95,5	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP			01 16 174	OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JATIREMBE	OPERASIONAL SEKOLAH			56.745.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 174	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JATIREMBE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 174	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JATIREMBE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
170	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 175	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JOGODALU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 175	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JOGODALU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 175	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JOGODALU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
171	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 176	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KALIPADANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	49.995.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 176	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KALIPADANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 176	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KALIPADANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
172	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 177	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGAN KIDUL I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	44.130.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 177	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGAN KIDUL I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 177	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGAN KIDUL I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
173	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 178	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGAN KIDUL II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.730.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 178	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGAN KIDUL II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 178	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGAN KIDUL II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
174	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 179	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGRUKEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	38.040.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 179	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGRUKEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 179	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGRUKEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
175	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 180	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSEKAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	36.795.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 180	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSEKAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 180	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSEKAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
176	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 181	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	32.280.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 181	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 181	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
177	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 182	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	45.480.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 182	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 182	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
178	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 183	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUNDO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	75.990.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 183	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUNDO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 183	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUNDO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
179	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 184	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI METATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 184	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI METATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 184	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI METATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
180	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 185	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI MUNGUGEBANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.790.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 185	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI MUNGUGEBANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 185	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI MUNGUGEBANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
181	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 186	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MUNGUGIANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	81.060.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 186	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MUNGUGIANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 186	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MUNGUGIANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
182	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 187	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUNDUTTRATE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.520.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				187	NEGERI PUNDUTTRATE				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 187	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUNDUTTRATE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
183	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 188	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAPURKLAGEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.860.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 188	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAPURKLAGEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 188	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAPURKLAGEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
184	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 189	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIRNOBOYO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	130.650.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 189	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIRNOBOYO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 189	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIRNOBOYO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
185	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 190	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	94.125.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 190	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 190	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
186	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 191	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI 2 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	57.315.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 191	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI 2 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 191	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI 2 BALONGPANGGANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
187	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 192	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABATAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	56.820.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 192	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABATAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 192	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABATAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
188	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 193	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BANDUNGSEKARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	40.800.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 193	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								BANDUNGSEKARAN				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 193	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BANDUNGSEKARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
189	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 194	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	56.625.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 194	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 194	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
190	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 195	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRANGKAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	41.070.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 195	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRANGKAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 195	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRANGKAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
191	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 196	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAPET	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	52.455.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 196	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAPET	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 196	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAPET	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
192	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 197	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DOHOAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	45.225.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 197	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DOHOAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 197	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DOHOAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
193	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 198	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JOMBANGDELIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 198	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JOMBANGDELIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 198	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JOMBANGDELIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
194	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 199	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGSEMANDING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 199	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGSEMANDING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 199	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGSEMANDING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
195	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 200	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGPRING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	54.360.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 200	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGPRING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 200	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGPRING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
196	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 201	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSUMER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	70.395.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 201	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSUMER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 201	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSUMER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
197	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 202	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 202	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 202	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
198	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 203	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 203	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 203	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
199	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 204	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	41.985.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 204	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 204	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
200	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 205	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAMPEL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 205	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAMPEL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 205	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAMPEL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
201	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 206	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGASIN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 206	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGASIN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 206	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGASIN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
202	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT	95,5	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN	KE SMP			207	NEGERI PINGGIR				
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 207	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PINGGIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 207	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PINGGIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
203	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 208	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUCUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 208	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUCUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 208	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUCUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
204	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 209	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARPUTHI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.670.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 209	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARPUTHI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 209	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARPUTHI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
205	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 210	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANAHANDEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.850.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 210	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANAHANDEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 210	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANAHANDEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
206	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 211	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENGGOR I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 211	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENGGOR I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 211	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENGGOR I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
207	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 212	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TENGGOR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 212	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TENGGOR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 212	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TENGGOR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
208	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 213	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WAHAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	43.740.000
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 213	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WAHAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 213	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WAHAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
209	DIKDas	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 214	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WONOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 214	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WONOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 214	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WONOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
210	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 215	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTANSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	40.905.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 215	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTANSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 215	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTANSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
211	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 216	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	145.620.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 216	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 216	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
212	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 217	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	174.300.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 217	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 217	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
213	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 218	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	110.985.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 218	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 218	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
214	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 219	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	154.785.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 219	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 219	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
215	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 220	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGKIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	234.630.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 220	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGKIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 220	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGKIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
216	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 221	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	194.430.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 221	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO 1	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 221	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
217	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 222	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	48.300.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 222	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 222	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
218	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 223	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	96.900.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 223	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 223	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
219	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 224	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	53.190.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 224	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 224	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
220	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 225	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	61.815.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 225	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 225	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
221	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 226	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KESAMBEN WETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	64.245.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 226	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KESAMBEN WETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 226	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KESAMBEN WETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
222	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 227	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	95.340.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 227	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 227	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
223	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 228	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.815.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 228	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 228	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
224	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 229	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	63.105.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 229	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 229	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
225	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 230	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOSARIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	240.030.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 230	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOSARIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 230	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOSARIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
226	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 231	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	64.410.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 231	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 231	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
227	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 232	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	76.440.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 232	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 232	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
228	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 233	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	113.085.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 233	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 233	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
229	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 234	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	119.265.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 234	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 234	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN II	OPERASIONAL SEKOLAH			
230	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 235	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	247.545.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 235	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 235	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
231	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 236	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDEGANSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	127.620.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 236	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDEGANSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 236	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDEGANSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
232	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 237	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	107.685.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 237	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 237	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
233	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 238	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	102.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 238	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 238	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
234	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 239	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	240.990.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 239	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 239	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
235	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 240	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	122.235.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 240	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 240	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
236	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 241	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDOROANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	120.690.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 241	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDOROANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
237	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	DASAR 9 TAHUN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	241	NEGERI WEDOROANOM				
							1 01 1 01 01 16 242	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	63.150.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 242	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 242	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
238	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 243	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KESAMBEN KULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	77.385.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 243	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KESAMBEN KULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 243	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KESAMBEN KULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
239	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 244	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 PASINAN LEMAH PUTIH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	97.905.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 244	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 PASINAN LEMAH PUTIH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 244	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 PASINAN LEMAH PUTIH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
240	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 245	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMBERWARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	60.525.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 245	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMBERWARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 245	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMBERWARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
241	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 246	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	68.145.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 246	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 246	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
242	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 247	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 WATES TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	68.460.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 247	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 WATES TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 247	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 WATES TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
243	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KEBERLANJUTAN	95,5	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP			01 16 248	OPERASIONAL (BOS) NEGERI 1 WRINGINANOM	OPERASIONAL SEKOLAH			53.025.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 248	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) NEGERI 1 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 248	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) NEGERI 1 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
244	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 249	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	42.660.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 249	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 249	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
245	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 250	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KESAMBEN KULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	61.500.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 250	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KESAMBEN KULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 250	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KESAMBEN KULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
246	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 251	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PASINAN LEMAH PUTIH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	65.400.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 251	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PASINAN LEMAH PUTIH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 251	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PASINAN LEMAH PUTIH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
247	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 252	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMBERWARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	32.385.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 252	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMBERWARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 252	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMBERWARU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
248	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 253	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	112.020.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 253	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 253	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMENGKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
249	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 254	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WATES TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.720.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				254	NEGERI 2 WATES TANJUNG				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 254	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WATES TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
250	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 256	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	166.275.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 256	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 256	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WRINGINANOM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
251	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 257	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH KLAGEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	107.040.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 257	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH KLAGEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 257	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH KLAGEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
252	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 258	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANI SOKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.910.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 258	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANI SOKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 258	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANI SOKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
253	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 259	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANIWARAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	54.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 259	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANIWARAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 259	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANIWARAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
254	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 260	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MONDOLUKU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	57.330.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 260	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MONDOLUKU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 260	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MONDOLUKU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
255	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 261	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEDAGANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	65.835.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 261	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEDAGANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 261	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEDAGANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
256	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 262	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	90.420.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 262	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNG	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 262	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
257	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 263	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SOOKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	76.365.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 263	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SOOKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 263	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SOOKO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
258	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 264	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERAME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	86.745.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 264	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERAME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 264	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERAME	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
259	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 265	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	62.175.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 265	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 265	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
260	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 266	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BANYUURIP	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	82.125.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 266	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BANYUURIP	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 266	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BANYUURIP	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
261	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 267	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 GLINDAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	41.265.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 267	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 GLINDAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 267	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 GLINDAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
262	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 268	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	39.120.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 268	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 268	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
263	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 269	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 LAMPAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	60.885.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				269	NEGERI 1 LAMPAH				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 269	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 LAMPAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
264	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 270	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 MENUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	49.740.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 270	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 MENUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 270	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 MENUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
265	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 271	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SLEMPIT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	88.965.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 271	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SLEMPIT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 271	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SLEMPIT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
266	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 272	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.650.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 272	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 272	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
267	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 273	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 BANYUURIP	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	47.940.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 273	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 BANYUURIP	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 273	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 BANYUURIP	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
268	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 274	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 GLINDAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	48.855.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 274	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 GLINDAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 274	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 GLINDAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
269	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 275	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	126.360.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 275	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 275	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDAMEAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
270	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 276	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 LAMPAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 276	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 LAMPAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 276	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 LAMPAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
271	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 277	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 MENUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.145.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 277	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 MENUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 277	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 MENUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
272	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 278	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SLEMPIT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	124.530.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 278	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SLEMPIT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 278	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SLEMPIT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
273	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 279	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	53.145.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 279	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 279	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 TANJUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
274	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 280	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BELAHANREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	53.445.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 280	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BELAHANREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 280	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BELAHANREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
275	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 281	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CERMENLEREK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 281	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CERMENLEREK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 281	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CERMENLEREK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
276	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 282	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOWUKU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	75.315.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 282	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOWUKU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 282	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOWUKU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
277	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 283	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEPUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.275.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 283	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEPUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 283	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEPUNG	OPERASIONAL SEKOLAH			
278	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 284	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORAHARJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	95.475.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 284	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORAHARJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 284	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORAHARJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
279	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 285	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TULUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	61.755.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 285	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TULUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 285	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TULUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
280	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 286	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TURIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	38.805.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 286	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TURIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 286	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TURIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
281	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 287	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	38.730.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 287	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 287	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
282	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 288	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOBOH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	59.520.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 288	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOBOH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 288	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOBOH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
283	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 289	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOTENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	169.365.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 289	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOTENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 289	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOTENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
284	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 290	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRINGKANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	151.260.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 290	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRINGKANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
285	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	DASAR 9 TAHUN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	290 1 01 1 01 01 16 291	NEGERI BRINGKANG PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	120.945.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 291	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 291	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOMAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
286	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 292	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRANCANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	69.525.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 292	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRANCANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 292	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRANCANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
287	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 293	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADINGWATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	182.820.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 293	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADINGWATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 293	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADINGWATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
288	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 294	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	90.855.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 294	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 294	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
289	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 295	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	137.715.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 295	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 295	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
290	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 296	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HENDROSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	99.585.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 296	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HENDROSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 296	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HENDROSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
291	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 297	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HULAA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	77.730.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 297	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HULAAAN	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 297	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HULAAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
292	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 298	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPATIHAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	158.025.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 298	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPATIHAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 298	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPATIHAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
293	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 299	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	119.760.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 299	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 299	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
294	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 300	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.245.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 300	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 300	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
295	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 301	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	309.075.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 301	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 301	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
296	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 302	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	60.795.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 302	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 302	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
297	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 303	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOTENGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	73.500.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 303	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOTENGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 303	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOTENGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
298	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 304	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PELEMWATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	179.505.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				304	NEGERI PELEMWATU				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 304	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PELEMWATU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
299	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 305	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PENGALANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	64.020.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 305	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PENGALANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 305	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PENGALANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
300	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 306	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	79.245.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 306	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 306	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRANTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
301	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 307	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	144.690.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 307	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 307	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
302	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 308	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	29.595.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 308	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 308	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
303	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 309	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUPADANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	60.060.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 309	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUPADANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 309	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUPADANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
304	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 310	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SETRO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	56.685.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 310	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SETRO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 310	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SETRO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
305	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 311	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOJANGKUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	148.905.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 311	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOJANGKUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 311	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOJANGKUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
306	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 312	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOWUNGU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	101.400.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 312	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOWUNGU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 312	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOWUNGU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
307	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 313	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	39.195.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 313	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 313	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
308	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 314	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOLOKAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	74.370.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 314	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOLOKAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 314	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOLOKAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
309	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 315	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KERTOSONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 315	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KERTOSONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 315	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KERTOSONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
310	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 316	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LASEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 316	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LASEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 316	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LASEM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
311	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 317	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MRIYUNAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	73.425.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 317	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MRIYUNAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 317	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MRIYUNAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
312	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 318	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAWEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 318	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAWEN	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 318	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAWEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
313	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 319	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACIKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 319	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACIKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 319	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACIKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
314	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 320	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACITENGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	41.730.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 320	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACITENGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 320	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACITENGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
315	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 321	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAGARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	39.270.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 321	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAGARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 321	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAGARAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
316	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 322	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMULYO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.675.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 322	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMULYO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 322	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMULYO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
317	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 323	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	37.500.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 323	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 323	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
318	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 324	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	60.390.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 324	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 324	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
319	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 325	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN RANDUBOTO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	33.495.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				325	RANDUBOTO				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 325	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN RANDUBOTO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
320	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 326	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SUKOREJO SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	43.515.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 326	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SUKOREJO SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 326	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SUKOREJO SIDAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
321	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 327	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ABAR ABIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.755.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 327	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ABAR ABIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 327	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ABAR ABIR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
322	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 328	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDANTEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	36.585.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 328	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDANTEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 328	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDANTEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
323	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 329	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BUNGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	140.355.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 329	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BUNGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 329	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BUNGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
324	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 330	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRODELİK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.720.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 330	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRODELİK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 330	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRODELİK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
325	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 331	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMANGI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 331	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMANGI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 331	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMANGI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
326	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 332	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRAMAT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	34.425.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 332	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRAMAT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 332	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRAMAT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
327	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 333	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MASANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	54.870.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 333	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MASANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 333	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MASANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
328	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 334	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MELIRANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	33.375.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 334	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MELIRANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 334	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MELIRANG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
329	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 335	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	66.645.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 335	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 335	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROGEDE	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
330	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 336	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROWETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	33.045.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 336	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROWETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 336	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROWETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
331	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 337	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEGUNDAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 337	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEGUNDAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 337	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEGUNDAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
332	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 338	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMUKTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	40.290.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 338	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMUKTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 338	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMUKTI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
333	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT	95,5	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	40.485.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN	KE SMP			339	NEGERI SIDOREJO				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 339	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 339	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
334	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 340	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.365.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 340	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 340	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
335	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 341	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOWATI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 341	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOWATI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 341	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOWATI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
336	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 342	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	64.965.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 342	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 342	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
337	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 343	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	54.720.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 343	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 343	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
338	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 344	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGWEDORO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	55.380.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 344	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGWEDORO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 344	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGWEDORO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
339	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 345	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WATUAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 345	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WATUAGUNG	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 345	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WATUAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
340	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 346	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKBAWO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 346	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKBAWO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 346	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKBAWO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
341	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 347	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.885.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 347	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 347	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
342	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 348	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 348	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 348	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
343	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 349	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 349	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 349	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
344	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 350	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BARON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 350	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BARON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 350	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BARON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
345	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 351	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	32.415.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 351	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 351	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
346	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 352	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUKUHKEMBAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	37.260.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				352	NEGERI DUKUHKEMBAR				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 352	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUKUHKEMBAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
347	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 353	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KALIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	26.925.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 353	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KALIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 353	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KALIREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
348	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 354	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGCANGKRING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	39.810.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 354	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGCANGKRING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 354	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGCANGKRING	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
349	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 355	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LOWAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	144.540.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 355	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LOWAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 355	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LOWAYU	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
350	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 356	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MADUMULYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	45.540.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 356	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MADUMULYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 356	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MADUMULYOREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
351	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 357	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENTARAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	54.675.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 357	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENTARAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 357	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENTARAS	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
352	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 358	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADANGBANDUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.895.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 358	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADANGBANDUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				358	NEGERI PADANGBANDUNG				
353	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 359	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIYINTUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	36.420.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 359	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIYINTUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 359	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIYINTUNGGAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
354	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 360	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMBOGUNUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	48.735.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 360	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMBOGUNUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 360	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMBOGUNUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
355	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 361	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.305.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 361	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 361	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
356	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 362	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARGADUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 362	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARGADUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 362	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARGADUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
357	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 363	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 363	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 363	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNGANYAR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
358	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 364	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBUWUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	45.675.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 364	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBUWUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 364	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBUWUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
359	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 365	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREMENGKAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	38.085.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 365	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREMENGKAL	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				365	NEGERI TIREMENGKAL				
360	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 366	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PANGKAHWETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.920.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 366	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PANGKAHWETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 366	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PANGKAHWETAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
361	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 367	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.655.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 367	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 367	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
362	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 368	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	37.515.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 368	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 368	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
363	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 369	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 369	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 369	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
364	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 370	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLATIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.385.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 370	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLATIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 370	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLATIK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
365	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 371	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 371	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 371	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOSARI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
366	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 372	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBONAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 372	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBONAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 372	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBONAGUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
367	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 373	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETAPANGLO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	37.320.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 373	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETAPANGLO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 373	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETAPANGLO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
368	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 374	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI NGIMBOH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 374	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI NGIMBOH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 374	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI NGIMBOH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
369	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 375	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAH WETAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	128.565.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 375	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAH WETAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 375	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAH WETAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
370	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 376	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAHKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.170.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 376	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAHKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 376	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAHKULON	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
371	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 377	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	51.855.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 377	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 377	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
372	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 378	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.485.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 378	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 378	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
373	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 379	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJANGAWAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				379	NEGERI TANJANGAWAN				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 379	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJANGAWAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
374	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 380	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN BOLO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 380	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN BOLO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 380	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN BOLO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
375	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 382	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN KARANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.120.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 382	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN KARANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 382	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN KARANGREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
376	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 383	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUTENGGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.965.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 383	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUTENGGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 383	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUTENGGAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
377	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 384	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAMPUREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.830.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 384	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAMPUREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 384	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAMPUREJO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
378	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 385	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	55.290.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 385	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 385	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
379	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 386	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 386	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 386	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
380	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 387	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 387	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 387	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
381	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 388	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETANEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 388	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETANEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 388	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETANEN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
382	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 389	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANTENAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	44.100.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 389	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANTENAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 389	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANTENAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
383	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 390	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	41.625.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 390	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 390	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETUNG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
384	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 391	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRUPUH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	38.130.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 391	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRUPUH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 391	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRUPUH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
385	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 392	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SERAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.455.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 392	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SERAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 392	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SERAH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
386	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 393	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIWALAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 393	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIWALAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 393	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIWALAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
387	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 394	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKODONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 394	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKODONO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 394	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKODONO	OPERASIONAL SEKOLAH			
388	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 395	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMURBER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	68.550.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 395	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMURBER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 395	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMURBER	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
389	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 396	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 396	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 396	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
390	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 397	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.530.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 397	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 397	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
391	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 398	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 398	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 398	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
392	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 399	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 399	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 399	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
393	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 400	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 400	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 400	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
394	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 401	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULULANJANG 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	52.245.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 401	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULULANJANG 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
395	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	DASAR 9 TAHUN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	401	NEGERI BULULANJANG 1				40.335.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 402	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULULANJANG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 402	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULULANJANG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
396	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 403	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	63.210.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 403	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 403	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
397	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 404	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 404	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 404	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
398	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 405	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 405	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 405	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
399	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 406	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DEKATAGUNG 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	50.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 406	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DEKATAGUNG 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 406	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DEKATAGUNG 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
400	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 407	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DEKATAGUNG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.185.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 407	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DEKATAGUNG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 407	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DEKATAGUNG 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
401	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 408	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GUNUNG TEGUH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 408	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GUNUNG TEGUH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 408	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GUNUNG TEGUH	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
402	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 409	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	42.240.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 409	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 409	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
403	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 410	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 410	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 410	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
404	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 411	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KOTAKUSUMA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	77.970.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 411	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KOTAKUSUMA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 411	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KOTAKUSUMA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
405	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 412	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KUMALASA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.080.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 412	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KUMALASA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 412	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KUMALASA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
406	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 413	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 413	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 413	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
407	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 414	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.420.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 414	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 414	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
408	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 415	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	36.135.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				415	NEGERI LEBAK 3				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 415	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
409	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 416	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 416	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 416	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
410	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 417	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 417	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 417	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
411	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 418	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 418	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 418	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
412	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 419	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT BARAT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	53.385.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 419	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT BARAT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 419	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT BARAT	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
413	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 420	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT TIMUR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 420	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT TIMUR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 420	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT TIMUR	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
414	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 421	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	88.905.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 421	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 421	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 1	OPERASIONAL SEKOLAH			
415	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 422	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 422	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 422	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
416	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 423	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 423	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 423	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
417	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 424	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	57.510.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 424	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 424	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
418	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 425	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 425	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 425	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
419	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 426	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	62.715.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 426	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 426	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
420	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 427	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 5	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	46.650.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				427	NEGERI SIDOGEDUNGBATU 5				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 427	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 5	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
421	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 428	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 6	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 428	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 6	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 428	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 6	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
422	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 429	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 429	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 429	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
423	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 430	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 430	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 430	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
424	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 431	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUNGAI RUJING 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 431	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUNGAI RUJING 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 431	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUNGAI RUJING 3	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
425	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 432	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI TELUK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 432	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI TELUK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 432	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI TELUK	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
426	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT	95,5	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	68.100.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN	KE SMP			433	NEGERI SUWARI 1				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 433	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 433	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 1	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
427	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 434	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.440.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 434	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 434	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 2	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
428	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 435	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DIPONGGO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	40.590.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 435	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DIPONGGO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 435	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DIPONGGO	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
429	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 436	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GELAM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 436	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GELAM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 436	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GELAM	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
430	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 437	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREJEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 437	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREJEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 437	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREJEG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
431	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 438	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	31.500.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 438	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 438	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
432	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 439	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 439	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DASAR 9 TAHUN				439	NEGERI KEPUH LEGUNDI II				
433	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 440	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 440	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 440	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
434	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 441	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	35.760.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 441	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 441	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
435	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 442	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 442	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 442	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
436	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 443	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 443	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 443	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
437	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 444	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 444	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 444	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
438	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 445	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 445	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 445	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
439	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 446	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 446	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 446	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
440	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 447	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 447	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 447	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
441	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 448	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 448	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 448	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
442	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 449	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKALELA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.930.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 449	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKALELA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 449	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKALELA	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
443	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 450	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKAONENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 450	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKAONENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 450	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKAONENG	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
444	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 451	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	34.125.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 451	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 451	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
445	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 452	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	58.155.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 452	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 452	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
446	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 453	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	48.060.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01	PENYEDIAAN BANTUAN	TERLAKSANANYA BIAYA	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				01 16 453	OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK III	OPERASIONAL SEKOLAH			
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 453	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
447	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 454	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	64.950.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 454	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 454	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
448	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 455	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 455	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 455	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI 4	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
449	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 456	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	53.730.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 456	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 456	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
450	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 457	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	55.590.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 457	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 457	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
451	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 458	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 458	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 458	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
452	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 459	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 459	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 459	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG I	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
453	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 460	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								DAWANG II				
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 460	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 460	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG II	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
454	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 461	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 461	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 461	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG III	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
455	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 462	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 462	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 462	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG IV	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
456	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KEBERLANJUTAN DARI SD DAN SEDERAJAT KE SMP	95,5	%	1 01 1 01 01 16 463	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN 2 PEROMAAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	30.000.000
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SD	96,75	%	1 01 1 01 01 16 463	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN 2 PEROMAAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
	DIKDAS	1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	ANGKA KELULUSAN SMP	92,25	%	1 01 1 01 01 16 463	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN 2 PEROMAAAN	TERLAKSANANYA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH	100	%	
457	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH DOKUMEN RENJA PAUD	1	DOKUMEN	38.000.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH DOKUMEN RENJA PAUD	1	DOKUMEN	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH DOKUMEN RENJA PAUD	1	DOKUMEN	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH DOKUMEN RENJA PAUD	1	DOKUMEN	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI	JUMLAH DOKUMEN RENJA PAUD	1	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD				
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH PESERTA KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI PAUD	96	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH PESERTA KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI PAUD	96	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH PESERTA KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI PAUD	96	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH PESERTA KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI PAUD	96	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1 01 1 01 01 22 002	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA KERJA PAUD	JUMLAH PESERTA KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI PAUD	96	ORANG	
458	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1 01 1 01 01 22 004	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	JUMLAH PESERTA	554	ORANG	110.999.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1 01 1 01 01 22 004	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	JUMLAH PESERTA	554	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1 01 1 01 01 22 004	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	JUMLAH PESERTA	554	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1 01 1 01 01 22 004	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	JUMLAH PESERTA	554	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1 01 1 01 01 22 004	PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD	JUMLAH PESERTA	554	ORANG	
459	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1 01 1 01 01 22 012	PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD	JUMLAH PESERTA	440	ORANG	150.000.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1 01 1 01 01 22 012	PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD	JUMLAH PESERTA	440	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1 01 1 01 01 22 012	PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD	JUMLAH PESERTA	440	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1 01 1 01 01 22 012	PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD	JUMLAH PESERTA	440	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1 01 1 01 01 22 012	PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PAUD	JUMLAH PESERTA	440	ORANG	
461	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.00 3.	PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN	JUMLAH LEMBAGA PAUD YANG TERSERTIFIKASI	485	LEMBAGA	1.015.746.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.00 3.	PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN	JUMLAH LEMBAGA PAUD YANG TERSERTIFIKASI	485	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.00 3.	PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN	JUMLAH LEMBAGA PAUD YANG TERSERTIFIKASI	485	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.00 3.	PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN	JUMLAH LEMBAGA PAUD YANG TERSERTIFIKASI	485	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.00 3.	PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN	JUMLAH LEMBAGA PAUD YANG TERSERTIFIKASI	485	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.15.00 3	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	1.735	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.15.00 3	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	1.735	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.15.00 3	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	1.735	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.15.00 3	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	1.735	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.15.00 3	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	1.735	LEMBAGA	
463	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.00 6.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MANYAR	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	140.000.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.00 6.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MANYAR	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.00 6.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MANYAR	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.00 6.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MANYAR	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.00 6.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MANYAR	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
464	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.00 8.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA BALONGPANGGANG	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	55.100.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.00 8.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA BALONGPANGGANG	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.00 8.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA BALONGPANGGANG	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.00 8.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								PEMBINA BALONGPANGGANG				
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.00 8.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA BALONGPANGGANG	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
465	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.00 7.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MENGANTI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	64.000.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.00 7.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MENGANTI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.00 7.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MENGANTI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.00 7.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MENGANTI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.00 7.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA MENGANTI	JUMLAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN YANG TERSALUR	1	LEMBAGA	
466	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.02 7	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B, C	JUMLAH PESERTA UJIAN	1.350	ORANG	120.000.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.02 7	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B, C	JUMLAH PESERTA UJIAN	1.350	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.02 7	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B, C	JUMLAH PESERTA UJIAN	1.350	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.02 7	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B, C	JUMLAH PESERTA UJIAN	1.350	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.02 7	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B, C	JUMLAH PESERTA UJIAN	1.350	ORANG	
467	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH PESERTA	280	ORANG	20.116.100.000
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH PESERTA	280	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH PESERTA	280	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH PESERTA	280	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH PESERTA	280	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH TPA/TPQ/MADIN YANG DI BINA	960	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH TPA/TPQ/MADIN YANG DI BINA	960	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.02	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	JUMLAH TPA/TPQ/MADIN YANG DI BINA	960	LEMBAGA	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
							5	NON FORMAL				
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH TPA/TPQ/MADIN YANG DI BINA	960	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH TPA/TPQ/MADIN YANG DI BINA	960	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLA PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	100	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLA PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	100	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLA PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	100	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLA PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	100	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLA PESERTA PEMBINAAN PENGELOLA KURSUS	100	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH LEMBAGA YANG DIBINA	980	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH LEMBAGA YANG DIBINA	980	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH LEMBAGA YANG DIBINA	980	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH LEMBAGA YANG DIBINA	980	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.02 5	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	JUMLAH LEMBAGA YANG DIBINA	980	LEMBAGA	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH KADER YANG DILATIH	275	ORANG	210.438.550
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH KADER YANG DILATIH	275	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH KADER YANG DILATIH	275	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH KADER YANG DILATIH	275	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN	JUMLAH KADER YANG DILATIH	275	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD IN FORMAL	79	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH ORANG TUA YANG DIBERIKAN SOSIALISASI	475	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA PARTISIPASI PAUD NON FORMAL	27,5	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH ORANG TUA YANG DIBERIKAN SOSIALISASI	475	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET A	93	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH ORANG TUA YANG DIBERIKAN SOSIALISASI	475	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET B	91	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH ORANG TUA YANG DIBERIKAN SOSIALISASI	475	ORANG	
	PAUD DAN NON FORMAL	1 01 1 01 01 22	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL	ANGKA KELULUSAN PAKET C	90	%	1.01.1.01 .01.22.01 2	PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	JUMLAH ORANG TUA YANG DIBERIKAN SOSIALISASI	475	ORANG	
473	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 4	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	JUMLAH PENETAPAN KREDIT GURU SD	200	ORANG	52.432.148.800
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 4	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	JUMLAH PENETAPAN KREDIT GURU SD	200	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 4	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	JUMLAH PENETAPAN KREDIT GURU SD	200	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 4	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	JUMLAH PENETAPAN KREDIT GURU SMP	70	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 4	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	JUMLAH PENETAPAN KREDIT GURU SMP	70	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 4	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	JUMLAH PENETAPAN KREDIT GURU SMP	70	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PESERTA GURU TK	170	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PESERTA GURU TK	170	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PESERTA GURU TK	170	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PESERTA GURU SD	170	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PESERTA GURU SD	170	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI			.01.19.00 1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)				
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PENGAWAS YANG DIBINA	94	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PENGAWAS YANG DIBINA	94	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PENGAWAS YANG DIBINA	94	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PENILIK YANG DIBINA	46	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PENILIK YANG DIBINA	46	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PENILIK YANG DIBINA	46	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PAMONG BELAJAR	18	PAMONG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PAMONG BELAJAR	18	PAMONG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 1	PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PKB)	JUMLAH PAMONG BELAJAR	18	PAMONG	
474	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	HONORARIUM KINERJA KEPALA/GURU TK/PAUD NON PNS	282	ORANG	856.800.000
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	HONORARIUM KINERJA KEPALA/GURU TK/PAUD NON PNS	282	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	HONORARIUM KINERJA KEPALA/GURU TK/PAUD NON PNS	282	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN TK	8	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN TK	8	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN TK	8	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN SD	4	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN SD	4	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN SD	4	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGLOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN SD	3	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGLOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN SD	3	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.02 3.	PENGLOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK	JENJANG PENDIDIKAN SD	3	ORANG	
477	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 3	JURNAL PENDIDIKAN	JUMLAH JURNAL	4	EDISI	306.812.700
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 3	JURNAL PENDIDIKAN	JUMLAH JURNAL	4	EDISI	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 3	JURNAL PENDIDIKAN	JUMLAH JURNAL	4	EDISI	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 4	PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS	JUMLAH GURU YANG DIBINA	80	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 4	PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS	JUMLAH GURU YANG DIBINA	80	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 4	PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS	JUMLAH GURU YANG DIBINA	80	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 5	PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL	UMLAH SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN	80	SEKOLAH	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 5	PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL	UMLAH SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN	80	SEKOLAH	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 5	PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL	UMLAH SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN	80	SEKOLAH	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.00 6	LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI DAN OLIMPIADE SAINS GURU	200	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.00 6	LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI DAN OLIMPIADE SAINS GURU	200	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.00 6	LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI DAN OLIMPIADE SAINS GURU	200	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 2	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU	JUMLAH KELOMPOK KERJA YANG DIBINA,	50	KELOMPOK KERJA	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 2	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU	JUMLAH KELOMPOK KERJA YANG DIBINA,	50	KELOMPOK KERJA	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19 .	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU	JUMLAH KELOMPOK KERJA YANG DIBINA,	50	KELOMPOK KERJA	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			TENAGA KEPENDIDIKAN	KOMPETENSI			2					
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 2	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU	JUMLAH KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD YANG DI KEMBANGKAN	18	KECAMATAN	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 2	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU	JUMLAH KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD YANG DI KEMBANGKAN	18	KECAMATAN	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 2	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU	JUMLAH KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD YANG DI KEMBANGKAN	18	KECAMATAN	
478	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH JURNAL	20	JURNAL	191.145.800
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH JURNAL	20	JURNAL	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH JURNAL	20	JURNAL	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH GURU YANG DIBINA	40	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH GURU YANG DIBINA	40	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH GURU YANG DIBINA	40	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN	60	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN	60	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN	60	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI DAN OLIMPIADE SAINS GURU	40	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI DAN OLIMPIADE SAINS GURU	40	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI DAN OLIMPIADE SAINS GURU	40	ORANG	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE GURU YANG BERKUALIFIKASI S1 & D4	97	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH KELOMPOK KERJA YANG DIBINA,	13	MGMP	
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SD MEMENUHI KOMPETENSI	57	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU	JUMLAH KELOMPOK KERJA YANG DIBINA,	13	MGMP	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								PEMULA				
	BIDANG TENDIK	1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRESENTASE JUMLAH GURU SMP MEMENUHI KOMPETENSI	53	%	1.01.1.01 .01.19.01 7	FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA	JUMLAH KELOMPOK KERJA YANG DIBINA,	13	MGMP	
485	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH RUANG KELAS BARU	25	KELAS	11.078.899.400
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH RUANG KELAS BARU	25	KELAS	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH RUANG KELAS BARU	25	KELAS	
486	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH RUANG KELAS YANG DIBANGUN	10	RUANG	8.058.894.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH RUANG KELAS YANG DIBANGUN	10	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH RUANG KELAS YANG DIBANGUN	10	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DAK	25	SEKOLAH	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DAK	25	SEKOLAH	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 9	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DAK	25	SEKOLAH	
487	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH KELAS YANG DI REBAHILITASI	147	RUANG KELAS	16.696.745.600
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH KELAS YANG DI REBAHILITASI	147	RUANG KELAS	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH KELAS YANG DI REBAHILITASI	147	RUANG KELAS	
489	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH KELAS YANG DI REBAHILITASI	40	ORANG	6.435.800.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH KELAS YANG DI REBAHILITASI	40	ORANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH KELAS YANG DI REBAHILITASI	40	ORANG	
490	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN YANG DIREHABILITASI	1	RUANG	1.262.400.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN YANG DIREHABILITASI			
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN YANG DIREHABILITASI			
491	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG LAB YANG DIREHABILITASI	10	RUANG	1.588.620.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG LAB YANG DIREHABILITASI			
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG LAB YANG DIREHABILITASI			
492	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	2.700	KURSI	5.500.000.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	2.700	KURSI	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	2.700	KURSI	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	2.700	MEJA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	2.700	MEJA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	2.700	MEJA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	96	KURSI GURU	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	96	KURSI GURU	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	96	KURSI GURU	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	96	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	96	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	96	KURSI SISWA	
493	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	1.800	KURSI SISWA	2.000.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				BELANJA SEKOLAH (APBS)								
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	1.800	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	1.800	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	1.800	MEJA SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	1.800	MEJA SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	1.800	MEJA SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	64	KURSI GURU	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	64	KURSI GURU	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	64	KURSI GURU	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	64	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	64	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 6	PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH	JUMLAH MEUBELER SEKOLAH	64	KURSI SISWA	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JUMLAH JENIS PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	4	JENIS	2.500.000.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JUMLAH JENIS PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	4	JENIS	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JUMLAH JENIS PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	4	JENIS	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIANYA ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	36	PAKET	755.700.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIANYA ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	36	PAKET	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIANYA ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	36	PAKET	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	TERSEDIANYA SARANA UTILITAS SEKOLAH	10	RUANG	2.800.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)								
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA SARANA UTILITAS SEKOLAH	10	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA SARANA UTILITAS SEKOLAH	10	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA PERALATAN KANTOR SAN RUMAH TANGGA	3	PAKET	1.285.000.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA PERALATAN KANTOR SAN RUMAH TANGGA	3	PAKET	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA PERALATAN KANTOR SAN RUMAH TANGGA	3	PAKET	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JUMLAH JENIS PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	4	JENIS	3.500.000.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JUMLAH JENIS PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	4	JENIS	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	JUMLAH JENIS PAKAIAN DAN ATRIBUTNYA	4	JENIS	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	68	PAKET	1.610.000.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	68	PAKET	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 7	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	TERSEDIAANYA ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	68	PAKET	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG GURU YANG DI REHAB	1	RUANG	262.400.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG GURU YANG DI REHAB	1	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG GURU YANG DI REHAB	1	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SEKOLAH YANG MERUMUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS)	60	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG UTILITAS YANG AKAN DI REHABILITASI	4	RUANG	359.240.000
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SD SESUAI SPM	54	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG UTILITAS YANG AKAN DI REHABILITASI	4	RUANG	
	PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	1.01.1.01.01.18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA SMP SESUAI SPM	57	%	1.01.1.01 .01.18.01 8	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH RUANG UTILITAS YANG AKAN DI REHABILITASI	4	RUANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
2	DINAS KESEHATAN											338.900.224.908,00
1	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.002	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan cetak dan penggandaan	1	tahun	1.400.515.962,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah pemenuhan bahan Bacaan dalam satu Tahun	12	bulan	57.500.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Jumlah Buku Himpunan Regulasi/ pedoman	10	jenis	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.005	Penyediaan makanan dan minuman	1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	36,00	kali	187.440.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.005	Penyediaan makanan dan minuman	2. Jumlah pemenuhan makmin harian	24,00	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.006	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Jumlah Puskesmas yang dilakukan Penilaian Kinerja Puskesmas	32	Puskesmas	3.151.891.722,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.006	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2. Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pembinaan Verifikasi dan Validasi data	32	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.006	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3. Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi di lima zona	160	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honor Tenaga Non PNS	12	bulan	14.198.840.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.008	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Listrik, Telekomunikasi,Air di Dinas Kesehatan, UPT dan Puskesmas	12	bulan	3.027.206.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	%	1.02.1.02.01.01.008	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan AC, Komputer, printer, dan mesin ketik di Dinas kesehatan dan UPT labkesda & UPPF	13	bulan	257.870.651,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.003	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor rumah tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga	14	kali	1.582.903.984,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.005	Pemeliharaan rutin berkala kantor gedung rumah tangga	Jumlah Bangunan yang disewa	2	bangunan	611.084.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.005	Pemeliharaan rutin berkala kantor gedung rumah tangga	Jumlah Pelaksaasn Pemeliharaan dalam 1 tahun	12	bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.005	Pemeliharaan rutin berkala kantor gedung rumah tangga	Jumlah Ruangan yang di renovasi	1	ruangan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.006	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan jabatan dinas operasional	Jumlah Pembelian Minyak Pelumas	25	kali	700.335.800,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.006	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan jabatan dinas operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan bermotor	18,6	liter	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	100	%	1.02.1.02.01.02.006	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan jabatan dinas operasional	Jumlah BBM	12	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase fasilitas terhadap	100	%	1.02.1.02	Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja		dokumen	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	pelaporan Kinerja dan Keuangan			.01.06.00 1	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	dan Keuangan	5		897.361.210,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Jumlah Puskesmas dilakukan pendampingan BLUD	32	puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Perencanaan	8	dokumen	57.483.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2. Jumlah Pelaksanaan pertemuan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas Kesehatan	9	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	Jumlah Pelaksaana verifikasi realisasi fisik & keuangan	4,00	kali	40.227.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Anggaran	8	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Monev SPM dan Profil Kesehatan	2	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan Bimtek dan Penilaian Kinerja	32	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	JUMLAH KETERSEDIAAN ATK	22	JENIS	683.702.291,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 9	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang menerapkan SIKDA	33	Puskesmas	261.723.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100	%	1.02.1.02 .01.06.00 9	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	Jumlah pelaksanaan pendampingan SIKDA	96	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan			1.02.1.02 .01.06.00 9	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	JUMLAH PENGADAAN JARINGAN DAN PERANGKAT KOMPUTER	3	PERANGKAT	50.500.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes	90.6	%	1.02.1.02 .01.15.00 1	Pembangunan Puskesmas	jumlah Puskesmas yang di bangun	2	puskesmas	15.066.024.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes	90.6	%	1.02.1.02 .01.15.00 6	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Pembangunan Ponkesdes	1	Ponkesdes	301.420.068
	Kesehatan	1.02.1.02.01.15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes	90.6	%	1.02.1.02 .01.15.00 6	Pembangunan Puskesmas Pembantu	jumlah Pustu yang dibangun	3	Pustu	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90.6	%	1.02.1.02 .01.15.00 6	Pembangunan Puskesmas Pembantu	JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN SARANA PUSKESMAS DILAKSANAKAN	1	PAKET	67.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PRASARANA	Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes								
	Kesehatan	1.02.1.02.01.15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes	90.6	%	1.02.1.02 .01.15.00 6	Pembangunan Puskesmas Pembantu	JUMLAH PEMELIHARAAN PRASARANA DAN KALIBRASI DILAKSANAKAN	1	PAKET	145.171.500
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah kegiatan menurunkan AKI & AKB terkait kesehatan ibu hamil	15	kali	4.227.943.400
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah kegiatan menurunkan AKI & AKB terkait kesehatan ibu bersalin	10	KALI	363.963.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah kegiatan menurunkan AKI & AKB terkait kesehatan bayi baru lahir	10	KALI	477.871.300
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88,0	%	1.02.1.02 .01.17.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah kegiatan menurunkan AKI & AKB terkait kesehatan balita	5	KALI	1.223.128.900
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.00 2	Pengelolaan DAK Jampersal	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan jampersal dalam rangka menurunkan AKI & AKB	300	ibu hamil	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	46.934	ibu hamil	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan standar	21.702	ibu bersalin	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.125	bayi	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.628	balita	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	34.104	anak	1.313.863.300
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan	891.448	orang	1.040.696.045
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	129.876	orang	751.542.200
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	372.249	orang	271.195.230
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun-Tambak)	Jumlah penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.974	orang	262.382.230
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.00	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.085	orang	293.569.460

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				3	Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah suspek TB mendapatkan pelayanan diagnostik standar	15.590	orang	469.829.700
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	17.000	orang	424.084.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah Desa / Kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangi < 24 Jam	150	Desa	147.224.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah Balita Gizi kurang mendapatkan penanganan	102.753	balita	3.097.599.200
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah anak sekolah dilakukan pengukuran kebugaran jasmani	3.544	anak	636.959.500
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah desa/kelurahan ODF	356	desa	992.101.100
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah Rumah Tangga dilakukan dilakukan pengkajian PHBS	63.015	rumah tangga	1.814.023.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah penyehat tradisional memiliki STPT/ ijin	36	STPT	130.031.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah laporan W2 (mingguan) dilaporkan	396	laporan	376.705.700
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	JUMLAH ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) DITANGANI	45	orang	184.178.800
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah sekolah SD, SMP dan SMA dilakukan penyuluhan NAPZA	735	sekolah	211.864.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah rumah diperiksa	284	rumah tangga	1.807.371.900
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI	1.153	desa	1.230.506.600
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88	%	1.02.1.02 .01.17.00 3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Alun-Alun- Tambak)	Jumlah Posyandu Balita PURI	1.414	posyandu	717.432.500
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.03 5	Manajemen BOK Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Perjadin di luar Jawa Timur (Desk)	1	kali	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.03 5	Manajemen BOK Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Pertemuan koordinasi BOK & Jampersal bagi Puskesmas dan Rumah Sakit,	1	kali	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			MASYARAKAT									
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.03 6	Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan usila	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	13	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	3. Persentase balita gizi kurang	7	%	1.02.1.02 .01.17.03 6	Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan usila	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut	6	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88	%	1.02.1.02 .01.17.03 7	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan masalah gizi	11	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	5. Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75	%	1.02.1.02 .01.17.03 8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder	Jumlah Kegiatan Penunjang BOK UKM Sekunder	36	kali	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	1. Cakupan pelayanan nifas	94	%	1.02.1.02 .01.17.03 9	Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	Jumlah remaja putri mendapat TTD 1 tablet setiap minggu selama 1 tahun	16.795	remaja putri	0
	Kesehatan	1.02.1.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2. Cakupan peyanan KN lengkap	97	%	1.02.1.02 .01.17.04 0	Penurunan AKI-AKB (DAK Penugasan)	Puskesmas memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal	32	Puskesmas	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	84	%	1.02.1.02 .01.18.00 1	Pengembangan Media Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatn	13	kali	1.000.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	84	%	1.02.1.02 .01.18.00 3	Pengelolaan dana bantuan keuangan dari provinsi bidang kesehatan	Jumlah kegiatan promosi kesehatan bantuan keuangan provinsi	8	KALI	-
		1.02.1.02.01.19	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM	12	%	1.02.1.02 .01.19.00 1	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kesehatan lingkungan	16	kali	-
		1.02.1.02.01.19	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase TTU yang bersanitasi dasar	65	%	1.02.1.02 .01.19.00 1	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	30	TPM	55.915.000
		1.02.1.02.01.19	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM	12	%	1.02.1.02 .01.19.00 1	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan Program Gresik Kabupaten Sehat	1	kali	114.765.800
		1.02.1.02.01.19	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase TTU yang bersanitasi dasar	65	%	1.02.1.02 .01.19.00 1	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas diadakan unit IPAL	12	PUSKESMAS	2.595.000.000
		1.02.1.02.01.19	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase keluarga/rumah tangga yang ber STBM	12	%	1.02.1.02 .01.19.00 2	Penyelenggaraan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	8	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	skrining kesehatan usia prokduktif 15 s/d 59 thn	891.448	orang	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah penderita hipertensi yang dilakukan pelayanan sesuai standar	372.249	orang	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah penderita DM yang dilakukan pelayanan sesuai standar	43.974	orang	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification	163	%	1.02.1.02 .01.20.00	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah penderita gangguan jiwa yang dilakukan pelayanan sesuai	1.085	orang	-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGENDALIAN PENYAKIT	Rate = CNR)			2		standar			
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	1. Jumlah pelaksanaan Jambore kesehatan jiwa	2	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	2. Jumlah kasus indera yag ditangani	356595	kasus	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	3. jumlah kelompok khusus yang melaksanakan posbindu PTM	42	kelompok	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	4. Jumlah pelaksanaan monev Posbindu per regional	5	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	1. Jumlah pertemuan kader kesehatan jiwa	6	Kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	2. Jumlah pertemuan penguatan TPKJM	2	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang dilakukan Penguatan UBM (upaya berhenti merokok) bagi guru	735	Sekolah	50.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 2	Pengendalian penyakit tidak menular				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	1) Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 2) Jumlah desa UCI			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Baduta yang mendapatkan imunisasi lanjutan			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah bumil yang mendapatkan imunisasi TT			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5760	Kejadian	568.500.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Lemari Es Penyimpan Vaksin yang dilakukan pemeliharaan	12	Lemari Es	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Baduta yang mendapatkan imunisasi lanjutan	20.154	Baduta	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	20.125	Bayi	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah bumil yang mendapatkan imunisasi TT	22.735	Ibu	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENYAKIT	Epidemiologi								
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Desa UCI	356	Desa	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah Kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	3	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik di puskesmas yang dilakukan kalibrasi & pemeliharaan	974	alat	267.700.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 3	Penyelenggaraan dan Pelayanan Imunisasi				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah pelaporan STP	396	Laporan	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah pelaporan SKDR mingguan	1664	Laporan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	100	Sampel	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan	150	Kejadian Luar Biasa	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah krisis kesehatan akibat bencana yang dilakukan penanggulangan	25	Kejadian	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan	2150	Jamaah Haji	75.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah pelaporan SKDR mingguan	469	desa	209.196.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 6	Surveilans dan Kesehatan Matra	Jumlah kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.00 7	Pengendalian penyakit menular langsung	1. Jumlah pertemuan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyakit menular langsung	18	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.00 7	Pengendalian penyakit menular langsung	2. Jumlah puskesmas dan RS yang dilakukan bimtek dan pendampingan mentoring	48	RS dan PKM	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 7	Pengendalian penyakit menular langsung	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15.590	orang	-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.00 7	Pengendalian penyakit menular langsung	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.000	orang	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.00 7	Pengendalian penyakit menular langsung	Jumlah paket pengadaan bahan habis pakai untuk pemeriksaan HIV	1	Paket	13.489.758.293
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.00 8	Pengendalian penyakit menular vector dan zoonotic	Jumlah puskesmas yang dilaksanakan peningkatan ketrampilan dan kemampuan petugas kesehatan dalam melaksanakan program pengendalian penyakit Menular Vektor dan Zoonotik	32	Puskesmas	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.00 8	Pengendalian penyakit menular vector dan zoonotic	Jumlah Pengadaan Mobil Ambulans Puskesmas	12	unit	8.297.124.020
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	5	%	1.02.1.02 .01.20.00 8	Pengendalian penyakit menular vector dan zoonotic	Jumlah Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling	1	unit	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.00 8	Pengendalian penyakit menular vector dan zoonotic	Jumlah unit mesin fogging yang diadakan	30	unit	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Jumlah Medical Transpor Box	8	unit	15.720.023.637,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Puskesmas (APBD)	183	alat	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT)	1	PAKET	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	163	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Jumlah Pengadaan Alkes di Puskesmas (DAK)	228	unit	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Jumlah Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan	1	unit	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Jumlah Vaccine refrigerator	9	unit	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Perjalanan Dinas Monitoring & Evaluasi Kondisi Alat Kesehatan di Puskesmas	32	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Pertemuan Uji Fungsi Alat Kesehatan & Kedokteran baru	32	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.01 0	Penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	Puskesmas memberikan pelayanan keawatdaruratan maternal neonatal	32	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN	4. Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification	163	%	1.02.1.02 .01.20.01	Penyediaan BMHP Pencegahan dan	a. Jumlah Pengadaan Reagen O HIV, Reagen Syphilis dan BMHP, berapa	2.500	Paket	0,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGENDALIAN PENYAKIT	Rate = CNR)			1	pengendalian penyakit (DAK)	syringe, Tabung Edta, Sarung Tangan, Alcohol Swab dan Plester			
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	5. Insiden / Angka kesakitan DBD	53	%	1.02.1.02 .01.20.01 1	Penyediaan BMHP Pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	b. Jumlah Pengadaan Catridge TCM	20.900	C	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	6. Persentase kasus pemasungan yang ditangani	2,5	%	1.02.1.02 .01.20.01 1	Penyediaan BMHP Pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	c. Jumlah Pengadaan BMHP beberapa Zn	150	Paket	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	93	%	1.02.1.02 .01.20.01 1	Penyediaan BMHP Pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	d. Jumlah Pengadaan pot dahak	31.400	Pc	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2. Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	88	%	1.02.1.02 .01.20.01 1	Penyediaan BMHP Pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	e. Jumlah Pengadaan Kaca Slide	196	Pc	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	3. Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	55	%	1.02.1.02 .01.20.01 1	Penyediaan BMHP Pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK)	f. Jumlah Paket Pengadaan bahan pakai Habis Pakai untuk Pemeriksaan HIV	1	Paket	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan FKTP	1. jumlah pemenuhan honor pelayanan kesehatan subsidi 2. Jumlah kegiatan evaluasi petugas lab dan perkesmas 3. Jumlah pelayanan kesehatan tim p3k 4. Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja 5. Jumlah klinik yang dilaksanakan monev			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan FKTP	Jumlah klinik yang dilaksanakan monev	20	klinik	74.615.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan FKTP	Jumlah pemenuhan operasional kantor PMI	12	bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.00 1	Peningkatan pelayanan kesehatan FKTP	Jumlah pemenuhan operasional KPI (komisi penanggulangan AIDS)	12	bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.00 2	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah pendampingan pasca akreditasi puskesmas	32	Puskesmas	2.457.560.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.00 2	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah survey reakreditasi puskesmas	8	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.00 2	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah pendampingan akreditasi klinik	3	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.00 3	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin dibayarkan premi	241.246	orang	121.587.777.500,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 6	Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah rumah sakit yang diberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian	19	RS	16.129.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN	2. Persentase Pustu sesuai	67	%	1.02.1.02	Peningkatan Pelayanan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan	4	RS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	standar			.01.21.03 6	kesehatan rujukan	visitasi			539.200.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.03 6	Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah rumah sakit yang melaporkan	19	RS	6.927.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 6	Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (tergabung dengan kegiatan PSC) dan Sisrute	32	Puskesmas	1.000.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 6	Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (tergabung dengan kegiatan PSC) dan Sisrute	19	RS	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.03 6	Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RS yag dibangun	1	RS	25.000.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.03 7	Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah Pembinaan penyehat tradisional	60	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 7	Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah Pembinaan programer kestrad	3	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 7	Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah Kunjungan sarana pelayanan kestrad	34	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.03 8	Akreditasi puskesmas (DAK)	Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	32	Puskesmas	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.03 8	Akreditasi puskesmas (DAK)	Survey Reakreditasi Puskesmas	8	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 9	Penyediaan biaya operasional RS Bawean	1. Jumlah pelaksanaan Pendidikan / pelatihan FORMAL	36	KALI	6.727.415.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 9	Penyediaan biaya operasional RS Bawean	2. Jumlah paket pemeliharaan alat	1	PAKET	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.03 9	Penyediaan biaya operasional RS Bawean	3. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan sarana prasarana	1	PAKET	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.03 9	Penyediaan biaya operasional RS Bawean	4. Jumlah konsultasi ke kabupaten	25	KALI	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 9	Penyediaan biaya operasional RS Bawean	5. Jumlah pemenuhan honor pegawai	12	bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.03 9	Penyediaan biaya operasional RS Bawean	6. Jumlah pemenuhan Insenda dokter spesialis	12	bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER,	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.04	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar (DAK)	Pertemuan Uji Fungsi Alat Kesehatan & Kedokteran			0,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			RUJUKAN DAN TRADISIONAL				0		baru Perjalanan Dinas Monitoring & Evaluasi Kondisi Alat Kesehatan di Puskesmas Jumlah pengadaan Mobil Promosi Kesehatan Jumlah Pengadaan alkes di Ruangan Laboratorium Jumlah Pengadaan alkes di Ruangan Sterilisasi Jumlah Pengadaan alkes di Ruangan Pemeriksaan Umum Jumlah Pengadaan alkes di Ruangan Rawat Inap Jumlah Pengadaan alkes di Ruangan Tindakan/UGD Jumlah Pengadaan alkes di Ruangan Gigi			
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.04 2	Pengelolaan Ponkesdes (BK Provinsi)	Jumlah Kegiatan Evaluasi Petugas Lab dan perkesmas	2	Kali	45.628.556.009,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.04 2	Pengelolaan Ponkesdes (BK Provinsi)	Jumlah Pelayanan Kesehatan tim P3K	5.100	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	1. Persentase puskesmas terakreditasi	100	%	1.02.1.02 .01.21.04 2	Pengelolaan Ponkesdes (BK Provinsi)	Jumlah Pemenuhan Honor Pelayanan Kesehatan Subsidi	12	Bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	2. Persentase Pustu sesuai standar	67	%	1.02.1.02 .01.21.04 2	Pengelolaan Ponkesdes (BK Provinsi)	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honor Perawat Ponkesdes	12	Bulan	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	3. Persentase Ponkesdes sesuai standar	64	%	1.02.1.02 .01.21.04 2	Pengelolaan Ponkesdes (BK Provinsi)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Penilaian Kinerja	32	Puskesmas	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.21	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	4. Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	%	1.02.1.02 .01.21.04 3	Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	Jumlah Rumah Sakit yang telah diakreditasi	19	RS	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 1	Peningkatan kualitas SDM	Jumlah diklat atau pelatihan yang diikuti oleh tenaga kesehatan	80,00	Kali	1.005.000.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi	Jumlah sarana kefarmasian yang divisitasi / dibina	39	SARANA	36.325.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi	Jumlah data yang di entri dan sarana yg diberi peringatan per tahun			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi	Jumlah pertemuan pembinaan / fasilitasi kefarmasian	6	KALI	110.840.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 3	Peningkatan pengawasan keamanan pangan	Jumlah penyuluhan untuk IRTP	3	KALI	115.641.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KESEHATAN									
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 3	Peningkatan pengawasan keamanan pangan	Jumlah penyuluhan utk jasa boga/kantin/rumah makan	2	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 3	Peningkatan pengawasan keamanan pangan	Jumlah PK5/Sentra jajanan yg dibina dan dilakukan stikerisasi			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 3	Peningkatan pengawasan keamanan pangan	Jumlah pengawasan pasar/supermarket/toko	8	KALI	20.122.500
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 3	Peningkatan pengawasan keamanan pangan	Jumlah pertemuan desk data			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 3	Peningkatan pengawasan keamanan pangan				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 4	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Puskesmas			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 4	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik di puskesmas yang dilakukan Kalibrasi & Pemeliharaan			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 4	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah kunjungan pengawasan ke sarana produksi alat kesehatan dan PKRT	20	KALI	6.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 4	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah kunjungan ke sarana Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	10	KALI	3.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 4	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Kunjungan Perizinan Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	5	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 4	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah Kunjungan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal	5	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 5	Pengelolaan dana alokasi khusus bidang kefarmasian	Jumlah paket Pengadaan obat- obatan pelayanan kesehatan dasar	1	PAKET	12.566.059.896
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 6	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah paket Pengadaan obat- obatan penunjang pelayanan kesehatan dasar	1	PAKET	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.07 2	Distribusi obat dan E- Logistik (DAK)	Jumlah pemenuhan Distribusi obat ke puskesmas dan pengelolaan E- Logistik	12	BULAN	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	jumlah pemenuhan belanja bahan kimia	64	reagen	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	jumlah unit peralatan penunjang medik yang diadakan	5	unit	-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	jumlah alat laboratorium yang dilakukan kalibrasi	20	unit	40.000.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	1. Jumlah pengambilan dan pemeriksaan sampel	24	kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	2. Jumlah pelaksanaan assesment surveilans akreditasi	1	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	3. jumlah parameter yang dilakukan PNPME terpenuhi	5	parameter	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	4. Jumlah kegiatan sosialisasi pemeriksaan di UPT Labkesda	1	kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	5. Jumlah kegiatan in house training staf teknis dan manajemen	1	KALI	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan penunjang	6. Jumlah Laporan Hasil Uji Laboratorium yang diterbitkan	6.000	LHU	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan	2,00	Kali	19.000.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	1. Jumlah kegiatan pertemuan terkait Angka Kredit Jabfung Kesehatan	4	Kali	57.135.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	2. Jumlah Kegiatan Bimtek ke Puskesmas	1	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	3. Jumlah Kegiatan Supervisi	1	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	4. Jumlah Pertemuan Organisasi Profesi	2	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	5. Jumlah Kegiatan Nakes Teladan	1	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	1. Jumlah Kegiatan Pertemuan Pengelola Data SDM Fasyankes	3	Kali	26.650.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	2. Jumlah kegiatan Validasi Data SDMK	1	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	1. Jumlah kegiatan Pelaksanaan PIDI	9	Kali	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22	PROGRAM	2. Persentase Sarana	70	%	1.02.1.02	Pengelolaan manajemen	2. Jumlah Kegiatan Pertemuan	1	Kali	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat			.01.22.00 9	tenaga kesehatan	Koordinasi dlm rangka Distribusi dan Pemerataan SDM			-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	1. Jumlah kegiatan Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	2	Kali	68.975.000
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	2. Jumlah kegiatan bimtek Perencanaan Kebutuhan Nakes	1	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	3. Jumlah kegiatan Pemenuhan Kebutuhan di Badan PPSPDM Kemenkes RI	2	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	4. Jumlah Kegiatan Bimtek Perencanaan Kebutuhan nakes	1	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.00 9	Pengelolaan manajemen tenaga kesehatan	5. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan PIDI	9	Kali	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.07 2	Distribusi obat dan E- Logistik (DAK)	Jumlah pemenuhan honor petugas e-logistik	12	BULAN	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.07 4	Penyediaan alat kesehatan di rumah sakit (DAK)	Jumlah paket pengadaan alat kedokteran IGD, lab, rawat inap, rawat jalan	1	PAKET	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.07 5	Penyediaan prasarana rumah sakit (DAK Reguler)	Jumlah Paket pengadaan prasarana di RSUD umar mas'ud	1	PAKET	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.07 6	Pengelolaan DAK non fiisk untuk pengawasan obat dan makanan	Jumlah Apotek dan toko obat yang dibina / diawasi	36	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	4. Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	49	%	1.02.1.02 .01.22.07 6	Pengelolaan DAK non fiisk untuk pengawasan obat dan makanan	Jumlah pertemuan pembinaan / fasilitasi kefarmasian dan koordinasi	6	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	%	1.02.1.02 .01.22.07 6	Pengelolaan DAK non fiisk untuk pengawasan obat dan makanan	Jumlah penyuluhan / bimtek untuk IRTP	2	KALI	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	2. Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	70	%	1.02.1.02 .01.22.07 6	Pengelolaan DAK non fiisk untuk pengawasan obat dan makanan	1. Jumlah IRTP yang dibina / diawasi	100	IRTP	-
	Kesehatan	1.02.1.02.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	3. Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	91	%	1.02.1.02 .01.22.07 6	Pengelolaan DAK non fiisk untuk pengawasan obat dan makanan				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	100	%	1.02.1.02 .01.23.00 3	PENYEDIAAN/ PENINGKATAN/ PEMELIHARAAN SARANA/ PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN (DBHCHT)	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Puskesmas	14.132.048.000,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan	100	%	1.02.1.02 .01.23.00	PENYEDIAAN/ PENINGKATAN/	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			0,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			SOSIAL	bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok			3	PEMELIHARAAN SARANA/ PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN (DBHCHT)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	Kesehatan	1.02.1.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	100	%	1.02.1.02 .01.23.00 3	PENYEDIAAN/ PENINGKATAN/ PEMELIHARAAN SARANA/ PRASARANA FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN (DBHCHT)				
	Kesehatan	1.02.1.02.01.29	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD PUSKESMAS ALON ALON	Persentase Capaian Mutu Pelayanan Puskesmas BLUD	100	%	1.02.1.02 .01.29.00 1	PENGELOLAAN PUSKESMAS BLUD	1. Jumlah pemenuhan jasa pelayanan kesehatan puskesmas	12	bulan	0,00
	Kesehatan	1.02.1.02.01.29	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD PUSKESMAS ALON ALON	Persentase Capaian Mutu Pelayanan Puskesmas BLUD	100	%	1.02.1.02 .01.29.00 1	PENGELOLAAN PUSKESMAS BLUD	2. Jumlah paket pengadaan obat	1	paket	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.29	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD PUSKESMAS ALON ALON	Persentase Capaian Mutu Pelayanan Puskesmas BLUD	100	%	1.02.1.02 .01.29.00 1	PENGELOLAAN PUSKESMAS BLUD	3. Jumlah paket pengadaan bahan kimia	1	paket	
	Kesehatan	1.02.1.02.01.29	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD PUSKESMAS ALON ALON	Persentase Capaian Mutu Pelayanan Puskesmas BLUD	100	%	1.02.1.02 .01.29.00 1	PENGELOLAAN PUSKESMAS BLUD	4. Jumlah paket pengadaan BMHP	1	paket	
3	RSUD IBNU SINA											194.085.354.767
1	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PATIENT SAFETY	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE INDIKATOR SPM YANG MENCAPAI TARGET	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE KELUHAN PASIEEN (NUMBER OF COMPLAIN)	0,50%		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PASIEN DIRUJUK KE RUMAH SAKIT YANG LEBIH TINGGI	0		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI RAWAT JALAN			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PASIEN PULANG PAKSA	2,25%		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI FARMASI			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PEROLEHAN PASIEEN BARU (CUSTOMER ACQUISITION)	0		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI RADIOLOGI			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PEROLEHAN PASIEEN LAMA (CUSTOMER LOYALTY)	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI LABORATORIUM			

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE HAIS (HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTION)	1,5%		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDICOLEGAL			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PEMENUHAN LAPORAN KEUANGAN	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI INSTALASI RAWAT INAP			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	SALES GROWTH RATE (SGR)	0		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	JUMLAH PELAYANAN DI UNIT BDRS			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	CURRENT RATIO	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	PERSENTASE CAPAIAN MASING- MASING SPM DI INSTALASI / BAGIAN / UNIT			
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	CASH RATIO	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	SOLVABILITAS	0		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	QUICK RATIO	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE KECUKUPAN SDM BERDASARKAN KATEGORI SDM	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PASIEN YANG TERLAYANI	1		1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD				
	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU UNTUK PRIORITAS RUMAH SAKIT	1							
1	Wadir Medik, Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.24 .001	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PATIENT SAFETY	100	%	1.02.1.02 .02.24.00 1	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PASIEN SAFETY	100	%	175.000.000.000
2	Wadir Medik	1.02.1.02.02.28	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN KESEHATAN/KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT	100	%	1.02.1.02 .02.28.00 1	PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (DAK REGULER)	PERSENTASE KETERSEDIAAN PERALATAN KESEHATAN / KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT	96	%	17.477.223.767

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Wadir Umum dan Keuangan	1.02.1.02.02.28	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DI RUMAH SAKIT	100	%	1.02.1.02.02.28.002	PENYEDIAAN SARANA RUMAH SAKIT (DAK REGULER)	PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DIRUMAH SAKIT	80	%	1.608.131.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG											636.466.440.865
30	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	PERSENTASE KAPASITAS DAYA TAMPUNG AIR WADUK KABUPATEN	74	%	1.03.1.03.01.22.004	REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU	JUMLAH EMBUNG YANG DIREHABILITASI	14	EMBUNG	3.095.545.000
31	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	PERSENTASE PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	60.23	%	1.03.1.03.01.21.003	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR	JUMLAH PINTU AIR YANG DIREHABILITASI	12	PINTU AIR	2.090.755.000
32	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	PERSENTASE SALURAN PEMBUANG DALAM KONDISI BAIK	49	%	1.03.1.03.01.19.001	PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENERUKAN SUNGAI/KALI	JUMLAH PANJANG SALURAN PEMBUANG YANG DIPELIHARA	130800	METER	20.935.909.000
33	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	PERSENTASE KAPASITAS DAYA TAMPUNG AIR WADUK KABUPATEN	76.36	%	1.03.1.03.01.22.004	PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	JUMLAH BANGUNAN PENAMPUNG AIR YANG DIPELIHARA	7	BANGUNAN AIR	997.500.000
		1.03.1.03.01.22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	PERSENTASE KAPASITAS DAYA TAMPUNG AIR WADUK KABUPATEN	76.36	%	1.03.1.03.01.22.004	PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	JUMLAH BANGUNAN PENAMPUNG AIR YANG DIPELIHARA	8900	METER KUBIK	
34	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	PERSENTASE KAPASITAS DAYA TAMPUNG AIR WADUK KABUPATEN	76.36	%	1.03.1.03.01.22.004	PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	JUMLAH EMBUNG YANG DIPELIHARA	1	WADUK	6.000.000.000
35	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.20	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	PERSENTASE PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DALAM KONDISI BAIK	1		1.03.1.03.01.20.002	REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE GORONG-GORONG	JUMLAH OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN RUMAH POMPA BANJIR	5	RUMAH POMPA	2.148.500.000
36	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	PERSENTASE KAPASITAS DAYA TAMPUNG AIR WADUK KABUPATEN	76.36%		1.03.1.03.01.22.002	PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU	JUMLAH HIPPA YANG DIBINA	6	KELOMPOK HIPPA	175.247.600
37	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	PERSENTASE PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	60.23	%	1.03.1.03.01.21.007	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR	JUMLAH PERENCANAAN DAN JUMLAH DATABASE DOKUMEN ASET	47	DOKUMEN	3.800.481.600
38	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	PERSENTASE PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	60.23	%	1.03.1.03.01.21.008	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	JUMLAH PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI	1676	M	10.928.535.000
39	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	PERSENTASE PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	60.23	%	1.03.1.03.01.21.008	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR IRIGASI	JUMLAH PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI (DAK)	2135	M	
40	SUMBER DAYA AIR	1.03.1.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN	PERSENTASE PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	60.23	%	1.03.1.03.01.21.005	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	JUMLAH JARINGAN IRIGASI YANG DIPELIHARA	19	JARINGAN IRIGASI	4.876.179.200

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGAIRAN LAINNYA									
41	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 1	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH DOKUMEN TEKNIS SARANA PRASARANA AIR BERSIH	43	DOKUMEN	5.274.499.960
42	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 1	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TERBANGUN	47	SUMUR	2.651.459.960
43	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 1	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TERBANGUN	12	SUMUR	4.075.953.960
45	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 4	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG AIR MINUM	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TERBANGUN	18	SUMUR	
46	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 5	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG AIR MINUM	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TERBANGUN	450	SR	
47	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 1	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TERBANGUN	850	SR	7.775.744.000
	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 1	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TERBANGUN	8000	M1	
48	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 1.	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH SARANA PRASARANA AIR BERSIH YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT	24	KEGIATAN	100.000.000
49	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM	PRESENTASE RUMAH TANGGA AKSES AIR BERSIH NON PDAM	68.72	%	1.03.1.03 .01.23.00 2	FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT	JUMLAH RUMAH TANGGA (MBR) YANG TERAKSES AIR BERSIH	1100	SR	4.055.200.000
50	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.20	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG- GORONG	PERSENTASE PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DALAM KONDISI BAIK	55.21	%	1.03.1.03 .01.20.00 1	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG	JUMLAH DOKUMEN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	3	DOKUMEN	600.000.000
51	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.20	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG- GORONG	PERSENTASE PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DALAM KONDISI BAIK	55.21	%	1.03.1.03 .01.20.00 1	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG	JUMLAH DOKUMEN JASA KONSULTANSI SUPERVISI/ PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN DAN REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN	4	DOKUMEN	600.000.000
52	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.20	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG- GORONG	PERSENTASE PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DALAM KONDISI BAIK	55.21	%	1.03.1.03 .01.20.00 1	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG-GORONG	JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN YANG DITINGKATKAN	800	M1	17.000.000.000
53	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.20	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG- GORONG	PERSENTASE PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DALAM KONDISI BAIK	55.21	%	1.03.1.03 .01.20.00 2	REHABILITASI/PEMELIHA RAAN DRAINASE GORONG-GORONG	JUMLAH PANJANG SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN YANG DI REHABILITASI	1850	M1	3.500.000.000
54	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.20	PROGRAM	PERSENTASE PANJANG	55.21	%	1.03.1.03	REHABILITASI/PEMELIHA	JUMLAH PANJANG SISTEM	1000	M1	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	SALURAN DRAINASE PERKOTAAN DALAM KONDISI BAIK			.01.20.00 2	RAAN DRAINASE GORONG-GORONG	DRAINASE YANG DIOPERASIONALKAN DAN DIPEMELIHARA			3.000.000.000
55	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 5	SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JUMLAH DOKUMEN PENYELENGGARAAN PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TAGB), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	11	SERTIFIKAT	200.000.000
	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 5	SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	JUMLAH PENYELENGGARAAN PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TAGB), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	5	BANGUNAN	
56	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.26	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA	PROSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG	95	%	1.03.1.03 .01.26.00 3	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	JUMLAH PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN, REHABILITASI, RENOVASI, UBAHSUAI SERTA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA GRESIK	7	BANGUNAN	36.505.200.000
57	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.25	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS	JUMLAH INFRASTRUKTUR STRATEGIS SESUAI TATA RUANG	30	LOKASI	1.03.1.03 .01.25.00 1	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	JUMLAH PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	2	LOKASI	49.850.400.000
58	CIPTA KARYA	1.03.1.03.01.25	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS	JUMLAH INFRASTRUKTUR STRATEGIS SESUAI TATA RUANG	30	LOKASI	1.03.1.03 .01.25.00 1	PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	JUMLAH PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	3	BANGUNAN	6.027.600.000
60	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03 .01.35.01 1	PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	85	DOKUMEN	8.000.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03 .01.35.01 1	PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN				
61	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03 .01.35.01 1	PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN	JUMLAH LOKASI LAHAN/TANAH YANG DIBEBAHKAN	1	LOKASI	10.000.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03 .01.35.01 1	PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN				
62	BINA MARGA	1.03.1.03.01.36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA KEBINAMARGAAN	PRESENTASE LEGER JALAN	68.07	%	1.03.1.03 .01.36.00 3	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN	JUMLAH PENGELOLAAN LEGER JALAN	4	RUAS	3.000.000.000
63	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03 .01.35.00 8	INSPEKSI KONDISI JALAN	JUMLAH DOKUMEN DATA KONDISI JALAN	4	DOKUMEN	1.500.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03 .01.35.00 8	INSPEKSI KONDISI JALAN				
64	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM	73.7	%	1.03.1.03 .01.35.00	PEMBANGUNAN JALAN	JUMLAH PANJANG RUAS JALAN KABUPATEN YANG DITINGKATKAN	2626	METER	84.540.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			JEMBATAN	KONDISI BAIK			1					
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN				
65	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN	JUMLAH PANJANG TPT YANG DIBANGUN	8470	METER	
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN				
66	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN	JUMLAH PANJANG TROTOAR YANG DIBANGUN	2311	METER	
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN				
68	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN	JUMLAH PANJANG JALAN KABUPATEN YANG DITINGKATKAN	17911	METER	161.500.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN				
69	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.006	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	JUMLAH PANJANG JALAN YANG DIREHABILITASI	12	RUAS	26.375.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.006	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN				
72	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.007	REHABILITASI-PEMELIHARAAN JALAN	JUMLAH PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA	12	RUAS	32.135.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.007	REHABILITASI-PEMELIHARAAN JALAN				
73	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.007	REHABILITASI-PEMELIHARAAN JALAN	JUMLAH PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA	18	RUAS	56.065.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.007	REHABILITASI-PEMELIHARAAN JALAN				
74	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.002	PEMBANGUNAN JEMBATAN	JUMLAH DERMAGA APUNG YANG DITINGKATKAN	1	UNIT	32.890.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.002	PEMBANGUNAN JEMBATAN				
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.002	PEMBANGUNAN JEMBATAN	JUMLAH JEMBATAN YANG DIBANGUN	7	UNIT	
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03.01.35.002	PEMBANGUNAN JEMBATAN				
75	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03.01.35.001	PEMBANGUNAN JALAN	JUMLAH JEMBATAN YANG DIREHABILITASI	6	JEMBATAN	7.130.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN		67.91	%	1.03.1.03	PEMBANGUNAN JALAN				

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK			.01.35.00 1					
77	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03 .01.35.00 6	REHABILITASI- PEMELIHARAAN JALAN	JUMLAH JEMBATAN YANG DIPELIHARA	12	JEMBATAN	5.000.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03 .01.35.00 6	REHABILITASI- PEMELIHARAAN JALAN				
78	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	A. PRESENTASE PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	73.7	%	1.03.1.03 .01.35.00 6	REHABILITASI/PEMELIHA RAAN JALAN	JUMLAH LOKASI BENCANA/DARURAT YANG DITANGANI	5	LOKASI	1.000.000.000
	BINA MARGA	1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	B. PRESENTASE JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK	67.91	%	1.03.1.03 .01.35.00 6	REHABILITASI/PEMELIHA RAAN JALAN				
79	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 2	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH PESERTA PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	140	PESERTA	289.400.000
80	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 2	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	2	KALI	163.499.800
81	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 7	VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN	JUMLAH LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	400	KEGIATAN DI OPD	233.500.200
82	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 1	PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI	JUMLAH PELAPORAN MONITORING PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI	2	SEMESTER	228.255.400
	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 1	PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI	JUMLAH PERATURAN DI DAERAH DAN SOP TERKAIT PENYELENGGARAAN IUJK NASIONAL DI KABUPATEN/KOTA	3	PERATURAN	
83	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 2	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA BUJK	3	KALI	86.641.600
84	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 2	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS TENTANG TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	450	PESERTA	204.054.500
85	BINA JASA KONSTRUKSI	1.03.1.03.01.34	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH SERTIFIKAT BANGUNAN LAIK FUNGSI YANG DITERBITKAN	11	SERTIFIKAT	1.03.1.03 .01.34.00 4	MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG	JUMLAH PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA, TERTIB PENGELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	400	KEGIATAN	190.000.000
86	TATA RUANG	1.03.1.03.01.29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR DAN RTBL YANG DI SUSUN	5	RDTR	1.03.1.03 .01.29.00 2	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI	JUMLAH DOKUMEN RDTR YANG DISUSUN	1	DOKUMEN RDTR	586.500.000
	TATA RUANG	1.03.1.03.01.29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR DAN RTBL YANG DI SUSUN	26	RTBL	1.03.1.03 .01.29.00 2	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI				
87	TATA RUANG	1.03.1.03.01.29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR DAN RTBL YANG DI SUSUN	5	RDTR	1.03.1.03 .01.29.00 1	PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)	JUMLAH DOKUMEN RTBL YANG DISUSUN	2	DOKUMEN RTBL	525.000.000
	TATA RUANG	1.03.1.03.01.29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR DAN RTBL YANG DI SUSUN	26	RTBL	1.03.1.03 .01.29.00 1	PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)				
88	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.01 0	PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA (NSPK)) PEMANFAATAN	JUMLAH TEKNIS REGULASI PENYUSUNAN JUKNIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN	1	DOKUMEN	70.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG				RUANG	RUANG			
89	TATA RUANG	1.03.1.03.01.29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR DAN RTBL YANG DI SUSUN	5	RDTR	1.03.1.03 .01.29.00 6	PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA INFORMASI TATA RUANG	JUMLAH PETA TEMATIK KAWASAN / WILAYAH PERENCANAAN	1	PETA TEMATIK	125.000.000
	TATA RUANG	1.03.1.03.01.29	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	JUMLAH RDTR DAN RTBL YANG DI SUSUN	26	RTBL						
90	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 9	DISEMINASI INFORMASI RENCANA TATA RUANG	JUMLAH KECAMATAN YANG TELAH MENDAPATKAN SOSIALISASI DAN INFORMASI TATA RUANG	4	KECAMATAN	160.000.000
91	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 4	PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN UTILITAS	JUMLAH REKOMEDASI TEKNIS YANG DIPROSES	10	REKOMTEK	325.000.000
	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 4	PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN UTILITAS	JUMLAH PENGAWASAN PEMBANGUNAN HINGGA REKONDISI INVESTASI JARINGAN UTILITAS	10	PENGAWASA N	
	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 4	PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN UTILITAS	JUMLAH DOKUMEN RENCANA INDUK JARINGAN UTILITAS	1	DOKUMEN	
92	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 8	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE PENATAAN RUANG	JUMLAH PELAPORAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERMOHONAN INFORMASI PERUNTUKAN RUANG YANG MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI	350	LAPORAN	150.000.000
93	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 7	PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG	JUMLAH LOKASI PENGAWASAN DAN MONITORING PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	100	LOKASI	128.500.000
94	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 2	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG	JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS PERUNTUKAN RUANG	300	REKOMENDA SI	
95	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 6	OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG	JUMLAH LOKASI PENGAWASAN DAN MONITORING PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	100	LOKASI	167.600.000
	TATA RUANG	1.03.1.03.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG SESUAI REKOMENDASI/LJIN TATA RUANG	100	%	1.03.1.03 .01.31.00 6	OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG	JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS PERUNTUKAN RUANG DALAM RANGKA KESESUAIAN DENG N RENCANA TATA RUANG	300	REKOMENDA SI	
1	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.06	PENINGKATAN	PRESENTASE FASILITASI	100	%	1.03.1.03	PENYUSUNAN RENCANA	JUMLAH DOKUMEN	2	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			.01.06.00 3	KERJA SKPD	PERENCANAAN TAHUNAN YANG DISUSUN			50.000.000
1	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.03.1.03 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN KEGIATAN YANG DISUSUN	10	DOKUMEN	334.500.000
5	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.03.1.03 .01.06.00 7	PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI KINERJA YANG DISUSUN	6	DOKUMEN	170.300.000
6	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.03.1.03 .01.06.00 2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN	7	DOKUMEN	105.200.000
7	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN	PERSentase FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.03.1.03 .01.06.00 1.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN YANG DISUSUN	5	DOKUMEN	177.600.000
8	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH FASILITASI UNTUK TELEPON, AIR DAN LISTRIK DAN/ATAU KEBUTUHAN LAIN	3,00	JENIS	461.000.000
9	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 1	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA PERALATAN KANTOR	4	JENIS	12.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITASI ADMINISTRASI KANTOR	100	%	1.03.1.03 .01.06.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PEGAWAI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	226	ORANG	35.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITASI ADMINISTRASI KANTOR	100	%	1.03.1.03 .01.06.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA KEAMANAN DAN ADMINISTRASI KANTOR	11	ORANG	290.670.000
10	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8,00	ORANG	144.000.000
12	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	1.03.1.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR	1,00	JENIS	300.000.000
13	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3,00	JENIS	70.000.000
14	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	1.03.1.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	5,00	JENIS	967.864.085
15	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10,00	JENIS	20.000.000
16	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	3,00	JENIS	100.000.000
17	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSentase FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.03.1.03 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH	2,00	JENIS	200.000.000
18	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	1.03.1.03 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH FASILITASI UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	7,00	LOKASI	400.000.000
19	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.02	PENINGKATAN SARANA	PRESENTASE FASILITASI	100	%	1.03.1.03	PEMELIHARAAN RUTIN	JUMLAH FASILITASI UNTUK	4	JENIS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DAN PRASARANA APARATUR	SARANA DAN PRASARANA APARATUR			.01.02.00 6	BERKALA KENDARAAN JABATAN DINAS OPERASIONAL	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			250.000.000
20	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	1.03.1.03 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR RUMAH TANGGA	JUMLAH FASILITASI UNTUK PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4	UNIT	125.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	1.03.1.03 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN JABATAN DINAS OPERASIONAL	JUMLAH ALAT YANG DIPELIHARA	4	UNIT	1.050.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.09 3	BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG SELATAN	PRESENTASE PELAYANAN PENDUKUNG KEWILAYAHAN URUSAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH SELATAN	100	%	50.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.09 3	BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG SELATAN	PRESENTASE PELAYANAN PENDUKUNG KEWILAYAHAN URUSAN KEBINAMARGAAN DI WILAYAH SELATAN	100	%	50.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.09 4	BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG UTARA	PRESENTASE PELAYANAN PENDUKUNG KEWILAYAHAN URUSAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH UTARA	100	%	40.000.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.09 4	BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG UTARA	PRESENTASE PELAYANAN PENDUKUNG KEWILAYAHAN URUSAN KEBINAMARGAAN DI WILAYAH UTARA	100	%	60.000.000
		1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.09 5	BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG BAWEAN	PRESENTASE PELAYANAN PENDUKUNG KEWILAYAHAN URUSAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BAWEAN	100	%	75.000.000
		1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.09 5	BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG BAWEAN	PRESENTASE PELAYANAN PENDUKUNG KEWILAYAHAN URUSAN KEBINAMARGAAN DI WILAYAH BAWEAN	100	%	150.000.000
29	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.10 0	OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK	JUMLAH IPAL DAN IPLT YANG DIPELIHARA.	140	UNIT	1.745.645.000
	SEKRETARIAT	1.03.1.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI UPT	100	%	1.03.1.03 .01.07.10 0	OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK	JUMLAH LAYANAN PENYEDOTAN.	1500	PELANGGAN	
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											42.779.488.010,00
01.	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG DAN JENIS BARANG CETAK DAN PENGGAANDAN	2,00	REKENING	86.063.200,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 3.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH DAN JENIS PENYEDIAAN BAHAN BACAAN	2,00	JENIS	7.900.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 5.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH FASILITASI PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN	3,00	JENIS	57.500.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN	FASILITASI TERHADAP	100	%	1.04.1.04	RAPAT - RAPAT	JUMLAH FASILITASI RAPAT DAN	100,00	%	178.855.010,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	ADMINISTRASI PERKANTORAN	PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH			.01.01.00 6.	KOORDINASI DAN KONSULTANSI	KONSULTASI LUAR DAERAH			
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%			JUMLAH FASILITASI RAPAT DAN KONSULTASI DALAM DAERAH			
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH ADMINISTRATOR KANTOR			
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH OPERASIONAL KANTOR			
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7,00	JENIS	216.020.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR	1,00	JENIS	56.580.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%			JUMLAH JASA KEAMANAN KANTOR			
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	24,00	ORANG KALI	9.600.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	3,00	ORANG	61.200.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.04.1.04 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	31,00	ORANG	824.400.000,00
02.	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR	13,00	JENIS	286.100.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAN PERALATAN/RUMAH TANGGA	13,00	JENIS	64.111.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR	13,00	JENIS	115.000.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH KOMPONEN INTSALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	13,00	JENIS	14.906.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 5.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH FASILITAS PEMELIHARAAN KANTOR	2,00	JENIS	200.000.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH FASILITAS PEMELIHARAAN KENDARAAN	3,00	JENIS	136.400.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 7.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH FASILITAS PERBAIKAN PERALATAN KERJA	2,00	JENIS	66.425.800,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04 .01.02.00 8.		JUMLAH PAKAIAN KERJA LAPANGAN	2,00	JENIS	3.600.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%			JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON FORMAL			

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR	APARATUR								
	Sekretariat	1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.04.1.04.01.02.002.	PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA	JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2,00	KENDARAAN	50.000.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	1.04.1.04.01.05.008.	PEMBINAAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH	JUMLAH SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,00	KALI	120.000.000,00
06.	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.04.1.04.01.01.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN KINERJA OPD	4,00	LAPORAN	92.365.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.04.1.04.01.01.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN OPD	50,00	EKSEMPLAR	25.000.000,00
	Sekretariat	1.04.1.04.01.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.04.1.04.01.01.003.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA OPD	4,00	LAPORAN	90.000.000,00
							1.04.1.04.01.01.005.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD				
09.	Sekretariat	1.04.1.04.01.09	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SKPD	PELAYANAN RUSUNAWA YANG NYAMAN	100	%	1.04.1.04.01.09.002.	PENGELOLAAN RUSUNAWA	JUMLAH PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	6,00	RUSUN	2.700.000.000,00
17.	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.001.	BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	JUMLAH BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (DAK)	189,00	BNBA	5.523.462.000,00
	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.001.	BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	JUMLAH BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (GAKIN)	1.000,00	BNBA	
	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.001.	BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN	3,00	LAPORAN	
	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.002.	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA	JUMLAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH	3,00	KECAMATAN	200.000.000,00
	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.003.	PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA	LAPORAN PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	4,00	LAPORAN	400.000.000,00
	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.003.	PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA	JUMLAH PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	18,00	KECAMATAN	
	Rumah Swadaya	1.04.1.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA	RUMAH SWADAYA TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI	1.01	%	1.04.1.04.01.17.003.	PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA	JUMLAH USULAN KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	2,00	USULAN KEGIATAN	
20.	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.001.	PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	JUMLAH KECAMTAN YANG MELAKUKAN PENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN UNTUK MENUJU TERWUJUDNYA	2,00	KECAMATAN	12.159.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI			
	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.005.	KAJIAN MASTERPLAN KAWASAN KUMUH DAN NON KUMUH	JUMLAH LAPORAN PENYUSUNAN RENCANA DAN REKOMENDASI PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH	2,00	LAPORAN	400.000.000,00
	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.008.	BOP PENDATAAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN	JUMLAH KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA	496,00	KEGIATAN	600.000.000,00
	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.008.	BOP PENDATAAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN	JUMLAH KECAMATAN YANG MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIEW SERTA LEGALISASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	18,00	KECAMATAN	
	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.010.	MONITORING DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	3,00	LAPORAN/DATA	160.000.000,00
	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.009.	INVENTARISASI ASET DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN PADA SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	JUMLAH KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH YANG DIBINA	3,00	KELOMPOK SWADAYA	175.000.000,00
	Kawasan Permukiman	1.04.1.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI	27,83	HA	1.04.1.04.01.20.005.	KAJIAN MASTERPLAN KAWASAN KUMUH DAN NON KUMUH	JUMLAH PENYUSUNAN SITE PLAN DAN DED	3,00	LOKASI	400.000.000,00
21.	Rumah Umum	1.04.1.04.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM	PENINGKATAN UNIT RUMAH UMUM	7.62	%	1.04.1.04.01.21.001.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)	JUMLAH RUSUN YANG DIBANGUN SARANA PRASANANYA	3,00	RUSUN	1.750.000.000,00
	Rumah Umum	1.04.1.04.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM	PENINGKATAN UNIT RUMAH UMUM	7.62	%	1.04.1.04.01.21.003.	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM				
	Rumah Umum	1.04.1.04.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM	PENINGKATAN UNIT RUMAH UMUM	7.62	%	1.04.1.04.01.21.006.	EVALUASI DAN PELAPORAN RUMAH UMUM	JUMLAH PERSIL RUMAH YANG DIKENDALIKAN	300,00	UNIT	500.000.000,00
	Rumah Umum	1.04.1.04.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM	PENINGKATAN UNIT RUMAH UMUM	7.62	%	1.04.1.04.01.21.004.	PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM				
	Rumah Umum	1.04.1.04.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM	PENINGKATAN UNIT RUMAH UMUM	7.62	%	1.04.1.04.01.21.007.	PEMBINAAN DAN FASILITASI RUMAH UMUM	JUMLAH PENGUSUL RUMAH SUBSIDI PROGRAM FLPP (FASILITAS LIQUIDITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN BP2PT (BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN)	250,00	UNIT	400.000.000,00
	Rumah Umum	1.04.1.04.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM	PENINGKATAN UNIT RUMAH UMUM	7.62	%	1.04.1.04.01.21.008.	PENGATURAN RUMAH UMUM	JUMLAH PENERBITAN IZIN SLF DAN JUMLAH PENGEMBANG YANG DIBINA	200,00	UNIT	200.000.000,00
22.	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG	1,00	%	1.04.1.04.01.22.001.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN	JUMLAH IPAL KOMUNAL TERBANGUN	1,00	LS	13.416.818.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGEMBANGAN PSU	DIPELIHARA				PEMUKIMAN PERKOTAAN				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.22.001.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAAN	JUMLAH PANJANG JALAN LINGKUNGAN	5.806,00	M2	
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.22.001.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAAN	JUMLAH PANJANG SALURAN LINGKUNGAN	1.668,00	M	
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.22.001.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAAN	JUMLAH PSU TERBANGUN	1,00	LS	
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.22.001.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAAN	JUMLAH TANGKI SEPTIK	220,00	TANGKI SEPTIK	
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.003.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.004.	PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.006.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.007.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN YANG MERUPAKAN ASET PEMERINTAH DAERAH				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.002.	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.005.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN				
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.22.009.	PENDATAAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JUMLAH DOKUMEN DED,MP DAN PENDATAAN YG DILAKUKAN	3,00	DOKUMEN	600.000.000,00
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.22.008.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PSU DIKAWASAN PERUMAHAN	JUMLAH PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PSU DI KAWASAN PERRUMAHAN	3,00	PERUMAHAN	433.182.000,00
	Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	1.04.1.04.01.22	PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU	PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERKOTAAN YANG DIPELIHARA	1,00	%	1.04.1.04.01.01.010.	BOP SERAHTERIMA FASUM FASOS DAN PSU DARI PERUMAHAN KE PEMERINTAH DAERAH				
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											6.187.471.200
1	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05.02.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12,00	BULAN	40.000.000,00
2	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100	%	1.05.1.05.02.01.002	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-	12,00	BULAN	15.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH			3	PERUNDANG-UNDANGAN	UNDANGAN			
3	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 5	PENYEDIAAN BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN	12,00	BULAN	44.064.000
4	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	12,00	BULAN	372.000.000
6	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12,00	BULAN	150.000.000
7	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	1,00	UNIT	15.000.000
	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR, JASA KEBERSIHAN DAN JASA KEAMANAN			
	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH ADMINISTRASI KANTOR	12,00	BULAN	620.400.000
	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH ADMINISTRASI KEBERSIHAN	12,00	BULAN	
	Sekretariat	1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .02.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH ADMINISTRASI KEAMANAN	12,00	BULAN	
	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH ATK	12,00	BULAN	82.000.000
	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH KOMPONEN LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12,00	BULAN	20.000.000,00
	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA	12,00	BULAN	20.000.000,00
10	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 1	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN/ DINAS/ GEDUNG/ KANTOR	JUMLAH REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	1,00	GEDUNG	825.387.200
11	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 2	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	1	MOBIL	378.000.000
		1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 2	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	7	MOTOR	
12	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	7	JENIS	268.000.000
13	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KANTOR/GEDUNG/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1,00	GEDUNG	50.000.000
14	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA	100	%	1.05.1.05 .02.02.00	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN	JUMLAH TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS DENGAN BAIK	12,00	R4	275.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR	PRASARANA APARATUR			6	JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL				
	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS DENGAN BAIK	14,00	R2	
15	Sekretariat	1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR	9,00	JENIS	80.000.000,00
16	Sekretariat	1.05.1.05.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.03.00 3	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	JUMLAH PEKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPAN	50,00	BUAH	70.000.000,00
17	Sekretariat	1.05.1.05.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	100	%	1.05.1.05 .02.05.00 1	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PESERTA PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	50	PESERTA	100.000.000,00
19	Sekretariat	1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .02.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4	DOKUMEN	10.000.000,00
20	Sekretariat	1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .02.06.00 2	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	JUMLAH RENSTRA DAN RENJA SKPD	20	BUKU	10.000.000,00
	Sekretariat	1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .02.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN KEGIATAN YANG DISUSUN	10	DOKUMEN	10.000.000,00
	Sekretariat	1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .02.06.01 2	KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PERANGKAT DAEARH	100	%	50.000.000,00
22	Sekretariat	1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .02.06.00 8	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6	DOKUMEN	15.000.000,00
23	Sekretariat	1.05.1.05.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .02.06.00 5	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	2	DOKUMEN	15.000.000,00
							1.05.1.05 .02.06.00 6	PENYUSUNAN SOP SKPD				
25	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.00 1	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	JUMLAH PENDUDUK DIKAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI ANCAMAN BENCANA	12	REM LEAFLET	50.000.000,00
	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.00 1	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	JUMLAH PENDUDUK DIKAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI ANCAMAN BENCANA	12	RAMBU	
26	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.00 2	PELATIHAN MITIGASI BENCANA	JUMLAH PESERTA MITIGASI BENCANA DAN DESA TANGGUH BENCANA	6	DESA	250.000.000
27	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.00 2	PELATIHAN MITIGASI BENCANA	JUMLAH PESERTA MITIGASI BENCANA DAN DESA TANGGUH BENCANA	200	ORANG	
							1.05.1.05	PELATIHAN PENGURUS				

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
							.02.21.00 3	DESA TANGGUH				
28	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.00 4	POS KOMANDO (POSKO) SIAGA BANJIR DAN TANAH LONGSOR	JUMLAH PENJAGA POSKO SIAGA BANJIR	6	ORANG	25.000.000
29	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.00 7	FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA	1	NOTA KESEPAHAMAN	50.000.000
30							1.05.1.05 .02.21.00 8	PEMBUATAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN				
31	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.02 2	PEMBINAAN DESA TANGGUH	JUMLAH PEMBINAAN DESA TANGGUH	1	DESA	100.000.000
32							1.05.1.05 .02.21.02 3	OPERASIONAL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB)				
33	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.02 4	HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL	JUMLAH PESERTA HKBN	647	PESERTA UPACARA	100.000.000
34							1.05.1.05 .02.21.02 5	PENERAPAN SEKOLAH / MADRASAH AMAN BENCANA				
35	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.02 6	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI KEBENCANAAN	TERSEDIAANYA DATA/ INFORMASI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DALAM BENTUK DOKUMEN	50	BUKU	150.000.000
36	Pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGURUS DESA TANGGUH DAN RELAWAN BENCANA YANG DILATIH	100	%	1.05.1.05 .02.21.02 6	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI KEBENCANAAN	TERSEDIAANYA DATA/ INFORMASI TENTANG JENIS BENCANA DALAM BENTUK DOKUMEN	50	BUKU	175.000.000
							1.05.1.05 .02.22.00 1	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM				
38	Kedaruratan dan logistik	1.05.1.05.02.22	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYALURAN LOGISTIK TERHADAP KORBAN BENCANA	100	%	1.05.1.05 .02.22.00 2	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DITEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	JUMLAH PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	17	TANDON AIR	1.209.733.000
	Kedaruratan dan logistik	1.05.1.05.02.22	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYALURAN LOGISTIK TERHADAP KORBAN BENCANA	100	%	1.05.1.05 .02.22.00 2	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DITEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	JUMLAH PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	1286	TANGKI AIR	
	Kedaruratan dan logistik	1.05.1.05.02.22	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYALURAN LOGISTIK TERHADAP KORBAN BENCANA	100	%	1.05.1.05 .02.22.00 2	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DITEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	JUMLAH PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	3000	PAKET SEMBAKO	
	Kedaruratan dan logistik	1.05.1.05.02.22	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYALURAN LOGISTIK TERHADAP KORBAN BENCANA	100	%	1.05.1.05 .02.22.00 2	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DITEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	JUMLAH PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN / KOTA	560	BUNGKUS NASI	
40	Kedaruratan dan logistik	1.05.1.05.02.22	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PERSENTASE PENYALURAN LOGISTIK TERHADAP KORBAN BENCANA	100	%	1.05.1.05 .02.22.00 4	OPERASIONAL TANGGAP DARURAT KEBENCANAAN	JUMLAH OPERASIONAL BENCANA	16	KECAMATAN	63.902.500

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENANGGULANGAN BENCANA									
41	Kedaruratan dan logistik	1.05.1.05.02.22	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYALURAN LOGISTIK TERHADAP KORBAN BENCANA	100	%	1.05.1.05 .02.22.00 5	PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR)	JUMLAH PESERTA PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR)	104	PESERTA	78.984.500
42	Rehabilitasi dan rekonstruksi	1.05.1.05.02.24	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA YANG DITANGANI	100	%	1.05.1.05 .02.24.00 2	IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN DAN KERUGIAN SARANA DAN PRASARANA UMUM, HARTA DAN RUMAH PENDUDUK BENCANA	JUMLAH LAPORAN UNTUK PENANGGULANGAN PASCA BENCANA	18	KECAMATAN	400.000.000
43	Rehabilitasi dan rekonstruksi	1.05.1.05.02.24	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA YANG DITANGANI	100	%	1.05.1.05 .02.24.00 3	PELATIHAN/ WHORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA PRASARANA PASCA BENCANA	JUMLAH PESERTA UNTUK PENANGGULANGAN PASCA BENCANA	50	PESERTA	
41		1.05.1.05.02.24	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA YANG DITANGANI	100	%	1.05.1.05 .02.24.00 1	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN PASCA BENCANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN PASCA BENCANA	18	KECAMATAN	
5									JUMLAH JASA ADMINISTRASI KANTOR			
18									JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DALAM DAERAH			
									JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG			
									JUMLAH PROFIL SKPD			
									JUMLAH SOP SKPD			
									JUMLAH LAPORAN KONDISI SARPRAS PASCA BENCANA			
43									JUMLAH PESERTA PELATIHAN APARATUR DAN RELAWAN			
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											15.771.603.600
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	JUMLAH TERSEDINYA KEBUTUHAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	5	JENIS	16.358.600
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	JUMLAH TERSEDINYA BAHAN BACAAN	3	JENIS	13.140.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH TERSEDINYA MAKANAN DAN MINUMAN	1024	MAKANAN	82.528.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH TERSEDINYA MAKANAN DAN MINUMAN	3000	DUS	
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 6	RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS	75	ORANG	914.750.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TERSEDINYA JASA OPERASIONAL KANTOR	3	REKENING	386.000.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TERSEDINYA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	126	ORANG	3.247.200.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR	22	JENIS	471.347.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								KANTOR/ RUMAH TANGGA				
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KANTOR/ GEDUNG/ RUMAH TANGGA	JUMLAH GEDUNG YANG DIPERBAIKI	1	GEDUNG	205.350.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN YANG DIPERBAIKI	34	UNIT	214.255.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN YANG DIPERBAIKI	3	JENIS	41.640.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL	100	%	1.05.1.05 .01.02.00 8	PENGADAAN PAKAIAN BESEERTA KELENGKAPANNYA	JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESEERTA KELENGKAPANNYA	2	PAKET	411.320.000
	SEKRETARIAT	1.05.1.05.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	1.05.1.05 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU YANG DISUSUN	10	BUKU	4.175.000
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 1	PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT	JUMLAH PAM GIAT PHBI DAN GIAT MASYARAKAT	98	KALI	258.005.200
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 2	PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	JUMLAH PAM GIAT PHBI DAN GIAT PEMERINTAHAN	78	KALI	
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 2	PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN	TERLAKSANANYA PENGAMANAN HARKAMTIBMAS UNTUK DIHIBAHKAN	1	GRESIK	
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 3	OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA	958	KALI	2.930.534.800
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 4	JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JUMLAH JAMBORE YANG MELAKSANAKAN GIAT JAMBORE	23,00	ORANG	75.000.000
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 5	PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JUMLAH PESERTA PEMANTAPAN OPERASIONAL	136	ORANG	475.000.000
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.05.1.05.01.15 .	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	RASIO POLISI PAMONG PRAJA PER 10.000 PENDUDUK	3/10.000	PENDUDUK	1.05.1.05 .01.15.00 6	PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI	JUMLAH PESERTA KESAMAPTAAN JASMANI	225	ORANG	150.000.000
	Bidang Penegakan Perundang- undangan	1.05.1.05.01.16 .	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN) DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA	100	%	1.05.1.05 .01.16.00 1	PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	JUMLAH TERLAKSANANYA PENYIDIKAN DAN PELANGGARAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	386	KALI	525.000.000
	Bidang Penegakan Perundang- undangan	1.05.1.05.01.16 .	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN) DALAM RANGKA PENEGAKAN	100	%	1.05.1.05 .01.16.00 9	PENGEMBANGAN SDM DAN PERFORMANCE PPNS DI KABUPATEN GRESIK	JUMLAH PELAKSANAAN PELATIHAN/BINTEK PPNS DI KAB. GRESIK	6	KALI	525.005.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Penegakan Perundang- undangan	1.05.1.05.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN) DALAM RANGKA PENEKAKAN PERDA	100	%	1.05.1.05 .01.16.01 0	PENGAWASAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA)	JUMLAH GIAT PENGAWASAN	156	KALI	524.995.000
	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.05.1.05.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	PERSENTASE LINMAS YANG DIBINA	29	%	1.05.1.05 .01.19.00 1	PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH	JUMLAH MASYARAKAT YANG DIBERI PEMBINAAN	365	ORANG	275.000.000
	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.05.1.05.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	PERSENTASE LINMAS YANG DIBINA	29	%	1.05.1.05 .01.19.00 2	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH	JUMLAH APARAT KEAMANAN DESA YANG IKUT SARASEHAN DAN SISKAMSWAKARSA	1.780	ORANG	575.000.000
	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.05.1.05.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	PERSENTASE LINMAS YANG DIBINA	29	%	1.05.1.05 .01.19.00 6	PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	PENGUMPULAN INFORMASI HASIL TEMBAKAU DBHCHT	1.000	ORANG	450.000.000
	UPT DAMKAR	1.05.1.05.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PERSENTASE PENURUNAN KEBAKARAN	50-75 (9-6)	%	1.05.1.05 .01.23.00 1	KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PENYULUHAN DAN SOSIALISASI BAHAYA KEBAKARAN	74	PASUKAN	35.000.000
	UPT DAMKAR	1.05.1.05.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PERSENTASE PENURUNAN KEBAKARAN	50-75 (9-6)	%	1.05.1.05 .01.23.00 2	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PERALATAN YANG LENGKAP DAN MEMADAI SERTA SUKU CADANG YANG BAIK	7	JENIS	874.360.000
	UPT DAMKAR	1.05.1.05.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	PERSENTASE PENURUNAN KEBAKARAN	50-75 (9-6)	%	1.05.1.05 .01.23.00 3	KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	OPERASIONAL PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	200	KEJADIAN	2.090.640.000
8	DINAS SOSIAL											7.390.445.400
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE KETERCAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	100	%	1.06.1.06 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA	JUMLAH LAPORAN	6	DOKUMEN	14.700.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE KETERCAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	100	%	1.06.1.06 .01.06.00 2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SKPD	41	BUKU	16.850.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE KETERCAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	100	%	1.06.1.06 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN	6	DOKUMEN	37.800.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE KETERCAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	100	%	1.06.1.06 .01.06.01 2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI KINERJA	4	DOKUMEN	18.800.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9	JENIS CETAK	30.000.000
										50	BUKU	
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATIRAN PERUNDANGAN	JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	BUKU	15.000.000
										4	EKSEMPLAR	
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN	JUMLAH PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN	3	JENIS	70.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.01.00 6	RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KE LUAR DAERAH	JUMLAH FASILITASI RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	190	KALI	275.000.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%			JUMLAH TENAGA JASA SURAT MENYURAT	8	ORANG	206.400.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL	JUMLAH REKENING AIR	1	REKENING	60.000.000
									JUMLAH REKENING LISTRIK	3	REKENING	
									JUMLAH REKENING TELEPON	2	REKENING	
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%			JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI	10	ORANG	261.600.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%			JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR	2	ORANG	36.000.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	5	JENIS LISTRIK	309.600.000
										12	UNIT	
										25	JENIS PEMBERSIH	
										45	JENIS ATK	
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	UNIT	250.000.000
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KENDARAAN JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KENDARAAN	7	UNIT KENDARAAN RODA 4	210.000.000
										2	UNIT KENDARAAN RODA 2	
	Bidang Sekretariat	1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR	PROSENTASE FASILITASI PELAYANAN PD	100	%	1.06.1.06 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA YANG TERPELIHARA	10	UNIT AC	90.000.000
										12	UNIT PRINTER	
										13	UNIT KOMPUTER	
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PELAYANAN DAN PELATIHAN BAGI PMKS	0,34	%	1.06.1.06 .01.16.00 3	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	JUMLAH PMKS YANG DITANGANI	120	ORANG	125.330.000
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PELAYANAN DAN PELATIHAN BAGI PMKS	0,34	%		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	JUMLAH PMKS YANG TELAH MENJALANI REHABILITASI DAN DIBERIKAN BANTUAN SOSIAL	62	ORANG	300.000.000
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PELAYANAN DAN PELATIHAN BAGI PMKS	0,34	%		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	JUMLAH PMKS YANG MENDAPAT PELAYANAN RUJUKAN	200	ORANG	175.000.000
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		0,34	%	1.06.1.06 .01.16.00 6	REHABILITASI PENANGANAN PMKS	JUMLAH ANAK TERLANTAR DAN LANSIA TERLANTAR YANG MENDAPAT BIMBINGAN LANSIA TERLANTAR YANG MENDAPAT BANTUAN SOSIAL	400	ORANG	250.000.000
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PELAYANAN DAN PELATIHAN BAGI PMKS	0,34	%	1.06.1.06 .01.16.00 4	BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF		20	ORANG	
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						JUMLAH FASILITASI PEMBUATAN NIK, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	26	KALI	100.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									ADOPSI ANAK DAN PENGUATAN ADOPSI ANAK			
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL							230	ORANG	
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.17	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	PERSENTASE PELAYANAN DAN PELATIHAN BAGI PMKS	2,8	%	1.06.1.06 .01.17.00 1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	JUMLAH LAYANAN RUJUKAN KASUS	40	KALI	95.576.400
	Bidang Rehabilitasi Sosial	1.06.1.06.01.19	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL		80	%	1.06.1.06 .01.19.00 1	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG DIBERI BANTUAN ALAT BANTU	25	ORANG	100.000.000
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.1.06.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	PERSENTASE PSKS YANG DIBINA	6,07	%	1.06.1.06 .01.15.00 1	PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPAT BIMBINGAN	125	ORANG	125.000.000
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.1.06.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	6,07	%	1.06.1.06 .01.15.00 6	PENANGANAN MASALAH- MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG DIBERIKAN PENDIDIKAN KETRAMPILAN	20	ORANG	100.000.000
									JUMLAH PENDAMPING DAN OPERATOR PKH YANG MENDAPAT PEMBINAAN	170	ORANG	900.000.000
									JUMLAH PENYEDIAAN MAKANAN (DAPUR UMUM)	13	KALI DAPUR UMUM	162.789.000
		1.06.06.2.01.04	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						JUMLAH PEMULANGAN ORANG TERLANTAR (OT) JUMLAH PENANGANAN MR. X	30	ORANG	85.000.000
										15	ORANG	
				PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL					JUMLAH TARUNA SIAGA BENCANA YANG DIBERI PEMBINAAN	30	ORANG	150.000.000
									JUMLAH PANTI ASUHAN YANG MENDAPAT HIBAH AGAR DAPAT DIJANGKAU OLEH ANAK TERLANTAR	1	PANTI ASUHAN	0
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.1.06.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	PERSENTASE PANTI ASUHAN YANG DIFASILITASI	58,82	%	1.06.1.06 .01.18.00 2	PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK	JUMLAH PANTI ASUHAN YANG DIBERI BANTUAN DAN PEMBINAAN	52	PANTI ASUHAN	370.000.000
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.1.06.01.21	PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	PERSENTASE FASILITASI TMP	90	%	1.06.1.06 .01.21.00 1	PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PEMBINAAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL, JUMLAH PEMELIHARAAN TMP, JUMLAH LEGIUN VETERAN, JANDA VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN YANG DIBERI TALI ASIH	100	ORANG	230.000.000
							1.06.1.06 .01.21.00 3	PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN		11	TMP	
							1.06.1.06 .01.21.00 2	PEMBANGUNAN/PEMELI HARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)		178	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									JUMLAH REHABILITASI TMP	3	TMP	150.000.000
									JUMLAH ANGGOTA PSM YANG TERBINA	100	ORANG	70.000.000
									JUMLAH ANGGOTA TSKS YANG TERBINA	18	ORANG	50.000.000
	Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.1.06.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PSKS YANG DIBINA			1.06.1.06 .01.20.00 2	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	JUMLAH ANGGOTA LK3 YANG TERBINA	7	ORANG	100.000.000
	Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.1.06.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PSKS YANG DIBINA	100	%	1.06.1.06 .01.20.00 8	PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WKSBM (WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT)	JUMLAH KARANG TARUNA YANG DIBENTUK DAN DIBINA JUMLAH LEMBAGA WKSBM YANG DIBERIKAN PEMBINAAN	356	LEMBAGA	400.000.000
							1.06.1.06 .01.20.00 3	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI		8	ORANG	
	Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.1.06.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN	100	%	1.06.1.06 .01.20.00 5	SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA RENTAN	PERSENTASE PENDATAAN FAKIR MISKIN	100	%	300.000.000
	Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.1.06.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN	100	%	1.06.1.06 .01.20.01 2	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA	100	%	1.050.000.000
	Bidang Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.02.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PENGUMPULAN SUMBERAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%			PERSENTASE PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	100	%	100.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA											5.237.056.450
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 2.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN JUMLAH BARANG PENGGANDAAN	11	JENIS	47.000.000
										23.000	LEMBAR	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 3.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH JENIS BAHAN BACAAN	10	JENIS	26.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 5.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH JENIS PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	4.000	DUS	150.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 6.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH FASILITASI RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH	223	KALI	350.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR	17	ORANG	520.800.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR	2	ORANG	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JENIS FASILITASI DAN TENAGA OPERASIONAL KANTOR	3	JENIS	287.664.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JENIS FASILITASI DAN TENAGA OPERASIONAL KANTOR	3	ORANG	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	%	2.01.2.01 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JENIS FASILITASI DAN TENAGA OPERASIONAL KANTOR	1	TAHUN	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	244.010.500
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE FASILITASI	100	%	2.01.2.01	PENGADAAN	JUMLAH PENYEDIAAN	1	PAKET	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR			.01.02.00 3.	PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	1	PAKET	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 5.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KANTOR/GEDUNG	1	PAKET	100.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KENDARAAN	6	UNIT	305.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KENDARAAN	9	UNIT	
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.01.2.01 .01.02.00 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN YANG TERPELIHARA	123	UNIT	38.657.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.01.2.01 .01.06.00 1.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JMLAH DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	6	LAPORAN	25.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.01.2.01 .01.06.00 3.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD	4	DOKUMEN	25.000.000
	Sekretariat	2.01.2.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.01.2.01 .01.06.00 8.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN SKPD	48	BUKU	25.000.000
	Bidang Pelatihan Kerja	2.01.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DIBERI PELATIHAN BERBASIS	11,11	%	2.01.2.01 .01.15.00 1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	200	ORANG	1.412.849.950

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				DEMAND DRIVEN				PENCARI KERJA				
	Bidang Pelatihan Kerja	2.01.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DIBERI PELATIHAN BERBASIS DEMAND DRIVEN	11,11	%	2.01.2.01 .01.15.00 3	SERTIFIKASI PROFESI	JUMLAH PESERTA SERTIFIKASI	60	ORANG	
	Bidang Pelatihan Kerja	2.01.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG DIBERI PELATIHAN BERBASIS DEMAND DRIVEN	11,11	%	2.01.2.01 .01.15.00 2	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN SWASTA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN	50	ORANG	
	Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas	2.01.2.01.01.18	PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	PERSENTASE INFORMASI PASAR KERJA YANG DIPUBLIKASIKAN	94,44	%	2.01.2.01 .01.18.00 3	PELATIHAN DAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS	TERLAKSANANYA PELATIHAN DAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS	40	ORANG	242.500.000
	Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas	2.01.2.01.01.18	PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	PERSENTASE INFORMASI PASAR KERJA YANG DIPUBLIKASIKAN	94,44	%	2.01.2.01 .01.18.00 4	PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIVITAS	TERLAKSANANYA PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIVITAS	70	ORANG	
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.01.2.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	72,01	%	2.01.2.01 .01.16.00 1	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRUSAHAAN	JUMLAH PESERTA PEMBEKALAN UMUM	150	ORANG	
	Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas	2.01.2.01.01.18	PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	PERSENTASE INFORMASI PASAR KERJA YANG DIPUBLIKASIKAN	94,44	%	2.01.2.01 .01.18.00 1	PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	BUKU LAPORAN BULANAN INFORMASI PASAR KERJA (IPK)	60	BUKU	312.575.000
	Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas	2.01.2.01.01.18	PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	PERSENTASE INFORMASI PASAR KERJA YANG DIPUBLIKASIKAN	94,44	%	2.01.2.01 .01.18.00 1	PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	BUKU LAPORAN BULANAN INFORMASI PASAR KERJA (IPK)	2	APLIKASI	
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.01.2.01.01.16	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	72,99	%	2.01.2.01 .01.16.00 5	PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KERJA	550	ORANG	225.000.000
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.01.2.01.01.16	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	72,99	%	2.01.2.01 .01.16.00 2	PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)	JUMLAH PESERTA PENYULUHAN CTKI	240	ORANG	175.000.000
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	2.01.2.01.01.16	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	72,99	%	2.01.2.01 .01.16.00 2	PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)	JUMLAH PESERTA PEMBEKALAN TKI PURNA	250	ORANG	
	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.01.2.01.01.17	PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN	16,81	%	2.01.2.01 .01.17.00 4	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN	250	ORANG	153.000.000
	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.01.2.01.01.17	PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN	16,81	%	2.01.2.01 .01.17.00 1	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	TERLAKSANANYA PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	216	KASUS	572.000.000
	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.01.2.01.01.17	PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN	16,81	%	2.01.2.01 .01.17.00 1	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	TERLAKSANANYA PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	100	ORANG	
	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	2.01.2.01.01.17	PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERJANJIAN KERJA	16,81	%	2.01.2.01 .01.17.00 1	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR	TERLAKSANANYA PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	300	PERUSAHAAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Tenaga Kerja		KETENAGAKERJAAN	BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN				PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL				
	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.01.2.01.01.17	PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENDAFTARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN	16,81	%	2.01.2.01 .01.17.00 1	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	TERLAKSANANYA PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	5	BUKU	
10	DINAS PERTANAHAN											179.768.247.000
	Sekretariat (Non Urusan)											
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6	JENIS	50.000.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH KEBUTUHAN BAHAN BACAAN DAN PERUNDANGUNDANGAN DALAM SATU TAHUN	3	JENIS	10.560.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN SELAMA 1 TAHUN	2830	KOTAK	88.987.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100	%	450.000.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH DENGAN INSTANSI TERKAIT DI BIDANG PERTANAHAN YANG DIFASILITASI	100	%	
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH KEBUTUHAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DI DINAS PERTANAHAN KAB. GRESIK	10	ORANG	260.600.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH KEBUTUHAN JASA KEBERSIHAN DI DINAS PERTANAHAN KAB. GRESIK	3	ORANG	64.000.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI	6	JENIS	36.000.000
	Sekretariat	2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.04.01.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH FASILITASI KEBUTUHAN JASA KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK	3	JENIS	81.600.000
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR	23	JENIS	386.500.000
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH KEBUTUHAN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5	JENIS	-
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA	3	JENIS	-
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH	JUMLAH PERLENGKAPAN KANTOR	2	JENIS	-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								TANGGA				
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR	3	JENIS	-
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KANTOR DINAS PERTANAHAN	12	BULAN	210.000.000
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL DINAS PERTANAHAN	16	KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	220.000.000
	Sekretariat	2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.04.01.0 1.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3	JENIS	42.000.000
	Sekretariat (Sub. Keuangan, Program dan Pelaporan)											
	Sekretariat	2.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.04.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUNGAN DINAS PERTANAHAN	4	DOKUMEN	47.000.000
	Sekretariat	2.04.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	101	%	2.04.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUNGAN DINAS PERTANAHAN	5	DOKUMEN	
	Sekretariat	2.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.04.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN	3	DOKUMEN	32.000.000
	Sekretariat	2.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.04.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM 1 TAHUN	3	DOKUMEN	-
	Sekretariat	2.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.04.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM 1 TAHUN	2	DOKUMEN	-
	ADMINISTRASI PERTANAHAN	2.04..01.15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PERSENTASE TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIVERIFIKASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI ASSET	50	%	2.04..01. 15.001	SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN	FASILITASI IDENTIFIKASI, SURVEY, VERIIFKASI, PEMBERKASAN, PENGUKURAN ASET TANAH PEMDA YANG AKAN DISERTIFIKASI DAN PENEGASAN BATAS ASET TANAH PEMDA	75	BIDANG	900.000.000
	ADMINISTRASI PERTANAHAN	2.04..01.15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PERSENTASE TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIVERIFIKASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI ASSET	50	%	2.04..01. 15.011	PENDATAAN ASET PEMERINTAH DAERAH	TERCAPAINYA PEMBERIAN PEMASANGAN PAPAN NAMA ASET PEMDA YANG BELUM DAN SUDAH BERSERTIFIKAT TERLAKSANANYA PENDATAAN ASET TANAH PEMDA	50	BIDANG	600.000.000
	ADMINISTRASI PERTANAHAN	2.04..01.15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PERSENTASE TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIVERIFIKASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI ASSET	50	%	2.04..01. 15.011	PENDATAAN ASET PEMERINTAH DAERAH	TERCAPAINYA PEMBERIAN PEMASANGAN PAPAN NAMA ASET PEMDA YANG BELUM DAN SUDAH BERSERTIFIKAT TERLAKSANANYA PENDATAAN	100	DESA	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									ASET TANAH PEMDA			
	ADMINISTRASI PERTANAHAN	2.04..01.15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PERSENTASE TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIVERIFIKASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI ASSET	50	%	2.04..01. 15.013	PENATAAN ASET PEMERINTAH DAERAH	PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN TANAH NEGARA (PEMBUATAN REGULASI) KAITANNYA DENGAN IJIN PEMANFAATAN TANAH NEGARA 2 RANPRDA-1 RANPERBUP	3	DOKUMEN	700.000.000
	ADMINISTRASI PERTANAHAN	2.04..01.15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	PERSENTASE TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIVERIFIKASI DALAM RANGKA SERTIFIKASI ASSET	50	%	2.04..01. 15.013	PENATAAN ASET PEMERINTAH DAERAH	TERLAKSANYA KOORDINASI DENGAN INSTANSI YANG LAIN	5	LOKASI	-
	BIDANG PENGADAAN LAHAN	2.04..01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	PERSENTASE KONFLIK PERTANAHAN YANG DISELESAIKAN	100	%	2.04..01. 16.001	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN	DATA INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	10	DOKUMEN	150.000.000
	BIDANG PENGADAAN LAHAN	2.04..01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	PERSENTASE KONFLIK PERTANAHAN YANG DISELESAIKAN	100	%	2.04..01. 16.001	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN	TERSELESAINYA FASILITASI KONFLIK PERTANAHAN YANG DI MEDIASI	10	LOKASI	
	BIDANG PEMBEBASAN LAHAN	2.04..01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	PERSENTASE KONFLIK PERTANAHAN YANG DISELESAIKAN	100	%	2.04..01. 16.006	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (DIBAWAH 5 HEKTAR)	TERSEDINYA BIDANG TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM	2	LOKASI	175.439.000.000
	BIDANG PEMBEBASAN LAHAN	2.04..01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	PERSENTASE KONFLIK PERTANAHAN YANG DISELESAIKAN	100	%	2.04..01. 16.006	PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (DIBAWAH 5 HEKTAR)	TERSEDINYA RENCANA PENGADAAN TANAH, PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN PENYERAHAN HASIL	2	DOKUMEN	
												-
												-
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP											27.018.039.250
1	UPT TPA	2.05.2.05.01.07	PENGLOLAAN UPTD	PROSENTASE FASILITASI PENGLOLAAN UPTD	100	%	2.05.2.05 .01.07.12 2	PENGLOLAAN KAPASITAS UPT TPA	JUMLAH PETUGAS	3	JENIS	4.787.600.000
1	UPT TPA	2.05.2.05.01.07	PENGLOLAAN UPTD	PROSENTASE FASILITASI PENGLOLAAN UPTD	100	%	2.05.2.05 .01.07.12 2	PENGLOLAAN KAPASITAS UPT TPA	JUMLAH SARANA PRASARANA	4	JENIS	
2	UPT LABORATORIUM LH	2.05.2.05.01.07	PENGLOLAAN UPTD	PROSENTASE FASILITASI PENGLOLAAN UPTD	100	%	2.05.2.05 .01.07.12 1	PENGLOLAAN KAPASITAS UPT LABORATORIUM LH	JUMLAH JENIS SERTIFIKASI	2	JENIS	2.388.800.000
2	UPT LABORATORIUM LH	2.05.2.05.01.07	PENGLOLAAN UPTD	PROSENTASE FASILITASI PENGLOLAAN UPTD	100	%	2.05.2.05 .01.07.12 1	PENGLOLAAN KAPASITAS UPT LABORATORIUM LH	JUMLAH JENIS PETUGAS	2	JENIS	
2	UPT LABORATORIUM LH	2.05.2.05.01.07	PENGLOLAAN UPTD	PROSENTASE FASILITASI PENGLOLAAN UPTD	100	%	2.05.2.05 .01.07.12 1	PENGLOLAAN KAPASITAS UPT LABORATORIUM LH	JUMLAH JENIS SARANA PRASARANA	4	JENIS	
3	Bidang PPKLH	2.05.2.05.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT TRHDP PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENGLOLAAN LH	45	%	2.05.2.05 .01.16.15	PENGAWASAN SUMBEER PENCEMAR AIR	JUMLAH LOKASI UJI	16	LOKASI	487.020.000,00
3	Bidang PPKLH	2.05.2.05.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT TRHDP PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENGLOLAAN LH	45	%	2.05.2.05 .01.16.15	PENGAWASAN SUMBEER PENCEMAR AIR	JUMLAH SARANA PRASARANA	1	PAKET	105.000.000,00
5	Bidang Tata Lingkungan	2.05.2.05.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI & SDA	PERSENTASE LOKASI TERKONSERVASI	40	%	2.05.2.05 .01.17.04	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	JUMLAH DOKUMEN	2	PAKET	250.000.000
5	Bidang Tata	2.05.2.05.01.17	PROGRAM	PERSENTASE LOKASI	40	%	2.05.2.05	PENINGKATAN	JUMLAH JENIS SARANA	4	JENIS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Lingkungan		PERLINDUNGAN KONSERVASI & SDA	TERKONSERVASI			.01.17.04	KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR	PRASARANA			
6	Bidang Pertamanan	2.05.2.05.01.20	PROGRAM PENGELOLAAN RTH	PROSENTASE LUASAN RTH TERHADAP LUAS WILAYAH	20	%	2.05.2.05 .01.20.01	PENATAAN RTH	JUMLAH LOKASI TAMAN/RTH	6	LOKASI	850.000.000
8	Bidang Pertamanan	2.05.2.05.01.20	PROGRAM PENGELOLAAN RTH	PROSENTASE LUASAN RTH TERHADAP LUAS WILAYAH	20	%	2.05.2.05 .01.20.02	PEMELIHARAAN RTH	JUMLAH PETUGAS ADMINISTRASI	5	ORANG	5.090.645.250
8	Bidang Pertamanan	2.05.2.05.01.20	PROGRAM PENGELOLAAN RTH	PROSENTASE LUASAN RTH TERHADAP LUAS WILAYAH	20	%	2.05.2.05 .01.20.02	PEMELIHARAAN RTH	JUMLAH PETUGAS PENGELOLA RTH	34	ORANG	
10	Bidang Pertamanan	2.05.2.05.01.20	PROGRAM PENGELOLAAN RTH	PROSENTASE LUASAN RTH TERHADAP LUAS WILAYAH	20	%	2.05.2.05 .01.20.03	PEMBANGUNAN / PENINGKATAN TAMAN	JUMLAH LOKASI TAMAN KEHATI	5	LOKASI	820.374.000
13	Bidang PPKLH	2.05.2.05.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PELAKU YANG TAAT TRHDP PERSYARATAN ADM & TEKNIS PENGELOLAAN LH	45	%	2.05.2.05 .01.16.	PENGELOLAAN B3 & LIMBAH B3	JUMLAH PELAKU TAAT REGULASI B3	2	PELAKU	235.200.000
14	Bidang Tata Lingkungan	2.05.2.05.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES SD A & LH	PROSENTASE PELAKU/LEMBAGA YANG MENDAPATKN PENGHARGAAN LH DAN PROSENTASE KELOMPOK YANG TERBINA	45	%	2.05.2.05 .01.18	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN	JUMLAH JENIS REKOMENDASI LH	3	JENIS	200.000.000
15	Bidang PPKLH	2.05.2.05.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PELAKU YANG TAAT TRHDP PERSYARATAN ADM & TEKNIS PENGELOLAAN LH	45	%	2.05.2.05 .01.16	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LH	JUMLAH PELAKU USAHA TERAWASI	80	PELAKU	300.000.000
15	Bidang PPKLH	2.05.2.05.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PELAKU YANG TAAT TRHDP PERSYARATAN ADM & TEKNIS PENGELOLAAN LH	45	%	2.05.2.05 .01.16	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LH	JUMLAH LOKASI TERAWASI	16	LOKASI	
16	Bidang Tata Lingkungan	2.05.2.05.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES SD A & LH	PROSENTASE PELAKU/LEMBAGA YANG MENDAPATKN PENGHARGAAN LH DAN PROSENTASE KELOMPOK YANG TERBINA	45	%	2.05.2.05 .01.18	PENINGKATAN EDUKASI & KOMUNIKASI MASYRAKAT DI BIDANG LH	JUMLAH JENIS PELAKU / LEMBAGA PEDULI LH	5	JENIS	688.000.000
17	Bidang PPKLH	2.05.2.05.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROSENTASE PELAKU YANG TAAT TRHDP PERSYARATAN ADM & TEKNIS PENGELOLAAN LH	45	%	2.05.2.05 .01.16.13	PENYELESAIAN ADUAN KASUS LINGKUNGAN	JUMLAH ADUAN TERKELOLA	12	BUAH	50.000.000
18	Bidang Pengelolaan Kebersihan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.20	PENYEDIAAN SARANA PR SARANA PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN	JUMLAH BANK SAMPAH (BK)	4	UNIT	1.750.000.000
18	Bidang Pengelolaan Kebersihan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.20	PENYEDIAAN SARANA PR SARANA PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN	JUMLAH SARANA PRASARANA	4	JENIS	
18	Bidang Pengelolaan Kebersihan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.20	PENYEDIAAN SARANA PR SARANA PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN	JUMLAH SARANA PRASARANA (BK)	12	PAKET	
18	Bidang Pengelolaan Kebersihan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.20	PENYEDIAAN SARANA PR SARANA PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN	JUMLAH TPST/TPS3R (BK)	11	UNIT	
19	Bidang Pengelolaan Kebersihan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.20	PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARPRAS PERSAMPAHAN	JUMLAH JENIS PETUGAS	4	JENIS	7.300.000.000
19	Bidang Pengelolaan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.20	PENINGKATAN OPERASIONAL DAN	JUMLAH JENIS SARANA DAN PRASARANA	3	JENIS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Kebersihan		PERSAMPAHAN					PEMELIHARAAN SARPRAS PERSAMPAHAN				
19	Bidang Pengelolaan Kebersihan	2.05.2.05.01.15	PENGEMBANGAN KINERJA PEGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSETASE CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	70	%	2.05.2.05 .01.15	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYRAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	JUMLAH LOKASI TPST	5	UNIT	400.000.000
20	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.05.2.05 .01.06	PENYUSUNAN RENCANA KERJA	JUMLAH JENIS DOKUMEN	4	JENIS	30.000.000
21	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.05.2.05 .01.06	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	JUMLAH DOKUMEN	5	PAKET	45.000.000
21	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.05.2.05 .01.06	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	JUMLAH LAPORAN	3	JENIS	20.000.000
22	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA	JUMLAH LAPORAN KINERJA	3	JENIS	20.000.000
23	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL	JUMLAH REKENING	3	JENIS	150.000.000
25	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL	JUMLAH PETUGAS	9	ORANG	248.400.000
26	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL	JUMLAH PETUGAS	2	PAKET	72.000.000
27	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN & PENGGANDAAN	5	PAKET	25.000.000
28	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATIRAN PERUNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	5	PAKET	20.000.000
29	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PENINGKATAN SARANA PRSARAAA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI SARPRAS APARATUR	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN PERALATAN PERLNGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	7	PAKET	150.000.000
30	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	PENYEDIAAN MAKANAN MINUMAN	JUMLAH MAKANAN MINUMAN	5	PAKET	75.000.000
31	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.01	PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TRHDP TUPOKSI PELAKSANAAN PD	100	%	2.05.2.05 .01.01	RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KE LUAR DAERAH	JUMLAH PERJALANAN DINAS	4	PAKET	200.000.000
33	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.02	PENINGKATAN SARANA PRSARAAA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI SARPRAS APARATUR	100	%	2.05.2.05 .01.01	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	JUMLAH GEDUNG TERPELIHARA	1	UNIT	100.000.000
34	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.02	PENINGKATAN SARANA PRSARAAA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI SARPRAS APARATUR	100	%	2.05.2.05 .01.01	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	10	KENDARAAN	100.000.000
35	Bidang Sekertariat	2.05.2.05.01.02	PENINGKATAN SARANA PRSARAAA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI SARPRAS APARATUR	100	%	2.05.2.05 .01.01	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN KANTOR TERPELIHARA	5	PAKET	60.000.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIIL											8.662.248.250
1	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSentase PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.05	PELAYANAN MUTASI PENDUDUK	JUMLAH PENERBITAN KARTU PDDK NON PERMANEN	1.000	ORANG	96.842.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.05	PELAYANAN MUTASI PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK RENTAN YANG TERDATA	50	ORANG	
2	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH PEREKAMAN	40.000	ORANG	403.158.000
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH PEREKAMAN	40.000	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH CETAK KTP-EL	60.000	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH CETAK KTP-EL	60.000	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH KIA YANG TERBIT	60.000	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH KIA YANG TERBIT	60.000	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH KK YANG TERBIT	50.000	LEMBAR	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH KK YANG TERBIT	50.000	LEMBAR	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH KTP OA & SKTT YANG TERBIT	72	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	~JUMLAH KTP OA & SKTT YANG TERBIT	72	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL DAN	98,26	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK YANG PINDAH	20.000	ORANG	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (DAFDUK)	2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIA	93,75	%	2.06.2.06 .01.15.06	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK YANG PINDAH	20.000	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
3	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PER- TAHUN	95,59	%	2.06.2.06 .01.16.05	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	JUMLAH KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TERBIT	32.500	KUTIPAN	150.000.000
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KEMATIAN PER- TAHUN	80	%	2.06.2.06 .01.16.05	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	JUMLAH KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TERBIT	32.500	KUTIPAN	
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PER- TAHUN	95,59	%	2.06.2.06 .01.16.05	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	JUMLAH KUTIPAN AKTA KEMATIAN YANG TERBIT	3.380	KUTIPAN	
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KEMATIAN PER- TAHUN	80	%	2.06.2.06 .01.16.05	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	JUMLAH KUTIPAN AKTA KEMATIAN YANG TERBIT	3.380	KUTIPAN	
4	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PER- TAHUN	95,59	%	2.06.2.06 .01.16.02	SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN	JUMLAH KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG TERBIT	80	KUTIPAN	
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KEMATIAN PER- TAHUN	80	%	2.06.2.06 .01.16.02	SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN	JUMLAH KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NON MUSLIM YANG TERBIT	80	KUTIPAN	
4	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PER- TAHUN	95,59	%	2.06.2.06 .01.16.02	SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN	JUMLAH PASANGAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN TERPADU MELALUI ISBAT NIKAH	50	ORANG	150.000.000
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (CAPIL)	2.06.2.06.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN AKTA KEMATIAN PER- TAHUN	80	%	2.06.2.06 .01.16.02	SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN	JUMLAH PASANGAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN TERPADU MELALUI ISBAT NIKAH	50	ORANG	
5	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.01	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JUMLAH APARAT YANG DIBINTEK/ DIKLAT	356	ORANG	476.120.000
6	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.01	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JUMLAH PEGAWAI YANG DIBINTEK	1	PAKET	109.835.000
7	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.03	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN	-PROGRAM LANJUTAN SERTIFIKASI ISO	1	PAKET	82.950.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.03	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN	-PELAKSANAAN SURVEY IKM	1	PAKET	
8	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-PELY.DOKUMEN KELILING TIAP KEC SE-KAB.	3	KALI	2.542.689.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-PELYN GISA	8	DESA	
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-SOSIALISASI KEBI JAKAN ADMINDUK	2	KALI	
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-TINTA CETAK KIA	260	BUAH	
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE LAYANAN	100	%	2.06.2.06	DAK UTK PELAYANAN	-TINTA CETAK KTP	50	PAKET	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	YANG BER-SOP			.01.18.05	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-BLANGKO KIA	100	KEPING	
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-KOORD DAN KON SULTASI	100	%	
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE LAYANAN YANG BER-SOP	100	%	2.06.2.06 .01.18.05	DAK UTK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-MEDIA CETAK	1	PAKET	
11	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)	2.06.2.06.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE VALIDASI DATA GANDA DAN ANOMALI	99	%	2.06.2.06 .01.19.03	SINKRONISASI, KONSOLIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN	- JUMLAH DATA GANDA & ANOMALI YANG TERVALIDASI	10.941	DATA	120.000.000
11	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)	2.06.2.06.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE VALIDASI DATA GANDA DAN ANOMALI	99	%	2.06.2.06 .01.19.06	PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE KEPENDUDUKAN	TERPELIHARANYA WAREHOUSE	1	PAKET	
12	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)	2.06.2.06.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE VALIDASI DATA GANDA DAN ANOMALI	99	%	2.06.2.06 .01.19.04	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	JUMLAH BUKU PROFIL KEPENDUDUKAN YANG TERSUSUN	50	BUKU	45.000.000
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)	2.06.2.06.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE VALIDASI DATA GANDA DAN ANOMALI	99	%	2.06.2.06 .01.19.04	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	JUMLAH MACAM PROFIL KEPENDUDUKAN	1	MACAM	
13	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KPDDKAN	9	INST	2.06.2.06 .01.20.01	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN	24	INSTANSI	52.200.000
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.01	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN	24	INSTANSI	
14	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KPDDKAN	9	INST	2.06.2.06 .01.20.02	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	JUMLAH JARINGAN PERANGKAT KERAS & LUNAK YANG TERPELIHARA	19	LOKASI/UNIT	174.300.000
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.02	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	JUMLAH JARINGAN PERANGKAT KERAS & LUNAK YANG TERPELIHARA	19	LOKASI/UNIT	
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KPDDKAN	9	INST	2.06.2.06 .01.20.02	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	JUMLAH SISTEM INFORMASI YANG DIBUAT	1	PAKET	
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.02	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	JUMLAH SISTEM INFORMASI YANG DIBUAT	1	PAKET	
	BIDANG PEMANF.DATA	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA	9	INST	2.06.2.06 .01.20.02	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	TERSEDIANYA SARANA WEBSITE	1	PAKET	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)		DAN INOVASI PELAYANAN	KPDDKAN								
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.02	PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS	TERSEDINYA SARANA WEBSITE	1	PAKET	
15	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KPDDKAN	9	INST	2.06.2.06 .01.20.05	PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN	TERSELENGGARANYA INOVASI PELAYANAN	1	PAKET	98.212.000
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.05	PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN	TERSELENGGARANYA INOVASI PELAYANAN	1	PAKET	
16	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KPDDKAN	9	INST	2.06.2.06 .01.20.03	PENATAAN ARSIP DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE ARSIP YANG TERTATA	100	%	124.340.000
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.03	PENATAAN ARSIP DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE ARSIP YANG TERTATA	100	%	
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	JUMLAH INSTANSI YANG MEMANFAATKAN DATA KPDDKAN	9	INST	2.06.2.06 .01.20.03	PENATAAN ARSIP DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-JUMLAH ARSIP YANG DIALIHMEDIA	110.122	DATA	
	BIDANG PEMANF.DATA DAN INOVASI PELAYANAN (PDIP)	2.06.2.06.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PERSENTASE ARSIP AKTA KELAHIRAN YANG DIALIHMEDIA	67	%	2.06.2.06 .01.20.03	PENATAAN ARSIP DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-JUMLAH ARSIP YANG DIALIHMEDIA	110.122	DATA	
17	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN YANG TERSEDIA	32	ITEM	108.800.000
18	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.03	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSEDINYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUUAN	3	KORANG	3.240.000
19	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.05	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	PERSENTASE TERSEDINYA MAMIN UTK PELAKS. KEG. DLM 1 TAHUN	100	%	63.590.000
20	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.06	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN KONSULTASI DLM 1 TAHUN	100	%	244.884.000
21	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	62	ORANG	1.808.288.250
22	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERSEDINYA : TELP	4	REK. TELP	78.840.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JARINGAN KONEKSI DATA	3	JARINGAN	
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	SMS GATEWAY	1	SMS GATEWAY	
23	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KEBERSIHAN	1	REKANAN PETUGAS	156.360.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAKS TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.06.2.06 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA ADMNISTRASI KANTOR	2	PETUGAS	
24	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI THD SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.06.2.06 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDINYA : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	17	JENIS	935.531.500
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE FASILITASI	100	%	2.06.2.06	PENGADAAN	-BAHAN KEBERSIHAN	39	JENIS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			SARANA DAN PRASARANA APARATUR	THD SARANA PRASARANA APARATUR			.01.02.03	PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA				
25	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI THD SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.06.2.06 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA ATK	64	JENIS	165.568.500
26	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI THD SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.06.2.06 .01.02.05	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	220.000.000
27	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI THD SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.06.2.06 .01.02.06	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN RODA 4 YANG TERPELIHARA	7	UNIT	100.000.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI THD SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.06.2.06 .01.02.06	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN RODA 2 YANG TERPELIHARA	3	UNIT	
28	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI THD SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.06.2.06 .01.02.07	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KERJA YANG TERPELIHARA	100	%	110.000.000
29	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.06.2.06 .01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH JENIS LAPORAN	4	MACAM	14.500.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.06.2.06 .01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BUKU	17	BUKU	
30	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.06.2.06 .01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	TERSELENGGARANYA PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	14	MACAM	11.000.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.06.2.06 .01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH MACAM DOKUMEN PERENCANAAN YANG TERSUSUN	5	MACAM	16.000.000
	SEKRETARIAT	2.06.2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI THD PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.06.2.06 .01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH BUKU PERENCANAAN YANG TERSUSUN	70	BUKU	
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											6.883.713.000
	SEKRETARIAT											
1	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	15	JENIS	20.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	3	JENIS	4.800.000
	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH AIR MINUM	135	GALON	25.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKANAN	30	DOS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	JUMLAH PERJALANAN DINAS YANG DILAKUKAN	100	PERSEN	150.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PETUGAS ADMINISTRASI KEUANGAN	12	ORANG	344.400.000
	SEKRETARIAT	2.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	1	ORANG	18.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR	1	PAKET	70.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TERSEDIA	35	UNIT	400.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIPELIHARA	7	UNIT	248.263.000
	SEKRETARIAT	2.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	15	UNIT	22.800.000
	SEKRETARIAT	2.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.02.00 8	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/KANTOR	JUMLAH GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	6	RUANG	50.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA	100	PERSEN	2.07.2.07 .06.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN	12	BUKU	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA	100	PERSEN	2.07.2.07 .06.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN	10	BUKU	25.000.000
2	BIDANG PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN DESA	2.07.2.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG AKTIF	72	PERSEN	2.07.2.07 .01.15.00 7	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	JUMLAH DESA YANG DIMONITORING DAN DIEVALUASI PELAKSANAAN BBGRM	330	DESA	1.400.000.000
	BIDANG PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN DESA	2.07.2.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG AKTIF	72	PERSEN	2.07.2.07 .01.15.00 7	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	JUMLAH KELURAHAN YANG DIMONITORING DAN DIEVALUASI PELAKSANAAN BBGRM	26	KELURAHAN	
	BIDANG PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN DESA	2.07.2.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG AKTIF	72	PERSEN	2.07.2.07 .01.15.00 7	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG DIFASILITASI	4	LEMBAGA	
	BIDANG PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN DESA	2.07.2.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA YANG AKTIF	72	PERSEN	2.07.2.07 .01.15.00 8	FASILITASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	JUMLAH PKK YANG DIFASILITASI	37	PKK	
3	BIDANG ADMINISTRASI	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.00	PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA BIDANG	JUMLAH DRAFT RANPERBUP YANG DISUSUN	3	DRAFT	520.450.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	PEMERINTAHAN DESA		PEMERINTAHAN DESA	MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA			1	PEMERINTAHAN DESA				
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.00 7	FASILITASI PENGISIAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD	JUMLAH ANGGOTA BPD YANG TERPILIH DAN MENGIKUTI PELANTIKAN	330	DESA	150.000.000
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 0	FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN	30	KALI	100.000.000
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 1	ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD YANG MENGIKUTI ORIENTASI	660	ORANG	300.000.000
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 2	DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UU 6 TAHUN 2014	JUMLAH DESA PERCONTOHAN	18	DESA	500.000.000
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 2	DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UU 6 TAHUN 2014	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN	330	DESA	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 3	FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (SPM DESA)	JUMLAH DESA YANG SUDAH MENERAPKAN PELAYANAN SESUAI SPM DESA	330	DESA	150.000.000
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 3	FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (SPM DESA)	JUMLAH DRAFT RANPERDA YANG DISUSUN	3	DRAFT	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 3	FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (SPM DESA)	JUMLAH PESERTA BIMTEK PENYUSUNAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM	330	ORANG	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 6	PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	JUMLAH OPERATOR YANG MENGIKUTI BIMTEK KEUANGAN DESA	732	ORANG	625.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA								
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 6	PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	JUMLAH PERANGKAT DESA YANG MENGIKUTI BIMTEK PENYUSUNAN RNCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DESA	330	DESA	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 6	PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	JUMLAH PERMASALAHAN ASET DESA YANG DIFASILITASI	170	DESA	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 6	PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	JUMLAH USULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS YANG DIVERIFIKASI	181	USULAN	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 7	FASILITASI PENYUSUNAN APLIKASI PROFIL DESA/KELURAHAN (PRODESKEL)	JUMLAH DESA YANG DIEVALUASI	18	DESA	200.000.000
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 7	FASILITASI PENYUSUNAN APLIKASI PROFIL DESA/KELURAHAN (PRODESKEL)	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA	330	DESA	
	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE APARATUR PEMERINTAH DESA YANG MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERITAH DESA	75	PERSEN	2.07.2.07 .01.17.01 8	FASILITASI PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA	51	DESA	400.000.000
4	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN BADAN USAHA BERSAMA MILIK DESA (BUMADES) YANG MEMILIKI KONTRIBUSI TERHADAP PADES	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.00 8	EVALUASI BUMDES	JUMLAH BUMDESMA YANG MEMBUAT PROFIL BUMDESMA	13	DESA	400.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN BADAN USAHA BERSAMA MILIK DESA (BUMADES) YANG MEMILIKI KONTRIBUSI TERHADAP PADES	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.00 8	EVALUASI BUMDES	JUMLAH BUMDESMA YANG SEHAT, MANDIRI DAN MAJU	13	DESA	
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN BADAN USAHA BERSAMA MILIK DESA (BUMADES) YANG	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.00 8	EVALUASI BUMDES	JUMLAH BUMDES YANG DIEVALUASI	18	KECAMATAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				MEMILIKI KONTRIBUSI TERHADAP PADES								
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN BADAN USAHA BERSAMA MILIK DESA (BUMADES) YANG MEMILIKI KONTRIBUSI TERHADAP PADES	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.00 8	EVALUASI BUMDES	JUMLAH BUMDES YANG MEMBUAT PROFIL BUMDES	330	DESA	
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PERSENTASE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DAN BADAN USAHA BERSAMA MILIK DESA (BUMADES) YANG MEMILIKI KONTRIBUSI TERHADAP PADES	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.00 8	EVALUASI BUMDES	JUMLAH BUMDES YANG SEHAT, MANDIRI DAN MAJU	330	DESA	
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PERSENTASE PASAR DESA DALAM KONDISI BAIK	62	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.01 7	EVALUASI PASAR DESA	JUMLAH PASAR DESA YANG DIEVALUASI	18	KECAMATAN	100.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PROSENTASE PERTUMBUHAN TTG YANG DIHASILKAN OLEH POKMAS DAN ATU WARGA MASYARAKAT	27	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.01 8	PEMBERDAYAAN POKMAS TTG DALAM PEMANFATAN TTG,SDA DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN MELALUI PELATIHAN	JUMLAH DESA MEMPUNYAI INOVASI	18	KECAMATAN	200.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA	PROSENTASE PERTUMBUHAN TTG YANG DIHASILKAN OLEH POKMAS DAN ATU WARGA MASYARAKAT	27	PERSEN	2.07.2.07 .01.19.01 8	PEMBERDAYAAN POKMAS TTG DALAM PEMANFATAN TTG,SDA DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN MELALUI PELATIHAN	JUMLAH KPSPAM YANG MENGIKUTI PELATIHAN	80	ORANG	
	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	2.07.2.07.01.22	PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN ANGGARAN DESA YANG BAIK	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.22.00 9	FASILITASI PENGELOLAAN DANA DESA	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL, PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA	330	DESA	150.000.000
	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	2.07.2.07.01.22	PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA	PERSENTASE DESA DENGAN PENGELOLAAN ANGGARAN DESA YANG BAIK	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.22.01 0	FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI P3MD	330	DESA	100.000.000
	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	2.07.2.07.01.22	PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA	PROSENTASE DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG BAIK	100	PERSEN	2.07.2.07 .01.22.00 5	PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI MENJADI KAWASAN	2	DESA	100.000.000
	BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	2.07.2.07.01.22	PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA	PROSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN KERJASAMA	36,3	PERSEN	2.07.2.07 .01.22.00 7	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA	100	DESA	100.000.000
14	DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											14.925.530.000
1	Sekretariat	2.08.2.08.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	%	2.08.2.08 .01.06.00 1.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	PERSENTASE TERCAINNYA PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA	100	%	20.768.000
	Sekretariat	2.08.2.08.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	%	2.08.2.08 .01.06.00 1.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	JUMLAH PESERTA ANGGOTA PIK KRR / SOSIALISASI PIK KRR KE KELOMPOK REMAJA	100	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
2	Sekretariat	2.08.2.08.01.06 .	KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	%	2.08.2.08 .01.06.00 3.	KINERJA SKPD PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	PERSENTASE KETERCAPIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100	BUKU	21.100.000
3	Sekretariat	2.08.2.08.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 2.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG CETAKANN DAN PENGGAANDAN	6	JENIS	15.950.000
4	Sekretariat	2.08.2.08.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN BUKU PERATURAN PERUNDANG UNDANG	7	EXEMPLAR	8.460.000
5	Sekretariat	2.08.2.08.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 5.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH AIR	220	GALON	78.375.000
	Sekretariat	2.08.2.08.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 5.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH NASI DAN SNACK	2915	DUS	
6	Sekretariat	2.08.2.08.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 6.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN RAKOR DAN KONSULTASI	491	KALI	219.195.000
7	Sekretariat	2.08.2.08.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PETUGAS ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERKANTORAN	48	ORANG	1.267.200.000
8	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH KOMPONEN INSLATASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7	JENIS	8.000.000
9	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	5	JENIS	60.000.000
10	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH BAHAN LOGISTIK KANTOR	17	JENIS	17.730.000
11	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR	41	JENIS	80.000.000
12	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU	60	PAKET	24.000.000
13	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 5.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KANTOR / GEDUNG / RUMAH TANGGA	JUMLAH BANGUNAN / GEDUNG YANG DIPELIHARA	2	BANGUN	62.330.000
14	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4	9	KENDARAAN	136.750.000
15	Sekretariat	2.08.2.08.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT	100%	%	2.08.2.08 .01.02.00 7.	PEMELIHARAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR /	6	JENIS	65.500.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				DAERAH				KANTOR/ RUMAH TANGGA	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA			
16	Sekretariat	2.08.2.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 8.	PEMELIHARAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	3	JENIS	109.200.000
17	Sekretariat	2.08.2.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 8.	PEMELIHARAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIA JASA KEBERSIHAN KANTOR	4	ORANG	72.000.000
18	Sekretariat	2.08.2.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.08.2.08 .01.01.00 8.	PEMELIHARAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIA JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	48	KALI	16.800.000
19	Sekretariat	2.08.2.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100%	%	2.08.2.08 .01.05.00 4.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD	JUMLAH PEMBINAAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT	126	ORANG	18.820.000
20	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.00 2	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DENGAN MITRA KERJA	JUMLAH PESERTA YANG MENDAPAT PEMBINAAN	4	KEGIATAN	32.428.000
	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.00 2	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DENGAN MITRA KERJA	JUMLAH PESERTA YANG MENDAPAT PEMBINAAN	190	ORANG	
21	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.00 6	DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PEERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN)	JUMLAH PESERTA KB MKJP YANG DILAYANI	150	AKSEPTOR	157.409.600
	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.00 6	DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PEERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN)	JUMLAH PESERTA LOMBA KB LESTARI	128	PESERTA	
22	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.01 0	MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI KEGIATAN MONITORING KB MELALUI SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING	210	PESERTA	90.390.000
23	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.01 1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	JUMLAH OPERASIONAL SARANA PRASARANA BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN TERCUKUPINYA ALOKON DI FASKES.	18	BALAI PENYULUH	6.235.412.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE UNMET NEED KB	9,80%	%	2.08.2.08 .01.15.01 1	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	OPERASIONAL DAN PEMBERDAYAAN KAMPUNG KB	18	BALAI PENYULUH	
24	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI RAKERDA	1:2	%	2.08.2.08 .01.17.00 4	RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI RAKERDA	150	ORANG	99.801.600
25	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	RASIO PETUGAS PENYULUH KB DAN PETUGAS LAPANGAN KB DI DESA / KELURAHAN	1:2	%	2.08.2.08 .01.17.00 5	PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL TINGKAT KABUPATEN	471	ORANG	59.955.800
26	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	2.08.2.08.01.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	RASIO PETUGAS PENYULUH KB DAN PETUGAS LAPANGAN KB DI DESA / KELURAHAN	1:2	%	2.08.2.08 .01.17.00 7	ORIENTASI KIE PENGENDALIAN PENDUDUK BERBASIS MASYARAKAT	JUMLAH SISWA DAN GURU SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN	345	ORANG	45.000.000
27	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 1	PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KB	1	KEGIATAN	100.000.000
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 1	PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA	JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN	2	KEGIATAN	
28	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 4	PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN KEPADA REMAJA	JUMLAH REMAJA YANG MENGIKUTI PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN	100	ORANG	8.725.000
29	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 7	FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	JUMLAH PESERTA ANGGOTA PIK KRR / SOSIALISASI PIK KRR KE KELOMPOK REMAJA	100	ORANG	97.138.000
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 7	FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH	JUMLAH PESERTA KONSELING PRA NIKAH	100	ORANG	
30	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 8	PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA (BKB)- POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) - PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)	JUMLAH LOKASI	16	KAJIAN	33.300.000
31	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 9	PENDIDIKAN PRA NIKAH	JUMLAH MODUL KESIAPAN MEMBANGUN KELUARGA (MATERI PEMAHAMAN USIA PUBERTAS, CITRA DIRI YANG SEHAT DAN SOSIAL RELATIONSHIP) UNTUK USIA 12- 15	1	MODUL	100.000.000
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 9	PENDIDIKAN PRA NIKAH	JUMLAH MODUL KESIAPAN MEMBANGUN KELUARGA (MATERI PENGENALAN DIRI, PEMAHAMAN TUGAS PERKEMBANGAN DEWASA AWAL DAN HEALTHY RELATIONSHIP)UNTUK USIA 15- 18 TAHUN	1	MODUL	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 9	PENDIDIKAN PRA NIKAH	JUMLAH MODUL KESIAPAN MEMBANGUN KELUARGA UNTUK 18+ / CALON PENGANTIN	1	MODUL	
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 9	PENDIDIKAN PRA NIKAH	JUMLAH MODUL PASCA PERNIKAHAN / NEWLY WED	1	MODUL	
32	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.01 0	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN	JUMLAH KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN	4	KEGIATAN	40.965.000
33	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.01 1	PENGEMBANGAN KELOMPOK BINA KELUARGA DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA	JUMLAH KELOMPOK TRIBINA DAN KELOMPOK UPPKS YANG TELAH DIBENTUK	4	KELOMPOK	36.689.400
34	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.01 2	PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)	JUMLAH PESERTA PELATIHAN PENDAMPING KELOMPOK UPPKS	40	ORANG	30.300.000
35	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 2	MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA	JUMLAH KEGIATAN PENDATAAN	3	KEGIATAN	23.159.200
36	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 3	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KELUARGA BERENCANA	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB YANG BERDAYA DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KB	2920	ORANG	1.868.685.400
37	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 5	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA	JUMLAH MEDIA CETAK	2	JENIS	30.750.000
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 5	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA	JUMLAH PAMERAN	1	KALI	
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 5	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA	JUMLAH MEDIA KIE KELUARGA SEJAHTERA	1	JENIS	19.678.000
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG ISTERINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN	0,70%	%	2.08.2.08 .01.16.00 6	LOMBA KELUARGA BERENCANA LESTARI	JUMLAH PESERTA LOMBA	128	PESERTA	27.175.000
40	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100,00%	%	2.08.2.08 .01.16.01 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	PENGADAAN ALAT KANTOR	1	UNIT	1.438.405.000
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100,00%	%	2.08.2.08 .01.16.01 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	7	UNIT	
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16 .	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100,00%	%	2.08.2.08 .01.16.01 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	PENGADAAN AC	13	UNIT	
	Bidang Keluarga	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA	PERSENTASE FASILITAS	100,00%	%	2.08.2.08	DANA ALOKASI KHUSUS	PENGADAAN PRINTER	25	UNIT	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Sejahtera dan Advokasi	.	SEJAHTERA	TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH			.01.16.01 3	(DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA				
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100,00%	%	2.08.2.08 .01.16.01 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	PENGADAAN BKB KIT	45	UNIT	
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100,00%	%	2.08.2.08 .01.16.01 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	PENGADAAN PEMBANGUNAN BALAI PENYULUH	1	UNIT	
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi	2.08.2.08.01.16	PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100,00%	%	2.08.2.08 .01.16.01 3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	BELANJA JASA KONSULTASI	1	UNIT	
41	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH	≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 3	FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)	1. JUMLAH PESERTA RAPAT DAN PEMBINAAN	250	PESERTA	90.000.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH	≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 3	FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)	2. JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	5	DESA	
42	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN		≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 5	FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN	503	ORANG	116.000.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN		≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 5	FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)	JUMLAH KEGIATAN RAPAT RUTIN	10	KALI	50.000.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH		%	2.02.2.08 .01.15.00 5	FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)	JUMLAH KEGIATAN TERFASILITASI	5	KEGIATAN	
43	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN		≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 2	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	1. JUMLAH PESERTA MUSRENBANG PEREMPUAN	150	ORANG	80.000.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH		%	2.02.2.08 .01.15.00 2	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	2. JUMLAH PERTEMUAN POKJA PUG	2	KALI	
44	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN		≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 2	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN	1. JUMLAH DOKUMEN ARG TERSUSUN	47	DOKUMEN	91.985.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Pengarusutamaan Gender		PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN					GENDER DAN ANAK				
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH	≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 2	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	2. JUMLAH PONPES YANG MENDAPATKAN SOSIALISASI KESETARAAN GENDER	65	PONPES	
45	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN		≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 6.	FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN	1. JUMLAH PESERTA DAN DESA YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN	540	ORANG	490.000.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15			≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 6.	FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN	2. JUMLAH DESA YANG MENYELENGGARAKAN SEKOLAH "LAKI-LAKI BARU"	18	DESA	
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2.02.2.08.01.15		PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	≥30%	%	2.02.2.08 .01.15.00 6.	FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN	3. JUMLAH PERTEMUAN "EVALUASI SEKOLAH PEREMPUAN" YANG TERSELENGGARA	2	KALI	
46	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 2	FORUM ANAK	JUMLAH FORUM ANAK	300	ANAK	225.000.000
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 2	FORUM ANAK	JUMLAH PERWAKILAN FORUM ANAK KECAMATAN	18	FORUM ANAK KECAMATAN	
47	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 3	FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK	JUMLAH INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK YANG TERPENUHI	21	INDIKATOR	75.000.000
48	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 3	FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK	JUMLAH PROFIL GENDER YANG TERSEDIA	1	DOKUMEN	75.000.000
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 3	FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK	JUMLAH PROFIL ANAK YANG TERSEDIA	1	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Hak Anak			PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);								
49	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 3	FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK	JUMLAH DISEMINASI DATA	1	KALI	20.000.000
50	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 9	PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK	1. JUMLAH SEKOLAH YANG MENGINISASI SEKOLAH RAMAH ANAK	42	SEKOLAH	150.000.000
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 9	PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK	2. JUMLAH PESERTA PELATIHAN PUSKESMAS RAMAH ANAK	32	PUSKESMAS	
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 9	PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK	3. JUMLAH TAMAN YANG DIAUDIT RBRA	1	TAMAN	
51	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 8	PERLINDUNGAN SISTEM PERLINDUNGAN TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)	DESA YANG INISIASI PATBM	35	DESA	145.000.000
52	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 6	PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	JUMLAH DESA DAN KECAMATAN YANG TELAH MENDAPATKAN SOSIALISASI P2TP2A	54	DESA	50.000.000
53	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 6	PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	JUMLAH DESA DAN KECAMATAN YANG TELAH MENDAPATKAN SOSIALISASI P2TP2A	54	DESA	50.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Hak Anak			PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);								
54	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	JUMLAH PENDAMPINGAN KASUS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG DIFASILITASI	210	PENDAMPING AN	100.000.000
55	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	JUMLAH PENDAMPINGAN KASUS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG DIFASILITASI	210	PENDAMPING AN	100.000.000
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);		%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	JUMLAH PENGURUS RUMAH CURHAT KECAMATAN YANG MENGIKUTI PELATIHAN	30	BAWEAN	
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	JUMLAH PENGURUS RUMAH CURHAT KECAMATAN YANG MENGIKUTI PELATIHAN	48	NON BAWEAN	
56	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI DAN SOP BERSAMA	1	DRAFT	70.000.000
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	JUMLAH PERTEMUAN DENGAN JEJARING	5	KALI	
57	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI DAN SOP BERSAMA	1	DRAFT	70.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Hak Anak							PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)				
	Bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak	2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DALAM PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A);	100%	%	2.02.2.08 .01.16.00 5	FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	JUMLAH PERTEMUAN DENGAN JEJARING	5	KALI	
15	DINAS PERHUBUNGAN											38.172.355.400
1	Bidang Sarana dan Prasarana	2.09.02.09.01.17	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN 2. PROSENTASE LOKASI PARKIR YANG DITETAPKAN	100	%	2.09.02.0 9.01.17.0 05	PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR	JUMLAH PETUGAS PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PARKIR YANG DIFASILITASI;	300	ORANG	4.367.112.000
2	Bidang Sarana dan Prasarana	2.09.02.09.01.17	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN 2. PROSENTASE LOKASI PARKIR YANG DITETAPKAN	100	%	2.09.02.0 9.01.17.0 02	PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI, GEDUNG TERMINAL	JUMLAH BANGUNAN HALTE DAN POS PANTAU YANG DIBANGUN	6	UNIT	408.008.000
3	Sekretariat	2.09.02.09.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	2.09.02.0 9.01.07.1 16	OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH SMARTCART UJI KENDARAAN YANG DISEDIAKAN	22048	PAKET	551.213.000
4	Sekretariat	2.09.02.09.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	2.09.02.0 9.01.07.1 25	OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH ALAT UJI KENDARAAN YANG DIPELIHARA	9	UNIT	351.213.000
5	Sekretariat	2.09.02.09.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	2.09.02.0 9.01.07.1 26	OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH KENDARAAN YANG LULUS UJI	2000	UNIT	503.187.000
6	Sekretariat	2.09.02.09.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	2.09.02.0 9.01.07.0 55	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL (FASILITAS UTAMA DAN PENDUKUNG)	JUMLAH PETUGAS UPT YANG DIFASILITAS	6	ORANG	75.000.000
7	Bidang Sarana dan Prasarana	2.09.02.09.01.15	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN 2. PROSENTASE LOKASI PARKIR YANG DITETAPKAN	100	%	2.09.02.0 9.01.15.0 05	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN	JUMLAH PRASARANA JALAN YANG DIPELIHARA	12	UNIT	205.000.000
8	Bidang Sarana dan Prasarana	2.09.02.09.01.15	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	1. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN 2. PROSENTASE LOKASI PARKIR YANG DITETAPKAN	100	%	2.09.02.0 9.01.15.0 03	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TERMINAL/ PELABUHAN	JUMLAH FASILITAS TERMINAL YANG DIBANGUN	1	PAKET	558.030.000
5	Bidang Sarana dan Prasarana	2.09.02.09.01.15	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN	1. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA	100	%	2.09.02.0 9.01.15.0	PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU	JUMLAH APILL YANG DIPELIHARA			-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	PERHUBUNGAN YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN			05	LINTAS				
				2. PROSENTASE LOKASI PARKIR YANG DITETAPKAN								
								PERAWATAN MARKA JALAN	PANJANG MARKA JALAN YANG DIPELIHARA			
								PERAWATAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS	JUMLAH RAMBU RAMBU LALU LINTAS YANG DIPELIHARA			
7	Bidang Sarana dan Prasarana		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1. PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN	100	%	2.09.02.0 9.01.19.0 10	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PENERANGAN JALAN UMUM	JUMLAH PJU YANG DIPASANG DAN DIPELIHARA	1	PAKET	12.800.000.000
				2. PROSENTASE LOKASI PARKIR YANG DITETAPKAN								
8	Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional	2.09.02.09.01.1 9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1. PROSENTASE FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN	66,67	%	2.09.02.0 9.01.19.0 06	OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS	JUMLAH PETUGAS OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS YANG DIFASILITASI	56	ORANG	1.872.600.000
				2. PENINGKATAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS	71,43	%						
				3. PERSENTASE TRAFFIC LIGHT TERPASANG ATCS	92,09	%						
9	Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional	2.09.02.09.01.1 9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1. PROSENTASE FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN	66,67	%	2.09.02.0 9.01.19.0 11	PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS	JUMLAH SISWA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN DAN PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS			-
				2. PENINGKATAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS	71,43	%						
				3. PERSENTASE TRAFFIC LIGHT TERPASANG ATCS	92,09	%						
10	Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional	2.09.02.09.01.1 9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1. PROSENTASE FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN	66,67	%	2.09.02.0 9.01.19.0 07	SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN LALU LINTAS	JUMLAH DOKUMEN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS YANG DISUSUN DAN DIHASILKAN	8	DOKUMEN	528.790.000
				2. PENINGKATAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS	71,43	%						
				3. PERSENTASE TRAFFIC LIGHT TERPASANG ATCS	92,09	%						
								SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA RATA				
								KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG				
								KAJIAN BLACKSPOT TITIK RAWAN KECELAKAAN				
14	Bidang Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional	2.09.02.09.01.1 9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1. PROSENTASE FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN	66,67	%	2.09.02.0 9.01.19.0 19	PEMELIHARAAN ATCS	JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN(FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS) YANG DIPASANG DAN DIKEMBANGKAN	12	JENIS	5.143.550.000
				2. PENINGKATAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS	71,43	%						
				3. PERSENTASE TRAFFIC LIGHT TERPASANG ATCS	92,09	%						
								PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS				
								PENGEMBANGAN SISTEM ATCS				
17	Bidang Kelalulintasan dan	2.09.02.09.01.1 9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN	1. PROSENTASE FASILITAS KESELAMATAN LALU	66,67	%	2.09.02.0 9.01.19.0	PENINGKATAN KAPASITAS SDM KELALULINTASAN	JUMLAH PETUGAS YANG MENGIKUTI DIKLAT	6	ORANG	186.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Pengendalian Operasional		PENGAMANAN LALU LINTAS	LINTAS YANG TERSEDIA SESUAI KEBUTUHAN			21		KELALULINTASAN			
				2. PENINGKATAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS	71,43	%						
				3. PERSENTASE TRAFFIC LIGHT TERPASANG ATCS	92,09	%						
1	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.02	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH PETUGAS DAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN YANG DIFASILITASII	800	ORANG	678.404.000
2	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.05	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH PENGEMUDI YANG MENGIKUTI AKUT	60	ORANG	74.000.000
2	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.04	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH ALAT UJI KENDARAAN YANG DISEDIAKAN	2	PAKET	660.000.000
3	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.40	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH ANGKUTAN UMUM YANG DISUBSIDI	30	UNIT	74.000.000
4	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.38	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH STUDY / KAJIAN ANGKUTAN JALAN YANG DISUSUN	3	DOKUMEN	196.500.000
5	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.27	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH PETUGAS OPERASIONAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG DIFASILITASII	3	DOKUMEN	607.050.000
1	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENINGKATAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN GRESIK - BAWEAN	5,36	%	2.09.02.09.01.16.28	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH STUDY/ KAJIAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN YANG DISUSUN	3	DOKUMEN	227.000.000
2	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENINGKATAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN GRESIK - BAWEAN	5,36	%	2.09.02.09.01.16.30	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH SIM PELAYARAN YANG DISUSUN	2	SISTEM	155.000.000
3	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENINGKATAN PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN GRESIK - BAWEAN	5,36	%	2.09.02.09.01.16.33	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH PETUGAS PERLINTASAN KA YANG DI FASILITASI	6	ORANG	308.800.000
1	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.16.10	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH KAJIAN KERETA API YANG DISUSUN	1	DOKUMEN	64.000.000
2	Bidang Angkutan	2.09.02.09.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANGKUTAN UMUM	15,63	%	2.09.02.09.01.17.04	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	JUMLAH FASILITAS KESELAMATAN PERLINTASAN KA YANG DIBANGUN	1	PAKET	140.000.000
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP UPTD	100	%	2.09.02.09.01.07.0	OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG	JUMLAH PETUGAS UPT YANG DIFASILITAS			-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PELAKSANA TEKNIS SKPD				56	BAWEAN				
1	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAAAN KANTOR YANG TERSEDIA	2	PAKET	241.438.400
1	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN SURAT KABAR YANG DISEDIAKAN	4	JENIS	20.000.000
1	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT / KEGIATAN KEDINASAN YANG DISEDIAKAN	12	BULAN	160.000.000
1	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 6	RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI DALAM DAN LUAR DAERAH	12	BULAN	500.000.000
1	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTASI KANTOR YANG DIBAYAR			-
1	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA OPERASIONAL KANTOR YANG DIFASILITASI			-
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI DI SEKRETARIAT	16	ORANG	553.200.000
		2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH SURAT MENYURAT YANG TERLAKSANA	12	BULAN	3.500.000
		2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DILAKSANAKAN	12	BULAN	356.400.000
		2.09.02.09.01.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.09.2.09 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN DI LINGKNGAN KANTOR	13	ORAG	388.650.000
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 01	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	JUMLAH GEDUNG KANTOR YANG DIBANGUN			-
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 02	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3	PAKET	1.600.000.000
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 03	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN			-
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 03	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH JENIS ALAT TULIS KANTOR	1	PAKET	160.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 03	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR	5	PAKET	295.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0	PROGRAM PENINGKATAN	PRESENTASE FASILITASI	100	%	2.09.02.0	PENGADAAN	JUMLAH ALAT, BAHAN	12	BULAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		2	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR			9.01.02.0 03	PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	PEMBERSIH, TANAMAN, PUPUK, SOUVENIR DAN KARANGAN BUNGAH			162.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 03	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH GENERATOR LISTRIK DAN PENDINGIN RUANGAN	2	PAKET	278.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 03	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH JENIS MEBELEUR	1	PAKET	45.000.000
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 05	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KANTOR/ GEDUNG/ RUMAH TANGGA	JUMLAH BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	3	PAKET	920.000.000
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 06	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	TERSEDIAANYA BAHAN BAKAR MINYAK DAN TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	12	BULAN	450.000.000
2	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 07	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA			-
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 07	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA	12	BULAN	85.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 07	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA	12	BULAN	82.500.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 07	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH JARINGAN LISTRIK KANTOR YANG TERPELIHARA	1	PAKET	190.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASRANA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.02.0 07	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KANTOR/ GEDUNG/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDINGIN RUANGAN, VACUM CLEANER, SOUND SYSTEM DAN GENERATOR LISTRIK DLL YANG DIPELIHARA	12	BULAN	90.000.000
3	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.03.0 02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS YANG DISEDIAKAN			-
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.03.0 02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS HARIAN YANG DISEDIAKAN	186	STEL	198.990.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.03.0 03	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	JUMLAH PAKAIAN DINAS LAPANGAN YANG DISEDIAKAN	186	STEL	198.460.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.03.0 05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU	JUMLAH KAOS OLAHRAGA DINAS PERHUBUNGAN YANG DISEDIAKAN	1	PAKET	52.500.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	100	%	2.09.02.0 9.01.05.0 01	PEMBINAAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH	JUMLAH PELAKSANAAN SENAM KESEHATAN JASMANI DAN PELATIHAN KESAMAPTAAN	12	BULAN	24.060.000
4	Sekretariat	2.09.02.09.01.0	PROGRAM PENINGKATAN	PRESENTASE FASILITASI	100	%	2.09.02.0	PENYUSUNAN LAPORAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN	3	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		6	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			9.01.06.01	CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	CAPAIAN KINERJA YANG DISUSUN DAN DISELESAIKAN			20.000.000
4	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN BULANAN DAN SEMESTERAN YANG DISUSUN	3	DOKUMEN	20.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN AKHIR TAHUN YANG DISUSUN	1	DOKUMEN	10.000.000
4	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISUSUN	1	DOKUMEN	20.000.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.07	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH RKA DAN DPA YANG DISUSUN	3	DOKUMEN	143.200.000
	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.08	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI DAN IKM YANG DISUSUN	14	DOKUMEN	170.000.000
4	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.01					-
4	Sekretariat	2.09.02.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.09.02.09.01.06.017					-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											11.297.536.500
1	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	#####	2.10.2.10.01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH UMBUL-UMBU	10	BUAH	54.491.500,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JASA PUBLIKASI UCAPAN	6	KALI	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BANNER	12	BUAH	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12	JENIS	-
2	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.05	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KETERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK Mendukung KEGIATAN DAN HARIAN	4	JENIS	44.415.000,00
3	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.03	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	600%	JENIS	13.720.000,00
4	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.06	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH FASILITASI RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH DALAM RANGKA Mendukung KEGIATAN Rutin	10	PERJALANAN DINAS	335.514.000,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	2.10.2.10.01.01.06	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH FASILITASI RAPAT-RAPAT KOORDINASI LUAR DAERAH DALAM RANGKA Mendukung KEGIATAN Rutin DAN LPSE	102	PERJALANAN DINAS	-
19	Sekretariat Dinas											

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
5	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA KONSULTANSI PERORANGAN TEKNIS APLIKASI MONITORING PENGADAAN YANG DIFASILITASI	1	ORANG	449.100.000,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH MATERAI YANG DIBUTUHKAN	120	LEMBAR	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR YANG DIFASILITASI DALAM RANGKA Mendukung KEGIATAN KANTOR	15	ORANG	-
20	Sekretariat Dinas											
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA KEAMANAN KANTOR	300%	ORANG	61.200.000,00
21	Sekretariat Dinas											
6	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA AIR	12	BULAN	3.935.633.325,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA LISENSI CPANEL	12	BULAN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA LISTRIK (RUANG SERVER PEMDA DAN KOMINFO)	12	BULAN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA PERIJINAN AS NUMBER / IP PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	1	TAHUN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA PERIJINAN FREKUENSI RADIO SUARA GRESIK	12	BULAN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA TELEPON	12	BULAN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH BELANJA TV KABEL	12	BULAN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KONSULTANSI STANDARISASI LPSE	5	STANDARISA SI	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA PEMELIHARAAN FITUR APLIKASI INFO LPSE DAN E-REPORTING	1	PAKET	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH OPERASIONAL BANDWIDTH UNTUK KABUPATEN GRESIK	350	MBPS	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PAKET PEMASANGAN LISTRIK PREMIUM	2	PAKET	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH SEWA LAYANAN CALL CENTER 112	12	BULAN	-
22	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%							
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH SENAM YANG DILAKSANAKAN DENGAN INSTRUKTUR	33	KALI	11.500.000,00
7	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100	%	0	'2.10.2.1 0.01.01.0 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH OPERASIONAL RETRIBUSI KEBERSIHAN	12	BULAN	22.200.000,00
8	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	100	%	##### ##	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1	PAKET	77.239.680,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR					KANTOR / RUMAH TANGGA				
				100	%							
9	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	9	JENIS	9.909.950,00
10	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PRINTER MONOCHROME	3	BUAH	55.000.000,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PRINTER WARNA	4	UNIT	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH SCANNER BESAR	3	UNIT	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH SCANNER KECIL	2	UNIT	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	WEBCAM	1	UNIT	-
11	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	28	JENIS	6.945.045,00
				100	%							
12	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN PEMBATAS RUANG	1	PAKET	200.000.000,00
13	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN KANTOR	5	JENIS	88.500.000,00
14	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN MEBELEUR KANTOR	1	PAKET	57.500.000,00
15	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.05	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KANTOR / GEDUNG / RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKET PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	231.851.000,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.05	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KANTOR / GEDUNG / RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.05	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KANTOR / GEDUNG / RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	-
16	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.06	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN JABATAN / DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL YANG PERLU PEMELIHARAAN	200%	JENIS	170.590.000,00
17	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	0	2.10.2.10 .01.01.07	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DIPELIHARA	500%	JENIS	33.300.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
23	Sekretariat Dinas											
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	##### ##	2.10.2.10 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA YANG DISUSUN	2	DOKUMEN	14.647.500,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH PELAPORAN MONEV APBD DAN KEGIATAN YANG DISUSUN (SEMESTERAN, TRIWULAN DAN BULANAN)	20	LAPORAN	-
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN MONEV, APBD DAN KEGIATAN YANG DISUSUN	3	DOKUMEN	-
24	Sekretariat Dinas											
25	Sekretariat Dinas											
26	Sekretariat Dinas											
27	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.04	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN (BULANAN TRIWULAN, SEMESTERAN) YANG DISUSUN	3	JENIS	5.400.000,00
28	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.04	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	JUMLAH BAHAN/ DATA TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN	2	JENIS	3.000.000,00
29	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN AKIP KINERJA YANG DISUSUN (PERKIN, IKU / IKI, RENAKSI)	7	DOKUMEN	10.878.000,00
	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA YANG DISUSUN (LKPJ, LPPD, LKJIP)	3	DOKUMEN	-
30	Sekretariat Dinas	2.10.2.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	0	2.10.2.10 .01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH PELAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN	1	JENIS	4.100.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
31	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	##### ##	2.10.2.10 .01.15.01 8	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E - GOVERNMENT	JUMLAH PAKET PEMELIHARAAN JARINGAN FO	1,00	PAKET	134.032.000,00
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 8	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E - GOVERNMENT	JUMLAH PENGADAAN ALAT LISTRIK DAN KABEL JARINGAN LAN	10,00	JENIS	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 8	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E - GOVERNMENT	JUMLAH PENGADAAN KOMPONEN PERANGKAT JARINGAN FO	5,00	BUAH	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 8	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E - GOVERNMENT	JUMLAH TENAGA AHLI JARINGAN YANG DIREKRUT	1,00	ORANG	-
32	Bidang Pengembangan e - Gov											
33	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 4	PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH KEBIJAKAN SPBE YANG DIREVIU	1,00	KEBIJAKAN	212.525.000,00
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 4	PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH MANAJEMEN SPBE YANG DIIMPLEMENTASIKAN	1,00	MANAJEMEN	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 4	PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH PEDOMAN SPBE YANG DISUSUN	2,00	PEDOMAN	-
34	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 4	PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH ARSITEKTUR SPBE YANG DIREVIU	1,00	KEBIJAKAN	129.404.000,00
35	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 5	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT	JUMLAH EVALUASI SMART CITY YANG DILAKSANAKAN	2,00	KALI	200.250.000,00
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 5	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT	JUMLAH QUICK WIN SMART CITY	1,00	QUICK WIN	-
36	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	1	100	0	2.10.2.10 .01.15.02 5	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT	JUMLAH EVALUASI SPBE	1,00	KALI	39.772.000,00
37	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	88,56	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 1	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA MANAGEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH ADMIN TIK YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	47,00	ORANG	173.416.500,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	88,56	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 1	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA MANAGEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH DATA TIK OPD YANG TERUPDATE	47,00	OPD	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	88,56	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 1	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA MANAGEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH PENGELOLA SPBE YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	4,00	ORANG	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	88,56	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 1	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA MANAGEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH PENGGUNA SPBE ASN YANG DILATIH	100,00	ORANG	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	88,56	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 1	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARA MANAGEMEN E- GOVERNMENT	JUMLAH PENGGUNA SPBE (MASYARAKAT) YANG DILATIH	200,00	ORANG	-
38	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 3	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH JASA SETTING CLUSTERING BACKUP SERVER DAN DRC	1,00	PAKET	965.162.000,00
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 3	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH PEMBANGUNAN RUANG BACKUP SERVER DISKOMINFO	1,00	PAKET	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 3	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH PENGADAAN BACKUP SERVER	1,00	PAKET	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 3	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH PENINGKATAN KAPASITAS CLUSTERING SERVER, DATA CENTER (KANTOR BUPATI)	1,00	PAKET	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.02 3	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH PENINGKATAN STANDAR DATA CERNTER TIER 1/ DRC (KANTOR BUPATI)	1,00	PAKET	-
39	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 9	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH APLIKASI SERVICE DESK YANG DIBANGUN	1,00	APLIKASI	357.889.000,00
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 9	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH PLATFORM APLIKASI GAPURO SANTRI YANG DISEWA	1,00	PLATFORM	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 9	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH TENAGA AHLI PROGRAMMER YANG DIREKTUR	1,00	TENAGA AHLI	-
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10 .01.15.01 9	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E- GOVERNMENT	JUMLAH WEB SINGLE SIGN ON YANG DIBANGUN	1,00	WEB	-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
40	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10.01.15.019	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT	JUMLAH DATA WAREHOUSE ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG DIBANGUN	1,00	DATABASE	130.004.000,00
	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10.01.15.019	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT	JUMLAH TENAGA AHLI INTEGRATOR/ SISTEM PENGHUBUNG YANG DIREKRUT	1,00	ORANG	-
41	Bidang Pengembangan e - Gov	2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT	100	%	0	2.10.2.10.01.15.019	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT	JUMLAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI YANG DILAKSANAKAN	1,00	KALI	18.202.000,00
42	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	#####	2.10.2.10.01.16.08	FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH	JUMLAH EVALUASI PENGADUAN OPD YANG BELUM DITINDAKLANJUTI	3,00	KALI	118.754.000,00
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.08	FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH	JUMLAH FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT	7,00	KALI	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.08	FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH	JUMLAH PENGADUAN DARI LAPOR.GO.ID DAN CETARJATIMPROV.GO.ID YANG DILAYANI	200,00	PENGADUAN	-
43	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.01	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LISENSI ADOBE, COREL DAN FLITING BOOK	3,00	BUAH	266.766.500,00
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.01	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH MAINTENANCE HOSTING	1,00	PAKET	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.01	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH MAINTENANCE MAIL SERVER	1,00	PAKET	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.01	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH MAINTENANCE WEBSITE GRESIKKAB	1,00	PAKET	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10.01.16.01	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN	JUMLAH MAINTENANCE WEBSITE SUARA GRESIK	1,00	PAKET	-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.01	PEMERINTAH DAERAH PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH PENGELOLAAN CEO MEDIA SOSIAL	1,00	PAKET	-
43	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.07	OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL	JUMLAH EVALUASI MATERI SIARAN RADIO SUARA GRESIK	48	KALI	346.385.000,00
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.07	OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL	JUMLAH LISENSI LAGU UNTUK RADIO SUARA GRESIK	300	LISENSI	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.07	OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL	JUMLAH PEMELIHARAAN JARINGAN RADIO	1	PAKET	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.07	OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL	JUMLAH REPORTASE UNTUK REPORTASE DI RADIO SURARA GRESIK	144	KALI	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.07	OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL	JUMLAH TENAGA PENYIAR RADIO SUARA GRESIK	4	ORANG	-
44	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.03	PENGOPERASIAN COMMAND CENTER	JUMLAH PANGGILAN KEDARURATAN YANG DILAYANI	1.000,00	PANGGILAN	638.520.000,00
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.03	PENGOPERASIAN COMMAND CENTER	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI NTPD 112	150,00	ORANG	-
	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.03	PENGOPERASIAN COMMAND CENTER	JUMLAH TENAGA OPERATOR CALL CENTER	9,00	ORANG	-
45	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0	2.10.2.10 .01.16.05	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN WEBSITE	PELATIHAN BRADCASTING	1,00	PAKET	56.719.000,00
		2.10.2.10.01.16	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	4,06	%	0			JUMLAH PELATIHAN PENGELOLA MEDIA KOMUNIKASI	1,00	PAKET	
46	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	#####	2.15.2.10 .01.15.01 6	FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI	JASA EVENT ORGANIZER PAMERAN KIM	1,00	PAKET	650.000.000,00
	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10 .01.15.01 6	FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI	JASA EVENT ORGANIZER SMART BRANDING	1,00	PAKET	
	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN	100	%	0	2.15.2.10 .01.15.01 6	FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI	JASA KONSULTASI SMART BRANDING	1,00	PAKET	

[illegible]

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Informasi dan Statistik		PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH				.01.15.001	PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH	STATISTIK	1,00		-
48	Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik	2.14.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	100	%	0	2.14.2.10.01.15.001	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH	JUMLAH PELATIHAN DATA SEKTORAL DI OPD	2,00	HARI	78.600.000,00
49	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,90 % ~ 70 TITIK								
50	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	#####	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	LISENSI SSL	1,00	PAKET	120.000.000,00
	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	MAINTENANCE KEAMANAN JARINGAN	1,00	PAKET	-
51	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	KOORDINASI TERKAIT PENERAPAN DIGITAL SIGNATURE	2,00	KALI	89.785.000,00
	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	PELATIHAN PENERAPAN DS BAGI TIM ANGGARAN	1,00	KALI	-
52	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	JASA IMPLEMENTASI DIGITAL SIGNATURE	1,00	PAKET	104.248.500,00
	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	PELATIHAN KEAMANAN INFORMASI	3,00	ORANG	-
	Bidang komunikasi dan Persandian	2.15.2.10.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH	12,9	%	0	2.15.2.10.01.15.017	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI	RAPAT EVALUASI KEAMANAN INFORMASI	2,00	KALI	-
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											8.835.692.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PEMENUHAN HONOR THL DALAM SURAT MENYURAT	35	ORANG	630.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH PEMENUHAN HONOR THL ADMINISTRASI KANTOR	45	ORANG	1.334.900.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN				2.11.2.11	PENYEDIAAN BARANG	JUMLAH PENGGANDAAN JUMLAH	14480	LEMBAR	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	ADMINISTRASI PERKANTORAN				.01.01.02 .	CETAKAN DAN PENGGANDAAN	PENYEDIAAN CETAK			150.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11 .01.01.02 .	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PENGGANDAAN JUMLAH PENYEDIAAN CETAK	14	JENIS	
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11 .01.01.01 .	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JENIS PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8	JENIS	278.792.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11 .01.01.01 .	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	75	BUAH	30.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11 .01.01.03 .	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN BACAAN	5	JENIS	15.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11 .01.01.05 .	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12	BULAN	80.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.11.2.11 .01.01.06 .	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	61	KALI	250.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.11.2.11 .01.02.04 .	PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS	JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASAR KABUPATEN	2	PASAR	65.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.11.2.11 .01.02.06 .	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN OPERASIONAL / DINAS	9	KENDARAAN	114.000.000
	Sekretariat	2.11.2.11.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.11.2.11 .01.02.07 .	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMELIHARAAN	96	UNIT	90.000.000
	Bidang Program dan Pelaporan	2.11.2.11.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				2.11.2.11 .01.06.03 .	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SIPD	JUMLAH DOKUMEN RENJA YANG TERCETAK	75	BUKU	26.000.000
	Bidang Program dan Pelaporan	2.11.2.11.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				2.11.2.11 .01.06.16 .	PEMBUATAN BULETIN OPD	JUMLAH BULETIN OPD YANG TERCETAK	350	BUKU	50.000.000
	Bidang Program dan Pelaporan	2.11.2.11.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				2.11.2.11 .01.06.01 .	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAKIP YANG TERCETAK	81	DOKUMEN	24.000.000
1	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE USAHA MIKRO YANG DI FASILITASI	0,21	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.01 .	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	JUMLAH USAHA MIKRO YANG TERDIGITALISASI	5950	USAHA MIKRO	200.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE USAHA MIKRO YANG DI FASILITASI	0,21	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.03 .	PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIPERDAYAKAN DALAM KEMITRAAN	120	USAHA MIKRO	75.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN	PROSENTASE USAHA MIKRO YANG DI FASILITASI	0,21	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.04 .	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIFASILITASI PERIJINANNYA	120	USAHA MIKRO	75.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			MENENGAH									
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE USAHA MIKRO YANG DI FASILITASI	0,21	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.10 .	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERDAYAKAN	200	USAHA MIKRO	150.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE USAHA MIKRO YANG DI FASILITASI	0,21	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.10 .	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)	TERSEDINYA BANTUAN HIBAH KEPADA USAHA MIKRO	244	USAHA MIKRO	
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE PENINGKATAN USAHA MENJADI SKALA KECIL	20	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.13 .	PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU	JUMLAH PRODUKSI YANG DIKEMBANGKAN	30	PRODUK	550.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE PENINGKATAN USAHA MENJADI SKALA KECIL	20	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.13 .	PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU	JUMLAH PRODUK YANG DIPROMOSIKAN	40	PRODUK	
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASE PENINGKATAN USAHA MENJADI SKALA KECIL	20	PERSEN	2.11.2.11 .01.15.13 .	PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI TERPADU	JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIFASILITASI USAHANYA	50	USAHA MIKRO	
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE PENGAWASAN KOPERASI	25	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.08 .	ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES PERMODALAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MENGIKUTI FASILITASI PENGAWASAN KOPERASI	30	KOPERASI	75.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE PENGAWASAN KOPERASI	25	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.11 .	PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF	JUMLAH KOPERASI YANG MENGIKUTI FASILITASI PENGAWASAN KOPERASI	30	KOPERASI	75.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE PENILAIAN KOPERASI	35	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.12 .	PENGAWASAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG DINILAI TINGKAT KESEHATANNYA	60	KOPERASI	75.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE PENILAIAN KOPERASI	35	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.13 .	PENUMBUHAN USAHA PRODUKSI BAGI KOPERASI YANG BERADA DIWILAYAH PESISIR	JUMLAH KOPERASI YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN KOPERASI	30	KOPERASI	150.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE KOPERASI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERKOPERASIAN	25	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.14 .	PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI	JUMLAH KOPERASI YANG MNEGIKUTI PENINGKATAN WAWASAN KOPERASI	75	KOPERASI	150.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE PERLINDUNGAN KOPERASI	15	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.15 .	ASISTENSI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MENGIKUTI FASILITASI PEMBERDAYAAN	75	KOPERASI	623.000.000
	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.11.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	PROSENTASE PERLINDUNGAN KOPERASI	15	PERSEN	2.11.2.11 .01.16.16 .	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI	JUMLAH SDM KOPERASI YANG MENGIKUTI FASILITASI KAPASITAS KOPERASI (DAK NON FISIK)	250	ORANG	
3	Bidang	3.06.2.11.01.15	PROGRAM	PROSENTASE UTTP YANG	100	PERSEN	3.06.2.11	PENINGKATAN	JUMLAH UTTP YANG DITERRA	1000	UTTP	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Perindustrian dan Perdagangan	.	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	MONITORING			.01.15.02 .	PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA				650.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.15 .	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	PROSENTASE UTTP YANG MONITORING	100	PERSEN	3.06.2.11 .01.15.03 .	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH	SPBU YANG DIAWASI	21	SPBU	50.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.15 .	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	PROSENTASE UTTP YANG MONITORING	100	PERSEN	3.06.2.11 .01.15.03 .	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH	SPBU YANG DIAWASI	60	UTTP	
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	PROSENTASE PENINGKATAN JUMLAH EXPORTIR	5	PERSEN	3.06.2.11 .01.16.02 .	FASILITASI PENGEMBANGAN MISI DAGANG	JUMLAH TEMU USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH	1	KALI	150.000.000
5	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIMONITORING TAHUN N	100	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.01 .	PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH	JUMLAH KOMODITI BAHAN POKOK YANG DI AWASI	28	KOMODITI	150.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE ALAT UTTP YANG DITERRA SAH	10,13	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.01 .	PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH				
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIMONITORING TAHUN N	100	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.08 .	PASAR RAKYAT	KOMODITI YANG DIPANTAU	30	KOMODITI	90.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE ALAT UTTP YANG DITERRA SAH	10,13	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.08 .	PASAR RAKYAT				
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIMONITORING TAHUN N	100	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.08 .	PASAR RAKYAT	OPERASI PASAR	2	PASAR	135.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE ALAT UTTP YANG DITERRA SAH	10,13	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.08 .	PASAR RAKYAT				
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG DIMONITORING TAHUN N	100	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.08 .	PASAR RAKYAT	PAKET PASAR MURAH	1000	PAKET	
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.17 .	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PROSENTASE ALAT UTTP YANG DITERRA SAH	10,13	PERSEN	3.06.2.11 .01.17.08 .	PASAR RAKYAT				
6	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.18 .	PROGRAM PENINGKATAN PASAR	PROSENTASE STAND PASAR KABUPATEN YANG DI PELIHARA	5,18	PERSEN	3.06.2.11 .01.18.01 .	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	JUMLAH SENTRA PKL YANG DI PELIHARA			200.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.18 .	PROGRAM PENINGKATAN PASAR	PROSENTASE STAND PASAR KABUPATEN YANG DI PELIHARA	5,18	PERSEN	3.06.2.11 .01.18.01 .	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	JUMLAH SARANA PASAR KABUPATEN YANG DI PELIHARA			1.300.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.18 .	PROGRAM PENINGKATAN PASAR	PROSENTASE STAND PASAR KABUPATEN YANG DI PELIHARA	5,18	PERSEN	3.06.2.11 .01.18.03 .	PENEMPATAN DAN PENATAAN KEMBALI PEDAGANG PASAR	JUMLAH PEDAGANG YANG DI FASILITASI			100.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.06.2.11.01.18 .	PROGRAM PENINGKATAN PASAR	PROSENTASE STAND PASAR KABUPATEN YANG DI PELIHARA	5,18	PERSEN	3.06.2.11 .01.18.04 .	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN NON FORMAL	JUMLAH SENTRA PKL YANG FASILITASI			100.000.000
8	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.15 .	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN				3.07.2.11 .01.15.03 .	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)	KEGIATAN PENYELIDIKAN METROLOGI LEGAL	15	KASUS	25.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENGAMANAN PERDAGANGAN					KEMETROLOGIAN DAERAH				
9	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH	PRESENTASE IMKM YANG DIFASILITASI	17.6 (250)	PERSEN (IMKM)	3.07.2.11 .01.18.01	PEMBINAAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI	JUMLAH IMKM YANG TELAH TERSINKRONISASI DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	60	IMKM	75.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	PRESENTASE IMKM YANG DIFASILITASI	17.6 (250)	PERSEN (IMKM)	3.07.2.11 .01.18.04	PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH	JUMLAH IMKM YANG TELAH TERSINKRONISASI DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	60	IMKM	75.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH	PRESENTASE IMKM YANG DIFASILITASI	17.6 (250)	PERSEN (IMKM)	3.07.2.11 .01.16.01	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI	JUMLAH IMKM YANG MENDAPAT FASILITASI	50	IMKM	100.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH	PRESENTASE IMKM YANG DIFASILITASI	17.6 (250)	PERSEN (IMKM)	3.07.2.11 .01.16.02	PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)	JUMLAH IMKM YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENGAWASAN INDUSTRI	50	IMKM	100.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASI DATA INDUSTRI YANG TERDIGITALISASI DATA INFORMASI PUBLIKNYA	35	PERSEN	3.07.2.11 .01.16.03	VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)	JUMLAH DATA PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN SIINAS	84	DATA	100.000.000
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	3.07.2.11.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH	PROSENTASI DATA INDUSTRI YANG TERDIGITALISASI DATA INFORMASI PUBLIKNYA	35	PERSEN	3.07.2.11 .01.16.05	PENDAMPINGAN SERTIFIKAT MEREK	JUMLAH DATA PERUSAHAAN YANG DIPUBLIKASIKAN DI SIINAS	84	DATA	100.000.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											10.779.526.185
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12 .01.15.00 7	PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI KAB. GRESIK	JUMLAH DIREKTORI PERUSAHAAN	30	BUKU	108.500.000
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12 .01.15.00 7	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	JUMLAH SARANA PRASARANA TI YANG TERPELIHARA	1	PAKET	
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12 .01.15.00 7	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	JUMLAH DATA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERSEDIA	1000	DATA	
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12 .15.012	KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH DRAF KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1	DRAFT PERATURAN	125.000.000
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12 .15.012	KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH DRAF EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	1	DRAFT EVALUASI	125.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12.15.012	KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH DRAF PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	DRAFT PERATURAN	125.000.000
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12.15.012	KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH KAJIAN TENTANG PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/ KOTA	1	KAJIAN	250.000.000
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12.15.012	PENYEDIAAN SARANA DAN BAHAN PROMOSI INVESTASI	JUMLAH BUKU PROFIL PENANAMAN MODAL/INVESTASI	1	PAKET BUKU PROFIL	130.000.000
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12.15.012	PENYEDIAAN SARANA DAN BAHAN PROMOSI INVESTASI	JUMLAH VIDEO PROFIL PENANAMAN MODAL/INVESTASI	2	PAKET VIDEO PROFIL	
	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENINGKATAN JUMLAH INVESTOR	5-10	%	2.12.2.12.01.15.008	PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI	JUMLAH PAMERAN INVESTASI	2	KALI PAMERAN	388.500.000
	Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu	2.12.2.12.01.17	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA, PERIZINAN TERTENTU DAN NONPERIZINAN	JUMLAH IZIN/ REKOMENDASI/ PERSETUJUAN/ SERTIFIKASI/ PENDAFTARAN DAN ATAU IZIN TERNOTIFIKASI	75	%	2.12.2.12.01.17.001	OPERSIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN (USAHA, TERTENTU DAN NON PERIZINAN)	JUMLAH IZIN/REKOMENDASI/PERSETUJUAN/ SERTIFIKASI/ PENDAFTARAN DAN ATAU IZIN TERNOTIFIKASI	1350	NULL	485.650.000
	Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu	2.12.2.12.01.17	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA, PERIZINAN TERTENTU DAN NONPERIZINAN	PROSENTASE PENYELESAIAN IZIN PERIZINAN USAHA, PERIZINAN TERTENTU DAN NON PERIZINAN	75	%	2.12.2.12.01.17.008	OPERSIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN (USAHA, TERTENTU DAN NON PERIZINAN)	JUMLAH FASILITASI PELAYANAN IZIN/REKOMENDASI/ DAN ATAU NOTIFIKASI IZIN	100	NULL	125.000.000
	Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	2.12.2.12.01.18	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PROSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	75	%	2.12.2.12.01.18.001	OPERASIONALISASI PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN.	JUMLAH IZIN/REKOMENDASI YANG TERBIT	2.450	IZIN	682.104.000
	Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	2.12.2.12.01.18	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PROSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	75	%	2.12.2.12.01.18.003	OPERASIONALISASI PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN.	JUMLAH IZIN/REKOMENDASI YANG TERBIT	475	IZIN	117.896.000
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12.01.16.008	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL	40	PERUSAHAAN	90.134.000
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12.01.16.007	PENYUSUNAN EVALUASI DAN FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12.01.16.002	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Bidang Pengendalian	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12.01.16.00	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELAPORAN	800	KEGIATAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Pelaksanaan Penanaman Modal		PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				8	PENGAWASAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	KEGIATAN PENANAMAN MODAL			
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 7	PENYUSUNAN EVALUASI DAN FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 2	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	0,75	%	2.12.2.12 .01.16.00 8	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JUMLAH PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	8	PEMBINAAN	58.628.000
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 7	PENYUSUNAN EVALUASI DAN FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 2	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	0,75	%	2.12.2.12 .01.16.00 8	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	295	PESERTA	
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 7	PENYUSUNAN EVALUASI DAN FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 2	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 8	OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	JUMLAH PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN	134	PERUSAHAAN	139.966.000
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 7	PENYUSUNAN EVALUASI DAN FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN				
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROSENTASE VERIFIKASI IZIN REALISASI INVESTASI	75	%	2.12.2.12 .01.16.00 2	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Sekretariat	2.12.2.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.12.2.12 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH	2	DOKUMEN	115.500.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.12.2.12 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2	DOKUMEN	208.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KINERJA DAN KEUANGAN					KINERJA SKPD				
	Sekretariat	2.12.2.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.12.2.12 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN SKM	10	BUKU	
	Sekretariat	2.12.2.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.12.2.12 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ SEMESTERAN	13	DOKUMEN	70.000.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH SURAT TERKIRIM	875	SURAT	755.180.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG TERBAYAR	3	JASA	703.445.160
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KEAMANAN KANTOR	1	PAKET	436.500.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH JENIS SURAT KABAR DAN BAHAN BACAAN	5	JENIS	9.692.025
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKAN DAN MINUM	211	ORANG	85.200.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	124	KALI	212.391.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11	JENIS	155.745.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KANTOR	26	ORANG	
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH ALAT LISTRIK	9	JENIS	15.225.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.12.2.12 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR	1	PAKET	
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH UNIT PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2 DAN 4	13	UNIT	163.080.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .02.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH JASA PERBAIKAN DAN PERALATAN KERJA	5	JENIS	330.900.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .02.003	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR	56	JENIS	180.635.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA	100	%	2.12.2.12 .02.003	PENGADAAN PERALATAN /	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20	JENIS	2.440.935.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR	PRASARANA APARATUR				PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA				
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH UNIT PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4	1	UNIT	56.680.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .02.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/ RUMAH TANGGA	JUMLAH MACAM PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	9	MACAM PEMELIHARA AN	1.539.300.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .02.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERAWATAN DAN PERBAIKAN MEBELAIR	5	JENIS	38.800.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	100	%	2.12.2.12 .01.05.00 1	PENINGKATAN KUALITAS DM SKPD	JUMLAH PENINGKATAN SDM SKPD	2	PAKET	310.940.000
	Sekretariat	2.12.2.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	100	%	2.12.2.12 .01.06.01 0	PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	JUMLAH LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	10	BUKU	
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											17.033.427.200
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN	19	ORANG	408.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	TERSEDIAANYA JASA SURAT MENYURAT	12	BULAN	460.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN	8	ORANG	65.400.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN & PENGGANDAAN	9	JENIS	78.744.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	12	BULAN	7.020.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAMIN	12	BULAN	100.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	12	BULAN	2.13.2.13 .01.01.00 6	RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	JUMLAH SPPD	82	KALI	265.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4	JENIS	70.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH ATK	76	JENIS	130.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN	PROSENTASE FASILITASI	12	BULAN	2.13.2.13	PENGADAAN PERALATAN	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI	15	JENIS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR			.01.02.00 3	/ PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	LISTRIK			15.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG	27	JENIS	20.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG	9	JENIS	50000000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH GEDUNG YANG TERPELIHARA	1	PAKET	50.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN DINAS / OPRASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG TERPELIHARA	8	KENDARAAN	100.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG YANG TERPELIHARA	4	JENIS	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG YANG TERPELIHARA	3	JENIS	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.07	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH GEDUNG	1	PAKET	150.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIPERBERBAIKI	7	KENDARAAN	48.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12	BULAN	2.13.2.13 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKIAN KERJA LAPANGAN	5	JENIS	50.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00 1	PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN	1	LAPORAN	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN	2	DOKUMEN	20.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00 1	PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI	3	DOKUMEN	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00 1	PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN	3	DOKUMEN	15.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00 5	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	JUMLAH DOKUMEN	6	DOKUMEN	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	JUMLAH LAPORAN	10	LAPORAN	10.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	KINERJA DAN KEUANGAN			5					
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	6	JENIS	2.13.2.13 .01.06.00 5	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	JUMLAH LAPORAN	1	LAPORAN	10.000.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.13.2.13 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PELAKSAAAN SENAM	150	KALI	17.500.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.13.2.13 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	TENAGA KEBERSIHAN	18	ORANG	463.200.000
	SEKRETARIAT	2.13.2.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	2.13.2.13 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	TENAGA ME	5	ORANG	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	1. PROSENTASE ATLLIT BERPRESTASI	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 2	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	JUMLAH PESERTA	60.000	PESERTA	1.200.000.000
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	2. PROSENTASE SARANA PRASARANA OLAH RAGA YANG TERPELIHARA	90	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 2	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	JUMLAH PESERTA	60.000	PESERTA	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	3. JUMLAH PARTISIPAN OLAH RAGA REKREASI	54000	ORANG	2.13.2.13 .01.17.00 2	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	JUMLAH PESERTA	60.000	PESERTA	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	1. PROSENTASE ATLLIT BERPRESTASI	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 3	PENYELENGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	JUMLAH CABANG OLAHRAGA	10	CABOR	2.000.000.000
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	2. PROSENTASE SARANA PRASARANA OLAH RAGA YANG TERPELIHARA	90	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 3	PENYELENGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	JUMLAH CABANG OLAHRAGA	10	CABOR	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	3. JUMLAH PARTISIPAN OLAH RAGA REKREASI	54000	ORANG	2.13.2.13 .01.17.00 3	PENYELENGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	JUMLAH CABANG OLAHRAGA	10	CABOR	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN	1. PROSENTASE ATLLIT BERPRESTASI	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 8	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	JUMLAH PESERTA	500	PESERTA	350.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA									
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	2. PROSENTASE SARANA PRASARANA OLAH RAGA YANG TERPELIHARA	90	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 8	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	JUMLAH PESERTA	500	PESERTA	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	3. JUMLAH PARTISIPAN OLAH RAGA REKREASI	54000	ORANG	2.13.2.13 .01.17.00 8	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	JUMLAH PESERTA	500	PESERTA	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	1. PROSENTASE ATLET BERPRESTASI	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 6	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	40	BANTUAN KEUANGAN	6.474.800.000
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	2. PROSENTASE SARANA PRASARANA OLAH RAGA YANG TERPELIHARA	90	PERSEN						
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	3. JUMLAH PARTISIPAN OLAH RAGA REKREASI	54000	ORANG	2.13.2.13 .01.17.00 6	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	JUMLAH PELAYANAN DI UPT	12	BULAN	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	1. PROSENTASE ATLET BERPRESTASI	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG OLAH RAGA	JUMLAH PELAYANAN DI UPT DENGAN MAKSIMAL	12	BULAN	112.160.000
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	2. PROSENTASE SARANA PRASARANA OLAH RAGA YANG TERPELIHARA	90	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG OLAH RAGA	JUMLAH PELAYANAN DI UPT DENGAN MAKSIMAL	12	BULAN	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANAgedung OLAHRAGA	3. JUMLAH PARTISIPAN OLAH RAGA REKREASI	54000	ORANG	2.13.2.13 .01.17.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG OLAH RAGA	JUMLAH PELAYANAN DI UPT DENGAN MAKSIMAL	12	BULAN	
	OLAHRAGA		PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PROSENTASE PEMELIHARAAN DAN PEMBERDAYAAN UPT	12	BULAN	2.13.2.13 .01.07.06 6	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPT KROMO WIJOJO	JUMLAH PELAYANAN DI UPT DENGAN MAKSIMAL	12	BULAN	785.550.000
	OLAHRAGA		PROGRAM PENGELOLAAN UNIT	PROSENTASE PEMELIHARAAN DAN	12	BULAN	2.13.2.13 .01.07.06	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPT	JUMLAH PELAYANAN DI UPT DENGAN MAKSIMAL	12	BULAN	438.590.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PELAKSANA TEKNIS SKPD	PEMBERDAYAAN UPT			3	WAHANA EKSPRESI POESPONEGORO				
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	1. PROSENTASE ATLET BERPRESTASI	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.01 1	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEOLAH RAGAAN	JUMLAH DATA	18	KECAMATAN	110.000.000
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	2. PROSENTASE SARANA PRASARANA OLAH RAGA YANG TERPELIHARA	90	PERSEN	2.13.2.13 .01.17.01 1	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEOLAH RAGAAN	JUMLAH DATA	18	KECAMATAN	
	OLAHRAGA	2.13.2.13.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN , PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN DAN PENINGKATANSARANA PRASARANA OLAHRAGA	3. JUMLAH PARTISIPAN OLAH RAGA REKREASI	54000	ORANG	2.13.2.13 .01.17.01 1	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEOLAH RAGAAN	JUMLAH DATA	18	KECAMATAN	
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.00 3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN	JUMLAH PESERTA PASKIBRAKA, DIKLAT KEPEMIMPINAN	177	ORANG	745.000.000
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.01 9	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	126	ORANG	260.000.000
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.01 2	PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH KELOMPOK, JUMLAH PESERTA	20	ORANG	490.000.000
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.01 2	PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH KELOMPOK, JUMLAH PESERTA	400	ORANG	
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.00 4	PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR	JUMLAH PESERTA PELOPOR	15	ORANG	224.463.200
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.00 7	PEMBINAAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA MUDA PRODUKTIF	JUMLAH PESERTA PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KEWIRAUSAHAAN	420	ORANG	390.000.000
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.02 6	PELATIHAN KEPRAMUKAAN	JUMLAH KEGIATAN PRAMUKA	1	TAHUN	800.000.000
	BIDANG KEPEMUDAAN	2.13.2.13.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN	PROSENTASE KAPASITAS KEPEMUDAAN	95	PERSEN	2.13.2.13 .01.18.02 6	PELATIHAN KEPRAMUKAAN	JUMLAH PESERTA	400	ORANG	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											8.527.367.675
1	Sekretariat	2.17.2.17.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JML BAHAN CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4	JENIS	32.974.000
2	Sekretariat	2.17.2.17.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN YANG TERSEDIA	13,00	JENIS	13.383.000
3	Sekretariat	2.17.2.17.01.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MIUMAN	JUMLAH MAKANAN YANG TERSEDIA	2.057,00	KOTAK	64.600.000
	Sekretariat	2.17.2.17.01.01	PELAYANAN	PERSENTASE FASILITASI	100	%	2.17.2.17	PENYEDIAAN MAKANAN	JUMLAH MINUM YANG TERSEDIA		MINUM	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH			.01.01.00 5	DAN MIUMAN		617,00		-
4	Sekretariat	2.17.2.17.01.01 .	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEDINASAN	118,00	KALI	209.717.000
7	Sekretariat	2.17.2.17.01.01 .	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA PETUGAS ADMINISTRASI	27,00	ORANG	726.000.000
8	Sekretariat	2.17.2.17.01.01 .	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PEMBIAYAAN KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK	12,00	BULAN	313.300.000
9	Sekretariat	2.17.2.17.01.01 .	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN DAN KEAMANAN	4,00	ORANG	149.330.000
	Sekretariat	2.17.2.17.01.01 .	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAANTUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.17.2.17 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PERALATAN/PERLENGKAPAN KEBERSIHAN	2,00	JENIS	-
11	Sekretariat	2.17.2.17.01.02 .	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.17.2.17 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN KANTOR	2	JENIS	164.857.300
12	Sekretariat	2.17.2.17.01.02 .	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.17.2.17 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR	6	JENIS	1.311.409.875
13	Sekretariat	2.17.2.17.01.02 .	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.17.2.17 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH GEDUNG YANG DIPELIHARA	1	UNIT	56.901.000
14	Sekretariat	2.17.2.17.01.02 .	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.17.2.17 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIPERBAIKI DAN DIPELIHARA	9,00	KENDARAN	125.000.000
15	Sekretariat	2.17.2.17.01.02 .	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.17.2.17 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHRAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	6,00	JENIS	89.175.000
16	Sekretariat	2.17.2.17.01.02 .	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	2.17.2.17 .01.02.01 1	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/KANTOR	JUMLAH DALAM SATU GEDUNG YANG DI RENOVASI	1,00	JENIS	2.500.000.000
17	Sekretariat	2.17.2.17.01.06 .	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.17.2.17 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JML.DOKUMEN LAPORAN PENGENDALIAN DAN DOKUMEN PELAPORAN KINERJA KEUANGAN	7,00	DOKUMEN	20.000.000
18	Sekretariat	2.17.2.17.01.06 .	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.17.2.17 .01.06.00 1	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JML DOKUMEN RENCANA KERJA YANG TERSUSUN	2,00	DOKUMEN	10.110.000
19	Sekretariat	2.17.2.17.01.06 .	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	2.17.2.17 .01.06.00 1	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JML DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TERSUSUN	1,00	DOKUMEN	11.890.000
21	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 4	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	JML.KOLEKSI BUKU DIGITAL	2500	JUDUL/EKS	593.717.000
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN	PROSENTASE	25	%	2.17.2.17	PENYEDIAAN BAHAN	JML.KOLEKSI BUKU DIGITAL	2500	JUDUL/EKS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERPUSTAKAAN YANG DI BINA			.01.15.00 4	PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH				
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 4	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	JUMLAH KOLEKSI BUKU MANUAL	1500	JUDUL/EKS	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 4	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	JUMLAH KOLEKSI BUKU MANUAL	1500	JUDUL/EKS	
22	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH LAYANAN MOBIL PINTAR PERPUSTAKAAN	196	KALI	235.562.000
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH LAYANAN MOBIL PINTAR PERPUSTAKAAN	196	KALI	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PELAYANAN PADA CARFREEDAY	23760	PENGUNJUN G	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PELAYANAN PADA CARFREEDAY	23760	PENGUNJUN G	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PELAYANAN PERPUSTAKAAN REGULER	25740	KUNJUNGAN	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PELAYANAN PERPUSTAKAAN REGULER	25740	KUNJUNGAN	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PELAYANAN PERPUSTAKAAN SABTU MINGGU	2376	ANGGOTA	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PELAYANAN PERPUSTAKAAN SABTU MINGGU	2376	ANGGOTA	
23	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH	46	TITIK	200.000.000
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 5	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH	JUMLAH PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH	46	TITIK	
24	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 3	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH PESERTA YANG DIKOORDINASIKAN	50	ANGGOTA FORUM	233.313.500
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 3	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH PESERTA YANG DIKOORDINASIKAN	50	ANGGOTA FORUM	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 3	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH PESERTA YANG DIKOORDINASIKAN	80	PESERTA	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI	25	%	2.17.2.17 .01.15.00	PELAKSANAAN KOORDINASI	JUMLAH PESERTA YANG DIKOORDINASIKAN	80	PESERTA	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	BINA			3	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN				
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 3	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH PESERTA YANG DIKOORDINASIKAN	100	PENGELOLA	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 3	PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH PESERTA YANG DIKOORDINASIKAN	100	PENGELOLA	
25	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 7	PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING	JML.PESERTA LOMBA STORY TELLING	16	SISWA SD/MI	245.730.000
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 7	PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING	JML.PESERTA LOMBA STORY TELLING	16	SISWA SD/MI	
26	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 8	PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH PESERTA LOMBAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	16	DESA/KELUR AHAN	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 8	PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH PESERTA LOMBAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	16	DESA/KELUR AHAN	
27	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 8	PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAHPERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	16	SD/MI	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 8	PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAHPERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	16	SD/MI	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.00 8	PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH PESERTA LOMBAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	16	SMP/MTS	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.00 8	PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH PESERTA LOMBAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	16	SMP/MTS	
28	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JML PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DI BINA	100	PENGELOLA	149.170.500
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JML PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DI BINA	100	PENGELOLA	
29	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH DESA YANG DI DAMPINGI SERTA PERPUSDES YG TELAH MELAKUKAN TRANSFORMASI	100	DESA	124.161.500
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH DESA YANG DI DAMPINGI SERTA PERPUSDES YG TELAH MELAKUKAN TRANSFORMASI	100	DESA	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH DESA YANG DI DAMPINGI SERTA PERPUSDES YG TELAH MELAKUKAN TRANSFORMASI	22	PENGELOLA	
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	JUMLAH DESA YANG DI DAMPINGI SERTA PERPUSDES YG TELAH MELAKUKAN TRANSFORMASI	22	PENGELOLA	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
30	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PERPUSTAKAAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	SEKOLAH DAN DESA PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI TINGKAT DASAR, KHUSUS DAN MASYARAKAT	150	PESERTA	200.000.000
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI TINGKAT DASAR, KHUSUS DAN MASYARAKAT	150	PESERTA	
31	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PENINGKATAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	42,56	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH NASKAH KUNO YANG DIKEMBANGKAN,DIOLAH, DAN DIALIH MEDIAKAN UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	5	NASKAH KUNO	35.000.000
	Perpustakaan	2.17.2.17.01.15	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA	25	%	2.17.2.17 .01.15.01 1	PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA	JUMLAH NASKAH KUNO YANG DIKEMBANGKAN,DIOLAH, DAN DIALIH MEDIAKAN UNTUK DILESTARIKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	5	NASKAH KUNO	
32	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 1	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	JML PENGADAAN SARANA PENYIMPANAN ARSIP PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH	2150	BOKS	319.333.200
33	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 2	PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	JML.PENCIPTA ARSIP OPD YG MENJADI TARGET PENDATAAN ARSIP	10	OPD	
34	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 3	PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA	JML.ARSIP/DOKUMEN YG DIDUPLIKASI DLM BENTUK INFORMATIKA	10000	LEMBAR	
35	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 4	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH	LUASAN DEPO ARSIP YG DI FUMIGASI DAN JML ARSIP VITAL DESA/KELURAHAN YG TERPELIHARA	600	M2	
	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 4	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH	LUASAN DEPO ARSIP YG DI FUMIGASI DAN JML ARSIP VITAL DESA/KELURAHAN YG TERPELIHARA	722	M	
36	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 5	SOSIALISASI/PENYULUHA N KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA	JML PENCIPTA ARSIP OPD YG MENJADI TARGET OBYEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAN PEMERINTAHAN DESA YAN MENJADI TARGET PENYULUHAN KEARSIPAN	40	DESA	386.790.000
	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 5	SOSIALISASI/PENYULUHA N KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA	JML PENCIPTA ARSIP OPD YG MENJADI TARGET OBYEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAN PEMERINTAHAN DESA YAN MENJADI TARGET PENYULUHAN KEARSIPAN	55	OPD	
37	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 6	LOMBA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH	JUMLAH JUARA LOMBA TERTIB ARSIP PEMERINTAH DAERAH	5	JUARA	
38	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 7	KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	JUMLAH PESERTA WORKSHOP PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN KEARSIPAN	70	ORANG	
39	Kearsipan	2.18.2.17.01.18	PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG DIBINA	50,85	%	2.18.2.17 .01.15.00 8	PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP	JML HASIL REPRO KHASANAH ARSIP	15	BUAH	5.942.800
21	DINAS PERIKANAN											6.517.627.900
1	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.001	PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN	TERSEDIAANYA DATA PERIKANAN TANGKAP	1	DOKUMEN	90.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.006	PERIKANAN TANGKAP INTRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TERSALURNYA PBANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK TERSEDIA NYA PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	3	KELOMPOK	-
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.006	INTRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TERSALURNYA PBANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK TERSEDIA NYA PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	1	PAKET	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.005	PEMBINAAN DAN PELATIHAN TANGKAP	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	200	ORANG	141.922.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.005	PEMBINAAN DAN PELATIHAN TANGKAP	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	5	KELOMPOK	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.004	FASILITASI PERLINDUNGAN NELAYAN	JUMLAH KELOMPOK	10	KELOMPOK	90.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.002	PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS NELAYAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	150	ORANG	137.600.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.002	PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS NELAYAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	4	KELOMPOK	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.011	PEMELIHARAAN TPI	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS	60	ORANG	120.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.011	PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	60	ORANG	147.600.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.011	PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN TEKNIS TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	4	KELOMPOK	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.16.	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP(TON)	21,358	TON	3.01.01.1 6.004	FASILITASI PERLINDUNGAN NELAYAN	JUMLAH KAPAL TEREKISTER	500	UNIT KAPAL PERIKANAN	85.000.000
2	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.004	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA IKAN	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDIDAYA IKAN KECIL PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN	420	ORANG	382.600.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.004	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA IKAN	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDIDAYA IKAN KECIL PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN	35	KELOMPOK	
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.015	INTRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE DAN BIOFLOK	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	300	ORANG	350.246.900
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.001	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	ORANG	50.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	142.622	TON	3.01.01.1 5.011	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA	100	ORANG	225.200.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR					DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.004	OPTIMALISASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BENAR	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN	300	ORANG	372.600.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.004	OPTIMALISASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BENAR	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN	4	KELOMPOK	
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.004	PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT TERSEDIA NYA PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA	100	ORANG	160.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01.3.01.01.15	PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA (TON) A. AIR PAYAU B. AIR TAWAR	142.622	TON	3.01.01.1 5.004	PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN	JUMLAH PESERTA SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT TERSEDIA NYA PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA	10	PAKET	
3	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.005	BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM	26800	BATANG	1.152.800.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.005	BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM	1	DOKUMEN	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.005	BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK	600	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM			
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.005	BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM	2	PAKET	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.005	BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM	1	PAKET	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.011	PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM			
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PROSENTASE LUAS KAWASAN PESISIR YANG DIREHABILITASI:	41	TON	3.01.01.1 8.001	PEMBINAAN,PENGELOLA AN,DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	BIBIT TANAMAN MANGROVE DAN PENANAMAN DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN LAINNYA JUMLAH PESERTA BIMTEK PEMBANGUNAN WALKINGTRACK DAN POS PANTAU MANGROVE UJI ANALISA LABAORATORIUM			
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PRODUKTIVITAS GARAM	6.700	TON	3.01.01.1 8.013	PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT	DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PEMBUDIDAYA IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, JUMLAH PESERTA BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI USAHA GARAM PENGAWASAN WILAYAH PEMBUDIDAYA IKAN	1	DOKUMEN	427.600.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PRODUKTIVITAS GARAM	6.700	TON	3.01.01.1 8.013	PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT	DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PEMBUDIDAYA IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, JUMLAH PESERTA BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI USAHA GARAM PENGAWASAN WILAYAH PEMBUDIDAYA IKAN	480	ORANG	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PRODUKTIVITAS GARAM	6.700	TON	3.01.01.1 8.013	PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT	DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PEMBUDIDAYA IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA,	1	PAKET	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									JUMLAH PESERTA BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI USAHA GARAM PENGAWASAN WILAYAH PEMBUDIDAYA IKAN			
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.18.	PENGLOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL (WP3K)	PRODUKTIVITAS GARAM	6.700	TON	3.01.01.1 8.013	PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT	DOKUMEN PEMETAAN POTENSI PEMBUDIDAYA IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, JUMLAH PESERTA BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI USAHA GARAM PENGAWASAN WILAYAH PEMBUDIDAYA IKAN	4	LOKASI	
4	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.010	PERTEMUAN PELAYANAN USAHA	TERSEDIAANNYA DATA STATISTIK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN TERSEDIAANNYA INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	12	BULAN	180.400.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.010	PERTEMUAN PELAYANAN USAHA	TERSEDIAANNYA DATA STATISTIK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN TERSEDIAANNYA INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	2	PAMERAN	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.003	GEMAR MAKAN IKAN	TERLAKSANANYA BIMBINGAN/PELATIHAN	13	BIMBINGAN/ P ELATIHAN	250.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.004	PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN - PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN KONSUMSI IKAN MASYARAKAT TERSEDIAANNYA PASAR IKAN YANG HIGIENIS	33	KG/KAPITA/T HN	300.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.004	PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN - PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN KONSUMSI IKAN MASYARAKAT TERSEDIAANNYA PASAR IKAN YANG HIGIENIS	2	PASAR	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.004	PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN - PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	TERLAKSANYA PERTEMUAN PENDAMPINGAN USAHA TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	6	B IMBINGAN/P ELATIHAN	150.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.17.	OPTIMALISASI PENGLOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01.01.1 7.004	PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN - PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	TERLAKSANYA PERTEMUAN PENDAMPINGAN USAHA TERSALURNYA BANTUAN HIBAH PADA KELOMPOK	22	KELOMPOK	
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01. 06.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	TERSEDIAANNYA FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN (RENJA, RKA, DPA, RDPPA, DPPA SKPD)	1	PAKET	75.200.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSentase PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01. 06.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	TERSEDIAANNYA FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	12	BULAN	75.200.000
	Kelautan dan	3.01	PROGRAM PELAYANAN	PERSentase PRODUKSI	38	TON	3.01	PENYEDIAAN JASA	TERSEDIAANNYA FASILITASI JASA	12	BULAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Perikanan	.3.01.01.01.	ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN			.3.01.01.01.007	ADMINISTRASI KANTOR	SURAT MENYURAT			55.400.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERSEDIAANYA FASILITASI JASA KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK	12	BULAN	130.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERSEDIAANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR	12	BULAN	73.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	TERSEDIAANYA FASILITASI BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12	BULAN	55.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERSEDIAANYA FASILITASI KOMPONEN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1	PAKET	15.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSEDIAANYA FASILITASI BAHAN BACAAN HARIAN DAN BUKU	12	BULAN	9.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.005	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSEDIAANYA FASILITASI MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT, TAMU SERTA HARIAN	12	BULAN	110.940.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.01.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	TERSEDIAANYA FASILITASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH	12	BULAN	200.400.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH PRASARANA KANTOR YANG DIPELIHARA	1	PAKET	248.919.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.002	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	PEMELIHARAAN KENDARAAN JABATAN	12	BULAN	95.200.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS	12	BULAN	135.200.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	12	BULAN	125.400.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	12	BULAN	85.200.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA FASILITASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1	PAKET	100.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA FASILITASI PERALATAN RUMAH TANGGA	1	PAKET	40.000.000
	Kelautan dan Perikanan	3.01 .3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN YANG DIOLAH DAN DIPASARKAN	38	TON	3.01 .3.01.01.02.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA FASILITASI ALAT TULIS KANTOR	1	PAKET	75.000.000
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											14.552.524.010
1	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100%	PERSEN	3.02.3.02.01.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11	JENIS	195.856.000
2	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100	PERSEN	3.02.3.02.01.01.000	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	JUMLAH JENIS BAHAN BACAAN	4	JENIS	10.200.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI			3	PERUNDANG-UNDANGAN				
3	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH JENIS PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	2	JENIS	190.000.000
4	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH FASILITASI RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH	323	KALI	350.000.000
5	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR	19	ORANG	514.800.000
6	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JENIS FASILITASI KANTOR YANG DIBAYAR	3	JENIS	277.200.000
6	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1	PAKET	79.499.000
6	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN KANTOR	1	PAKET	197.200.000
6	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH SENAM YANG DILAKSANAKAN	48	KALI	16.800.000
6	Sekretariat	3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TENAGA OPERASIONAL KANTOR DAN UPT	21	ORANG	428.400.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN	1	PAKET	85.000.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK YANG DISEDIAKAN	1	PAKET	45.000.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	1	PAKET	170.000.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	1	PAKET	131.000.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2	UNIT	330.000.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	59.000.000
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	22.666.755
7	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN MEBELEUR	1	PAKET	151.200.000
8	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	1	PAKET	139.000.000
8	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	1	PAKET	125.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
8	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	1	PAKET	100.000.000
8	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH GEDUNG KANTOR YANG DIREHABILITASI	1	PAKET	429.600.000
9	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH MOBIL JABATAN YANG DIPELIHARA	2	UNIT	130.000.000
9	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL JABATAN YANG DIPELIHARA	10	UNIT	22.850.000
9	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH MOBIL JABATAN YANG DIREHABILITASI	2	UNIT	75.000.000
9	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIREHABILITASI	10	UNIT	22.150.000
10	Sekretariat	3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI	100	PERSEN	3.02.3.02.01.02.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN YANG TERPELIHARA	13	UNIT	65.000.000
11	Sekretariat	3.02.3.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	3.02.3.02.01.06.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12	BULAN	
11	Sekretariat	3.02.3.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	3.02.3.02.01.06.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JMLAH DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	6	LAPORAN	50.000.000
12	Sekretariat	3.02.3.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	3.02.3.02.01.06.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA DAN RENJA SKPD	4	DOKUMEN	25.000.000
12	Sekretariat	3.02.3.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	3.02.3.02.01.06.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	3	DOKUMEN	100.000.000
13	Sekretariat	3.02.3.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	3.02.3.02.01.06.008	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEGIATAN SKPD	4	LAPORAN	18.148.455
14	Sekretariat	3.02.3.02.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA YANG DIKELOLA	100	PERSEN	3.02.3.02.01.07.061	UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI	JUMLAH KAWASAN PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN	12	BULAN	63.774.600
15	Sekretariat	3.02.3.02.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA YANG DIKELOLA	100	PERSEN	3.02.3.02.01.07.062	OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WISATA MAULANA MALIK IBRAHIM	JUMLAH KAWASAN PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN	12	BULAN	107.393.600
16	Sekretariat	3.02.3.02.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA YANG DIKELOLA	100	PERSEN	3.02.3.02.01.07.064	OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BAWEAN	JUMLAH KAWASAN PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN	12	BULAN	87.181.600

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			SKPD									
17	Pemasaran Pariwisata	3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATA (MANCANEGERA DAN DALAM NEGERI)	5.274 DAN 3.561.273	KUNJUNGA N	3.02.3.02 .01.15.00 1	PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI PARIWISATA	6	MEDIA	1.110.000.000
18	Pemasaran Pariwisata	3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATA (MANCANEGERA DAN DALAM NEGERI) 5.274 DAN 3.561.273	3566547	KUNJUNGA N	3.02.3.02 .01.15.00 3	PROMOSI POTENSI WISATA	JUMLAHFASILITASI KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	3	KEGIATAN	410.000.000
19	Pemasaran Pariwisata	3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATA (MANCANEGERA DAN DALAM NEGERI) 5.274 DAN 3.561.273	3566547	KUNJUNGA N	3.02.3.02 .01.15.00 6	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI POTENSI WISATA	JUMLAH JARINGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	3	PAKET	435.000.000
20	Pemasaran Pariwisata	3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATA (MANCANEGERA DAN DALAM NEGERI) 5.274 DAN 3.561.273	3566547	KUNJUNGA N	3.02.3.02 .01.15.00 7	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	TERWUJUDNYA PEMUTAKHIRAN DATA KUNJUNGAN WISATA DAN ANALISA PASAR PARIWISATA	2	DOKUMEN	90.000.000
21	Destinasi Pariwisata	3.02.3.02.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE DESTINASI WISATA YANG DIKEMBANGKAN	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.16.00 1	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA	JUMLAH FASILITASI PEMENUHAN SARANA PRASARANA PENUNJANG PARIWISATA DI KABUPATEN GRESIK	8	PAKET	1.315.000.000
21	Destinasi Pariwisata	3.02.3.02.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE DESTINASI WISATA YANG DIKEMBANGKAN	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.16.00 1	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN YANG DILAKSANAKAN	19	BANTUAN KEUANGAN	-
22	Destinasi Pariwisata	3.02.3.02.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN	56	PERSEN	3.02.3.02 .01.16.00 2	PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA	JUMLAH SDM YANG MEMPEROLEH PELATIHAN	100	ORANG	500.000.000
23	Destinasi Pariwisata	3.02.3.02.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE DAYA TARIK WISATA YANG DIKEMBANGKAN	100	PERSEN	3.02.3.02 .01.16.00 3	PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA	FASILITASI DAYA TARIK WISATA ATAU DESTINASI WISATA YANG DIKEMBANGKAN	3	ODTW	695.000.000
24	Destinasi Pariwisata	3.02.3.02.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN	56	PERSEN	3.02.3.02 .01.17.00 2	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA (DAK)	JUMLAH SDM YANG MEMPEROLEH PELATIHAN	280	ORANG	928.604.000
25	Destinasi Pariwisata	3.02.3.02.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN	56	PERSEN	3.02.3.02 .01.17.00 4	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	JUMLAH DUTA WISATA YANG TERPILIH DAN PEMBERDAYAAN SDM PARIWISATA	2	KEGIATAN	800.000.000
26	Kebudayaan	2.16.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERKELOLANYA OBJEK KEBUDAYAAN DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.15.00 1	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	JUMLAH OBJEK KEBUDAYAAN YANG DILESTARIKAN	4	OBJEK	800.000.000
26	Kebudayaan	2.16.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERKELOLANYA OBJEK KEBUDAYAAN DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.15.00 1	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA KEBUDAYAAN YANG DIBINA	100	ORANG	75.000.000
26	Kebudayaan	2.16.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERLESTARIANNYA KESENIAN TRADISIONAL	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.15.00 1	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	JUMLAH PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	3	OBJEK	225.000.000
26	Kebudayaan	2.16.3.02.01.15	PROGRAM	PERSENTASE	100	PERSEN	2.16.3.02	PELESTARIAN DAN	JUMLAH HIBAH YANG	18	HIBAH	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
		.	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	TERLESTARIKANNYA KESENIAN TRADISIONAL			.01.15.00 1	AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	DILAKSANAKAN			-
26	Kebudayaan	2.16.3.02.01.15 .	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERLESTARIKANNYA KESENIAN TRADISIONAL	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.15.00 1	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	JUMLAH PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	10	ORANG	50.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERBINANYA SEJARAH LOKAL DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH SEJARAWAN DAN PEMERHATI SEJARAH TERBEDAYAKAN	3	KOMUNITAS	30.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERBINANYA SEJARAH LOKAL DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH JUDUL BUKU PEMBINAAN KESEJARAHAN	1	BUKU	100.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERBINANYA SEJARAH LOKAL DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH SARANA INFORMASI ELEKTRONIK KESEJARAHAN	1	MEDIA	100.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH POTENSI CAGAR BUDAYA TEREGISTRASI	10	POTENSI CB	300.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH KAJIAN CAGAR BUDAYA	2	CB	150.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH TENAGA PENDAFTAR DAN AHLI CAGAR BUDAYA	3	ORANG	75.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERMANFAATKANNYA CAGAR BUDAYA DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH CAGAR BUDAYA TERFASILITASI INFORMASI DAN PROMOSI	5	CB	50.000.000
27	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16 .	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE TERMANFAATKANNYA CAGAR BUDAYA DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 1	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM, DAN PENINGGALAN BAWAH AIR	JUMLAH CAGAR BUDAYA TEREVITALISASI	2	CB	300.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								DAN PENINGGALAN BAWAH AIR				
28	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN KESENIAN DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 2	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL YANG DIBINA	100	ORANG	75.000.000
28	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN KESENIAN DAERAH	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 2	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	JUMLAH LEMBAGA KESENIAN YANG DIBINA	5	LEMBAGA	850.000.000
29	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DI FASILITASI	100%		2.16.3.02 .01.16.00 4	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH YANG DIADAKAN			-
30	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE PAMERAN KOLEKSI MUSEUM	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 5	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	JUMLAH KOLEKSI MUSEUM TERPAMERKAN	150	KOLEKSI	150.000.000
30	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE PAMERAN KOLEKSI MUSEUM	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 5	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	JUMLAH SDM PERMUSEUMAN BERSERTIFIKAT	2	ORANG	25.000.000
30	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE PAMERAN KOLEKSI MUSEUM	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 5	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	JUMLAH SARANA INFORMASI MUSEUM	3000	EKS	25.000.000
30	Kebudayaan	2.16.3.02.01.16	PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA	PERSENTASE PAMERAN KOLEKSI MUSEUM	100	PERSEN	2.16.3.02 .01.16.00 5	PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	JUMLAH SARANA PAMER MUSEUM	10	UNIT	75.000.000
23	DINAS PERTANIAN											18.602.326.620
1	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	PERSENTASE KELOMPOK TANI DENGAN KLASIFIKASI UTAMA SESUAI PERMENTAN NO 82 TAHUN 2013 (%)	0,63	PERSEN	3.03.3.03 .01.15.01	MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN	JUMLAH PESERTA PERTEMUAN PUAP	278	GAPOKTAN	50.280.000
2	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	PERSENTASE KELOMPOK TANI DENGAN KLASIFIKASI UTAMA SESUAI PERMENTAN NO 82 TAHUN 2013 (%)	0,63	PERSEN	3.03.3.03 .01.15.14	PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK	JUMLAH E-RDCK TINGKAT DESA	278	GAPOKTAN	149.162.000
2	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	PERSENTASE KELOMPOK TANI DENGAN KLASIFIKASI UTAMA SESUAI PERMENTAN NO 82 TAHUN 2013 (%)	0,63	PERSEN	3.03.3.03 .01.15.14	PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS	6	KELAS	
3	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	PERSENTASE KELOMPOK TANI DENGAN KLASIFIKASI UTAMA SESUAI PERMENTAN NO 82 TAHUN 2013 (%)	0,63	PERSEN	3.03.3.03 .01.15.23	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH MEDIA PENYULUHAN YANG DI BUAT	6	BUKU	88.698.000
3	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	PERSENTASE KELOMPOK TANI DENGAN KLASIFIKASI UTAMA SESUAI PERMENTAN NO 82 TAHUN 2013 (%)	0,63	PERSEN	3.03.3.03 .01.15.23	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH MEDIA PENYULUHAN YANG DI BUAT	1500	LEMBAR	
4	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN LAPANGAN	PERSENTASE PENYULUH BERSERTIFIKAT (%)	68,18	PERSEN	3.03.3.03 .01.20.01	PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	JUMLAH PELAKSANAAN PENILAIAN KELAS	16	KECAMATAN	233.600.000
4	Bidang Usaha Tani	3.03.3.03.01.20	PROGRAM	PERSENTASE PENYULUH	68,18	PERSEN	3.03.3.03	PENINGKATAN KAPASITAS	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	66	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	dan Penyuluhan		PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN LAPANGAN	BERSERTIFIKAT (%)			.01.20.01	TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PENINGKATAN KAPASITAS			
6	Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan	3.03.3.03.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN LAPANGAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.20.06	PEMBANGUNAN/PERBAIK AN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DI KECAMATAN DAN	JUMLAH BPP YANG DIFASILITASI	3	PAKET	1.226.362.000
7	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.01	PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN PENGENDALIAN BANTUAN JALAN USAHA TANI (JUT)	JUMLAH KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DAK BIDANG PERTANIAN (PRASARANA PERTANIAN)	3	KALI	186.108.000
8	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.02	PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN PENGENDALIAN BANTUAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN (JIP)	JUMLAH PEMBINAAN KELOMPOK HIPPA	25	KELOMPOK	
9	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.05	PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR	JUMLAH PENERIMA BK	44	DESA	
9	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.05	PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR	JUMLAH PENERIMA HIBAH	2	KELOMPOK	
9	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.05	PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR	JUMLAH PESERTA KOORDINASI DAN SINGKRONISASI BANTUAN KEUANGAN PRASARANA LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN	240	ORANG	
10	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.08	AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	JUMLAH PETA DELINIASI PEMILIK LP2B KAB. GRESIK	1	PAKET	149.600.000
10	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.08	AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	JUMLAH INSENTIF YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK TANI	13	PAKET	963.000.000
11	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.03	PEMBANGUNAN/PERBAIK AN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIR TANAH (DANGKAL/DALAM)/EMB UNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)	JUMLAH PENERIMA BANTUAN	11	KELOMPOK	3.544.440.000
11	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.03	PEMBANGUNAN/PERBAIK AN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIR TANAH (DANGKAL/DALAM)/EMB UNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)	JUMLAH PRASANANA YANG DIFASILITASI	1	PAKET	
12	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.03	PEMBANGUNAN/PERBAIK AN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIR TANAH	JUMLAH EMBUNG YG DIBANGUN	2	PAKET	239.400.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	DALAM KONDISI BAIK (%)				(DANGKAL/DALAM)/EMB UNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)				
12	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.03	PEMBANGUNAN/PERBAIK AN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIR TANAH (DANGKAL/DALAM)/EMB UNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)	JUMLAH DAM PARIT YG DIBANGUN	1	PAKET	119.700.000
13	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNA N/PETERNAKAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.21.03	PEMBANGUNAN/PERBAIK AN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIR TANAH (DANGKAL/DALAM)/EMB UNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)	JUMLAH PRASANANA YANG DIFASILITASI	1	PAKET	-
16	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.17.01	GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	JUMLAH PENERIMA HIBAH	6	KELOMPOK	55.000.000
16	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.17.01	GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	JUMLAH PESERTA PHT	675	ORANG	
17	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.17.01	GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	JUMLAH PESERTA SL IKLIM	300	ORANG	65.000.000
18	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.17.01	GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	JUMLAH PENGADAAN BENIH PUPUK ORGANIK	9,1	TON	53.453.400
18	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.17.01	GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	JUMLAH PENGADAAN BENIH PUPUK ORGANIK	36,4	TON	
19	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA	JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	681102	TON	3.03.3.03 .01.18.01 7	SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (GPPTT)	JUMLAH ALAT MESIN PERTANIAN	1	PAKET	346.293.800
19	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA	JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	681102	TON	3.03.3.03 .01.18.01 7	SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (GPPTT)	JUMLAH PENERIMA HIBAH	2	KELOMPOK	
19	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA	JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	681102	TON	3.03.3.03 .01.18.01 7	SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (GPPTT)	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	170	ORANG	
20	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.03.3.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	681102	TON	3.03.3.03 .01.19.02 1	PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA	JUMLAH HIBAH	2	KELOMPOK	203.845.600
20	Bidang Tanaman	3.03.3.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN	JUMLAH PRODUKSI	681102	TON	3.03.3.03	PENINGKATAN PRODUKSI	JUMLAH PENGADAAN BIBIT BUAH	2	PAKET	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Pangan dan Hortikultura		PRODUKSI PERKEBUNAN	KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			.01.19.02 1	DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA	DAN SAYUR			
22	Bidang Perkebunan	3.03.3.03.01.24	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.24.03	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) PERKEBUNAN	JUMLAH ALAT DAN BAHAN PEST CONTROL	5	PAKET	793.375.400
22	Bidang Perkebunan	3.03.3.03.01.24	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.24.03	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) PERKEBUNAN	JUMLAH PESERTA SL-TANAMAN TEMBAKAU, JUMLAH PESERTA PERTEMUAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN	360	ORANG	
22	Bidang Perkebunan	3.03.3.03.01.24	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.24.03	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) PERKEBUNAN	JUMLAH PESERTA WORKSHOP MITIGASI DAN KONSERVASI	225	ORANG	
22	Bidang Perkebunan	3.03.3.03.01.24	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	PERSENTASE PENANGANAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA YANG TERSERANG HAMA DAN PENYAKIT	81	PERSEN	3.03.3.03 .01.24.03	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) PERKEBUNAN	LUAS DEMPLOT TANAMAN TEBU	1	LOKASI	
26	Bidang Pangan	2.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (TON GKG)	6	KELOMPOK	2.03.3.03 .01.15.04	PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	JUMLAH PESERTA KOORDINASI	41	KELOMPOK LUMBUNG	54.676.000
27	Bidang Pangan	2.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN	JUMLAH BUKU PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	6	KELOMPOK	2.03.3.03 .01.15.04	PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	JUMLAH BUKU PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	1	BUKU	63.524.000
28	Bidang Pangan	2.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (TON GKG)	5	MACAM	2.03.3.03 .01.15.07	PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	JUMLAH KEGIATAN YANG DIKUTI DALAM RANGKA HARI PANGAN SEDUNIA	5	MACAM	250.715.000
29	Bidang Pangan	2.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (TON GKG)	5	MACAM	2.03.3.03 .01.15.07	PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	JUMLAH SERTFIKASI PANGAN SEGAR YANG AMAN DIKONSUMSI	6	PAKET	30.000.000
30	Bidang Pangan	2.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (TON GKG)	6	KALI	2.03.3.03 .01.15.08	PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH POKTAN YANG BERPERAN SEBAGAI LUPN	12	KELOMPOK	93.600.000
31	Bidang Pangan	3.03.3.03.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN/PETERNAKAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA (TON GKG)	6	KALI	3.03.3.03 .01.16.02	LOMBA DAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN UNGGULAN DAERAH	JUMLAH RMU YANG DI BINA /DIBERDAYAKAN	50	UNIT	78.698.000
32	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	JUMLAH OBAT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	11	JENIS	3.03.3.03 .01.22.01	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	JUMLAH PERALATAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK	8	JENIS	242.000.000
32	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	JUMLAH PERALATAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK	8	JENIS	3.03.3.03 .01.22.01	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	JUMLAH OBAT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	11	JENIS	
33	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	JUMLAH HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAHAN ASAL HEWAN	48	SAMPEL	3.03.3.03 .01.22.02	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAHAN ASAL HEWAN	64	SAMPEL	146.100.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
33	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	JUMLAH OBAT-OBATAN UNTUK KESEHATAN TERNAK	5	JENIS	3.03.3.03 .01.22.02	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH OBAT-OBATAN UNTUK KESEHATAN TERNAK	8	JENIS	
35	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	100	ORANG	3.03.3.03 .01.23.01	PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	JUMLAH PENERIMA HIBAH PETERNAKAN	118	KELOMPOK	262.000.000
35	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	JUMLAH SARANA PEMBIBITAN DAN TERNAK YANG DIHIBAHKAN	0	PAKET	3.03.3.03 .01.23.01	PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	100	ORANG	
35	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	JUMLAH SARANA PEMBIBITAN DAN TERNAK YANG DIHIBAHKAN	0	PAKET	3.03.3.03 .01.23.01	PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	JUMLAH SARANA PEMBIBITAN DAN TERNAK YANG DIHIBAHKAN	1	PAKET	
36	Bidang Peternakan	3.03.3.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	200	ORANG	3.03.3.03 .01.23.07	PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOLAHAN HASIL TERNAK	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	200	ORANG	100.000.000
37	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH BARANG CETAKAN YANG DIADAKAN,JUMLAH PENGGGANDAAN	5	JENIS	3.03.3.03 .01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN YANG DIADAKAN, JUMLAH PENGGGANDAAN	5	JENIS	66.000.000
37	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH BARANG CETAKAN YANG DIADAKAN,JUMLAH PENGGGANDAAN	15000	LEMBAR	3.03.3.03 .01.01.02	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN YANG DIADAKAN,JUMLAH PENGGGANDAAN	15000	LEMBAR	
38	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH BAHAN BACAAN YANG DIADAKAN	5	JENIS	3.03.3.03 .01.01.03	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN YANG DIADAKAN	3	JENIS	15.840.000
39	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH TERSEDIA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN,JUMLAH RAPAT/KEGIATAN RUTIN YANG TERSEDIA MAMIN	26	KALI	3.03.3.03 .01.01.05	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH RAPAT/KEGIATAN RUTIN YANG TERSEDIA MAMIN	26	KALI	130.000.000
39	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH TERSEDIA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN,JUMLAH RAPAT/KEGIATAN RUTIN YANG TERSEDIA MAMIN	560	AIR GALON	3.03.3.03 .01.01.05	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH TERSEDIA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN (AIR GALON)	560	GALON	
39	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH TERSEDIA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN,JUMLAH RAPAT/KEGIATAN RUTIN YANG TERSEDIA MAMIN	240	AIR KEMASAN	3.03.3.03 .01.01.05	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH TERSEDIA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN (AIR KEMASAN)	240	DUS	
40	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH PEGAWAI YANG DAPAT MELAKSANAKAN KOOORDINASI DAN KONSULTASI	35	ORANG	3.03.3.03 .01.01.06	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PEGAWAI YANG DAPAT MELAKSANAKAN KOOORDINASI DAN KONSULTASI	35	ORANG	288.295.000
41	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH PEJABAT PENGADAAN DAN PPHP	14	ORANG	3.03.3.03 .01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR	75	ORANG	2.016.000.000
42	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH PEMBAYARAN REKENING TELEPON, AIR, LISTRIK DAN RETRIBUSI SAMPAH	4	JENIS	3.03.3.03 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PEMBAYARAN REKENING TELEPON, AIR, LISTRIK DAN RETRIBUSI SAMPAH	4	JENIS	198.720.000
43	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN	8	ORANG	3.03.3.03 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TENAGA JASA PERAWATAN TAMAN	2	ORANG	412.840.000
43	Sekretariat	3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN	8	ORANG	3.03.3.03 .01.01.08	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN	8	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
44	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH ATK YANG DIADAKAN	64 JENIS	JENIS	3.03.3.03 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH ATK YANG DIADAKAN	64	JENIS	132.070.000
45	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH ALAT KEBERSIHAN YANG DIADAKAN	36 JENIS	JENIS	3.03.3.03 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT KEBERSIHAN YANG DIADAKAN	36	JENIS	791.936.000
45	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK YANG DIADAKAN	13 JENIS	JENIS	3.03.3.03 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK YANG DIADAKAN	13	JENIS	
45	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG DIADAKAN	6 JENIS	JENIS	3.03.3.03 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK	1	PAKET	
45	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK	1 PAKET	PAKET	3.03.3.03 .01.02.03	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG DIADAKAN	6	JENIS	
46	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS	1 PAKET	PAKET	3.03.3.03 .01.02.05	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KANTOR/ GEDUNG/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS	3	JENIS	180.000.000
47	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG MENDAPAT PERAWATAN RUTIN	16	UNIT MOBIL	3.03.3.03 .01.02.06	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG MENDAPAT PERAWATAN RUTIN	2	MOBIL	64.096.000
47	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG MENDAPAT PERAWATAN RUTIN	16	UNIT MOBIL	3.03.3.03 .01.02.06	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG MENDAPAT PERAWATAN RUTIN	12	MOBIL	237.760.000
48	Sekretariat	3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI	4	UNIT MESIN KETIK	3.03.3.03 .01.02.07	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KERJA YANG DIPERBAIKI	4	JENIS	174.150.000
49	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN YANG DICETAK	10	BUKU	3.03.3.03 .01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN KEUANGAN SEMESTER YANG DICETAK	10	BUKU	9.985.000
50	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN YANG DICETAK	10	BUKU	3.03.3.03 .01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	10	BUKU	4.235.000
51	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN YANG DICETAK	10	BUKU	3.03.3.03 .01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN YANG DICETAK	10	BUKU	6.740.000
52	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN RENJA YANG DICETAK	30	BUKU	3.03.3.03 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN DPA YANG DICETAK	20	BUKU	40.628.530
52	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN RKA YANG DICETAK	5	BUKU	3.03.3.03 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN DPPA YANG DICETAK	20	BUKU	
52	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	JUMLAH DOKUMEN DPA YANG DICETAK	20	BUKU	3.03.3.03 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN RENJA YANG DICETAK	30	BUKU	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KINERJA DAN KEUANGAN									
52	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN DPPA YANG DICETAK	20	BUKU	3.03.3.03 .01.06.03	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN RKA YANG DICETAK	5	BUKU	
53	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN PROFIL DATA SKPD YANG DICETAK	50	BUKU	3.03.3.03 .01.06.05	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI PERANGKAT DAERAH	50	BUKU	63.677.800
54	Sekretariat	3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	JUMLAH BUKU PROFIL DATA PERTANIAN YANG DICETAK	20	BUKU	3.03.3.03 .01.06.06	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	JUMLAH BUKU PROFIL DATA PERTANIAN YANG DI CETAK	20	BUKU	47.420.000
55	Sekretariat	3.03.3.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	JUMLAH OBAT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	11	JENIS	3.03.3.03 .01.07.10 2	PENGLOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN BALONGPANGGANG	JUMLAH OBAT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	11	JENIS	50.000.000
56	Sekretariat	3.03.3.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	JUMLAH OBAT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	11	JENIS	3.03.3.03 .01.07.10 2	PENGLOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN PANCENG	JUMLAH OBAT PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	11	JENIS	44.000.000
58	Sekretariat	3.03.3.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.07.10 3	PENGLOLAAN UPT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI KECAMATAN PANCENG	JUMLAH PENINGKATAN KUALITAS SAPI	70	EKOR	522.714.820
59	Sekretariat	3.03.3.03.01.07	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERTANIAN DALAM KONDISI BAIK (%)	28,89	PERSEN	3.03.3.03 .01.07.10 4	PENGLOLAAN UPT TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI KECAMATAN PANCENG	JUMLAH PRASANANA YANG DIFASILITASI	1	PAKET	3.316.587.270
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH											12.316.573.861
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10	JENIS	26.500.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	JUMLAH KETERSEDIAAN BAHAN BACAAN DAN BUKU PERUNDANGAN	6	JENIS	31.400.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN	100	%	186.604.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE FASILITASI RAPAT KOORDINASI, PERJALANAN DINAS LUAR DAN DALAM DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN	100	%	459.447.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA JASA ADMINISTRASI YANG DIFASILITASI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN	12	ORANG	343.200.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH REKENING KOMUNIKASI YANG DIFASILITASI	2	JENIS	36.000.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.02.4.02 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR	1	ORANG	18.000.000
	Sekretariat	4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN	PERSENTASE FASILITASI	100	%	4.02.4.02	PENYEDIAAN JASA	JUMLAH KETERSEDIAAN	21	JENIS	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH			.01.01.00 8	OPERASIONAL KANTOR	PERALATAN KERJA			20.000.000
	Sekretariat	4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.02.4.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA				
	Sekretariat	4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.02.4.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50	JENIS	100.000.000
	Sekretariat	4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.02.4.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH KETERSEDIAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	100	JENIS	150.000.000
	Sekretariat	4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.02.4.02 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PC DEKSTOP/ NOTEBOOK	20	UNIT	124.628.000
	Sekretariat	4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.02.4.02 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA	18	KENDARAAM	180.000.000
	Sekretariat	4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.02.4.02 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN KANTOR YANG DIPELIHARA	10	JENIS	164.800.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.00 4.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	JUMLAH DOKUMEN LKPJ A.T.A 2020	1	DOKUMEN	256.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.00 4.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	RAPAT TEKNIS PENGUMPULAN DATA LKPJ	6	RAPAT	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.00 4.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	PUBLIKASI BUKU LKPJ	150	EKSEMPLAR	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.00 4.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	PENYUSUNAN INFOGRAFIS LKPJ	1	SELURUH SASARAN RKPD	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.00 4.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	ASISTENSI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN LKPJ	3	ASISTENSI	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN RANWAL RKPD	1	DOKUMEN	820.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN RKPD	1	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD	1	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENETAPAN DOKUMEN RKPD	1	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PESERTA PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	100	ORANG	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NARASUMBER PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	3	NARASUMBE R	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PELAKSANAAN ORIENTASI RKPD	4	TRIWULAN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN RANWAL RPJMD	1	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN RPJMD	1	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PESERTA PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RPJMD	100	ORANG	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NARASUMBER PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RPJMD	3	NARASUMBE R	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RPJMD	120	ORANG	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RPJMD	4	NARASUMBE R	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PEMBAHASAN RANPERDA RPJMD	1	BULAN KE-5	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PELAKSANAAN ORIENTASI RPJMD	6	BULAN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENGEMBANGAN PUBLIKASI DATA PEMBANGUNAN DIGITAL	1	WEBSITE	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PESERTA MUSRENBANG	350	OT=RANG	200.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PUBLIKASI MATERI MUSRENBANG	350	EKSEMPLAR	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERLENGKAPAN MUSRENBANG	350	ORANG	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ASISTENSI PELAKSANAAN FORUM OPD	48	OPD	24.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PELAKSANAAN SINKRONISASI POKOK PIKIRAN DPRD	4	NARASUMBE R	420.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 7.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PELAKSANAAN SINKRONISASI POKOK PIKIRAN DPRD	120	ORANG	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.01 8.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	ASISTENSI PELAKSANAAN MONEV SPM	6	URUSAN WAJIB	50.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD DENGAN NILAI MINIMAL 76%	95	%	4.02.4.02 .01.15.01 8.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	ASISTENSI PELAKSANAAN MONEV OPD	48	OPD	100.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 9.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN RENJA BAPPEDA YANG DISUSUN	1	DOKUMEN RENJA	150.000.000
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 9.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA BAPPEDA YANG DISUSUN	1	DOKUMEN RENSTRA	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 9.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN RENJA BAPPEDA	3	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 9.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENJA BAPPEDA	6	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.01 9.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN AKIP YANG DISUSUN	2	DOKUMEN	
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN	PERSENTASE PELAKSANAAN	100	%	4.02.4.02 .01.15.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN	JUMLAH DOKUMEN PPD YANG DISUSUN	1	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMBANGUNAN DAERAH	MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS			9.	PELAPORAN PERANGKAT DAERAH				
	Sekretariat	4.02.01.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PELAKSANAAN MUSRENBANG/FORUM SKPD SESUAI PETUNJUK TEKNIS	100	%	4.02.4.02 .01.15.02 0.	KOORDINASI , FASILITASI DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGIS, PRIORITAS, DAN LINTAS SEKTORAL	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN LINTAS SEKTORAL	1	PAKET	985.000.000
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 7.	FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS NIK	JUMLAH OPD YANG DIFASILITASI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN	20	OPD	250.000.000
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 7.	FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS NIK	TERSEDIAANYA DATA SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS NIK	7	DATA	
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 0.	KOORDINASI PELAKSANAAN RAD BIDANG PEMERINTAHAN	LAPORAN CAPAIAN RAD BELA NEGARA DAN RANHAM KAB.GRESIK	2	DOKUMEN	75.000.000
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 5.	KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	JUMLAH PESERTA RAPAT KIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	140	ORANG	200.000.000
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 6.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENTAL DAN BUDAYA	DOKUMEN STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENTAL DAN BUDAYA	1	DOKUMEN	175.000.000
1	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 2.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	JUMLAH OPD YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK	11	OPD	300.000.000
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.01 5.	FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK	JUMLAH SKPD YANG MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS RESPONSIF GENDER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN ANAK	57	OPD	
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.01 5.	FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK	JUMLAH DESA YANG MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS RESPONSIF GENDER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN ANAK	20	DESA	
	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02 4	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESRA	DOKUMEN STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026)	1	DOKUMEN	200.000.000
	Bidang Sosial Budaya dan	4.02.4.02.01.17 .	PROGRAM PERENCANAAN	PERSENTASE KESELARASAN	100	%	4.02.4.02 .01.17.02	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN	LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1	DOKUMEN	150.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Pemerintahan		PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN			4	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	DAERAH (LP2KD) KABUPATEN GRESIK			
1	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 3.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	JUMLAH RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN	2	OPD	100.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 3.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN	1	DOKUMEN	350.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 3.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	JUMLAH LAPORAN MONEV BIDANG PEREKONOMIAN	2	OPD	100.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 4.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN	JUMLAH RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	2	OPD	100.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 4.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	2	DOKUMEN	100.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 4.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN	JUMLAH LAPORAN MONEV BIDANG SUMBER DAYA ALAM	2	OPD	100.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 5.	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	JUMLAH OPD YANG DIKOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHNYA	2	OPD	100.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 7.	KOORDINASI, INTERGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	JUMLAH SISTEM INFORMASI SISTEM DATA BASE BIDANG EKONOMI (SIEKO)	1	SISTEM APLIKASI	485.000.000
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.02 7.	KOORDINASI, INTERGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, PENDANAAN	FASILITASI PELAKSANAAN CSR	1	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMBANGUNAN DAN INVESTASI					DAN INVESTASI				
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.027.	KOORDINASI, INTERGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	ANALISA KELAYAKAN BUMDES	1	DOKUMEN	
	BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	4.02.4.02.01.16	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI	100	%	4.02.4.02.01.16.027.	KOORDINASI, INTERGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN MONEV DAN INFORMASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG EKONOMI KREATIF	1	DOKUMEN	100.000.000
1	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.004.	FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	JUMLAH KOORDINASI, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DOKUMEN RENCANA SEKTORAL, RENSTRA DAN RENJA PD BIDANG KEBINAMARGAAN DAN PERHUBUNGAN	2	PD	150.000.000
2	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.007.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	JUMLAH DOKUMEN STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEBINAMARGAAN DAN PERHUBUNGAN	2	DOKUMEN	700.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.007.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	JUMLAH LAPORAN SEKTORAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAPORAN MONEV PD RUMPUN BIDANG KEBINAMARGAAN DAN PERHUBUNGAN	2	PD	100.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.005.	KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH KOORDINASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN RENCANA SEKTORAL, RENSTRA DAN RENJA PD BIDANG SUMBERDAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	PD	100.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.006.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	3	DOKUMEN	800.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.006.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH LAPORAN SEKTORAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAPORAN MONEV PD RUMPUN BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	1	DOKUMEN	100.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR	100	%	4.02.4.02.01.21.006.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH LAPORAN SEKTORAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAPORAN MONEV PD RUMPUN BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	PD	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				DAN LINGKUNGAN HIDUP								
4	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.001.	FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH	JUMLAH KOORDINASI, VERFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN RENCANA SEKTORAL, RENSTRA DAN RENJA PD BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	2	TIM PERENCANA	150.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.001.	FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH	JUMLAH KOORDINASI, VERFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN RENCANA SEKTORAL, RENSTRA DAN RENJA PD BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	1	DOKUMEN	
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.001.	FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH	JUMLAH KOORDINASI, VERFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN RENCANA SEKTORAL, RENSTRA DAN RENJA PD BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	3	PD	
5	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.002.	STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	4	DOKUMEN	700.000.000
6	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.003.	PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH	JUMLAH LAPORAN SEKTORAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAPORAN MONEV PD RUMPUN BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	1	BUMD	100.000.000
	Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, Dan Lingkungan Hidup	4.02.4.02.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KESELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	4.02.4.02.01.21.003.	PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH	JUMLAH LAPORAN SEKTORAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN LAPORAN MONEV PD RUMPUN BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	3	PD	
1	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.002	KAJIAN STRATEGIS DAERAH	HASIL KAJIAN BIDANG PARIWISATA	1	DOKUMEN	120.000.000
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.002	KAJIAN STRATEGIS DAERAH	HASIL KAJIAN BIDANG KEWIRUSAHAAN PEMUDA	1	DOKUMEN	120.000.000
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.002	KAJIAN STRATEGIS DAERAH	HASIL KAJIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	DOKUMEN	140.000.000
3	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.004.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.004.	PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	JUMLAH INOVASI YANG DI DAMPINGI	2	INOVASI	1.020.994.861
4	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	JUMLAH APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (RKPD ONLINE / E-PLANNING) YANG DIKEMBANGKAN	2	APLIKASI	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	KAJIAN DAN MODEL TEKNOLOGI TEPAT GUNA Mendukung PEREKONOMIAN BUMDES	1	KAJIAN	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	ANALISA HASIL DAN RAKORTEK LAPORAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	1	LAPORAN	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	INKUBASI INOVASI DAN REPLIKASI INOVASI	20	PESERTA	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	PELATIHAN SIPD	6	JENIS OPERATOR	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	FASILITASI PELAKSANAAN KKN	20	KKN PERGURUAN TINGGI	
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.15.011.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PRESENTASE KAJIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DITINJAKLANJUTI	100	%	4.05.4.02.01.15.011.	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	MODEL TEKNOLOGI TEPAT GUNA Mendukung PEREKONOMIAN BUMDES	1	MODEL	
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.16.001.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	PRESENTASE KETERSEDIAAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	4.05.4.02.01.16.001.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	JUMLAH DOKUMEN DATA/INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK (SIPD)	2	DOKUMEN	110.000.000
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.16.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	PRESENTASE KETERSEDIAAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	4.05.4.02.01.16.002.	PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	JUMLAH DOKUMEN INFORMASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2	DOKUMEN	175.000.000
	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.05.4.02.01.16.002.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	PRESENTASE KETERSEDIAAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	4.05.4.02.01.16.002.	PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	FORUM DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6	FORUM	
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											23.699.293.640
1	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.03.4.03.01.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	63	JENIS	709.987.500
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.03.4.03.01.01.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAANDAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	JENIS	37.710.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN	PERSENTASE FASILITASI	100	%	4.03.4.03	PENYEDIAAN MAKANAN	TERSEDIANYA MAKAN DAN MINUM	12	BULAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH			.01.01.00 5	DAN MINUMAN				270.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	TERSELENGGARANYA KOORDINASI DAN KONSULTASI	12	BULAN	854.636.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PENGIRIMAN	228	PAKET	47.600.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12	BULAN	396.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PENYEDIA JASA KEBERSIHAN	12	BULAN	162.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH ALAT TULIS KANTOR YANG TERSEDIA	104	JENIS	767.440.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG TERSEDIA	11	JENIS	75.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.312	UNIT	1.463.201.590
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA	431	UNIT	70.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIBELI	2	UNIT	1.000.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR/ RUMAH TANGGA	JUMLAH MEBELEUR YANG DIADAKAN	178	UNIT	593.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN /BERKALA KANTOR/ GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH GEDUNG YANG DIPELIHARA	1	GEDUNG	1.653.600.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/ OPERASIONAL	JUMLAH MOBIL DAN MOTOR YANG DIPELIHARA	70	KENDARAAN	1.071.392.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG YANG DIPELIHARA	1	GUDANG ARSIP	336.800.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG YANG DIPELIHARA	32	JENIS	1.454.740.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				PRASARANA APARATUR				PAN KANTOR/RUMAH TANGGA				
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH MEBELEUR YANG DIPELIHARA	237	UNIT	41.250.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	4.03.4.03 .01.01.00 5	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA YANG TERSEDIA	173	STEL	125.000.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT NILAI SAKIP	A		4.03.4.03 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN YANG TERSUSUN	17	LAPORAN	50.653.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT NILAI SAKIP	A		4.03.4.03 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI KINERJA	4	DOKUMEN	62.600.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT NILAI SAKIP	A		4.03.4.03 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN YANG TERSUSUN	3	DOKUMEN	36.134.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT NILAI SAKIP	A		4.03.4.03 .01.06.00 4	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENJA YANG TERSUSUN	1	DOKUMEN	36.942.000
	SEKRETARIAT	4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT NILAI SAKIP	A		4.03.4.03 .01.06.00 4	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA YANG TERSUSUN	1	DOKUMEN	
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 1	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	JUMLAH DOKUMEN YANG DISEPAKATI	2	DOKUMEN	150.000.000
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 1	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	JUMLAH DOKUMEN OPD YANG DIREVIEW RKANYA	50	OPD	200.000.000
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 5	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	JUMLAH DOKUMEN YANG DISEPAKATI	2	DOKUMEN	150.000.000
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 5	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	JUMLAH DOKUMEN OPD YANG DIREVIEW RKANYA	50	OPD	200.000.000
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 6	PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	JUMLAH RANPERDA DAN RANPERBUP YANG DISUSUN	2	DOKUMEN	250.000.000
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 6	PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	JUMLAH RANPERDA DAN RANPERBUP YANG DISUSUN	2	DOKUMEN	250.000.000
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 6	PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	JUMLAH PERKADA YANG DISUSUN	1	DOKUMEN	200.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	ANGGARAN	4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN	PERSENTASE PD YANG MENYUSUN DPA SESUAI KETENTUAN	100	%	4.03.4.03 .01.15.00 6	PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	JUMLAH REGULASI YANG DISUSUN	2	DOKUMEN	200.000.000
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH SP2D YANG DITERBITKAN	8.000	SP2D	158.000.000
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	8	KALI	250.000.000
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	12	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	20	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	16	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	1	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	4	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH KOORDINASI DAN JUMLAH LAPORAN	12	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 2	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH SK DAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN	111	SK	1.000.000.000
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 2	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH SK DAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN	25	LAPORAN	
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 3	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH RANPERDA DAN RANPERBUP YANG DISUSUN	2	DOKUMEN	372.375.100
	PERBENDAHARAA N	4.03.4.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PD YANG DIBINA DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	100	%	4.03.4.03 .01.16.00 4	PENYUSUNAN RANCANGAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	JUMLAH LAPORAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS TAHUN 2021 DAN LRA PERBULAN YANG TERSEDIA	2	DOKUMEN	168.738.100
	PENAGIHAN DAN PELAYANAN	4.03.4.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENAGIHAN PAJAK	100	%	4.03.4.03 .01.19.00	KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN	KAJIAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN DAN	1	LAPORAN HASIL	100.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	DAERAH TERHADAP TUNGGAKAN POTENSIAL			3	ASLI DAERAH	PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH		KAJIAN	
	PENAGIHAN DAN PELAYANAN	4.03.4.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENAGIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP TUNGGAKAN POTENSIAL	100	%	4.03.4.03 .01.19.01 1	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	TERSUSUNNYA REGULASI TENTANG INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH	12	REGULASI	400.000.000
	PENAGIHAN DAN PELAYANAN	4.03.4.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENAGIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP TUNGGAKAN POTENSIAL	100	%	4.03.4.03 .01.19.01 1	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	TERSUSUNNYA SOP PAJAK DAERAH	20	SOP	200.000.000
	PENAGIHAN DAN PELAYANAN	4.03.4.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENAGIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP TUNGGAKAN POTENSIAL	100	%	4.03.4.03 .01.19.01 1	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	TERSELENGGARANYA SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH	14	SISTEM	696.000.000
	PAJAK DAERAH LAINNYA	4.03.4.03.01.21 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH (SELAIN PBB DAN BPHTB)	100	%	4.03.4.03 .01.21.00 2	PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN, PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH	900,00	WP	959.989.000
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 2	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	JUMLAH ASET YANG DILAKUKAN PENGAMANAN	5,00	BIDANG TANAH	2.585.951.550
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 2	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	JUMLAH PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BMD	50,00	SK STATUS	
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 5	INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH ASET YANG DIINVENTARISASI	2	PASAR	17.708.000
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 6	PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH BMD YANG DINILAI	60	UNIT	226.333.000
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 7	FASILITASI PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH KOORDINASI;	25	KALI	250.927.600
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 7	FASILITASI PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH PENGHAPUSAN BMD;	60	UNIT	
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERCATAT DALAM SISTEM INFORMASI PENCATATAN ASET	100	%	4.03.4.03 .01.22.00 7	FASILITASI PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH PEMINDAHTANGANAN BMD	60	UNIT	
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH		100	%	4.03.4.03 .01.22.00 1	PENATAUSAHAAN ASET	JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 2 YANG DIURUS PEMBAYARAN PKB;	1.140	RODA DUA	1.138.340.600
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH		100	%	4.03.4.03 .01.22.00 1	PENATAUSAHAAN ASET	JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 YANG DIURUS PEMBAYARAN PKB;	350	RODA EMPAT	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH		100	%	4.03.4.03 .01.22.00 1	PENATAUSAHAAN ASET	JUMLAH LAPORAN TAHUNAN;	3	LAPORAN	
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH		100	%	4.03.4.03 .01.22.00 1	PENATAUSAHAAN ASET	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI KE KECAMATAN YANG DILAKSANAKAN	16	WILAYAH	
	PENGELOLAAN ASET	4.03.4.03.01.22 .	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH		100	%	4.03.4.03 .01.22.00 1	PENATAUSAHAAN ASET	JUMLAH REKONSILIASI ASET	6	KALI	
	PBB DAN BPHTB	4.03.4.03.01.23 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	100	%	4.03.4.03 .01.23.00 8	PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA PBB DAN BPHTB	JUMLAH OP;	125	OP	300.000.000
	PBB DAN BPHTB	4.03.4.03.01.23 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	100	%	4.03.4.03 .01.23.00 8	PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA PBB DAN BPHTB	JUMLAH SPPT YANG DICETAK;	771.303	SPPT	
	PBB DAN BPHTB	4.03.4.03.01.23 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	100	%	4.03.4.03 .01.23.00 5	PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	JUMLAH PELAKSANAAN REKON;	4	KALI	1.959.244.600
	PBB DAN BPHTB	4.03.4.03.01.23 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	100	%	4.03.4.03 .01.23.00 5	PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	JUMLAH PESERTA BULAN PANUTAN;	150	DESA/KELUR AHAN	
	PBB DAN BPHTB	4.03.4.03.01.23 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	100	%	4.03.4.03 .01.23.00 5	PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	PERSENTASE JUMLAH PEMOHON KEBERATAN YANG DITINDAKLANJUTI	100	%	
	PBB DAN BPHTB	4.03.4.03.01.23 .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	PERSENTASE CAPAIAN TARGET PENDAPATAN PBB DAN BPHTB	100	%	4.03.4.03 .01.23.00 5	PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	PERSENTASE PENUNGGAK PAJAK YANG DITAGIH;	100	%	
26	INSPEKTORAT											9.569.348.000,00
1	Pemerintahan	4.01.4.01.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.01.00 2.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12	JENIS	66.000.000,00
2	Pemerintahan	4.01.4.01.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.01.00 3.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH JENIS MEDIA	4	JENIS	50.000.000,00
3	Pemerintahan	4.01.4.01.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.01.00 5.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH JENIS MAMIN	6	JENIS	115.000.000,00
4	Pemerintahan	4.01.4.01.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.01.00 6.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	450	KALI	572.010.000,00
6	Pemerintahan	4.01.4.01.01.01 .	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.01.00 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH SURAT TERKIRIM	390	SURAT	46.950.000,00
8	Pemerintahan	4.01.4.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.02.00 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH JENIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7	JENIS	401.808.000,00
9	Pemerintahan	4.01.4.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.02.00 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL	16	UNIT	260.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL				
10	Pemerintahan	4.01.4.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.02.00 7.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KERJA	100	UNIT	25.000.000,00
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.02 .	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.02.00 7.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH JASA ADMINISTRASI	10	ORANG	266.400.000,00
11	Pemerintahan	4.01.4.01.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE DOKUMEN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	100	%	4.01.4.01 .01.06.00 1.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH BUKU LAPORAN	25	BUKU	32.792.000,00
12	Pemerintahan	4.01.4.01.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE DOKUMEN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	100	%	4.01.4.01 .01.06.00 2.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH BUKU LAPORAN	4	DOKUMEN	18.750.000,00
13	Pemerintahan	4.01.4.01.01.06 .	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE DOKUMEN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	100	%	4.01.4.01 .01.06.00 3.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU LAPORAN	30	BUKU	25.000.000,00
14	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 1.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	JUMLAH LHP	24	LHP	1.000.000.000,00
15	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 2.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN	12	LAPORAN	1.515.937.000,00
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 2.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LHP	100	LHP	
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 2.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH SOSIALISASI	1	KEGIATAN	
16	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 3.	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	JUMLAH LHP	80	LHP	859.847.000,00
17	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16 .	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 7.	EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN				

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
18	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16	KEBIJAKAN KDH PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 9.	PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN				
19	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 5.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	JUMLAH OBRIK	96	OBRIK	394.159.000,00
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 6.	KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	JUMLAH PELIMPAHAN KASUS DARI APH KE APIP	5	KASUS	1.496.006.000,00
21	Pemerintahan	4.01.4.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	PERSENTASE TEMUAN AUDIT YANG BERSIFAT MATERIAL NIHIL	100	%	4.01.4.01 .01.16.00 8.	REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH*	JUMLAH LHR	30	LHR	568.658.000,00
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.17.00 3.	PENILAIAN ANGKA KREDIT	JUMLAH APIP BERSERTIFIKASI	15	ORANG	949.927.000,00
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.17.00 3.	PENILAIAN ANGKA KREDIT	JUMLAH APIP PESERTA DIKLAT	40	ORANG	
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.17.00 3.	PENILAIAN ANGKA KREDIT	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI	116	ORANG	
	Pemerintahan	4.01.4.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	PERSENTASE KEGIATAN PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	%	4.01.4.01 .01.17.00 3.	PENILAIAN ANGKA KREDIT	JUMLAH PELAKSANAAN PELATIHAN	55	KALI	
26	Pemerintahan	4.01.4.01.01.18	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH	PERSENTASE PENYELENGGARA NEGARA/ASN YANG TERASISTENSI DAN TERDAMPINGI	100	%	4.01.4.01 .01.18.00 5.	PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) OPD	JUMLAH ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN	48	OPD	905.104.000,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH											19.714.805.950,00
1	Sekretariat	4.04.4.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	JUMLAH BUKU LKPJ TAHUN 2020, LPPD TAHUN 2020, DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021 YANG DISUSUN	55	BUKU	19.999.500,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
2	Sekretariat	4.04.4.04.01.06	KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN YANG DISUSUN	30	BUKU	45.004.950,00
3	Sekretariat	4.04.4.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 5	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	JUMLAH BUKU PROFIL KEPEGAWAIAN YANG DISUSUN	100	BUKU	
	Sekretariat	4.04.4.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENSTRA YANG DISUSUN	30	BUKU	
4	Sekretariat	4.04.4.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 7	PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH LAPORAN KINERJA BKD DAN LAOPRAN MONEV KEGIATAN BKD	12	LAPORAN	19.999.800,00
5	Sekretariat	4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.04.4.04 .01.01.00 2	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN	18	JENIS	200.000.000,00
6	Sekretariat	4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.04.4.04 .01.01.00 3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN PADA BKD SELAMA 1 TAHUN	108	BAHAN BACAAN	10.000.000,00
7	Sekretariat	4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.04.4.04 .01.01.00 5	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN PADA BKD SELAMA 1 TAHUN	1600	DOS	51.000.000,00
8	Sekretariat	4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.04.4.04 .01.01.00 6	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE PERJALANAN DINAS YANG DILAKSANAKAN OLEH PEGAWAI PADA BKD SELAMA 1 TAHUN	1	PERSEN	400.000.000,00
9	Sekretariat	4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.04.4.04 .01.01.00 8	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PEMBAYARAN UNTUK TENAGA KEBERSIHAN KANTOR PADA BKD SELAMA 1 TAHUN	12	KALI	60.000.000,00
10	Sekretariat	4.04.4.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.04.4.04 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH ATK YANG TERSEDIA	40	JENIS	747.000.000,00
13	Sekretariat	4.04.4.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.04.4.04 .01.03.00 1	PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	JUMLAH MESIN CEK CLOCK	11	UNIT	
	Sekretariat	4.04.4.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.04.4.04 .01.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR	17	UNIT	
11	Sekretariat	4.04.4.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.04.4.04 .01.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR PADA BKD YANG TERPELIHARA SELAMA 1 TAHUN	68	UNIT	190.000.000,00
12	Sekretariat	4.04.4.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	4.04.4.04 .01.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL PADA BKD YANG TERPELIHARA SELAMA 1 TAHUN	7	UNIT	200.000.000,00
	Sekretariat	4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	4.04.4.04 .01.01.00 7	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR/NON ASN	4	ORANG	118.520.000,00
14	Sekretariat	4.04.4.04.01.01 .06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/SEMESTERAN	36	DOKUMEN	11.200.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Sekretariat	4.04.4.04.01.01 .06	KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	4.04.4.04 .01.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	20	DOKUMEN	4.500.000,00
15	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.05	PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME				
16	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.14	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN				
17	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.02	PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL	JUMLAH PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)	35	ORANG	7.996.350.000
18	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CPNS DAERAH	JUMLAH PESERTA PRAJABATAN / PELATIHAN DASAR CPNS	500	ORANG	
19	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH	JUMLAH PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL	60	ORANG	
20	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	JUMLAH PESERTA DIKLAT ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI]	30	ORANG	1.759.058.800,00
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS				
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	JUMLAH PESERTA DIKLAT PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI	30	ORANG	
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	JUMLAH PESERTA DIKLAT DIETEKSI KANKER SERVIKS DAN KANKER PAYUDARA	30	ORANG	
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	JUMLAH PESERTA DIKLAT BAHASA INGGRIS PERKANTORAN	30	ORANG	
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	JUMLAH PESERTA JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GRESIK	40	ORANG	
21	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%		4.04.4.04 .01.15.10	DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP, SEMINAR DAN LOKAKARYA	JUMLAH PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP, SEMINAR DAN LOKAKARYA	75	ORANG	
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%							
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%							
22	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT	72%		4.04.4.04 .01.15.08	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS				

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP				TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS				
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%							
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	4.04.4.04.01.15 .	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	PROSENTASE ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL LEBIH DARI 80 JP	72%							
23	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.00 1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	JUMLAH TANDA PENGENAL/NAME TAG BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK YANG DICETAK	2835	ID CARD	185.968.000,00
24	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.00 7	PEMBINAAN APARATUR NEGARA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN DISIPLIN ASN	100	ORANG	285.562.000,00
	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.00 7	PEMBINAAN APARATUR NEGARA	JUMLAH PEMELIHARAAN MESIN CEK CLOCK	56	UNIT	
	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.00 7	PEMBINAAN APARATUR NEGARA	JUMLAH PEMELIHARAAN APLIKASI CEK CLOCK	1	PAKET	
25	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.01 2	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	JUMLAH KASUS -KASUS PELANGGARAN DISIPLIN YANG DITANGANI	45	KASUS	45.002.000,00
26	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.02 9	WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-SKP)	JUMLAH ASN YANG MEMILIKI PENILAIAN KINERJA BAIK	7728	ORANG	902.680.000,00
	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.02 9	WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-SKP)	JUMLAH KASUS -KASUS PELANGGARAN DISIPLIN YANG DITANGANI	45	KASUS	
	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAANASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.02 9	WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-SKP)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN DISIPLIN ASN	100	ORANG	
27	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.00 4	PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR PEMERINTAH	JUMLAH PESERTA UJI KESEHATAN BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GRESIK	531	ORANG	933.592.500,00
28	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.01 1	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI	JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GRESIK YANG MENGAJUKAN USULAN SATYALANCANA KARYA SATYA	600	ORANG	
29	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.01 3	BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS PURNA TUGAS	574	ORANG	
30	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.02 0	FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN	JUMLAH PNS YANG MENGAJUKAN KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, BPJS, DAN KLAIM JKK-JKM	1000	ORANG	
31	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN ASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.00 9	PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI	JUMLAH OPD YANG DIMONITORING	52	OPD	130.414.000,00
32	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN ASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.01 4	PENYELENGGARAAN HUT KORPRI	PENYELENGGARAAN HUT KORPRI SERTA RANGKAIAN KEGIATANNYA	1	KALI	
33	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN ASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.01 0	PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI	PEMBINAAN PADUAN SUARA, PEMBINAAN OLAHRAGA	100	ORANG	325.845.000,00
	Pembinaan dan KesejahteraanASN	4.04.4.04.01.16 .	PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN ASN	PROSENTASE ASN YANG CAPAIAN KINERJANYA SESUAI DENGAN TARGET	100%		4.04.4.04 .01.16.01 0	PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI	BINTEK PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI, PEMBINAAN MTQ KORPRI KABUPATEN	100	ORANG	
34	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN	PROSENTASE KENAIKAN PANGKAT TEPAT WAKTU	100%		4.04.4.04 .01.17.00	PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN	JUMLAH ASNI YANG MENERIMA SK KENAIKAN PANGKAT	2000	ORANG	579.202.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
35	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	APARATUR SIPIL NEGARA PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE KENAIKAN PANGKAT TEPAT WAKTU	100%		2 4.04.4.04 .01.17.01 0	PANGKAT OTOMATIS PNS SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN ARSIAPARIS	JUMLAH ASN FUNGSIONAL YANG BISA MENGHITUNG ANGKA KREDIT	298	ORANG	
	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE KENAIKAN PANGKAT TEPAT WAKTU	100%		4.04.4.04 .01.17.00 2	PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS	JUMLAH ASN MENERIMA SK KENAIKAN GAJI BERKALA	4250	ORANG	
36	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE KENAIKAN PANGKAT TEPAT WAKTU	100%		4.04.4.04 .01.17.00 3	PENGADMINISTRASIAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH ASN YANG MENERIMA SK PENSIUN BUP, APS DAN PENSIUN MENINGGAL DUNIA.	450	SK PENSIUN	368.997.000,00
37	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 7	PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL, DAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI JABATAN FUNGSIONAL	7	KALI	1.722.309.000,00
38	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 8	PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL	JUMLAH HASIL ANALISA SELEKSI KOMPETENSI STAF GOL. III/D DAN III/C PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	100	ORANG	
39	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 9	SELEKSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL/FUNGSION AL	JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG LOWONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	10	JABATAN	
40	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 1	PENEMPATAN PNS	JUMLAH PENYERAHAN SK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PERIODE JULI 2021 DAB JANUARI 2022	2	KALI	623.006.000,00
41	Mutasi dan Kepangkatan	4.04.4.04.01.17	PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 1	PENEMPATAN PNS	JUMLAH PESERTA TES KESEHATAN CPNS	500	ORANG	
			PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 4	PENATAAN SDA SESUAI KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)	JUMLAH RAPAT TIM PENILAI KINERJA PNS KAB. GRESIK	12	KALI	
			PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 1	PENEMPATAN PNS	JUMLAH SK PENGANGKATAN PNS DAN SUMPAAH JANJI PNS	500	ORANG	
			PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA	PROSENTASE USULAN PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB	100%		4.04.4.04 .01.17.00 1	PENEMPATAN PNS	SK PENGANGKATAN PPPK	500	ORANG	
42	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE AKURASI DATA KEPEGAWAIAN	100%		4.04.4.04 .01.18.00 4	PEMBANGUNAN/PENGEM BANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH	JUMLAH INFORMASI KEPEGAWAIAN YANG DISEBARKAN MELALUI WEBSITE DAN SMS GATEWAY	1570	INFORMASI	211.195.000,00
43			PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE AKURASI DATA KEPEGAWAIAN	100%		4.04.4.04 .01.18.00 6	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	JUMLAH PNS YANG MELAKUKAN UPDATING DATA	7630	PNS	
44	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE PEMENUHAN FORMASI SESUAI DENGAN ABK	77%		4.04.4.04 .01.18.00 1	SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	JUMLAH BEZETTING DAN FORMASI ASN	60	DOKUMEN	1.519.180.400
45	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE PEMENUHAN FORMASI SESUAI DENGAN ABK	77%		4.04.4.04 .01.18.01 1	ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN FORMASI KEBUTUHAN CALON PNS)	JUMLAH OPD PENERIMA MANFAAT	60	OPD	
46	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE PEMENUHAN FORMASI SESUAI DENGAN ABK	77%		4.04.4.04 .01.18.00 1	SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	JUMLAH PENDAFTAR CPNS DAN P3K	14000	PELAMAR	
	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM	PROSENTASE PEMENUHAN FORMASI SESUAI DENGAN ABK	77%		4.04.4.04 .01.18.00 1	SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	JUMLAH PENERIMA SK ASN	750	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR NEGARA									
	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE PEMENUHAN FORMASI SESUAI DENGAN ABK	77%		4.04.4.04 .01.18.00 1	SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	JUMLAH PESERTA BINTAL CPNS DAN P3K	750	ORANG	
	Bidang Data, Formasi dan Pengembangan	4.04.4.04.01.18	PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM APARATUR NEGARA	PROSENTASE PEMENUHAN FORMASI SESUAI DENGAN ABK	77%		4.04.4.04 .01.18.01 5	PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	JUMLAH PNS YANG MENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR	1	ORANG	49.220.000
28	SEKRETARIAT DAERAH											102.861.954.645
28. 1	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA											1.500.000.000
1	Bagian Layanan Pengadaan	5.01.5.01.03.30	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.30.02	PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	JUMLAH PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA	200	PAKET	500.000.000
2	Bagian Layanan Pengadaan	5.01.5.01.03.30	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.30.01	ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	JUMLAH PAKET TERTIB ADMINISTRASI	200	PAKET	550.000.000
3	Bagian Layanan Pengadaan	5.01.5.01.03.30	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.30.03	ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PEMANGKU KEPENTINGAN PENGADAAN BARANG/JASA	100	ORANG	450.000.000
28. 2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN											2.684.182.500
1	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.05.24 .006	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	BUKU	150.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.05.24 .009	PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI	JUMLAH PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA	36	KUNJUNGAN	200.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.05.24 .011	RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA	JUMLAH PELAKSANAAN RAKOR FORKOPIMDA	24	KALI	750.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.05.24 .011	RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	1	DOKUMEN	100.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.05.24 .011	RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA	JUMLAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2	ORANG	250.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.05.24 .010	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	JUMLAH KESEPAKATAN BERSAMA (MOU)	5	MOU	105.182.500
2	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.02.24 .01	PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN	JUMLAH PESERTA PENINGKATAN KINERJA KECAMATAN	18 KECAMATA N	KECAMATAN	150.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI	100	%	5.01.5.01 .03.02.24	PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI	JUMLAH PENGEMBANGAN APLIKASI	1 APLIKASI	APLIKASI	29.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM			.07	ADMINISTRASI KECAMATAN				
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.02.24 .08	ASISTENSI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	JUMLAH KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN	18 KECAMATA N	KECAMATAN	100.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.02.24 .13	MONITORING DAN EVALUASI BIDANG ADMINISTRASI KECAMATAN	JUMLAH KEC/KEL YANG DIMONITORING	18 KECAMATA N	KECAMATAN	100.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.02.24 .20	PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN YANG MENGIKUTI	18 KECAMATA N	KECAMATAN	200.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.02.24 .05	PENDATAAN RUPABUMI	JUMLAH DOKUMEN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI	1 DOKUMEN	DOKUMEN	350.000.000
	Bagian Pemerintahan	5.01.5.01.03.05 .24.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM	100	%	5.01.5.01 .03.02.24 .19	PENEGASAN BATAS DAERAH	JUMLAH DOKUMEN	1 DOKUMEN	DOKUMEN	200.000.000
28. 3	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA											1.409.963.000
1	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE OPD YANG TELAH MENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	100	%	5.01.5.01 .03.07.20 .01.	EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH	JUMLAH UNIT LAYANAN YANG DI LAKSANAKAN SKM	96	UNIT LAYANAN	143.353.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE OPD YANG TELAH MENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	100	%	5.01.5.01 .03.07.20 .03.	KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH UNIT LAYANAN YANG MENGIKUTI KOMPETISI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	96	UNIT LAYANAN	291.377.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE OPD YANG TELAH MENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)	100	%	5.01.5.01 .03.07.20 .09.	FASILITASI PENYUSUNAN SPP	PROSENTASE OPD YANG DIFASILITASI	48	OPD	209.796.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE OPD YANG MENYUSUN LAPORAN KINERJA BAIK	85	%	5.01.5.01 .03.07.28 .04	EVALUASI ANALISA BEBAN KERJA	JUMLAH OPD YANG DIANALISA BEBAN KERJANYA	48	OPD	66.250.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE OPD YANG MENYUSUN LAPORAN KINERJA BAIK	85	%	5.01.5.01 .03.07.28 .12	RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	PRESENTASE JABATAN STRUKTURAL ESELON IV YANG TELAH DISUSUN SKJ	100	%	194.909.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE SKPD YANG TELAH MENYUSUN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ABK DENGAN BAIK	100	%	5.01.5.01 .03.07.28 .16	EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH JABATAN YANG DISUSUN INFORMASI FAKTOR JABATANNYA	10	OPD	56.810.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE SKPD YANG TELAH MENYUSUN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ABK DENGAN BAIK	100	%	5.01.5.01 .03.07.28 .16	PENYUSUNAN STANDAR KOMPETISI JABATAN STRUKTURAL	PRESENTASE PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI	100	%	99.400.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE SKPD YANG TELAH MENYUSUN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ABK DENGAN BAIK	100	%	5.01.5.01 .03.07.28 .16	EVALUASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TUSI PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	48	OPD	66.210.000
	BAGIAN ORGANISASI DAN	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA	PERSENTASE SKPD YANG TELAH MENYUSUN	100	%	5.01.5.01 .03.07.28	IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA	JUMLAH OPD YANG MENYUSUN DOKUMEN SAKIP	48	OPD	182.458.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	TATA LAKSANA		DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ABK DENGAN BAIK			.16	INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)				
	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5.01.5.01.03.07 .28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE SKPD YANG TELAH MENYUSUN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ABK DENGAN BAIK	100	%	5.01.5.01 .03.07.28 .16	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	JUMLAH OPD YANG DI ASISTENSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	48	OPD	99.400.000
28. 4	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											3.993.362.000
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.10	MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)	JUMLAH PESERTA MTQ TINGKAT KABUPATEN	750	ORANG	950.000.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.11	PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN	JUMLAH PERINGATAN HARI BESAR ISLAM DAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL BAGI PNS YANG DILAKSANAKAN	3	PHBI	70.000.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.12	PEMBINAAN KEAGAMAAN	JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN TAKMIR MASJID DAN PENGURUS UPZ	6	KEGIATAN	130.000.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.13	MONITORING EVALUASI DAN OPERASIONAL BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN	JUMLAH ISTIGHOSAH, KHATMIL QURAN DAN TADARUS AL QUR'AN YANG DILAKSANAKAN	2	KEGIATAN	956.364.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.14	PENINGKATAN NILAI- NILAI LUHUR KEAGAMAAN	JUMLAH PEMBERANGKATAN CALON JAMA'AH HAJI YANG DILAKSANAKAN	1	KEGIATAN	101.750.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.15	FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI	JUMLAH KEGIATAN MQK TINGKAT KABUPATEN GRESIK YANG DILAKSANAKAN	1	KEGIATAN	58.918.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.015.01. 5.01.03.2 7.18	MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB	JUMLAH KEGIATAN IDUL ADHA (PENGADAAN DAN PENYALURAN TERNAK, SHOLAT IDUL ADHA) YANG DILAKSANAKAN	1	KEGIATAN	700.000.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.015.01. 5.01.03.2 7.19	IDHUL ADHA	JUMLAH RUKYATUL HILAL, SAFARI ROMADHON, NUZULUL QUR'AN DAN IDUL FITRI YANG DILAKSANAKAN	10	KEGIATAN	291.500.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.015.01. 5.01.03.2 7.20	RAMADLAN	JUMLAH PELAKSANAAN PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL	1	KEGIATAN	90.110.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.015.01. 5.01.03.2 7.22	PERINGATAN HARI SANTRI	JUMLAH SOSIALISASI DAN MONEV HIBAH SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH YANG DILAKSANAKAN	10	KEGIATAN	110.800.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01. 03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01 .5.01.03. 27.03	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL / SANTUNAN KEMASYARAKATAN	JUMLAH PENDATAAN DAN SOSIALISASI BANSOS ANAK YATIM DAN JANDA MISKIN YANG DILAKSANAKAN	12	KEGIATAN	92.300.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01.03.27	RAKYAT PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01.5.01.03.27.16	FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM DAN FAKIR MISKIN	JUMLAH SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS YANG DILAKSANAKAN	5	KEGIATAN	59.990.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01.03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01.5.01.03.27.21	FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS	JUMLAH RAKOR DAN JAMBORE KOMISI DAERAH LANSIA KECAMATAN & KABUPATEN GRESIK	2	KEGIATAN	66.132.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01.03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01.5.01.03.27.23	FASILITASI DAN KOORDINASI KOMISI DAERAH LANSIA	1). JUMLAH PESERTA RAKORDA, PESERTA VALIDASI PROGRAM DAN RENCANA KERJA, LSS UKS/M PROPINSI, LSS UKS/M NASIONAL, LSS UKS/M VERIFIKASI, LOMBA JAMBORE UKS/M KAB, LOMBA JAMBORE UKS/M PROP	870	ORANG	125.600.000
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01.03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01.5.01.03.27.01	RAKORDA UKS	JUMLAH SENAM KESEGERAN JASMANI KARYAWAN DI LINGKUNGAN PEMKAB YANG DILAKSANAKAN DAN LOMBA SENAM UKS/M TIM PELAKSANA (LEMBAGA) KECAMATAN SE - KABUPATEN	38	KEGIATAN	79.055.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.01.5.01.5.01.03.27	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	PRESENTASE JUMLAH PENERIMA LAYANAN BIDANG KESRA	100	%	5.01.5.01.5.01.03.27.08	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	JUMLAH SOSIALISASI DAN EVALUASI PENYALURAN SANTUNAN KEMASYARAKATAN UNTUK KEMATIAN	8	KEGIATAN	110.843.000
28.5	BAGIAN HUKUM											2.500.000.000
1	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.001	KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PELAKSANAAN KOORDINASI PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25	KALI	85.000.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.002	PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DISUSUN	880	DOKUMEN	428.000.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.003	PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	JUMLAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIRENCANAKAN	10	DOKUMEN	125.000.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.006	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH	600	ORANG	275.000.000
2	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.004	PENYULUHAN HUKUM	JUMLAH PESERTA PENYULUHAN HUKUM	600	ORANG	383.200.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.004	PENYULUHAN HUKUM	JUMLAH DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM YANG DILAKUKAN PEMBINAAN	3	DESA/ KELURAHAN	191.800.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.009	PENANGANAN KASUS	JUMLAH PERKARA LITIGASI YANG TERTANGANI	5	PERKARA	353.400.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.009	PENANGANAN KASUS	JUMLAH PERKARA NON LITIGASI YANG TERTANGANI	12	KASUS	176.600.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02.18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSentase PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01.03.02.18.012	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENEKAKAN HUKUM	JUMLAH PESERTA DIKLAT LEGAL DRAFTING DAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT	7	ORANG	56.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
3	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02 .18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.02.18 .005	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BUKU ABSTRAK DAN KATALOG PERUNDANG- UNDANGAN, JUMLAH BUKU HIMPUNAN PERBUP YANG DISEBARLUASKAN	1.440	BUKU	176.000.000
	Bagian Hukum	5.01.5.01.03.02 .18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.02.18 .007	KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	4	DOKUMEN	100.000.000
		5.01.5.01.03.02 .18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE PENGESAHAN PRODUK HUKUM DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.02.18 .011	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM	JUMLAH PRODUK HUKUM YANG TERDOKUMENTASIKAN	880	DOKUMEN	150.000.000
28. 6	BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN											1.250.000.000
1	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .001	KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	JUMLAH RAPAT KOORDINASI TENTANG PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	23	KALI	109.300.000
	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .007	FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN SEKRETARIS DAERAH	JUMLAH BUKU RENJA SEKRETARIAT DAERAH	35	BUKU	27.812.000
	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .008	PENYUSUNAN STANDAR ANALISA BIAYA	JUMLAH BUKU STANDAR ANALISA BIAYA	85	BUKU	154.234.000
	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .011	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	JUMLAH BUKU RENSTRA SETDA TAHUN 2022 S/D 2026	50	BUKU	35.000.000
2	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .005	PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH	JUMLAH BUKU PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS	400	BUKU	213.392.500
	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .009	PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH RAPAT PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	8	KALI	238.800.500
	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .010	SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH RAPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN OPD	12	KALI	66.011.000
3	Bagian Program Pembangunan	5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .002	PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH BUKU LAPORAN REALISASI KINERJA SKPD SE KABUPATEN GRESIK	84	BUKU	87.700.000
		5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .003	KOORDINASI DAN EVALUASI APBD	JUMLAH PELAKSANAAN REVIEW APBD	4	KALI	230.000.000
		5.01.5.01.03.05 .22.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.05.22 .004	EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN KINERJA APBD	PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN APLIKASI E CONTROLLING	1	APLIKASI	87.750.000
28. 7	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA											1.413.612.500
1	Bagian	5.01.5.01.03.06	PROGRAM FASILITASI	PERSENTASE FASILITASI	100,00	%	5.01.5.01	FASILITASI PERUMUSAN	JUMLAH DOKUMEN KEBIJAKAN	1	DOKUMEN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Perekonomian dan SDA	.25.	DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH			.03.06.25.001	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI DAERAH	PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI DAERAH			272.413.000
	Bagian Perekonomian dan SDA	5.01.5.01.03.06.25.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.06.25.007	PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL	JUMLAH PELAKSANAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL	1	EVENT	345.027.000
	Bagian Perekonomian dan SDA	5.01.5.01.03.06.25.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.06.25.008	FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERLUASAN INFORMASI BAHAN PANGAN POKOK MELALUI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN LAJU INFLASI DAERAH	1	DOKUMEN	169.940.000
	Bagian Perekonomian dan SDA	5.01.5.01.03.06.25.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.06.25.011	PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA BUMD	JUMLAH RAPAT EVALUASI BUMD	4	KALI	328.432.500
	Bagian Perekonomian dan SDA	5.01.5.01.03.06.25.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.06.25.012	PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI BLUD	MONITORING PUSKESMAS YANG SUDAH MENJADI BLUD	32	PUSKESMAS	75.000.000
2	Bagian Perekonomian dan SDA	5.01.5.01.03.06.26	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	%	5.01.5.01.03.06.26.002	KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PEMAHAMAN PEMAKAIAAN SAMPAH PLASTIK DALAM RUMAH TANGGA	60	ORANG	76.114.000
	Bagian Perekonomian dan SDA	5.01.5.01.03.06.26	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	%	5.01.5.01.03.06.26.006	KOORDINASI DAN PENDATAANTENTANG HASIL PRODUKSI DI BIDANG PERTAMBANGAN	JUMLAH DOKUMEN DATA PENUNJANG DAN INFORMASI BIDANG PERTAMBANGAN	1	DOKUMEN	78.127.000
		5.01.5.01.03.06.26	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	100,00	%	5.01.5.01.03.06.26.007	PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	JUMLAH PESERTA SINKRONISASI PROGRAM PENGHEMATAN ENERGI DAN PEMAHAMAN ATAS PENGHEMATAN ENERGI	30	ORANG	68.559.000
28.8	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL											4.334.188.750
1	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.04.21.008	KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH KEGIATAN KEPROTOKOLAN	1.920	KALI	367.883.500
2	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.04.21.002	PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN WARTAWAN	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI GATHERING ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN WARTAWAN	90	ORANG	74.374.500
	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.04.21.003	PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI ACARA KOORDINASI ANTAR HUMAS	50	ORANG	18.008.200
	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.04.21.005	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH BERITA YANG DIPUBLIKASIKAN	365	BERITA	1.929.757.050
	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.04.21.006	PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA GIRI	JUMLAH CETAK MAJALAH WARTA GIRI	18.000	EKSEMPLAR	309.131.700
	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01.03.04.21.009	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI	JUMLAH MEDIA CETAK YANG TERSEDIA	24	MEDIA	248.576.000
	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04.29.	SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	PRESENTASE SOSIALISASI PENGGUNAAN PRODUK BERPITA CUKAI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	100,00	%	5.01.5.01.03.04.29.001	PENYAMPAIAN INORMASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU	JUMLAH PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN	12	KALI	955.170.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
3	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.03.04 .21.	PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH	PRESENTASE FASILITASI DAN KEHUMASAN DAERAH	100,00	%	5.01.5.01 .03.04.21 .001	KEPENTINGAN PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.920	KALI	431.287.800
28. 9	BAGIAN KEUANGAN											2.500.000.000
1	Bagian Keuangan	5.01.5.01.03.10 .08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	%	5.01.5.01 .03.10.08 .001	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI PIMPINAN	JUMLAH PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH / PEJABAT	230	KALI	2.000.000.000
2	Bagian Keuangan	5.01.5.01.03.10 .08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	%	5.01.5.01 .03.10.08 .003	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	JUMLAH RAPAT KOORDINASI	10	BUKU	50.000.000
	Bagian Keuangan	5.01.5.01.03.10 .08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	%	5.01.5.01 .03.10.08 .003	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN	40	BUKU	220.000.000
	Bagian Keuangan	5.01.5.01.03.10 .08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	%	5.01.5.01 .03.10.08 .003	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN	125	ORANG	30.000.000
3	Bagian Keuangan	5.01.5.01.03.10 .06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	%	5.01.5.01 .03.10.06 .002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN	22	KALI	50.000.000
	Bagian Keuangan	5.01.5.01.03.10 .06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100%	%	5.01.5.01 .03.10.06 .002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH RAPAT KOORDINASI	233	BUKU	150.000.000
28. 10	BAGIAN UMUM											81.276.645.895
1	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	JENIS BARANG CETAKAN	4	JENIS	547.888.500
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH PENGGAANDAN	10000	KALI	
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .004	PENYEDIAAN SOUVENIR/TALI ASIH	JUMLAH DAN JENIS SOUVENIR DAN TALI ASIH	14	JENIS	5.670.000.800
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KANTOR	153	ORANG	
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KETERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENDUKUNG KEGIATAN	120	JENIS	2.484.435.300
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH FASILITASI KOORDINASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	350	KALI	1.518.776.600
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .009	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PIMPINAN	JUMLAH PENYEDIAAN LAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	8	ORANG	983.016.000
2	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .004	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN GEDUNG/KANTOR/RUMA H DINAS	JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR	30	ORANG	952.586.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH RUMAH JABATAN YANG DIPELIHARA	3	UNIT	1.265.340.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH GEDUNG KANTOR YANG DIPELIHARA	1	UNIT	3.222.059.600
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA	47	UNIT	1.612.310.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG/KANTOR YANG DIPELIHARA	1024	UNIT	1.583.100.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	3	JENIS	1.044.730.800
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.01 .008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3	JENIS	38.918.748.000
3	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .23.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.23 .001	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (RUTIN)	JUMLAH BUKU YANG DICETAK	120	BUKU	2.146.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .23.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.23 .001	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (RUTIN)	JUMLAH KEPUTUSAN YANG DIHASILKAN	1	KEPUTUSAN	-
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .23.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.23 .002	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH (RUTIN)	JUMLAH PELAKSANAAN REKONSILIASI	4	KALI	-
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .23.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	PERSENTASE FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN BARANG DAERAH	100	%	5.01.5.01 .03.08.23 .002	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH (RUTIN)	JUMLAH PESERTA REKONSILIASI	10	BAGIAN	-
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .001	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN/DINAS/GEDUNG/KANTOR	JUMLAH TAMAB YANG DIBANGUN	2	UNIT	-
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .002	PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DILAKUKAN PENGADAAN	156	UNIT	10.776.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.02 .003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN YANG DILAKUKAN PENGADAAN	14	JENIS	7.051.569.795
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE FASILITASI PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.03 .002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	JENIS PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	6	JENIS	850.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.03.08 .03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE FASILITASI PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100	%	5.01.5.01 .03.08.03 .005	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS UNTUK HARI-HARI TERTENTU	JUMLAH DAN JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK HARI-HARI TERTENTU YANG DIADAKAN	8	JENIS	650.084.500
29	SEKRETARIAT DPRD											70.854.968.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
1	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS BARANG CETAKAN	13	JENIS	288.250.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS CINDERAMATA	160	JENIS	
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS PLAKAT	160	JENIS	
2	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PEGAWAI DAN TAMU	168	KALI	385.431.000
3	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	20	KALI	642.725.000
					100	%			JUMLAH KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH			
4	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01.04.02.008	PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	9	JENIS	567.450.000
5	Bagian Umum	5.01.5.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	5.01.5.01.04.05.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATHAN FORMAL APARATUR SEKRETARIAT DPRD YANG DIIKUTI	5	KALI	400.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	5.01.5.01.04.05.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS YANG DIIKUTI	2	KALI	83.400.000
6	Bagian Umum	5.01.5.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	5.01.5.01.04.05.005	PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG MENGIKUTI MEDICAL CHECK UP	50	ORANG	75.000.000
7	Bagian Umum	5.01.5.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	5.01.5.01.04.05.006	PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN DPRD	50	DOKUMEN	1.146.680.000
8	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA TENAGA ADMINITRASI KANTOR (PEMBANTU ADMINISTRASI KANTOR)	38	ORANG	
9	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3	REKENING	552.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH INSTRUKTUR SENAM DAN TENAGA PENGAMANAN DALAM	17	ORANG	1.252.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA KEBERSIHAN KANTOR, JASA SOPIR PIMPINAN DPRD	2	PAKET	
10	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01.04.02.003	PENGADAAN PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH FRAKSI DPRD YANG DIFASILITASI	7	FRAKSI	200.000.000
3	Bagian Umum	5.01.5.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	5.01.5.01.04.01.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	20	KALI	288.365.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE FAILITASI	100	%	5.01.5.01	PENGADAAN PERALATAN	JUMLAH PERALATAN,	2	PAKET	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERHADAP SARANA PRASARANA			.04.02.00 3	/PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	PERLENGKAPAN DAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD			600.000.000
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01 .04.02.00 3	PENGADAAN PERALATAN /PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	10	JENIS	2.785.298.000
11	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01 .04.02.00 5	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KANTOR / GEDUNG / RUMAH TANGGA	JUMLAH BANGUNAN YANG DIPELIHARA	2	UNIT	
12	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01 .04.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN JABATAN / DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL RODA 2 YANG DIPELIHARA	15	UNIT	
	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01 .04.02.00 6	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN JABATAN / DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN JABATAN DAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL RODA 4 YANG DIPELIHARA	15	UNIT	
13	Bagian Umum	5.01.5.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FAILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA	100	%	5.01.5.01 .04.02.00 7	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA YANG DIPELIHARA	7	JENIS	
14	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI SKPD DAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	6	DOKUMEN	503.559.400
					100	%						
15	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	6	DOKUMEN	50.000.000
	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5	DOKUMEN	75.000.000
	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN BULANAN ATAU SEMESTERAN	14	DOKUMEN	75.000.000
16	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 3	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN SKPD ,	3	DOKUMEN	775.000.000
17	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 4	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD				
18	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 5	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	JUMLAH DOKUMEN PROFIL SKPD DAN SOP SKPD	2	DOKUMEN	
19	Bagian Keuangan	5.01.5.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.01.5.01 .04.06.00 6	PENYUSUNAN SOP SKPD				
20	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	4	KEGIATAN	400.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH RAPAT KERJA PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	1	DOKUMEN	
	Bagian	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN	PERSENTASE PENYUSUNAN	100	%	5.01.5.01	PENINGKATAN PERAN	JUMLAH RAPAT KERJA HASIL	4	KEGIATAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Persidangan dan Perundang-Undangan		KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI			.04.15.00 1	DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN			400.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN	1	DOKUMEN	
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH RAPAT KERJA HASIL PEMBAHASAN APBD	10	KEGIATAN	1.200.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN APBD	1	DOKUMEN	
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH RAPAT KERJA DAN DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	10	KEGIATAN	1.200.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	1	DOKUMEN	
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH RAPAT KERJA HASIL PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	4	KEGIATAN	100.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	1	DOKUMEN	
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	10	KEGIATAN	300.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	1	DOKUMEN	
					100	%			DOKUMEN REKOMENDASI ATAS LKPJ KEPALA DAERAH			
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN APBD	4	DOKUMEN	1.350.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 1	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN APBDKERJA	8	KEGIATAN	
21	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 0	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD YANG DIKUTI	6	KEGIATAN	5.000.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 0	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI YANG TERSEDIA	4	KELOMPOK	864.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 0	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH TENAGA AHLI FRAKSI	7	ORANG	252.000.000
22	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 1	PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF DPRD	JUMLAH DOKUMEN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA INISIATIF DPRD	8	DOKUMEN	6.000.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 1	PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF DPRD	JUMLAH PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA INISIATIF DPRD	4	KEGIATAN	
23	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 2	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PROPEMPERDA	2	DOKUMEN	1.163.580.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 2	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA PROPEMPERDA	8	KEGIATAN	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 2	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	4	DOKUMEN	650.000.000
24	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 5	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN PANITIA KHUSUS RANPERDA YANG DIBAHAS	8	RANPERDA	4.500.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 5	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD	JUMLAH PANITIA KHUSUS DPRD	8	PANSUS	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 5	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT BPK	1	DOKUMEN	535.546.600
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 5	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA	4	KEGIATAN	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.01 5	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD	JUMLAH KONSULTASI	1	KALI	
25	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 3	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD	JUMLAH DOKUMEN RENJA DPRD	1	DOKUMEN	2.146.190.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 3	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD	JUMLAH RAPAT KERJA BADAN MUSYAWARAH DPRD	37	KEGIATAN	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 3	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD	JUMLAH RAPAT PIMPINAN AKD	37	KEGIATAN	
26	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 6	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	30	KEGIATAN	400.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 6	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	24	KEGIATAN	
27	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 7	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN	30	KEGIATAN	400.000.000
	Bagian Persidangan dan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG	100	%	5.01.5.01 .04.15.00	KOORDINASI KONSULTASI DAN	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA BIDANG PEREKONOMIAN	24	KEGIATAN	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Perundang- Undangan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DIFASILITASI			7	KUNJUNGAN KERJA KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD				
28	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	1.20.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 8	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR	30	KEGIATAN	400.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	1.20.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 8	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR	24	KEGIATAN	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	1.20.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 8	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	30	KALI	400.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	1.20.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 8	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA BIDANG SUMBER DAYA ALAM	24	KALI	
29	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	1.20.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 9	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD	JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	30	KEGIATAN	400.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	1.20.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 9	KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	24	KEGIATAN	
30	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI	JUMLAH KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	134	KALI	20.009.965.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPRD	1	DOKUMEN	500.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI	JUMLAH JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN LAPORAN	2	JASA	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA PIMPINAN DPRD	6	KEGIATAN	
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI	JUMLAH DOKUMEN PERSETUJUAN KERJASAMA DAERAH	4	DOKUMEN	100.000.000
	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA KERJASAMA DAERAH	16	KEGIATAN	
31	Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01 .04.15.00 4	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	JUMLAH RAPAT-RAPAT PARIPURNA DPRD			
32	Bagian Persidangan dan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG	100	%	5.01.5.01 .04.15.00	KEGIATAN RESES	JUMLAH DOKUMEN HASIL RESES	3	DOKUMEN	3.040.725.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Perundang-Undangan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DIFASILITASI			5					
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.15.005	KEGIATAN RESES	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN RESES	3	KEGIATAN	
33	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.15.013	PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD	16	KEGIATAN	807.540.000
34	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	5.01.5.01.04.15	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.15.016	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	JUMLAH DOKUMEN POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD	3	DOKUMEN	1.070.675.000
35	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.001	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	JUMLAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DI SEKRETARIAT DPRD YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPELIHARA	2	PAKET	5.357.327.000
36	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.004	PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL DPRD DAN LIFLAT DPRD	JUMLAH MEDIA CETAK UNTUK MEMPUBLIKASIKAN KEGIATAN DPRD	5	JENIS	
37	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.007	PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	JENIS	
38	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.003	PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD	JUMLAH BERITA DAN INFORMASI YANG DIMUAT DI MEDIA MASSA	375	ADVETORIAL /IKLAN	
39	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.008	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50	KEGIATAN	
									JUMLAH KEGIATAN UNTUK MEMPUBLIKASIKAN KEGIATAN DPRD	5	KEGATAN	
40	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.002	FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK YANG DDIKUTI	1	DOKUMEN	1.043.936.000
41	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.005	PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN WARTAWAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN KEMITRAAN ANTARA DPRD, SEKRETARIAT DPRD DAN WARTAWAN	1	KEGIATAN	
42	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.006	ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK	JUMLAH PELAKSANAAN ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK YANG DIIKUTI	3	KEGIATAN	
43	Bagian Humas dan Protokol	5.01.5.01.04.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT	PERSENTASE HUBUNGAN DPRD DENGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	100	%	5.01.5.01.04.16.009	PROTOKOLER KEGIATAN DPRD	JUMLAH PROTOKOLER PELAKSANAAN UNDANGAN DPRD	36	KEGIATAN	118.325.000
30	KECAMATAN GRESIK											11.936.988.000
44	Kelurahan Bedilan	6.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.20.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	3.431.580.000,00
47	Kelurahan Karangpoh	6.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KARANGPOH	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.21.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KARANGPOH	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KECAMATAN GRESIK					KECAMATAN GRESIK				
50	Kelurahan Karangturi	6.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 2.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
53	Kelurahan Kebungson	6.01.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 3.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
56	Kelurahan Kemuteran	6.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KEMUTERAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 4.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KEMUTERAN KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
59	Kelurahan Kroman	6.01.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 5.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
62	Kelurahan Lumpur	6.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN LUMPUR KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 6.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN LUMPUR KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
65	Kelurahan Ngipik	6.01.01.27.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN NGIPIK KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 7.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN NGIPIK KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
68	Kelurahan Pekauman	6.01.01.28.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 8.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
71	Kelurahan Pekelingan	6.01.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN PEKELINGAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 9.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN PEKELINGAN KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
74	Kelurahan Sidokumpul	6.01.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 0.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
77	Kelurahan Sukodono	6.01.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 1.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
80	Kelurahan Sukorame	6.01.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 2.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
83	Kelurahan Tlogopatut	6.01.01.33.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 3.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN TLOGOPATUT	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								KECAMATAN GRESIK				
86	Kelurahan Tlogopojok	6.01.01.34.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 4.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
89	Kelurahan Trate	6.01.01.35.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 5.001.	OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK	PRESENTASE KOORDINASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN	100	%	
28		6.01.01.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 6.029.	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	21	KELURAHAN/ DESA	10.000.000,00
42		6.01.01.19.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.01.1 9.002.	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MUSRENBANG	21	KELURAHAN/ DESA	25.000.000,00
20		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.008	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	5	DESA	75.000.000,00
35		6.01.01.17.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 7.004.	PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	21	KELURAHAN/ DESA	
33		6.01.01.17.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 7.001.	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA	5	DESA	
34		6.01.01.17.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 7.002.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH	21	KELURAHAN/ DESA	
45	Kelurahan Bedilan	6.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 0.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	5.113.930.000,00
48	Kelurahan Karangpoh	6.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 1.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
51	Kelurahan Karangturi	6.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 2.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
54	Kelurahan Kebungson	6.01.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 3.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
57	Kelurahan Kemuteran	6.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KEMUTERAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 4.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KEMUTERAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
60	Kelurahan Kroman	6.01.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 5.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
63	Kelurahan Lumpur	6.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN	NILAI SURVEY KEPUASAN	100	%	6.01.01.2	PEMBANGUNAN SARANA	PERSENTASE PELAKSANAAN	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN LUMPUR KECAMATAN GRESIK	MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN			6.002.	DAN PRASARANA KELURAHAN LUMPUR KECAMATAN GRESIK	PEMBANGUNAN			
66	Kelurahan Ngipik	6.01.01.27.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN NGIPIK KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 7.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN NGIPIK KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
69	Kelurahan Pekauman	6.01.01.28.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 8.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
72	Kelurahan Pekelingan	6.01.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN PEKELINGAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 9.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PEKELINGAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
75	Kelurahan Sidokumpul	6.01.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 0.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
78	Kelurahan Sukodono	6.01.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 1.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
81	Kelurahan Sukorame	6.01.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 2.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
84	Kelurahan Tlogopatut	6.01.01.33.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 3.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
87	Kelurahan Tlogopojok	6.01.01.34.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 4.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
90	Kelurahan Trate	6.01.01.35.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 5.002.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	
46	Kelurahan Bedilan	6.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 0.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	1.608.278.000,00
49	Kelurahan Karangpoh	6.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 1.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
52	Kelurahan Karangturi	6.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 2.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
55	Kelurahan Kebungson	6.01.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 3.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEBUNGSON KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
58	Kelurahan Kemuteran	6.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 4.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMUTERAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KEMUTERAN KECAMATAN GRESIK					KECAMATAN GRESIK				
61	Kelurahan Kroman	6.01.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 5.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
64	Kelurahan Lumpur	6.01.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN LUMPUR KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 6.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LUMPUR KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
70	Kelurahan Pekauman	6.01.01.28.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 8.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
73	Kelurahan Pekelingan	6.01.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN PEKELINGAN KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.2 9.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKELINGAN KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
76	Kelurahan Sidokumpul	6.01.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 0.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIDOKUMPUL KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
79	Kelurahan Sukodono	6.01.01.31.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 1.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUKODONO KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
82	Kelurahan Sukorame	6.01.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 2.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUKORAME KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
85	Kelurahan Tlogopatut	6.01.01.33.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 3.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TLOGOPATUT KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
88	Kelurahan Tlogopojok	6.01.01.34.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 4.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
91	Kelurahan Trate	6.01.01.35.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN	100	%	6.01.01.3 5.003.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	
38		6.01.01.18.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.01.1 8.003.	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	21	KELURAHAN/ DESA	75.000.000,00
40		6.01.01.18.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.01.1 8.007.	PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH	JUMLAH PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI KECAMATAN GRESIK	21	KELURAHAN/ DESA	
41		6.01.01.18.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.01.1 8.015.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNA AN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA	21	KELURAHAN/ DESA	
39		6.01.01.18.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MONEV WILAYAH DAN GALIAN C	21	KELURAHAN/ DESA	10.000.000,00
32		6.01.01.16.	PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 6.033.	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUSAI	5	DESA	10.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DAN PELAYANAN PUBLIK					KEUANGAN DESA	DENGAN PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU			
29		6.01.01.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 6.030.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN PELATIHAN KUALITAS SDM PEMERINTAHAN DESA	21	KELURAHAN/ DESA	15.000.000,00
		6.01.01.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 6.037.	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MONITORING PELAKSANAAN PILKADES	2	DESA	7.500.000,00
		6.01.01.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 6.055.	MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN PERANGKAT DESA	JUMLAH DESA YANG DI REKOMENDASI	5	DESA	7.500.000,00
22		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.010.	PEMBINAAN KARANG TARUNA	JUMLAH ORGANISASI KARANG TARUNA YANG DIBINA	21	KELURAHAN/ DESA	180.000.000,00
		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.008	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	21	KELURAHAN/ DESA	
24		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.019.	KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN	JUMLAH PEMBINA MTQ	21	KELURAHAN/ DESA	
		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.027.	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN UKS	JUMLAH PESERTA KADER UKS YANG DIBINA	21	KELURAHAN/ DESA	
23		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.018.	FASILITASI DAN PEMBINAAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA	21	KELURAHAN/ DESA	
25		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.023.	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	JUMLAH SKJ	46	KALI	
19		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.001.	PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PEMBINAAN FORUM ANAK KECAMATAN	21	KELURAHAN/ DESA	
21		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 5.015	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MONITORING SEMBAKO	21	KELURAHAN/ DESA	
		6.01.01.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.01.1 9.001.	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MONEV DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	21	KELURAHAN/ DESA	10.000.000,00
17		6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA SKPD	7	DOKUMEN	16.872.000,00
18		6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.01.0 6.004	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	10	BUKU	
15		6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN	100	%	6.01.01.0 6.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	JUMLAH TERSUSUNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	8	DOKUMEN	11.100.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	KINERJA DAN KEUANGAN				IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD				
16		6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.01.0 6.002.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	13	BUKU	12.100.000,00
5		6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.01.0 1.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA JASA ADMINISTRASI KANTOR	12	ORANG	290.400.000,00
6		6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.01.0 1.008.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA OPERASIONAL KANTOR, REK. TELP DAN LISTRIK	3	JENIS	86.000.000,00
		6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.01.0 1.002.	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8	JENIS	30.000.000,00
7		6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.01.0 2.003.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TEREDIA	4	JENIS	170.000.000,00
2		6.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.01.0 1.003.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN YANG TERSEDIA	2	JENIS	15.000.000,00
3		6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.01.0 1.005.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEGIATAN KANTOR YG DISEDIAKAN MAKAN DAN MINUM	3	JENIS	220.028.000,00
4		6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.01.0 1.006.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	2	JENIS	160.000.000,00
8		6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.01.0 2.005.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	PAKET	122.700.000,00
9		6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.01.0 2.006.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	PERSENTASE TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	4	UNIT	90.000.000,00
10		6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.01.0 2.007.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERAWATAN PERALATAN KERJA	3	JENIS	24.000.000,00
11		6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.01.0 5.001	PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN YANG MENGIKUTI PEMBINAAN	21	KELURAHAN/ DESA	15.000.000,00
14		6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.01.0 5.007	SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN	21	KELURAHAN/ DESA	95.000.000,00
12		6.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	6.01.01.0 5.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PESETA YANG MENGIKUTI BIMTEK SDM	21	KELURAHAN/ DESA	
13		6.01.01.17.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.01.1 7.007.	SOSIALISASI DAN BIMBINAN TEKNIS DANA KELURAHAN	JUMLAH SOSIALISASI PEMBINAAN PENGELOLAHAN DANA KELURAHAN	16	KELURAHAN	
31	KECAMATAN KEBOMAS											7.741.912.500
1	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100		6.01.02.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3	JENIS	14.250.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH				PERLENGKAPAN KANTOR				
2	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.02.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN UNTUK ADMINISTRASI KANTOR YANG MEMADAI	1	JENIS	24.600.000,00
3	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.02.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG DISEDIAKAN	3	JENIS	4.000.000,00
4	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.02.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN	3	JENIS	40.000.000,00
5	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.02.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH YANG DIFASILITASI	2	JENIS	92.664.000,00
6	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.02.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI KANTOR	12	BULAN	373.200.000,00
7	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.02.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH OPERASIONAL KANTOR YANG DIFASILITASI	12	BULAN	67.000.000,00
8	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.02.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	44	JENIS	80.000.000,00
9	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.02.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH SARANA, PRASARANA KANTOR YANG DIPELIHARA	1	UNIT	78.928.000,00
10	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.02.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG DIPELIHARA	2	UNIT	47.000.000,00
11	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.02.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR/PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DIPELIHARA	3	JENIS	22.500.000,00
12	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100		6.01.02.0 5.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PESERTA BIMTEK	30	ORANG	10.000.000,00
13	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100		6.01.02.0 5.002	PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN KECAMATAN	100	ORANG	10.000.000,00
14	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.02.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15	BUKU	8.000.000,00
15	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.02.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN	1	DOKUMEN	8.000.000,00
16	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.02.0 6.003	PENYUSUNAN RENJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD	1	DOKUMEN	16.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS									1	DOKUMEN	-
17	KECAMATAN	6.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE FASILITASI	100		6.01.02.0	PENYUSUNAN RENCANA	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA			

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	KEBOMAS		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN			6.004	STRATEGIS SKPD	PERANGKAT DAERAH			
18	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.02.1 5.004	PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH PKK DAN ORGANISASI WANITA YANG DIBINA			
19	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.02.1 5.015	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV BPNT DAN SANTUNAN KEMATIAN			
20	KECAMATAN KEBOMAS											
21	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.02.1 5.019	FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN MTQ			
22	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.02.1 5.022	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SELEKSI KAPILAH			
23	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.02.1 5.023	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI DI KECAMATAN			
24	KECAMATAN KEBOMAS											
25	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	PERSENTASE KEGIATAN Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100		6.01.02.1 6.030	PELATIHAN APARATUR Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DESA YANG DILATIH			
	KECAMATAN KEBOMAS			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
26	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	PERSENTASE KEGIATAN Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100		6.01.02.1 6.036	PENDAMPINGAN REKTUMEN PERANGKAT DESA	JUMLAH KEGIATAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA YANG DIMONITORING	11	DESA	8.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								-
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	1	PERSEN	6.01.02.1 6.034	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA	JUMLAH PESERTA FASILITASI	44	ORANG	15.000.000,00
27	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	PERSENTASE KEGIATAN Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100		6.01.02.1 6.037	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN PILKADES	4	DESA	6.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								-
28	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	PERSENTASE KEGIATAN Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100		6.01.02.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	PERSENTASE LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD YANG BENAR DAN TEPAT WAKTU	11	DESA	15.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
29	KECAMATAN KEBOMAS									11	DESA	15.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS											-
30	KECAMATAN KEBOMAS									21	ORANG	10.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS											-
31	KECAMATAN KEBOMAS	06.01.02.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.16.1 7.002	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH	JUMLAH UKM YANG DIFASILITASI	60	ORANG	45.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS									60	ORANG	-
32	KECAMATAN KEBOMAS	06.01.02.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.16.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	PERSENTASE PELAKSANAAN MONEV DAN PEMBINAAN BUMDES			
33	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100		6.01.02.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK DI KECAMATAN	12	BULAN	55.000.000,00
34	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100		6.01.02.1 8.004	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	JUMLAH LAPORAN HASIL MONEV	12	BULAN	10.000.000,00
35	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.02.1 9.001	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG DIMONITORING DAN DI EVALUASI	21	DESA/KELUR AHAN	25.000.000,00
36	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.16.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	JUMLAH PARTISIPASI MUSRENBANG KECAMATAN	21	DESA/KELUR AHAN	30.000.000,00
37	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.16.1 9.003	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	JUMLAH TERPENUHINYA PROFIL DESA DAN KECAMATAN	21	DESA/KELUR AHAN	10.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	PERSEN	6.01.16.1 8.016	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH KONSOLIDASI UKS	2	KALI	168.000.000,00
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	PERSEN	6.01.16.1 8.016	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI DI KECAMATAN	44	KALI	-
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	PERSEN	6.01.16.1 8.016	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV BPNT DAN SANTUNAN KEMATIAN	12	BULAN	-
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	PERSEN	6.01.16.1 8.016	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH PKK DAN ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	21	DESA/KELUR AHAN	-
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	PERSEN	6.01.16.1 8.016	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SELEKSI KAPILAH	100	%	-
	KECAMATAN KEBOMAS	6.01.02.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	PERSEN	6.01.16.1 8.016	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN MTQ	100	%	-
38	Kelurahan Gending	6.01.02.36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN	100		6.01.02.3 6.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN	TERSEDINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN	100	%	2.172.692.500,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KELURAHAN GENDING	GENDING				PEMERINTAH KELURAHAN GENDING KECAMATAN KEBOMAS	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
	Kelurahan Gending									100	%	-
39	Kelurahan Gending	6.01.02.36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN GENDING	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN GENDING	100		6.01.02.3 6.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN GENDING KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
40	Kelurahan Gending	6.01.02.36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN GENDING	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN GENDING	100		6.01.02.3 6.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN GENDING KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
41	Kelurahan Gulomantung	6.01.02.37	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN GULOMANTUNG	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN GULOMANTUNG	100		6.01.02.3 7.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
42	Kelurahan Gulomantung	6.01.02.37	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN GULOMANTUNG	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN GULOMANTUNG	100		6.01.02.3 7.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	%	3.555.904.000,00
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
43	Kelurahan Gulomantung	6.01.02.37	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN GULOMANTUNG	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN GULOMANTUNG	100		6.01.02.3 7.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN GULOMANTUNG KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100	%	705.174.000,00
	Kelurahan									100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Gulomantung											-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
	Kelurahan Gulomantung									100	%	-
44	Kelurahan Indro	6.01.02.38	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN INDRO	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN INDRO	100		6.01.02.3 8.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN INDRO KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
45	Kelurahan Indro	6.01.02.38	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN INDRO	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN INDRO	100		6.01.02.3 8.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN INDRO KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
46	Kelurahan Indro	6.01.02.38	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN INDRO	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN INDRO	100		6.01.02.3 8.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN INDRO KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
47	Kelurahan Kawisanyar	6.01.02.39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KAWISANYAR	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KAWISANYAR	100		6.01.02.3 9.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KAWISANYAR KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
48	Kelurahan Kawisanyar	6.01.02.39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KAWISANYAR	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KAWISANYAR	100		6.01.02.3 9.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KAWISANYAR KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
49	Kelurahan Kawisanyar	6.01.02.39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KAWISANYAR	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KAWISANYAR	100		6.01.02.3 9.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN KAWISANYAR KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
50	Kelurahan Kebomas	6.01.02.40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KAWISANYAR	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBOMAS	100		6.01.02.4 0.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN KEBOMAS KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
51	Kelurahan Kebomas	6.01.02.40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KAWISANYAR	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBOMAS	100		6.01.02.4 0.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN KEBOMAS KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
52	Kelurahan Kebomas	6.01.02.40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN KAWISANYAR	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN KEBOMAS	100		6.01.02.4 0.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN KEBOMAS KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
53	Kelurahan Ngargosari	6.01.02.41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN NGARGOSARI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN NGARGOSARI	100		6.01.02.4 1.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN NGARGOSARI KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
54	Kelurahan Ngargosari	6.01.02.41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN NGARGOSARI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN NGARGOSARI	100		6.01.02.4 1.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN NGARGOSARI KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
55	Kelurahan Ngargosari	6.01.02.41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN NGARGOSARI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN NGARGOSARI	100		6.01.02.4 1.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN NGARGOSARI KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
56	Kelurahan Sidomoro	6.01.02.42	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOMORO	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMORO	100		6.01.02.4 2.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDIAANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
57	Kelurahan Sidomoro	6.01.02.42	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOMORO	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMORO	100		6.01.02.4 2.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
58	Kelurahan Sidomoro	6.01.02.42	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOMORO	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMORO	100		6.01.02.4 2.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
59	Kelurahan Sidomukti	6.01.02.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOMUKTI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMUKTI	100		6.01.02.4 3.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDIAANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
60	Kelurahan Sidomukti	6.01.02.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOMUKTI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMUKTI	100		6.01.02.4 3.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
61	Kelurahan Sidomukti	6.01.02.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SIDOMUKTI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SIDOMUKTI	100		6.01.02.4 3.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
62	Kelurahan Singosari	6.01.02.44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SINGOSARI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SINGOSARI	100		6.01.02.4 4.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SINGOSARI KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDIAANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
63	Kelurahan Singosari	6.01.02.44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SINGOSARI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SINGOSARI	100		6.01.02.4 4.002	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SINGOSARI KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
64	Kelurahan Singosari	6.01.02.44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SINGOSARI	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN SINGOSARI	100		6.01.02.4 4.003	PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT DI KELURAHAN SINGOSARI KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
65	Kelurahan Tenggulunan	6.01.02.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TENGGULUNAN	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN TENGGULUNAN	100		6.01.02.4 5.001	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS	TERSEDIAANYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
66	Kelurahan Tenggulunan	6.01.02.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TENGGULUNAN	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN TENGGULUNAN	100		6.01.02.4 5.002	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
67	Kelurahan Tenggulunan	6.01.02.45	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN TENGGULUNAN	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN TENGGULUNAN	100		6.01.02.4 5.003	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS				
32	KECAMATAN MANYAR											1.100.000.000
1	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGKANDAAAN	JUMLAH KEGIATAN CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	12	BULAN	10.000.000,00
2	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TERSEDINYA BAHAN BACAAN	12	BUKU	3.000.000,00
3	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	PERSENTASE KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN	100	%	28.000.000,00
4	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100	%	83.050.000,00
5	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	TERSEDINYA PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12	BULAN	284.400.000,00
6	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE JASA OPERASIONAL KANTOR, REK. TELP,LISTRIK	12	BULAN	61.200.000,00
7	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TEREDIA	100	%	43.000.000,00
7	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH GEDUNG YANG TERPELIHARA	2	GEDUNG	90.000.000,00
8	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PERSENTASE TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	100	%	46.350.000,00
9	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERAWATAN PERALATAN KERJA	100	%	13.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERSEDINYA PETUGAS KEBERSIHAN	12	BULAN	18.000.000,00
11	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.12.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	4	DOKUMEN	5.000.000,00
12	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.12.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN	1	DOKUMEN	5.000.000,00
12	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.12.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD	4	DOKUMEN	10.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR									1	DOKUMEN	-
14	KECAMATAN	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI	PERSENTASE JUMLAH	100		6.01.12.1	PEMBINAAN ORGANISASI	JUMLAH ORGANISASI WANITA			

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	MANYAR		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA			5.004	WANITA	YANG DIBINA			
15	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.010	PEMBINAAN KARANG TARUNA	JUMLAH PELAKSANAAN PELATIHAN KARANG TARUNA			
16	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.016	FASILITASI DAN PEMGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN UKS			
17	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.018	FASILITASI DAN PEMBINAAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA	JUMLAH PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI KEHIDUPAN BERAGAMA			
18	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.019	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN LPTQ			
18	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.020	PEMBINAAN DAN FASILITASI NAGI PENYANDANG MASALAH KESEJATERAAN SOSIAL	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI PMKS			
18	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.021	KOORDINASI DAN PEMBINAAN MINAT DAN BUDAYA BACA	JUMLAH PELAKSANAAN KEG KOORDINASI DAN PEMBINAAN BUDAYA BACA			
18	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.023	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	PERSENTASE PELAKSANAAN SKJ/JUM'AT BERSIH			
	KECAMATAN MANYAR											
20	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.029	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	KALI	10.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100					1	KALI	-
19	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.037	PEMANTAUAN PILKADES	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN PILKADES	100	%	20.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100					100	%	-
22	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH DIKUMEN APBDES YANG DIVERIFIKASI DAN ECVALUASI APBDES	23	DOKUMEN	10.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100					23	DOKUMEN	-
21	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.60	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN MONEV PELAPORAN KEUANGAN DESA	100	%	10.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100					100	%	-
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	PERSEN	6.01.12.1 8.16	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	12	BULAN	200.000.000,00
	KECAMATAN	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI	PERSENTASE PELAYANAN	100	PERSEN	6.01.12.1	PEMBINAAN DAN	JUMLAH PELAKSANAAN	1	KALI	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	MANYAR		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP			8.16	PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	KEGIATAN KOORDINASI KEHIDUPAN BERAGAMA			-
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	PERSEN	6.01.12.1 8.16	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH PELAKSANAAN PELATIHAN ANGGOTA KARANG TARUNA	1	KALI	-
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	PERSEN	6.01.12.1 8.16	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI PMKS	1	KALI	-
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	PERSEN	6.01.12.1 8.16	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN LPTQ	100	%	-
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	PERSEN	6.01.12.1 8.16	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN UKS	100	%	-
	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	PERSEN	6.01.12.1 8.16	PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PELAKSANAAN SKJ/JUMAT BERSIH	100	%	-
23	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.002	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH	PERSENTASE KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH			
24	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN UPKU/BUMDES	23	DESA	50.000.000,00
	KECAMATAN MANYAR									23	DESA	-
	KECAMATAN MANYAR									100	%	-
	KECAMATAN MANYAR									100	%	-
25	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.017	SOSIALISASI PRINSIP- PRINSIP PEMAHAMAN PEREKONOMIAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI			
25	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.034	MONITORING DAN EVALUASI PBB	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN MONEV PBB			
	KECAMATAN MANYAR											
27	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100		6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PERSERTA PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	23	DESA	50.000.000,00
30	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	100	ORANG	35.000.000,00
30	KECAMATAN MANYAR	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.004	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN MONEV PEMBANGUNAN	100	%	15.000.000,00
33	KECAMATAN CERME											1.100.000.000
30	KECAMATAN CERME	6.01.04.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.04.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	100	ORANG	25.000.000,00
25	KECAMATAN CERME	6.01.04.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PEMBINAAN BUMDES	3	KALI	40.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
26	KECAMATAN CERME	6.01.04.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PEMBINAAN KOPWAN	11	KALI	
28	KECAMATAN CERME	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.04.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN LINMAS DESA SE KEC. CERME	12	LAPORAN	55.000.000,00
27	KECAMATAN CERME	6.01.04.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.04.1 8.001	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PENYULUHAN NARKOBA	75	ORANG	20.000.000,00
23	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH LAPORAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES	25	BUKU	15.000.000,00
22	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MONEV ADD DAN DANA DESA	25	DESA	55.000.000,00
	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.04.1 6.030		JUMLAH PESERTA PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	172	ORANG	
24	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 6.54	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	75	ORANG	20.000.000,00
21	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 6.037	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG DI PANTAU DALAM MELAKSANAKAN PILKADES	5	DESA	10.000.000,00
	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 5.015	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN MONEV PENYALURAN BPNT DAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA	25	DESA	110.000.000,00
	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 5.007	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	25	DESA	
	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 5.003	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN PEMBINAAN ORGANISASI WANITA/PKK	25	DESA	
	KECAMATAN CERME	6.01.04.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.04.1 5.019	FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)	JUMLAH PEMBINAAN CALON KAPILAH MTQ	4	KALI	
29	KECAMATAN CERME	6.01.04.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.04.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN	60	LAPORAN	15.000.000,00
12	KECAMATAN CERME	6.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.04.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA SKPD	20	BUKU	30.000.000,00
14	KECAMATAN CERME	6.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.04.0 6.004	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	20	BUKU	
11	KECAMATAN CERME	6.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.04.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	20	BUKU	10.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
13	KECAMATAN CERME	6.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.04.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH BUKU LAPORAN KEUANGAN	20	BUKU	10.000.000,00
5	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	12	BULAN	256.800.000,00
6	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE JASA OPERASIONAL KANTOR, REK. TELP DAN LISTRIK	100	%	40.200.000,00
1	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JASA PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN KANTOR	3	JENIS	5.000.000,00
2	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	2	JENIS	25.000.000,00
3	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	2	JENIS	3.000.000,00
4	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEGIATAN KANTOR YG DISEDIAKAN MAKAN DAN MINUM	36	KEGIATAN	45.000.000,00
4	KECAMATAN CERME	6.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.04.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100	%	60.000.000,00
7	KECAMATAN CERME	6.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.04.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TEREDIA	100	%	130.000.000,00
8	KECAMATAN CERME	6.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.04.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	2	UNIT	23.000.000,00
8	KECAMATAN CERME	6.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.04.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PERSENTASE TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	100	%	47.000.000,00
9	KECAMATAN CERME	6.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.04.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERAWATAN PERALATAN KERJA	100	%	20.000.000,00
10	KECAMATAN CERME	6.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	6.01.04.0 5.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN	35	ORANG	30.000.000,00
34	KECAMATAN BENJENG											1.100.000.000
1	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3	JENIS	10.500.000,00
2	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGAANDAN	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	12	BULAN	14.625.000,00
3	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100	%	6.01.05.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	PENYEDIAAN JUMLAH BAHAN BACAAN	12	BULAN	4.200.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH				PERUNDANG-UNDANGAN				
4	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH JUMLAH KEGIATAN KANTOR YG DISEDIAKAN MAKAN DAN MINUM	12	BULAN	46.420.000,00
5	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	12	BULAN	26.545.000,00
6	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.008	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KANTOR	12	BULAN	185.220.000,00
7	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR DAN RUMAH TANGGA	12	BULAN	112.945.000,00
	KECAMATAN BENJENG											
8	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN GEDUNG KANTOR	100	PERSEN	143.351.000,00
9	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	2	GEDUNG	113.299.000,00
10	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	6	UNIT	42.525.000,00
11	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERAWATAN PERALATAN KERJA KNTOR	20	UNIT	13.650.000,00
	KECAMATAN BENJENG											
12	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	4	DOKUMEN	13.200.000,00
13	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNNYA DOKUMEN RENCANA KERJA	4	DOKUMEN	13.200.000,00
	KECAMATAN BENJENG											
14	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.008	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	23	DESA	50.400.000,00
15	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.015	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV RASKIN DAN DANA KEMATIAN	3	KALI	24.212.000,00
16	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.019	FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHAN SEKOLAH	JUMLAH PEMBINAAN UKS KECAMATAN	1	KALI	10.500.000,00
17	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI	100	%	6.01.05.1 5.019	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SKJ, DAN PARTISIPASI GERAK JALAN KECAMATAN	12	BULAN	31.500.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KEMASYARAKATAN DESA	TINGKAT KEC. YANG DIBINA					TERLAKSANYA PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	2	KALI	
18	KECAMATAN BENJENG											15.000.000,00
	KECAMATAN BENJENG											
19	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DANA DESA	JUMLAH MONEV ADD YANG TERLAKSANA	3	KALI	24.527.000,00
	KECAMATAN BENJENG			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
20	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADES	2	DESA	10.500.000,00
	KECAMATAN BENJENG			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
21	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	JUMLAH FASILITASI UPDATING BERITA WEBSITE INFORMASI KECAMATAN	5	KALI	12.075.000,00
	KECAMATAN BENJENG			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
22	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 7.009	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH KOPERASI WANITA TINGKAT DESA YANG TELAH DIBINA	23	DESA	16.702.000,00
23	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 7.011	FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH UPKU /BUMDES YANG DIFASILITASI	23	DESA	16.702.000,00
	KECAMATAN BENJENG											
24	KECAMATAN BENJENG											
	KECAMATAN BENJENG											
25	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.05.1 8.001	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANNA LINGKUNGAN	JUMLAH PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SITUASI LINGKUNGAN	12	KALI	59.871.000,00
26	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.05.1 8.003	MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN TRANSTIBUM	JUMLAH MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH DAN WARUNG LIAR	3	KALI	24.527.000,00
27	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.05.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUAN DESA	JUMLAH LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN	2	KALI	16.702.000,00
28	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.05.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG	184	ORANG	30.432.000,00
29	KECAMATAN BENJENG	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.05.1 9.002	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	JUMLAH BUKU PROFIL KECAMATAN BENJENG DAN BUKU PROFIL DESA YANG DISUSUN			16.670.000,00
35	KECAMATAN BALONGPANGGAN											1.100.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	G											
1	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	TERSEDINYA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3	JENIS	10.500.000,00
2	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	5	JENIS	14.625.000,00
3	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	4	JENIS	11.520.000,00
4	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEGIATAN KANTOR YG DISEDIAKAN MAKANAN DAN MINUMAN	7	KEGIATAN	116.275.000,00
5	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	529	KALI	69.540.000,00
6	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.008	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA ADMINISTRASI KANTOR	6	ORANG	174.000.000,00
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.008	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH JASA TENAGA KEBERSIHAN KANTOR	1	ORANG	
7	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE TERBAYARNYA REK LISTRIK, AIR DAN TELEPHON	3	REKENING	48.400.000,00
8	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TERSEDIA	6	JENIS	141.300.500,00
9	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG, PAGAR DAN HALAMAN KANTOR	1	PAKET	113.299.000,00
10	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PERSENTASE TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	2	KENDARAAN	41.800.000,00
11	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERAWATAN PERALATAN KERJA	20	UNIT	17.525.000,00
12	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KEUANGAN	4	LAPORAN	6.000.000,00
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	JUMLAH TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SKPD	10	BUKU	3.480.000,00
13	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN RENSTRA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA DAN RENSTRASKPD	10	BUKU	6.898.500,00
14	KECAMATAN BALONGPANGGAN	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA	100	%	6.01.05.1 5.008	PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA DI TINGKAT	25	DESA	80.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	G		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA					KECAMATAN			
15	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.015	FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHAN SEKOLAH	JUMLAH PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN FASILITASI PROGRAM UKS	3	KALI	15.000.000,00
16	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.019	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	4	KALI	15.000.000,00
17	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.019	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PARTISIPASI GERAK JALAN TINGKAT KECAMATAN	1	KALI	52.980.000,00
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.019	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SKJ	44	KALI	
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G											
19	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DANA DESA	JUMLAH MONEV ADD	4	KALI	12.180.000,00
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.05.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DANA DESA	JUMLAH MONEV ADD	4	KALI	
20	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADES	3	DESA	4.500.000,00
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.05.1 6.047	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADES	3	DESA	
21	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	VERIFIKASI DAN MONITORING PENYUSUNAN APBDES	JUMLAH FASILITASI DAN MONITORING PENYUSUNAN APBDES	25	DESA	9.517.000,00
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.05.1 6.047	VERIFIKASI DAN MONITORING PENYUSUNAN APBDES	JUMLAH FASILITASI DAN MONITORING PENYUSUNAN APBDES	25	DESA	
22	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 7.009	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH	JUMLAH IKM TINGKAT DESA YANG TELAH DIBINA	50	ORANG	16.702.000,00
23	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 7.011	FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH UPKU /BUMDES YANG DIFASILITASI	25	DESA	10.500.000,00
24	KECAMATAN BALONGPANGGAN G											
	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 7.009	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH	JUMLAH IKM YANG DIBINA DI KECAMATAN	50	ORANG	13.900.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
25	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.05.1 8.001	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANNA LINGKUNGAN	JUMLAH PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN SITUASI LINGKUNGAN	25	DESA	37.281.000,00
26	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.05.1 8.003	MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN TRANSTIBUM	JUMLAH MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH DAN WARUNG LIAR	2	KALI	8.210.000,00
27	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.05.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN DESA	25	DESA	16.702.000,00
28	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.05.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	185	ORANG	28.865.000,00
29	KECAMATAN BALONGPANGGAN G	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.05.1 9.002	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	JUMLAH BUKU PROFIL KECAMATAN BALONGPANGGAN DAN DESA	10	BUKU	3.500.000,00
36	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N											1.100.000.000
1.1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH TENDA, KURSI DAN SOUND SYSTEM YANG DISEWA	3	JENIS	3.400.000,00
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK, AIR DAN TELEPON	12	BULAN	310.800.000,00
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN ATK, ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA	12	BULAN	111.910.000,00
1.2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG YANG DICETAK	2	JENIS	14.540.000,00
1.3	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH SURAT KABAR	4	JENIS	5.400.000,00
1.4	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12	BULAN	46.420.000,00
1.5	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.05.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE TERSELENGGARANYA RAPAT DAN KOORDINASI KE PEMDA, DESA DAN LUAR DAERAH	12	BULAN	56.218.000,00
2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									-
2.2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIPELIHARA	1	GEDUNG	50.000.000,00
2.3	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.05.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIRAWAT	7	UNIT	56.130.000,00
2.4	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA	6.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA	100	%	6.01.05.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	JUMLAH KOMPUTER, PRINTER, LAPTOP/NOTEBOOK DAN AC	36	UNIT	35.600.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	N		APARATUR	PRASARANA APARATUR				PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	YANG DIRAWAT			
3	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									-
3.1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA IKHTISAR SKPD YANG DISUSUN	30	BUKU	6.980.000,00
3.2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU LAPORAN KEUANGAN JUMLAH BUKU RENJA JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	20	BUKU	15.000.000,00
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU LAPORAN KEUANGAN JUMLAH BUKU RENJA JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	20	BUKU	
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU LAPORAN KEUANGAN JUMLAH BUKU RENJA JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	20	BUKU	
3.3	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.05.0 6.003	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH CALK, NERACA, LRA, DAN LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN	20	BUKU	6.980.000,00
4	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									-
4.1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN TI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.008	PEMBERDAYAAN ORAGANISASI WANITA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	23	DESA	172.533.000,00
4.2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN TI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.015	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV RASKIN DAN DANA KEMATIAN	12	KALI	-
4.3	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN TI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.019	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN LPTQ	2	KALI	-
4.4	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN TI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.05.1 5.019	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SENAM BAGI PNS DAN PERANGKAT DESA SERTA IBU2 PKK DESA	45	KALI	-
6.2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN BUMDES	3	KALI	-
5	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK									-
5.1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.044	SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI DAN BIMTEK ADD PESERTA PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN	69	ORANG	36.452.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
									KEUANGAN DESA			
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.05.1 6.044	SOSIALISASI DAN BIMIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA				
5.2	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG DIPANTAU DALAM MELAKSANAKAN PILKADES	3	DESA	15.000.000,00
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.05.1 6.047	PEMANTAUAN PILKADES				
5.4	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PESETA SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	69	ORANG	27.457.000,00
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.05.1 6.047	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
7	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-
7.1	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASI PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.05.1 8.001	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA PELATIHAN PENGENDALIAN KEMANANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN JUMLAH RAPAT PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	69	ORANG	93.044.000
8	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN									-
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYA N	6.01.05.19.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.05.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	145	ORANG	36.136.000
37	KECAMATAN DRIYOREJO											1.100.000.000
1	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3	JENIS	9.000.000
2	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANGCETAKAN DAN PENGGANDAAN	2	JENIS	11.770.000
3	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.003	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TERSEDINYA TENAGA ADMINISTRASI	3	ORANG	69.000.000
4	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEGIATAN KANTOR YANGDISEDIAKAN MAKAN DANMINUM	31	KEGIATAN	179.710.000
5	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE RAPAT- RAPATKOORDINASI DAN KONSULTAS	100	%	56.100.000
6	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA OPERASIONALKANTOR, REKENING TELEPON DAN LISTRIK	12	BULAN	92.549.000
7	KECAMATAN	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE FASILITASI	100	%	6.01.12.0	PENGADAAN	PERSENTASE PERALATAN	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	DRIYOREJO		SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR			2.003	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	DANPERLENGKAPAN KANTOR YANGTERSEDIA			45.051.000
8	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAANGEDUNG KANTOR	3	UNIT	51.500.000
9	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMALAH TERPELIHARANYKENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	7	UNIT	35.260.000
10	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.001	PEMBANGUNANRUMAH JABATAN/DINAS/GEDUNG/ KANTOR	JUMLAH BANGUNAN YANG DIREHAP	1	UNIT	150.000.000
11	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	22	BUKU	7.500.000
12	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA SKPD	20	BUKU	21.000.000,00
13	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.004	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	10	BUKU	20.000.000,00
1	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.03 0	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH AN DESA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	84	ORANG	10.150.000
2	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.03 7	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG DI FASILITASI PELAKSANAAN PILKADES	1	DESA	6.500.000
3	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.04 1	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH DESA YANG DI FASILITASI	16	DESA	9.450.000
4	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.05 4	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH DESA YANG DI FASILITASIDALAM PENGELOLAANKEUANGAN DESA	16	DESA	57.468.000
5	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.05 7	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG DI FASILITASI DALAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	16	DESA	8.650.000
	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.06 2	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	JUMLAH DESA YANG MEMANFAATKAN JARINGAN DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	16	DESA	10.000.000
6	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	6.01.6.01 .08.16.06	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI YANG MEMAHAMI TENTANG	68	ORANG	8.405.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP			5	TENTANG DESA	UNDANG-UNDANG DESA			
7	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.15.00 3	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMALAH SDM KADER PKK DAN ORGANISASI WANITA LAINNYA YANG DI BI NA	105	ORANG	20.000.000
8	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.15.00 7	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH PEMUDA YANG DI BINA	32	ORANG	20.000.000
9	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.15.00 9	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKATAN PEDESAAN	JUMLAH SDM LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG ADA DIDESA YAG DI BINA	48	ORANG	18.000.000
10	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.16.00 4	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	JUMLAH SDM LEMBAGA MASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DI BINA	32	ORANG	18.000.000
11	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.15.02 2	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ KECAMATAN)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN LPTQ	78	ORANG	19.000.000
12	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.15.02 4	PEMBINAAN KEAGAMAAN	JUMLAH TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT YANG DI BINA	48	ORANG	18.000.000
13	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PROSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.17.00 1	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA		48	ORANG	24.350.000
14	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PROSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.17.02 9	PELATIHAN KETRAMPILOAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN		32	ORANG	20.000.000
15	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.6.01 .08.18.00 3	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PELAKSANAAN KOORDINASI DITINGKAT KECAMATAN	48	KALI	37.350.000
	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.6.01 .08.18.00 3	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH KOORDINASI DENGANTOKOH AGAMA DANMASYARAKAT	12	KALI	
16	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.6.01 .08.18.00 7	PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH	JUMLAH ANGGOTA LINMAS DALAM MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGS IDI DESA	85	ORANG	20.000.000
17	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PROSENTASE DESA YANG DI FASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.6.01 .08.19.00 2	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	120	ORANG	16.737.000
	KECAMATAN DRIYOREJO	6.01.6.01.08.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PROSENTASE DESA YANG DI FASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.6.01 .08.19.00 4	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	JUMLAH MONITORING DANEVALUASI DANA DESA	16	DESA	9.500.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
38	KECAMATAN WRINGINANOM											1.100.000.000,00
1	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.09.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12	BULAN	85.000.000,00
2	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	100	JENIS	25.000.000,00
3	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI	100	ORANG	109.200.000,00
4	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KETERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	100	DOS	42.000.000,00
5	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH RAPAR - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI YANG DI FASILITASI	100	KALI	80.000.000,00
6	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH FASILITASI JASA OPERASIONAL KANTOR (REKENING TELEPON DAN LISTRIK)	12	BULAN	35.000.000,00
7	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100	JENIS	70.000.000,00
8	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	100	UNIT	32.300.000,00
9	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	7	UNIT	35.000.000,00
10	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.001	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN/DINAS/GEDUN G/ KANTOR	JUMLAH BANGUNAN YANG DIREHAB	1	UNIT	25.000.000,00
11	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSESUNNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA	1	LAPORAN\	10.500.000,00
12	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA SKPD	50	EKS	18.000.000,00
13	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.004	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD	50	EKS	18.000.000,00
1	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.17.00 2	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH AN DESA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	100	ORANG	20.000.000,00
2	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN	100	%	6.01.6.01 .08.16.03 7	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI	3	DESA	20.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP								
3	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.04 1	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	100	ORANG	15.000.000,00
4	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.05 2	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI TTG PENGELOLAAN KEUANGAN	16	DESA	20.000.000
5	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.05 7	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI TTG ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	16	DESA	20.000.000
	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.62	OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
6	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DI FASILITASI 2. PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SUSAI SOP	100	%	6.01.6.01 .08.16.06 5	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI TTG UNDANG - UNDANG DESA	100	ORANG	30.000.000,00
7	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.	PROSENTASE KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.15.00 3	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH SDM KADER PKK DAN ORGANISASI WANITA LAINNYA YANG DIBINA	100	ORANG	240.000.000,00
8	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.15.07	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN				
9	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.15.09	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKATAN PEDESAAN				
10	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.15.04	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT				
11	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.15.19	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ KECAMATAN)				
12	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.15.24	PEMBINAAN KEAGAMAAN				
	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%						
13	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PROSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DI FASILITASI	100	%	6.01.6.01 .08.17.00 1.	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	16	DESA	15.000.000
	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.17.01	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA				
	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%	6.01.6.01 .08.17.29	PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA				

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	KECAMATAN WRINGINANOM				100	%		INDUSTRY KERAJINAN				
15	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.6.01 .08.18.00 3	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PELAKSANAAN KOORDINASI DI TINGKAT KECAMATAN	100	KALI	40.000.000
	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.6.01 .08.18.00 3	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH KOORDINASI DENGAN TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT	100	KALI	-
16	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.6.01 .08.18.00 7	PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH	JUMLAH ANGGOTA LINMAS DALAM MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI DI DESA YANG BINA	100	ORANG	30.000.000
17	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PROSENTASE DESA YANG DI FASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.6.01 .08.19.00 2	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	JUMALH PESERTA MUSRENBANG	100,00	ORANG	45.000.000
	KECAMATAN WRINGINANOM	6.01.6.01.08.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PROSENTASE DESA YANG DI FASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.6.01 .08.19.00 4	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	JUMLAH MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA	16	DESA	20.000.000
									JUMLAH PEGAWAI	12	BULAN	
39	KECAMATAN KEDAMEAN											1.100.000.000
1	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN	3	JENIS	12.000.000,00
	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG PENGGANDAAN	21500	LEMBAR	
2	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	2	JENIS	3.960.000,00
3	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/KEGIATAN	2800	PORSI	70.000.000,00
4	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100	%	90.000.000,00
5	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH FASILITASI PEMBAYARAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	12	BULAN	172.800.000,00
6	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH FASILITASI REKENING LISTRIK, AIR DAN TELEPON	12	BULAN	65.000.000,00
	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.10.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH DASILITASI PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12	BULAN	18.000.000,00
7	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.001	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEC. KEDAMEAN	100	%	145.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
8	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TEREDIA	100	%	77.240.000,00
9	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	PERSENTASE PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, RUMAH DINAS, PENDOPO, PANTI PKK DAN MUSHOLLAH KEC. KEDAMEAN	100	%	15.000.000,00
10	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PERSENTASE TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	100	%	50.000.000,00
11	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERAWATAN PERALATAN KERJA	100	%	10.000.000,00
	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG TERSEDIA	100	%	6.000.000,00
	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TERSEDIA	100	%	3.500.000,00
	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.10.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE ALAT TULIS KANTOR YANG TERSEDIA	100	%	20.000.000,00
12	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.10.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	30	BUKU	10.000.000,00
13	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.10.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	20	BUKU	8.000.000,00
14	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.10.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNNYA RENSTRA, RENJA DAN RKA SKPD	25	BUKU	22.000.000,00
15							6.01.10.0 6.008	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD				
16	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.10.1 5.010	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH ORGANISASI KARANG TARUNA YANG DIBINA	15	DESA	135.000.000,00
17	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.10.1 5.004	PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	15	DESA	
18	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.10.1 5.015	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV SANTUNAN KEMATIAN DAN RAKOR PELAPORAN SANTUNAN KEMATIAN	3	KALI	
19	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.10.1 5.023	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SENAM KESEGERAN JASMANI DI LINGKUNGAN KECAMATAN	38	KALI	
21	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.10.1 5.022	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	25	ORANG	
22	KECAMATAN	6.01.10.15	PROGRAM KOORDINASI	PERSENTASE JUMLAH	100	%	6.01.10.1	FASILITASI DAN	PERSENTASE TERFASILITASI	100	%	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	KEDAMEAN		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA			5.016	PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH	KEGIATAN UKS KECAMATAN			
23	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 6.029	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	30	ORANG	7.500.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	1							
24	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 6.037	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN PILKADES	4	DESA	5.000.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	1							
25	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES	2	KALI	10.000.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	1							
26	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	1		6.01.10.1 6.57	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	120	ORANG	10.000.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	1							
27	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 6.60	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA	JUMLAH RAPAT KOORDINASI RAKOR PELAPORAN KEUANGAN DESA	3	KALI	10.000.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	1							
28	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 7.029	PELATIHAN KETRAMPILOAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN	JUMLAH PESERTA KETRAMPILOAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN	60	ORANG	35.000.000,00
29	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN ADM KOPWAN	45	ORANG	
30	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.10.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN BUMDES	45	ORANG	
31	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.10.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN LINMAS DESA SE KEC.	12	KALI	44.000.000,00
32	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.10.1 8.001	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	JUMLAH PESERTA KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGUNAAN NARKOBA	60	ORANG	
33	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.10.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG	JUMLAH RAPAT KOORDINASI PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	3	KALI	7.500.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
34	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.10.1 9.002	LIAR PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	90	ORANG	20.000.000,00
35	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.10.1 9.003	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	JUMLAH BUKU PROFIL DESA DAN KECAMATAN	16	BUKU	7.500.000,00
36	KECAMATAN KEDAMEAN	6.01.10.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.10.1 9.004	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	JUMLAH RAKOR LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3	KALI	10.000.000,00
40	KECAMATAN MENGANTI											1.100.000.000,00
1	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.11.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	9	JENIS	10.000.000,00
2	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.11.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	720	EXEMPLAR	2.760.000,00
3	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.11.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH MAKAN DAN MINUMAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	2676	BENDA	40.000.000,00
4	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.11.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH PESERTA PELAKSANA KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH	144	ORANG	75.000.000,00
5	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	100	%	6.01.11.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH TENAGA JASA PENGELOLA SURAT MENYURAT	5	ORANG	135.600.000
6	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH REKENING TELP, AIR DAN LISTRIK	3	REKENING	82.240.000,00
7	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN KANTOR	2	ORANG	
8	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH GEDUNG/RUMAH DINAS YANG DIREHAB			
9	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	JUMLAH REHAB GEDUNG	100	%	6.01.11.0 2.001	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR	JUMLAH RUMAH GEDUNG KANTOR YANG DIREHAB	1	UNIT	95.000.000,00
10	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN ATK	36	JENIS	112.000.000,00
11	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	15	JENIS	
12	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR/RUMAH TANGGA	20	JENIS	
13	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARA AN RUMAH DINAS	1	UNIT	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
14	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1	UNIT	40.000.000,00
15	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH MOBIL PEJABAT YANG DIPELIHARA SECARA BERKALA	2	UNIT	52.500.000,00
16	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA DUA YANG DIPELIHARA SECARA BERKALA	5	UNIT	
17	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.11.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG DIPELIHARA	36	UNIT	17.400.000,00
18	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.11.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNNYA BUKU LAPORAN PENILAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN DI AKHIR TAHUN	15	BUKU	12.500.000,00
19	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.11.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH TERSUSUNNYA BUKU LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ SEMESTERAN	24	BUKU	12.500.000,00
20	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.11.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNNYA BUKU LAPORAN RENSTRA, REJA, DAN RKA	20	BUKU	12.500.000,00
21	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.11.1 5.003	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	95	ORANG	75.000.000,00
22	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.11.1 5.014	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PENINGKATAN KUALITAS SDM	95	ORANG	15.000.000,00
23	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.11.1 5.019	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH SISWA DARI LEMBAGA PENDIDIKAN UMUM/AGAMA (MADRASAH/ PONDOK PESANTREN UNTUK PEMBINAAN LPTQ	95	ORANG	25.000.000,00
25	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.11.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	95	ORANG	15.000.000,00
	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.11.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK	95	ORANG	
26	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH PESERTA HADIR MENGIKUTI EVALUASI APBDES DARI PERANGKAT DESA (SEKDES DAN SEI PROGRAM)	44	ORANG	15.000.000,00
27	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.11.1 6.057	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA HADIR DARI PERANGKAT DESA MENGIKUTI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMDES	95	ORANG	15.000.000
28	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.11.1 6.037	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH DESA SE KECAMATAN MENGANTI YANG MELAKSANAKAN PILKADES	3	DESA	15.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DAN PELAYANAN PUBLIK									
29	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.11.1 6.061	SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK			15.000.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
30	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.11.1 7.022	MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PESERTA DARI ANGGOTA PENGELOLA BUMDES SE KEC.MENGANTI	75	ORANG	15.000.000,00
31	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.11.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PEMBINAAN KOPWAN	75	ORANG	15.000.000,00
32	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.11.1 8.001	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	JUMLAH PESERTA DARI MASYARAKAT KALANGAN GENERASI MUDA MENGIKUTI PENCEGAHAN AKIBAT NARKOBA	75	ORANG	15.000.000,00
33	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.11.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA PENGENDALI KEAMANAN DESA SE KECAMATAN YANG DIBINA	44	ORANG	80.000.000,00
34		6.01.11.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE /JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN LINMAS	100	%	6.01.11.1 8.004	PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DESA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI BINTEK LINMAS	25	ORANG	20.000.000,00
35	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.11.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG HADIR DARI PERANGKAT DESA DAN TOKOH MASYARAKAT	95	ORANG	30.000.000,00
36	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.11.1 9.003	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	JUMLAH PROFIL DESA DAN KECAMATAN YANG DISUSUN	23	DATA	20.000.000
37	KECAMATAN MENGANTI	6.01.11.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	%	6.01.11.1 9.004	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH PELAKSANAANMONEV PENGUNAAN BANTUAN DANA DESA	22	DESA	15.000.000
41	KECAMATAN SIDAYU											1.100.000.000
1	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGAANDAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	2	JENIS	20.381.000,00
2	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	1	JENIS	1.800.000,00
3	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEGIATAN KANYOR YG DISEDIAKAN MAKAN DAN MINUM	31	KEGITAN	25.195.000,00
4	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100	%	39.062.000,00
5	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE JASA OPERASIONAL KANTOR, REK. TELP,LISTRIK DAN JUMLAH JASA KANTOR	12	BULAN	78.000.000,00
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE JASA OPERASIONAL KANTOR, REK. TELP,LISTRIK DAN	12	BULAN	40.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH					JUMLAH JASA KANTOR			
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE JASA OPERASIONAL KANTOR, REK. TELP,LISTRIK DAN JUMLAH JASA KANTOR	12	BULAN	18.960.000,00
6	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TEREDIA	100	%	119.643.000,00
7	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	3	UNIT	45.000.000,00
8	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PERSENTASE TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4	100	%	45.000.000,00
9	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERAWATAN PERALATAN KERJA	21	UNIT	15.000.000,00
10	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	6.01.12.0 5.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN	31	ORANG	7.369.000,00
11	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNYA LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	22	BUKU	13.550.000,00
12	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH BUKU RENCANA KERJA SKPD	23	BUKU	30.000.000,00
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.019	PEMBINAAN KARANG TARUNA	JUMLAH ORGANISASI KARANG TARUNA YANG DIBINA	21	DESA	187.600.000
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.019	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	21	DESA	
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.019	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMALH PELAKSANAAN MONE RASKIN DAN DANA KEMATIAN	12	LAPORAN	
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.019	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PEMBINAAN LPTQ	4	KALI	
19	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.030	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	84	ORANG	24.724.000,00
	KECAMATAN SIDAYU			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
20	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	TERLAKSANANYA SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP	100	%		SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	TERLAKSANANYA SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	63	ORANG	12.840.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SESUAI SOP								
21	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH MONEV ADD DAN DANA DESA	105	ORANG	13.495.000,00
	KECAMATAN SIDAYU			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
22	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH LAPORAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES	21	BUKU	21.008.000,00
	KECAMATAN SIDAYU			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
23	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.54	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOAAN KEUANGAN DESA	70	KALI	64.496.000,00
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.12.1 6.54	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH MONEV KEUANGAN DESA	122	KALI	
	KECAMATAN SIDAYU			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
25	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 7.009	PELATIHAN PEREMPUAN DIPERDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	21	DESA	96.501.000,00
26	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PEMBINAAN BUMDES DAN MONEV	3	KALI	
27	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PEMBINAAN KOPWAN	100	ORANG	
	KECAMATAN SIDAYU											
28	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.001	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PENYULUHAN NARKOBA	66	ORANG	98.360.000,00
29	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PEMBINAAN LINMAS DESA SE KEC.	12	LAPORAN	
30	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	JUMLAH LAPORAN MONEV WILAYAH DAN GALIAN C	12	LAPORAN	20.060.000,00
32	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.12.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	100	ORANG	30.000.000,00
	KECAMATAN SIDAYU	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.12.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH LAPORAN MONEV PEMBANGUNAN	60	LAPORAN	31.956.000
42	KECAMATAN UJUNGPAKKAH											1.100.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
1	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	65	ORANG	26.000.000,00
2	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	13	DESA	21.000.000,00
3	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.001	MONEV DAN EVALUASI DANA DESA (DD)	JUMLAH PELAPORAN MONEV	13	DESA	
4	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.011	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	JUMLAH LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT DESA YANG DIBINA	1	OK	35.000.000,00
5	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.028	MONEV, DAN PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV EVALUASI BUMDES	12	DESA	
6	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASI PEMANTAUAN HASIL PBB DI KECAMATAN	100		6.01.12.1 7.13	PENINGKATAN PENERIMAAN PBB DI DESA	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV EVALUASI PBB	35	ORANG	
7	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN KOPWAN	35	ORANG	
8	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100		6.01.12.1 8.001	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PENYULUHAN NARKOBA	65	ORANG	63.500.000,00
9	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100		6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PEMBINAAN KEMANAN/KENYAMANAN LINMAS DESA SE KECAMATAN	13	DESA	
10	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE /JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN LINMAS	100		6.01.12.1 8.007	PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DESA	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN LINMAS	26	ORANG	
11	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PEMANTAUAN GALIAN C DAN WARUNG LIAR	100		6.01.12.1 8.004	PEMANTAUAN GALIAN C, DAN WARUNG LIAR	JUMLAH PEMANTAUAN GALIAN C DAN WARUNG LIAR	12	LAPORAN	9.000.000,00
12	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.034	MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH LAPORAN PERATURAN DESA	13	DESA	10.500.000,00
13	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 7.009	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PELATIHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEDESAAN	60	OK	10.000.000,00
14	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	62	OK	
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
15	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	62	ORANG	
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP								

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				KECAMATAN SESUAI SOP								
16	KECAMATAN UJUNGPAKKAH		PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.042	MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH LAPORAN PERATURAN DESA	13	DESA	
17	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.54	VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES	JUMLAH PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES	13	DESA	14.500.000,00
18	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH MONEV ALOKASI DANA DESA (ADD)	13	DESA	28.500.000,00
19	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.54	PEMBINAAN/PENDAMPIN GAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN DAN MONEV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	26	ORANG	
20	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.12.1 6.037	PEMANTAUAN PELAKSANAAN PILKADES	JUMLAH DESA YANG DI PANTAU DALAM PELAKSANAAN PILKADES	1	DESA	3.000.000,00
21	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.012	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA /PKK	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	13	DESA	117.000.000,00
22	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.006.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI KEGIATAN GENDER	52	ORANG	
23	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.007	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH PESERTA PEMUDA YANG DIBINA	13	DESA	
24	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.015	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN/ BPNT	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV RASKIN DAN DANA KEMATIAN/BPNT	13	DESA	
25	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100		6.01.12.1 5.019	FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN KAFILAH MTQ TINGKAT KECAMATAN	45	ORANG	
26	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE PESERTA YANG MENGIKUTI SKJ	100		6.01.12.1 5.023	SENAM KESEGERAN JASMANI / SKJ	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SKJ	100	ORANG	
27	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.12.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD	20	BUKU	11.000.000,00
28	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.12.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1	KEGIATAN	10.500.000,00
29	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100		6.01.12.0 6.008	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	10	BUKU	8.500.000,00
30	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.10.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	PROSENTASE TERSEDIAANYA TENAGA KEBERSIHAN KANTOR			18.000.000,00
31	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100		6.01.10.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	PROSENTASE KECUKUPAN TENAGA ADMINISTRASI KANTOR			144.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH								
32	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3	JENIS	11.000.000,00
33	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	TERPENUHINYA BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	2	JENIS	28.000.000,00
34	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERSENTASE FASILITASI BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1	JENIS	3.000.000,00
35	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KEGIATAN MAKAN DAN MINUMAN DI KANTOR KECAMATAN	31	KEGIATAN	32.000.000,00
36	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	TERLAKSANANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1	KEGIATAN	85.500.000,00
37	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100		6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	TERCUKUPINYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	12	BULAN	54.000.000,00
38	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERLAKSANANYA PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	12	KEGIATAN	159.000.000,00
39	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1	KEGIATAN	97.500.000,00
40	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3	KEGIATAN	75.000.000,00
41	KECAMATAN UJUNGPAKHAH	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100		6.01.12.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1	KEGIATAN	25.000.000,00
43	KECAMATAN PANCENG											1.100.000.000
1	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.14.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGKANDAAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGKANDAAAN	2	JENIS	13.707.000
2	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.14.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH KETERSEDIAAN SURAT KABAR	2	JENIS	6.000.000
3	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.14.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KETERSEDIAAN MAKANANDAN MINUMAN	3	JENIS	51.200.000
4	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.14.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	JUMLAH RAPAT - RAPAT DAN KONSULTASI YANG DI FASILITASI	12	BULAN	65.420.000
5	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT	100	%	6.01.14.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA OPERASIONAL	12	BULAN	54.788.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
				DAERAH								
	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.14.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH JASA OPERASIONAL SURAT MENYURAT	12	BULAN	208.800.000,00
6	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.14.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PRESENTASE PERALATANGEDUNG KANTOR YANG TERSEDIA	100	%	116.410.000
7	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.14.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN RUMAHDINAS	1	UNIT	13.000.000
7	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.14.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG/KANTOR	1	UNIT	13.000.000
8	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.14.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/ DINAS / OPERASIONAL	JUMLAH FASILITASIPEMELIHARAAN KENDARAANDINAS	7	UNIT	48.570.000
9	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.14.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA	JUMLAH FASILITASIPEMELIHARAANRUFUTIN G/BERKALAPERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR	33	UNIT	25.000.000
10	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100	%	6.01.14.0 5.001	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	JUMLAH PESERTA YANGMENGIKUTI PEMBINAAN SDM	60	ORANG	24.992.000
11	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.14.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KIENRJA SKPD	JENIS DOKUMEN LAPORANKINERJA	3	JENIS	11.000.000
12	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.14.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH TERSUSUNYA DOKUMEN KEUANGAN	3	JENIS	11.350.000
13	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.14.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN RENJA	5	JENIS	11.000.000
14	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.14.0 6.004	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA	2	JENIS	11.000.000
	KECAMATAN PANCENG	JUMLAH										
15	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.06	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.14.1 5.003	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH ANGGOTA PKK DAN ORGANISASI WANITA AKTIF YANG DIBINA	14	DESA	50.000.000
16	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.14.1 5.007	PEMBINAAN ORAGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG DIBINA	14	DESA	10.000.000
17	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.14.1 5.015	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV RASKIN DAN DANA KEMATIAN DESA YANG FASILITASI	14	DESA	10.000.000
18	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.14.1 5.022	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PEMBINAAN MTQ	4	KALI	28.000.000
19	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI	100	%	6.01.14.1 5.023	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH KEGIATAN SENAM KESEGERAN JASMANI YANG DIFASILITASI	44	KALI	39.445.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KEMASYARAKATAN DESA	TINGKAT KEC. YANG DIBINA								
20	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.14.1 5.024	PEMBINAAN KEAGAMAAN	JUMLAH PESETA PEMBINAAN KEAGAMAAN	150	PESERTA	15.000.000
21	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.14.1 5.027	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN UKS	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN KEGIATAN UKS	14	DESA	10.000.000
	KECAMATAN PANCENG	JUMLAH										
22	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	14	DESA	9.695.000
22	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 6.041	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA YANGMENGIKUTI SOSIALISASI PUBLIK	56	ORANG	
23	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH DESA YANG DI MONEVDANA ADD	14	DESA	13.430.000
	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
24	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH LAPORAN PERATURANDESA TENTANG APBDES	14	DESA	12.435.000
	KECAMATAN PANCENG			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
25	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 6.048	SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA	JUMLAH PESERTA BIMTEK ADD	56	ORANG	10.285.000
	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.17	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.14.1 6.049	SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA	JUMLAH PESERTA BIMTEK ADD	57	ORANG	
26	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 6.061	SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SOSIALISASI	56	ORANG	8.230.000
	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.17	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.14.1 6.062	SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI SOSIALISASI	57	ORANG	
	Seksi Ekonomi	JUMLAH										
27	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.11	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH FASILITASI PEMBINAAN UPKU/BUMDES	2	KALI	29630000
28	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 7.017	SOSIALISASI PRINSIP- PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN	JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA	21	KOPERASI	11063000
29	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.35	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.14.1 7.035	PELATIHAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	FASILITASI PELATIHAN PENINGKATAN EKONOMI	2	KALI	11390000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
30	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH DESA YANG DI MONEV(KEGIATAN OPERASI SAYANGSISWA)	14	DESA	55.290.000
	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH DESA YANGMELAKSANAKAN KEGIATANMASYARAKAT	14	DESA	
	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAANLINMAS DESA	360	ORANG	
31	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	JUMLAH USAHA YANG DIMONITOR & MONEV GALIAN C	80	USAHA	16.670.000
32	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.013	PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT	JUMLAH KEGIATAN MASYARAKT	14	DESA	11.000.000
33	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.017	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN JAM BELAJAR SISWA (OPERASI SAYANG SISWA)	JUMLAH MONEV DAN PELAPORAN	14	DESA	11.000.000
34	KECAMATAN PANCENG	6.01.14.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.14.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUAN DESA	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	14	DESA	18.000.000
35	KECAMATAN PANCENG	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.14.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH FASILITASIMUSRENBANG KECAMATAN	3	JENIS	24.200.000
36	KECAMATAN PANCENG	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.14.1 9.003	PENYUSUNAN PROFIL DESA (PRODES/KEL) DAN KECAMATAN	JUMLAH PROFIL DESA	14	DESA	10.000.000
44	KECAMATAN BUNGAH											1.100.000.000
1	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.15.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JASA PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN KANTOR	3	JENIS	6.500.000,00
2	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.15.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGGANDAAN	PERSENTASE BARANG YG DICETAK DAN DIGANDAKAN	100	PERSEN	10.000.000,00
3	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.15.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH SURAT KABAR	2	JENIS	3.120.000,00
4	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.15.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100	PERSEN	22.510.000,00
5	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.15.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PERSENTASE PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100	PERSEN	130.000.000,00
	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.15.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE KECUKUPAN REK. TELP DAN LISTRIK	100	PERSEN	55.200.000,00
6	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN	100	%	6.01.15.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PERSENTASE KECUKUPAN TENAGA ADMINITRASI KANTOR	100	PERSEN	189.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH								
7	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.15.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG TEREDIA	100	PERSEN	100.000.000,00
8	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.15.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	PERSENTASE PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	100	PERSEN	80.650.000,00
9	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.15.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PERSENTASE KENDARAAN OPERASIONAL YANG TERPEIHARA	100	PERSEN	50.000.000,00
10	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.15.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PERSENTASE PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR YANG TERPELIHARA	100	PERSEN	15.000.000,00
11	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.15.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH TERSUSUNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA	15	BUKU	10.000.000,00
12	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.15.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH RENJA DAN RENSTRA YANG TERSUSUN	30	BUKU	20.000.000,00
13	KECAMATAN BUNGAH											
14	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.15.1 5.003	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH ORGANISASI WANITA YANG DIBINA	22	LEMBAGA	70.000.000,00
15	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.15.1 5.015	MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV DISTRIBUSI SEMBAKO DAN SANTUNAN KEMATIAN	12	LAPORAN	15.000.000,00
16	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.022	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN LPTQ	1	KALI	25.000.000,00
17	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 5.023	PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SENAM BAGI PNS, PERANGKAT DESA DAN IBU-IBU PKK DESA	42	KALI	73.500.000,00
	KECAMATAN BUNGAH											
18	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.15.1 6.063	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES	JUMLAH APBDES YANG DIVERIFIKASI DAN DIEVALUASI	22	DESA	15.000.000,00
	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.15.1 6.063	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES	JUMLAH APBDES YANG DIVERIFIKASI DAN DIEVALUASI	22	DESA	
19	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.15.1 6.053	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGADMINISTRASIAN DATA KEPENDUDUKAN	66	ORANG	15.000.000,00
	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%	6.01.15.1 6.053	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PENGADMINISTRASIAN DATA KEPENDUDUKAN	66	ORANG	
20	KECAMATAN	6.01.15.16	PROGRAM KOORDINASI	PERSENTASE KEGIATAN	100	%	6.01.15.1	MONITORING ,EVALUASI	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV	4	KALI	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	BUNGAH		PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa yang difasilitasi			6.051	DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ADD	ADD			15.000.000,00
	KECAMATAN BUNGAH	6.01.15.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik di lingkup Kecamatan sesuai SOP	100	%	6.01.15.1 6.051	MONITORING ,EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ADD	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV ADD	4	KALI	
21	KECAMATAN BUNGAH											
	KECAMATAN BUNGAH											
22	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Kegiatan Perekonoian Desa yang difasilitasi	100	%	6.01.12.1 7.009	PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA	66	ORANG	19.000.000,00
23	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Kegiatan Perekonoian Desa yang difasilitasi	100	%	6.01.12.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN BUMDES	4	KALI	20.000.000,00
24	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase Kegiatan Perekonoian Desa yang difasilitasi	100	%	6.01.12.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PESERTA YG MENGIKUTI PEMBINAAN ADMINISTRASI KOPWAN	66	ORANG	20.000.000,00
	KECAMATAN BUNGAH											
25	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	100	%	6.01.12.1 8.001	PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PEMBINAAN LINMAS	66	ORANG	15.000.000,00
26	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	100	%	6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PEMBINAAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	12	KALI	30.500.000,00
27	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	100	%	6.01.12.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	JUMLAH LAPORAN MONEV WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	12	KALI	14.000.000,00
28	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	100	%	6.01.12.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV BANTUAN PEMBANGUNAN DESA	3	KALI	38.420.000,00
	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	100	%	6.01.12.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN MONEV DANA DESA	44	KALI	-
29	KECAMATAN BUNGAH	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Desa yang difasilitasi dalam perencanaan Pembangunan	100	%	6.01.12.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI MUSRENBANG	150	ORANG	22.600.000,00
45	KECAMATAN DUKUN											1.100.000.000
1	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Fasilitas terhadap pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah	100	%	6.01.16.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5	JENIS	23.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Fasilitas terhadap pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah	100	%	6.01.16.0 1.003	PENYEDIAAN BARANG BACAAN DAN PERATURSRAN PERUNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	52	EKSEMPLAR	6.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Fasilitas terhadap pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah	100	%	6.01.16.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12	BULAN	65.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase Fasilitas terhadap pelaksanaan	100	%	6.01.16.0 1.006	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN	JUMLAH FASILITASI RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN	12	BULAN	60.000.000

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PERKANTORAN	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH				KONSULTASI	KONSULTASI			
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.16.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH FASILITASI PEMBAYARAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	12	BULAN	135.600.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.16.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH FASILITASI PEMBAYARAN REKENING LISTRIK, TELEPON DAN AIR	12	BULAN	36.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.16.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	JUMLAH FASILITASI PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12	BULAN	18.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.16.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100	%	116.400.000
2	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.16.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR			-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.16.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	100	%	70.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.16.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12	BULAN	70.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.16.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH FASILITASI PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	12	BULAN	20.000.000
3	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.16.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA	JUMLAH LAPORAN SAKIP	1	DOKUMEN	8.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.16.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	1	DOKUMEN	7.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.16.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENJA	1	DOKUMEN	15.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.16.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	JUMLAH DOKUMEN RENSTRA	1	DOKUMEN	
4	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.004	PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA	JUMLAH PESERTA PELATIHAN PEREMPUAN	35	ORANG	45.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.007	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN BUMDES	60	ORANG	-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI	100	%	6.01.16.1 5.015	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV BPNT DAN SANTUNAN KEMATIAN			-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			KEMASYARAKATAN DESA	TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA				KEMATIAN				
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.016	FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH	JUMLAH KONSOLIDASI UKS			-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.022	PEMBINAAN LPTQ	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN KOPWAN DAN KSPPS	95	ORANG	-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.023	PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SKJ			-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.024	PEMBINAAN KEAGAMAAN	JUMLAH PESERTA PELATIHAN	35	ORANG	-
5	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.029	PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	JUMLAH FASILITASI PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	12	BULAN	15.000.000
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.037	PEMANTAUAN PILKADES	JUMLAH PELAKSANAAN PILKADES	3	DESA	10.000.000
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV ADD	12	BULAN	30.000.000
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.054	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN MONEV KEUANGAN DESA	12	BULAN	
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES	JUMLAH APBDES YANG DIFASILITASI	26	DOKUMEN	10.000.000
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.057	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	182	ORANG	15.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.057	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN			-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			DAN PELAYANAN PUBLIK									
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.16	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 6.057	PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN BPD	26	ORANG	8.000.000
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP								
6	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.17	KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 7.011	PEMBINAAN UPKU/BUMDES	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN			-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.17	KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN DAN KSPPS	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN			-
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.17	KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.16.1 7.009	PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN			-
7	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.18	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.16.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	JUMLAH PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	12	BULAN	45.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.18	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.16.1 8.004	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR	12	BULAN	10.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.18	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.16.1 8.015	PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA	JUMLAH PESERTA PENYULUHAN NARKOBA	100	ORANG	10.000.000
8	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.16.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	JUMLAH PESERTA MUSRENBANG	200	ORANG	25.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.16.1 9.003	PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN	JUMLAH PROFIL YANG DISUSUN	26	DESA	10.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.016	FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH	JUMLAH KONSOLIDASI UKS	4	KALI	192.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.015	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV BPNT DAN SANTUNAN KEMATIAN	12	BULAN	
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.019	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA	JUMLAH PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI WANITA	12	BULAN	
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.023	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SKJ	40	KALI	
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.024	PEMBINAAN KEAGAMAAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN KEAGAMAAN	100	ORANG	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.007	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN KEPEMUDAAN	72	ORANG	
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.1 6.019	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PESERTA PEMBINAAN LPTQ	50	ORANG	
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.16.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPDESA	3	BULAN	10.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.16.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV PEMBANGUNAN	12	BULAN	15.000.000
	Kecamatan Dukun	6.01.6.01.16.19	KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	6.01.16.1 9.004	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV			-
46	KECAMATAN SANGKAPURA											1.200.000.000
1	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	25.000.000,00
2	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGGANDAAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	26.000.000,00
3	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	2.280.000,00
4	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	63.945.000,00
5	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	152.090.000,00
6	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	60.156.000,00
7	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.007	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	218.000.000,00
8	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN ADMINISTRASI KANTOR	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	44.000.000,00
		6.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.12.0 1.008	PENYEDIAAN ADMINISTRASI KANTOR	PERSENTASE JASA ADMINISTRASI KANTOR			-
9	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	60.120.000,00
10	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA	100	%	6.01.12.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN	100	%	35.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			APARATUR	PRASARANA APARATUR				KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH			
11	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.02.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	39.500.000,00
12	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.12.02.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	30.000.000,00
13	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.06.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	15.000.000,00
14	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.06.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	PRESENTASE FASILITAS TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	30.000.000,00
		6.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.12.06.008	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	JUMLAH BUKU RENSTRA SKPD			
15	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.15.008	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	162.929.000,00
		6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.15.015		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH PELAKSANAAN MONEV RASKIN DAN DANA KEMATIAN	17 DESA	
		6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.12.15.019		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH PEMBINAN MTQ	4 KALI	
		6.01.12.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									
16	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.16.030	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	23.080.000,00
17	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.16.031	PEMANTAUN PELAKSANAAN PILKADES	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	23.080.000,00
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.16.041	SOSIALISASI KEBYAKAN KEPENDUDUKAN	TERLAKSANANYA SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			-
	KECAMATAN SANGKAPURA			PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100	%						
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.16.057	PEMBINAAN ADMINISTRAI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PESERTA YANG DIBINA			-

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
18	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	30.000.000,00
				PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP KECAMATAN SESUAI SOP	100							
19	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.054.	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	30.244.000,00
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.16	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	JUMLAH MONEV ADD DAN DANA DESA			-
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 7.011	MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	JUMLAH PEMBINAAN BUMDES			-
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	6.01.12.1 7.027	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	JUMLAH PEMBINAAN KOPWAN			-
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%						
20	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	85.000.000,00
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR				-
	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100	%	6.01.12.1 8.004	PENYULUHAN PENCEGAHAN /PENGUNGUAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA				-
21	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	25.000.000,00
22	KECAMATAN SANGKAPURA	6.01.12.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.12.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	19.576.000,00
47	KECAMATAN TAMBAK											1.200.000.000
1	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.18.0 1.001	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	10.000.000,00
2	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.18.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CATAKAN DAN PENGKANDAAAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.000.000,00
3	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT	100	%	6.01.18.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	3.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
4	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	DAERAH PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.18.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	60.000.000,00
5	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.18.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	170.000.000,00
6	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	6.01.18.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	138.000.000,00
7	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	54.000.000,00
8	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 1.008	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	44.000.000,00
9	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	45.000.000,00
10	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	12.000.000,00
11	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	118.000.000,00
12	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	25.000.000,00
13	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	45.000.000,00
14	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	%	36.000.000,00
		6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	%	6.01.18.0 2.005	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMA H TANGGA	PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG KANTOR			-
15	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.18.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	15.000.000,00
16	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.18.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	7.000.000,00
17	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	6.01.18.0 6.002	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	PRESENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	%	5.000.000,00
18	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA	100	%	6.01.18.1 5.003	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN	PRESENTASE KEGIATAN PEREKONOMIAN DESA YABG	100	%	41.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA				KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	DIFASILITASI			
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.18.1 5.019	PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	JUMLAH PEMBINA MTQ			-
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	6.01.16.1 5.023	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI	JUMLAH PELAKSANAAN SKJ			-
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.18.1 5.024	KEGIATAN KEAGAMAAN	JUMLAH KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DILAKSANAKAN			-
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%						
19	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.18.1 5.009	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	PRESENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN YANG DI FASILITASI	100	%	15.000.000,00
20	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.15	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KEC. YANG DIBINA	100	%	6.01.18.1 5.009	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	PRESENTASE JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI TINGKAT KECAMATAN YANG DIBINA	100	%	140.000.000,00
21	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.18.1 6.030	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	80.000.000,00
22	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.18.1 6.044	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA	PRESENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100	%	10.000.000,00
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.16	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.18.1 6.047	VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	JUMLAH LAPORAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES			-
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.18.1 7.009	PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF	JUMLAH PESERTA PELATIHAN			-
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.18.1 7.011	PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU)/BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	*-			-
	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.17	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	PERSENTASE KEGIATAN PEREKONOMOIAN DESA YANG DIFASILITASI	100		6.01.18.1 7.021	SOSIALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	SOSIALISASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA			-
	KECAMATAN TAMBAK											
23	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100		6.01.18.1 8.003	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	PRESENTASE PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100	%	80.000.000,00
24	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELESAIAN KONFLIK DI WILAYAH KECAMATAN	100		6.01.18.1 8.004	MONEV DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG	PRESENTASE PENYELESAIAN KONFLIK DIWILAYAH KECAMATAN	100	%	10.000.000,00

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
								LIAR				
25	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.18.1 9.001	MONEV DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA	PRESENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	9.000.000,00
26	KECAMATAN TAMBAK	6.01.18.19	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100		6.01.18.1 9.002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	PRESENTASE DESA YANG DIFASILITASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100	%	22.000.000,00
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											4.117.930.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSESNTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	7.01.01.0 1.002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH KETERSEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12	JENIS	25.900.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSESNTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	7.01.01.0 1.003	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH KETERSEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3	JENIS	3.600.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSESNTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	7.01.01.0 1.005	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH KETERSEDIAAN KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN	1	TAHUN	45.700.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSESNTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	100	PERSEN	7.01.01.0 1.006	RAPAT-RAPAT KOORDIANASI DAN KONSULTASI	JUMLAH FASILITASI KOORDINASI DAN KONSULTASI	1	TAHUN	212.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUR	100	PERSEN	7.01.01.0 2.003	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH KETERSEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	44	JENIS	162.552.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUT	100	PERSEN	7.01.01.0 2.006	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERAS IONAL	JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG TERPELIHARA	3	UNIT	89.400.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUT	100	PERSEN	7.01.01.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERLENGKAPAN KANTOR YANG TERPELIHARA	2	BUAH	23.048.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUT	100	PERSEN	7.01.01.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN RUMAH TANGGA/KANTOR YANG TERPELIHARA	15	BUAH	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUT	100	PERSEN	7.01.01.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR/RUMAH TANGGA YANG TERPELIHARA	5	BUAH	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP SARANA PRASARANA APARATUT	100	PERSEN	7.01.01.0 2.007	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKA PAN KANTOR/RUMAH TANGGA	JUMLAH PERALATAN KANTOR/RUMAH TANGGA YANG TERPELIHARA	15	BUAH	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN FUNGSIONAL YANG DISUSUN	24	BUKU	24.224.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	JUMLAH LAPORAN KINERJA YANG DISUSUN	24	BUKU	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	KINERJA DAN KEUANGAN				IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD				
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN MONEV RENJA YANG DISUSUN	24	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN PROGNOSIS YANG TERSUSUN	2	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.001	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN LRA YANG TERSUSUN	24	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DPA YANG DISUSUN	7	BUKU	25.776.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH DPA YANG DI SUSUN	7	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH PRA RKA YANG DISUSUN	7	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH RENJA YANG DISUSUN	7	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH RKA YANG DISUSUN	7	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100	PERSEN	7.01.01.0 6.003	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	JUMLAH RKAP YANG DI SUSUN	7	BUKU	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 8.001	PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA	JUMLAH PESERTA SEMILOKA PEMANTAPAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH	500	ORANG	344.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 8.001	PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA	JUMLAH PESERTA SEMILOKA PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA	500	ORANG	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.002	PERINGATAN HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR	JUMLAH PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR	1	KALI	50.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.003	UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL	JUMLAH PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI BESAR	15	KALI	1.330.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.003	UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL	JUMLAH AGEN PERUBAHAN	275	ORANG	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.003	UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL	JUMLAH DOKUMEN RENCANA AKSI	1	DOKUMEN	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.003	UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL	JUMLAH LAPORAN PROGRAM	3	DOKUMEN	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.003	UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL	JUMLAH MONEV PROGRAM	3	DOKUMEN	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS,	100	PERSEN	7.01.01.1 9.003	UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL	JUMLAH PELAKSANAAN RENCANA AKSI	3	KALI	

No	DINAS/ BIDANG	PROGRAM					KEGIATAN					Estimasi Anggaran Eksisting (Rp)
		KODE REK.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	KODE REK.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
			WAWASAN KEBANGSAAN	ORSOSPOL & TOGA								
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMANFAATAN HAK PILIH	100	PERSEN	7.01.01.1 9.005	VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARPOL	JUMLAH DOKUMEN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARPOL YANG DI BINA	15	DOKUMEN	180.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.004.	RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)	JUMLAH RAPAT KOORDINASI RANHAM	50	DOKUMEN	80.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN LSM, OKP, TOMAS, ORSOSPOL & TOGA	100	PERSEN	7.01.01.1 9.016	VERIFIKASI DAN PEMBINAAN LSM DAN ORMAS	JUMLAH DOKUMEN VERIFIKASI DAN LSM DAN ORMAS YANG DI BINA	50	DOKUMEN	180.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE KONFLIK YANG DAPAT DISELESAIKAN	100	PERSEN	7.01.01.1 9.018	FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	JUMLAH RAPAT KOORDINASI TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)	11	KALI	172.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE KONFLIK YANG DAPAT DISELESAIKAN	100	PERSEN	7.01.01.1 9.008	PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA (FKUB)	JUMLAH RAPAT KOORDINASI FORUM KERUKUNAN ANTARA UMAT BERAGAMA	11	KALI	316.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN FKDM	100	PERSEN	7.01.01.1 9.001	PENGAMANAN HARI-HARI BESAR, UNJUK RASA DAN PEJABAT NEGARA	JUMLAH PEMANTAUAN PENGAMANAN HARI-HARI BESAR	3	KALI	232.930.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN FKDM	100	PERSEN	7.01.01.1 9.001	PENGAMANAN HARI-HARI BESAR, UNJUK RASA DAN PEJABAT NEGARA	JUMLAH PEMANTAUAN PENGAMANAN UNJUK RASA	12	KALI	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE PEMBINAAN FKDM	100	PERSEN	7.01.01.1 9.001	PENGAMANAN HARI-HARI BESAR, UNJUK RASA DAN PEJABAT NEGARA	JUMLAH PEMANTAUAN PENGAMANAN PEJABAT	12	KALI	
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE KONFLIK YANG DAPAT DISELESAIKAN	100	PERSEN	7.01.01.1 9.012	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN	JUMLAH RAPAT KOORDINASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	11	KALI	490.000.000
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.19	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	PERSENTASE KONFLIK YANG DAPAT DISELESAIKAN	100	PERSEN	7.01.01.1 9.012	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN	JUMLAH RAPAT KOORDINASI TIM FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	11	KALI	
												-
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMISTRASI PERKANTORAN.	PERSENTASE FASILITASI TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH.	100	PERSEN	7.01.01.0 1.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	JUMLAH KETERSEDIANNYA GAJI PELAKSANAAN TUGAS ASN.	5	ORANG	130.800.000

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai perencanaan tahunan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun kelima atas pencapaian RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.

Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. ***Lagging indicators*** adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun ***leading indicators*** adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2016-2021 ditetapkan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Indikator Kinerja Kunci sebagaimana berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	Target 2021
1	Nilai Peduli HAM	>75	>75	>75
2	Indeks Reformasi Birokrasi	76,59	>80-85 A	>80-90 A
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,97	>6.2-6.55	>6.3-6.65
4	Laju Inflasi	2,21 %	3-4%	3-4%
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,99%	68.5-72.6	70.5-74.8
6	Tingkat Kemiskinan	11,35%	11.75 - 10.75%	11.25 - 9.75%
7	Indeks Pembangunan Manusia	76,10	79-80	80-81
8	Indeks Pembangunan Gender	89,72%	90.5-91.1	90.5-91.1

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	Target Tahun 2021
1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	17%	10-20%	10-20%
2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%
3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	96,37	98%	100%
4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100% (5 cagarbudaya)	100%	100%
5	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,93	84-88	86-90
6	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Government	3,15	3.05-3.15	3.10-3.20

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	Target Tahun 2021
7	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	A	A	A
8	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
9	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	A	A	AA
10	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	66%	81	82
11	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Rp. 52,93T	85,29% (Rp.43,45 T)	104,69% (Rp.48 T)
12	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	29,39%	7,0-8,0%	7,5-8,5%
13	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	125,84	112,50	112,75
14	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	67,22%	61%	62%
15	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	72,41%	86,11% Jalan	87,21% Jalan
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	58,36%	100%	100%
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	Target Tahun 2021
		RTRW			
16	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,12%	0,11%	0,10%
17	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	63,33	64.3-68	68-72.5
		Indeks Kualitas Udara	86,16	87,5-90	90-93.5
		Indeks Tutupan Lahan	18,19%	18,19%	18,19%
18	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.54%	5.05-4.75%	4.90-4.60%
19	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Usaha Mikro	0.15% (250 usahamikro)	0.16 (270 usahamikro)	0.17 (290 usahamikro)
		Pertumbuhan Koperasi Sehat	8.82% (415)	8.55% (330)	10.20% (335)
20	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	24,74% (1.643.903.)	40.96% (1.857.610,40)	53.41% (2.021.750,4)
		Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	0.94% (7.275)	0.95% (7336)	1.01% (7411)
21	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	7,41%	5,1-5,6%	5,3-5,8%
22	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	63% (30 ha)	41% (40 ha)	19% (40 ha)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	Target Tahun 2021
	kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Persentase Rumah Layak Huni	90,55%	86,08%	86,19%
23	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7072	0,700	0,725
24	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	187.55 kg/kpt/tn	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn
		Nilai Tukar Petani	108,53	109,42	109,62
25	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	95.04%	99.15%	99.20%
		APM SMP sederajat;	72.10%	87.10%	87.23%
		Angka Harapan lama sekolah	9.29	9,6	9,7
26	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72,46	72,8	73
27	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	1.4%	0.6-1.4	0.6-1.4
28	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,33	63.50-64.00	63.75-64..25
29	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	100%	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	828	850-925	925-1000

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 mempunyai kedudukan strategis yang dapat mejembatani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang telah selaras terhadap tema nasional maupun Jawa Timur yaitu **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial menuju Gresik Kota Inklusif, Tangguh dan Berkelanjutan**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021 meliputi:

1. Pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi hub Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah dan ekologi berkelanjutan;
2. Pelayanan publik berlandaskan human centered design yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi;
3. Pembangunan keluhuran budaya berlandaskan pengarustamaan Gresik yang agamis;

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 melalui berbagai tahapan antara lain forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah hingga Musrenbang Kabupaten dengan pendekatan inovatif Pembangunan Semesta Inklusif dan Terencana (Pestainca).

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kabupaten, pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran di tingkat desa. Adapun Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menjadi landasan bagi masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2021 menjadi Rencana Kerja OPD Tahun 2021.
2. Dalam rangka konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, maka RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 menjadi landasan bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun atau review RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2021.
4. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dengan sumber pendanaan meliputi APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten, partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 memiliki akses secara terbuka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021, Pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 dan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si.